



LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

LKJ



PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN
SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
MARET 2022

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2021 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Materi LKj mengandung analisis pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun yang bersangkutan.



Laporan Kinerja (LKj) juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Papua pada masa mendatang.

Capaian Sasaran Pemerintah Provinsi Papua yang diukur melalui indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 adalah predikat “Sangat Berhasil”. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jayapura, 20 Maret 2022



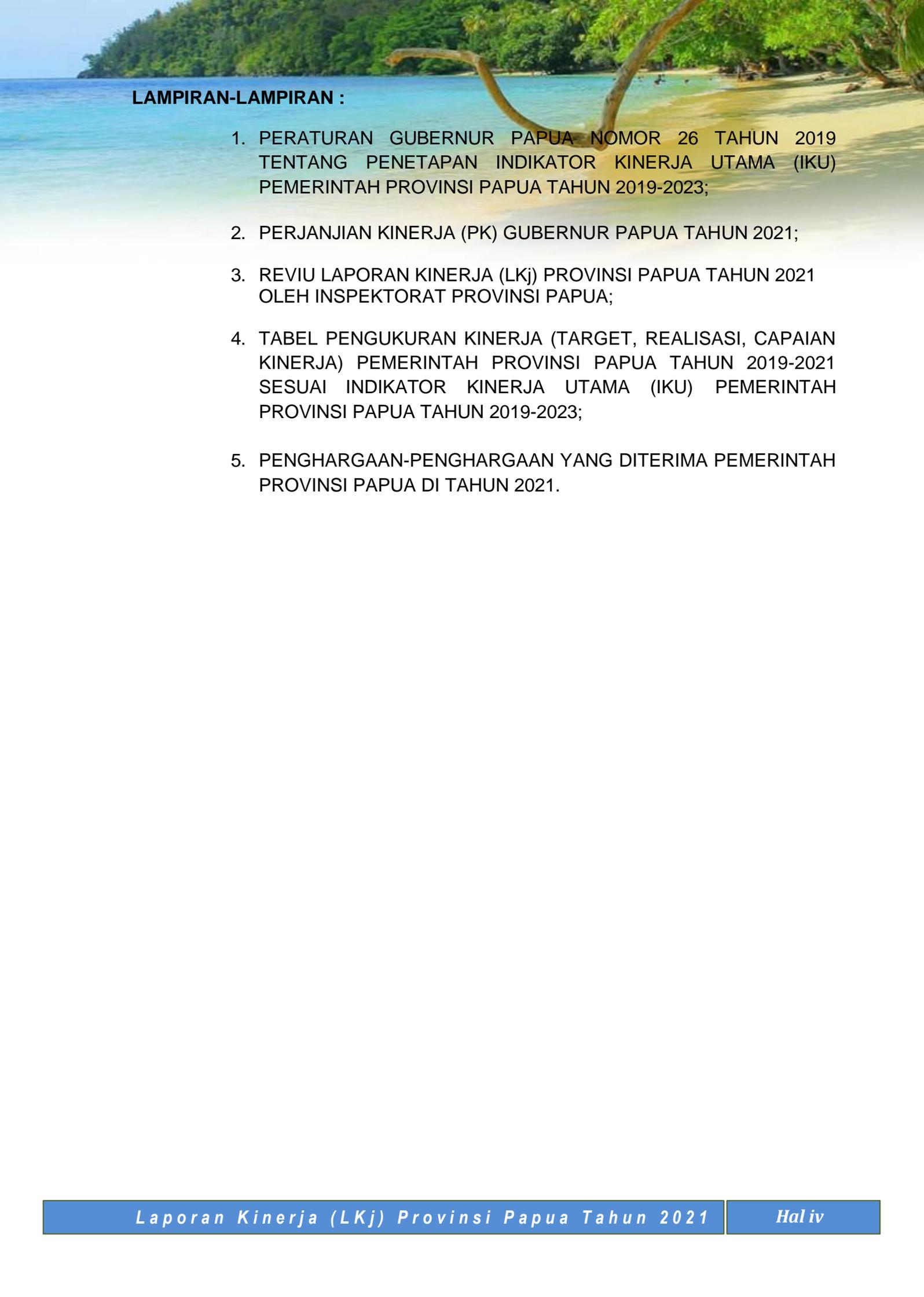


DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA.....	1
1.1.1. Kondisi Geografis	1
1.1.2. Kondisi Demografis.....	2
1.1.3. Kondisi Pemerintahan.....	5
1.1.4. Kondisi Perekonomian	7
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	10
BAB II	
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi	13
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	23
2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah.....	26
2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021.....	30
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	34
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	44
3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA	47
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	220
BAB IV	
PENUTUP	229
A. SIMPULAN	229
B. UPAYA PERBAIKAN	233



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023;
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) GUBERNUR PAPUA TAHUN 2021;
3. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 OLEH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA;
4. TABEL PENGUKURAN KINERJA (TARGET, REALISASI, CAPAIAN KINERJA) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2021 SESUAI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023;
5. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DI TAHUN 2021.

RINGKASAN EKSEKUTIF

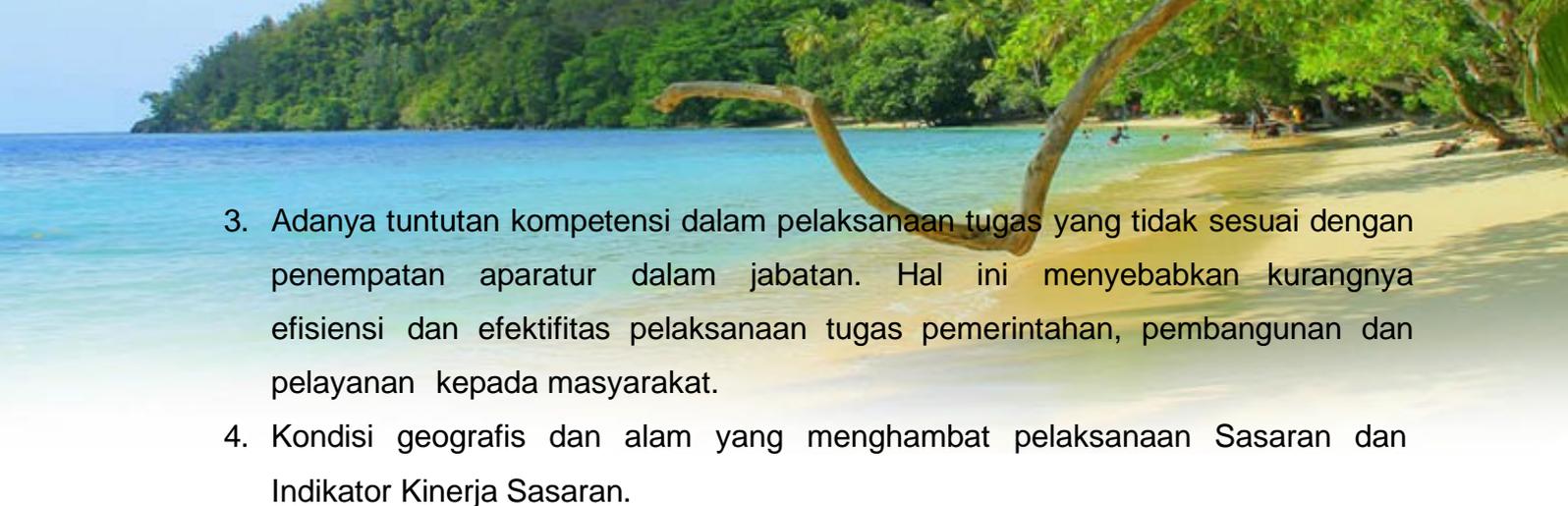
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2020. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dari Target Indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023.

Dari hasil pengukuran kinerja pada 26 (Dua Puluh Enam) Sasaran, dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua "**Sangat Berhasil**", hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja pelaksanaan masing-masing Sasaran sebagai berikut :

- ❖ 17 Sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- ❖ 2 Sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- ❖ 0 Sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- ❖ 1 Sasaran termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil".
- ❖ 6 Sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target Kinerja, pengukuran dan evaluasi IKU yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.

- 
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Dari segi Akuntabilitas Keuangan, total anggaran Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.374.483.354.836.00 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp3.920.724.345.364 atau 61,50 persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp2.454.110.009.472.00 atau 2,45 persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2021 adalah Rp17.577.357.443.639 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp 11.202.523.088.803 dan Belanja Langsung Rp6.374.834.354.836. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.920.724.345.364 atau 61,50 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.343.514.619.015.18 dari realisasi belanja langsung atau 58,77 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 85,2 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 85,2 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

1.1.1 Kondisi Geografis

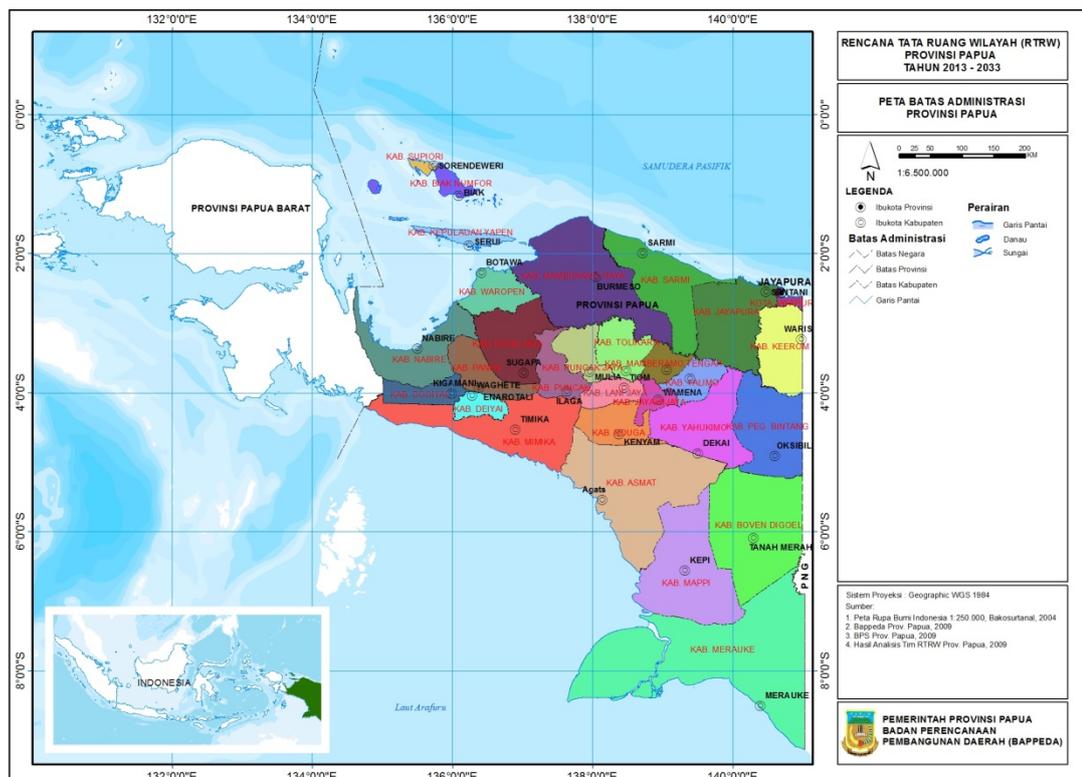
Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia dengan luas 319.036.05 km².

Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

- o Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- o Sebelah Selatan : Laut Arafura
- o Sebelah Barat : Papua Barat
- o Sebelah Timur : Papua New Guinea

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 09°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT. Provinsi Papua hingga tahun 2019, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

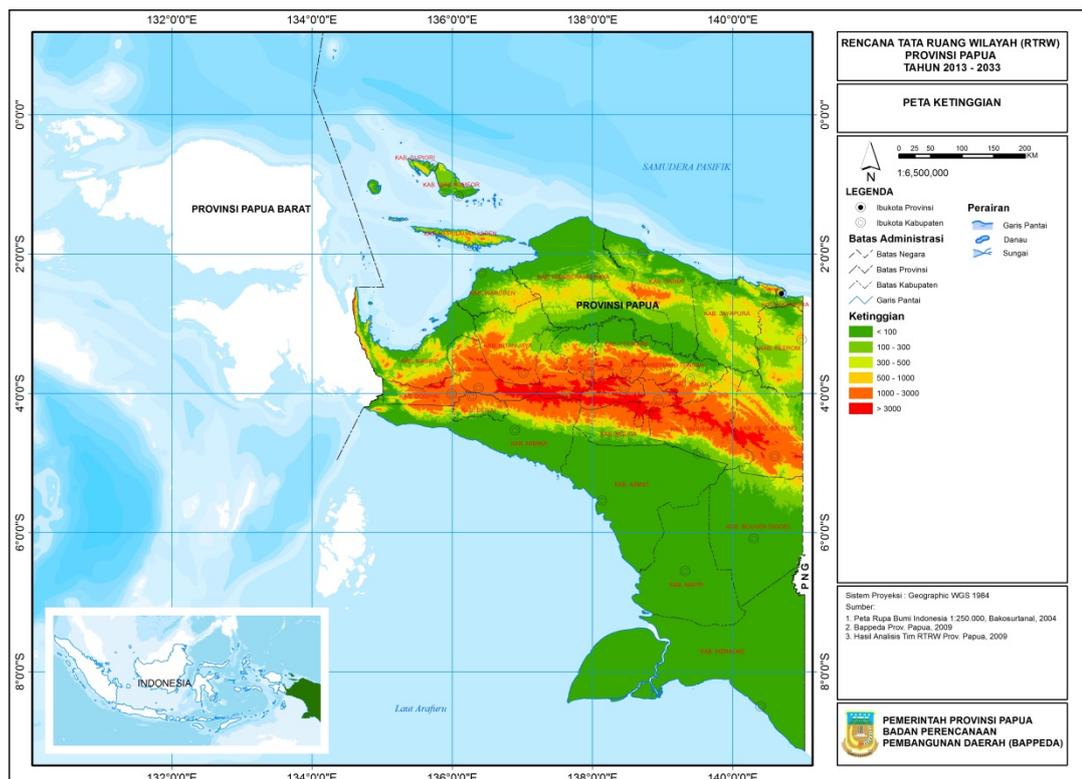


Topografi yang membentuk wilayah Provinsi Papua sangat bervariasi. mulai dari laut dangkal yaitu bagian dari Laut Arafura; dataran rendah hingga

puncak gunung yang ditutupi oleh salju abadi di bagian tengah. perbukitan dan dataran di bagian utara. serta kepulauan di bagian utara.

Pada bagian tengah rangkaian pegunungan tinggi terdapat Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang selalu diselimuti oleh salju abadi di Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5.030 m. Puncak Trikora 5.160 m dan Puncak Yamin 5.100 m.

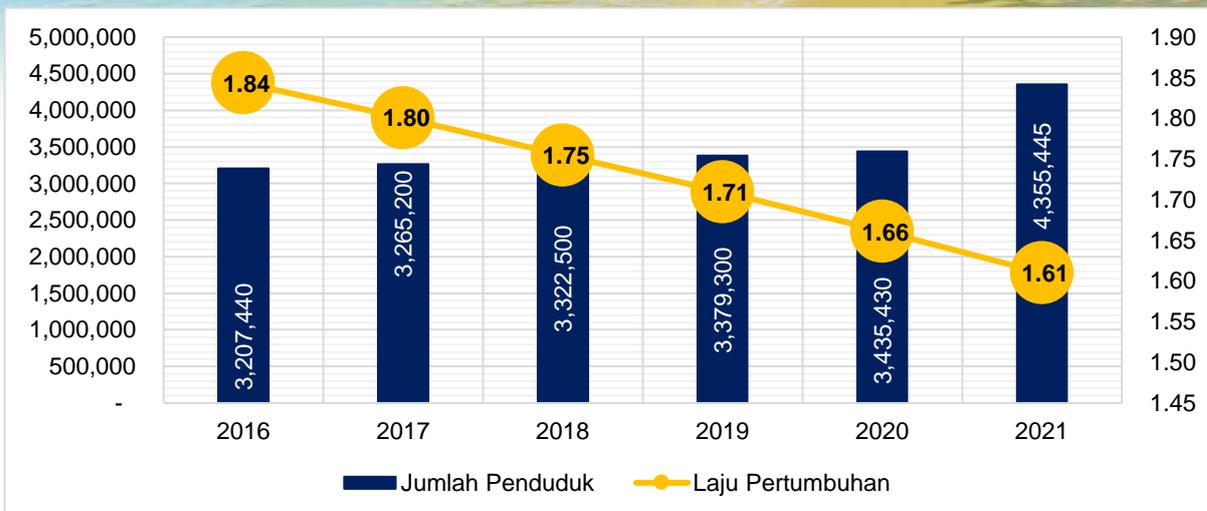
Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua



1.1.2 Kondisi Demografis

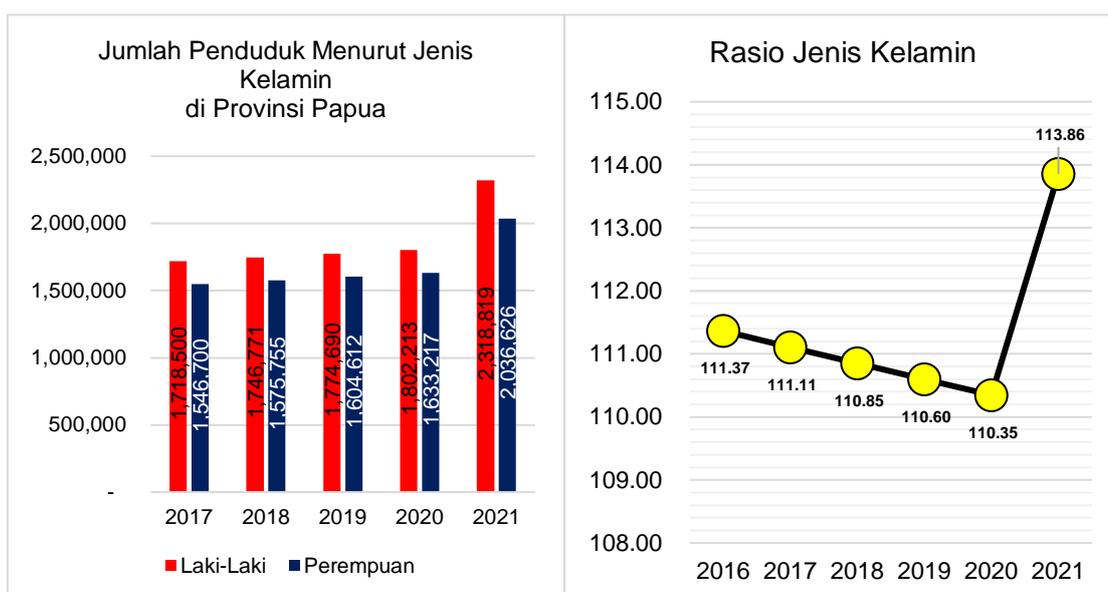
Jumlah penduduk Papua tahun 2021 adalah 4.355.445 jiwa yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 404.004 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 113.86 yang berarti terdapat 113 laki-laki setiap 100 perempuan.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex di Provinsi Papua Tahun 2017–2021

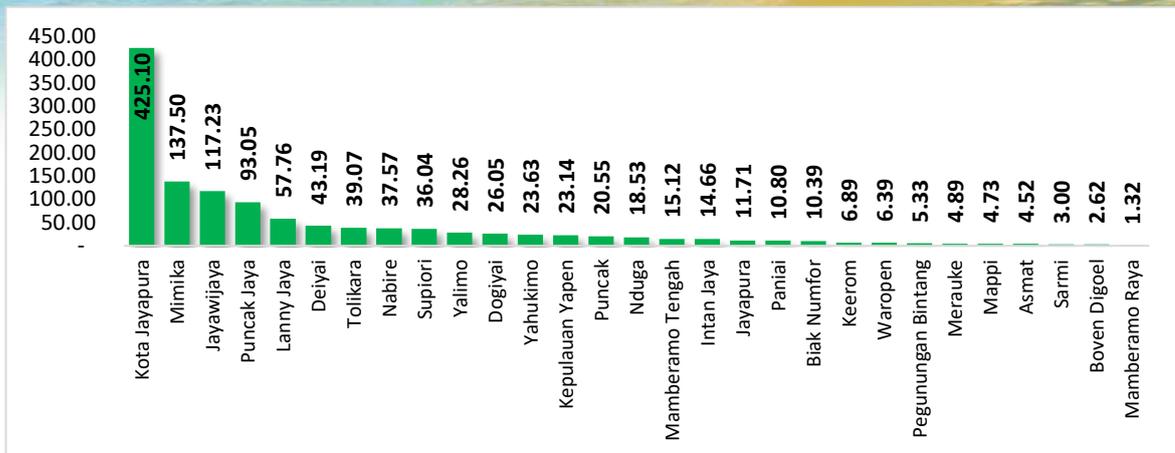


[a] Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan

[b] Rasio Sex

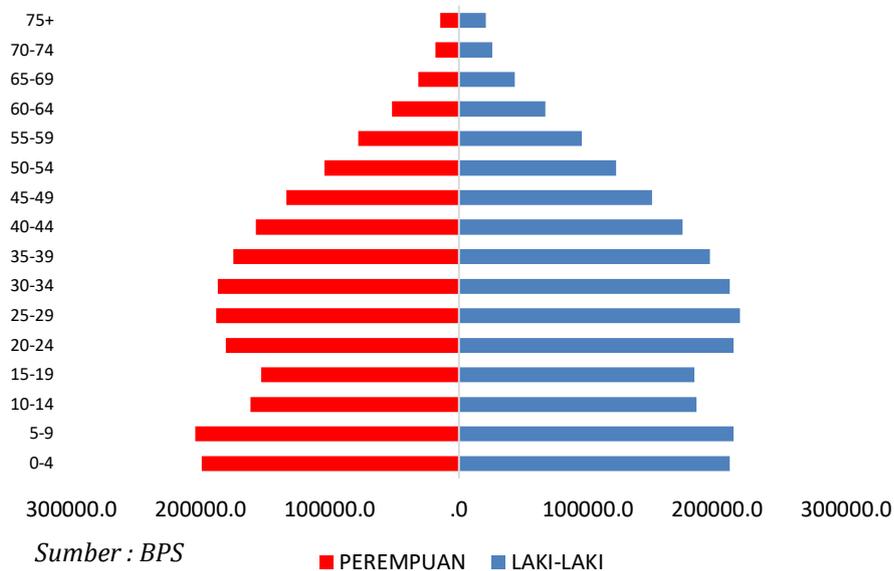
Dengan luas wilayah 316.553.11 km². kepadatan penduduk di Papua sebanyak 11.07 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 425.10 jiwa per km². diikuti Kabupaten Mimika (137.50 jiwa per km²) dan Kabupaten Jayawijaya (117.23 jiwa per km²). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni kurang dari 1.32 jiwa per km².

Grafik 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2021



Penduduk Papua berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda (0-4 tahun). Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 75 tahun keatas. Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan di Papua tahun 2021 cukup tinggi, yaitu sebesar **43.72** persen.

Grafik 1.4 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2021



1.1.3 Kondisi Pemerintahan

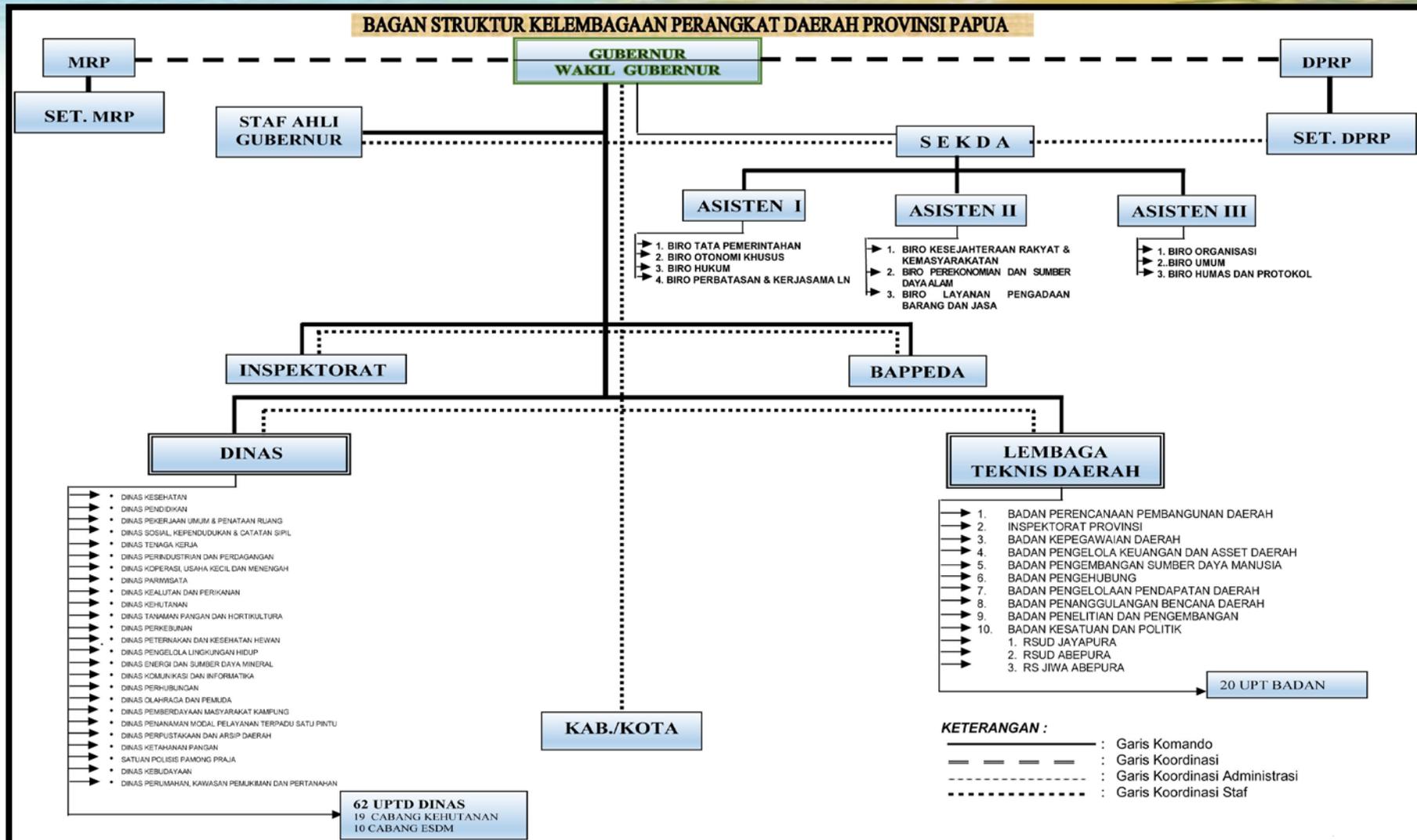
Provinsi Papua, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 576, dan desa 5.560. Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Distrik, Desa dan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

Kabupaten/Kota	JumlahDesa2021	JumlahKecamatan2021	LuasWilayah
Merauke	190	20	47.406.90
Jayawijaya	332	40	2.331.19
Jayapura	144	19	14.390.16
Nabire	89	15	4.549.75
Kepulauan Yapen	165	16	4.936.37
Biak Numfor	268	19	13.017.45
Paniai	216	24	20.686.54
Puncak Jaya	302	26	2.446.50
Mimika	152	18	2.300.37
Boven Digoel	111	20	24.665.98
Mappi	164	15	23.178.45
Asmat	221	23	24.687.57
Yahukimo	518	51	15.057.90
Pegunungan Bintang	277	34	14.655.36
Tolikara	545	46	6.149.67
Sarmi	111	19	13.965.58
Keerom	91	11	9.015.03
Waropen	117	12	5.381.47
Supiori	38	5	634.24
Mamberamo Raya	59	9	28.034.87
Nduga	248	32	5.825.22
Lanny Jaya	355	39	3.439.79
Mamberamo Tengah	59	5	3.384.14
Yalimo	300	5	3.658.76
Puncak	206	25	5.618.84
Dogiyai	79	10	4.522.15
Intan Jaya	97	8	9.336.60
Deiyai	67	5	2.325.88
Kota Jayapura	39	5	950.38
Provinsi Papua	5560	576	316.553.11

Sumber : Papua Dalam Angka 2022

Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

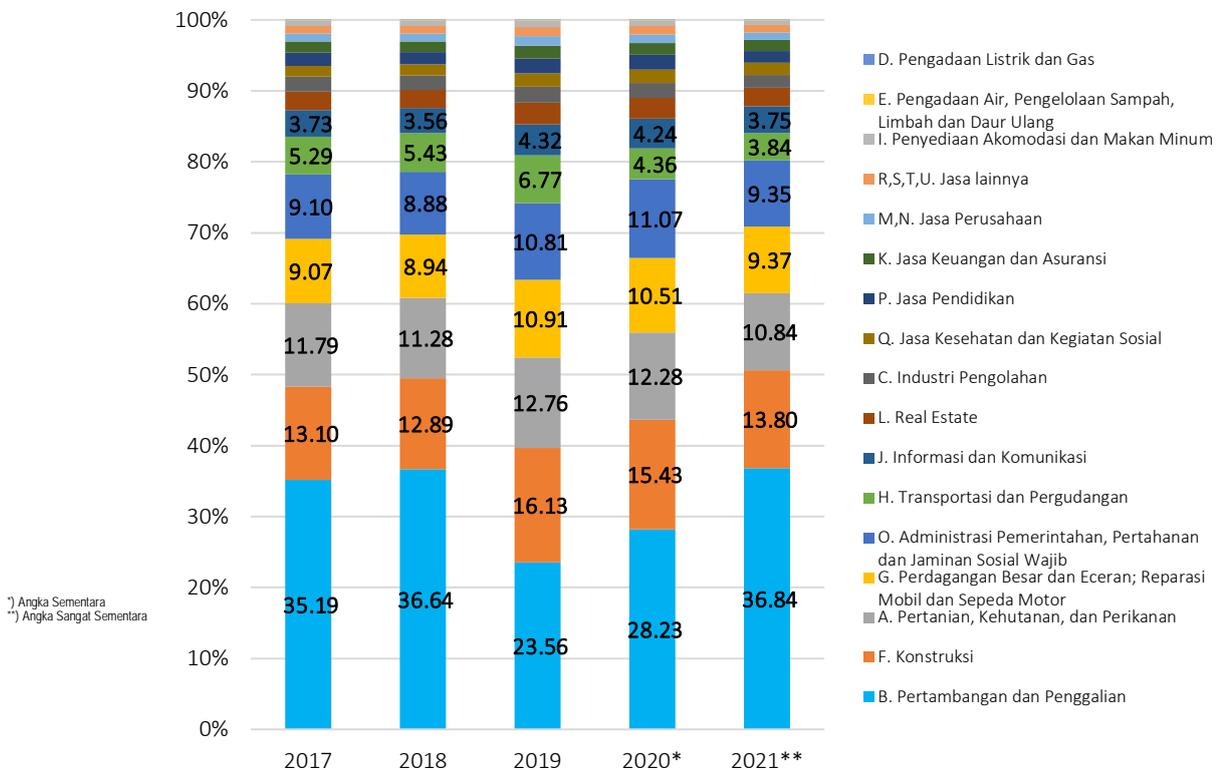


1.1.4 Kondisi Perekonomian

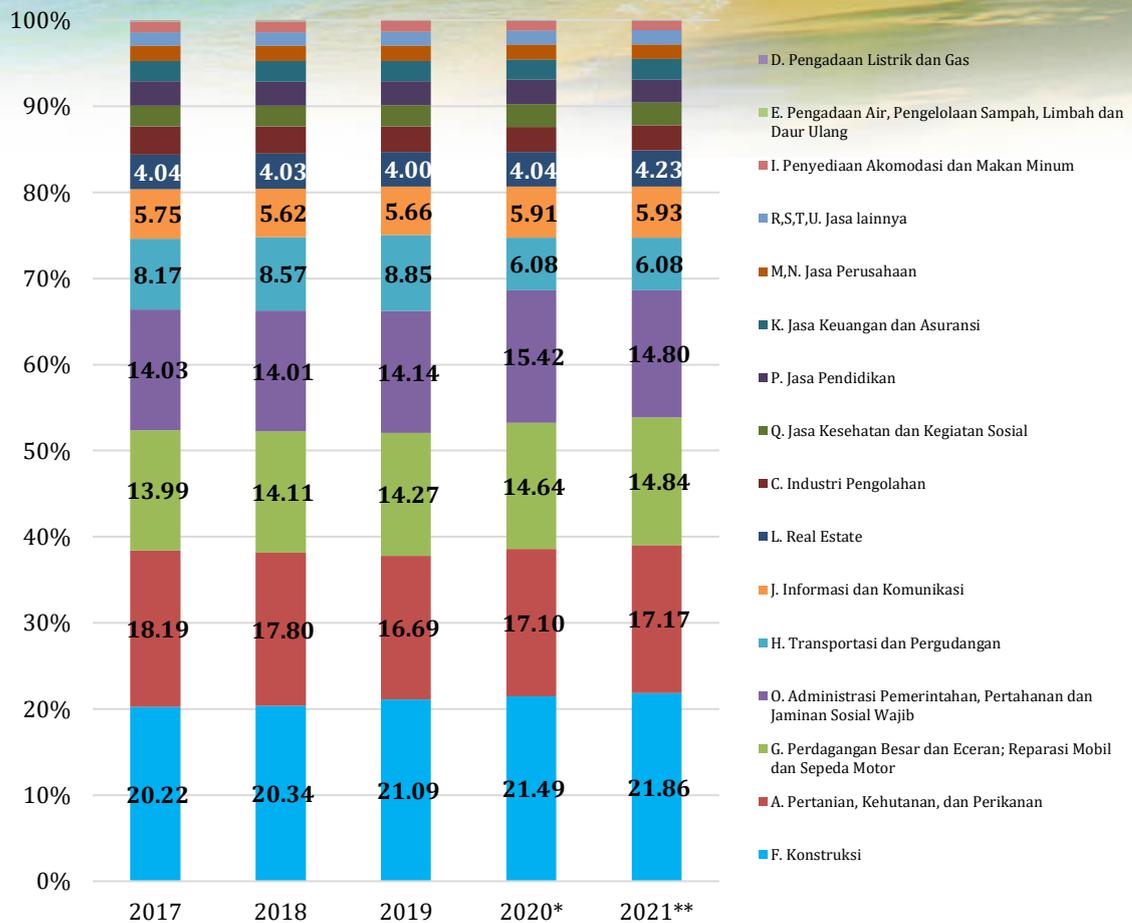
A. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2021, distribusi PDRB Provinsi Papua sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. pada tahun 2020 sektor Pertambangan berkontribusi sebesar 28.23% kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 36.84% meningkat 8.60%. Setelah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap perekonomian Papua tahun 2021, sumbangan sektor ini sebesar 13.80 persen di tahun 2021, menurun jika dibanding kontribusi di tahun 2020 sebesar 15.43%. Di urutan ketiga dan keempat, dengan peranan masing-masing sebesar 10.84 persen dan 9.37 persen adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Grafik 1.5 Distribusi PDRB ADHB dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%)



Grafik 1.6 Distribusi PDRB ADHB Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%)



Sumber : BPS

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

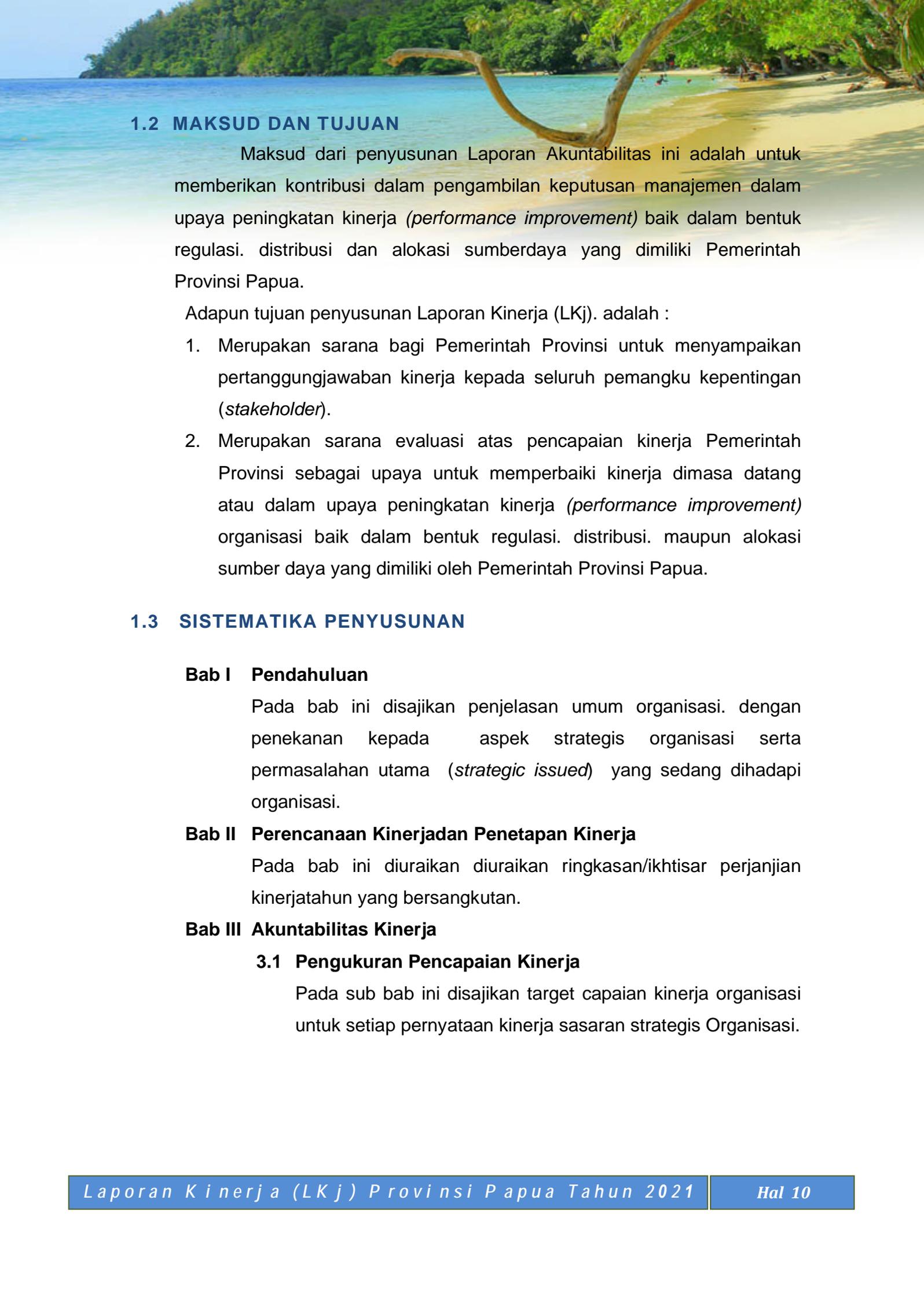
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu di wilayah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu.

PDRB Papua yang diukur atas dasar harga berlaku Papua terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 188.938.08 miliar rupiah. terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 sebesar 235.343.25 miliar rupiah.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2010 - 2021 (miliar rupiah)

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU		PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN	
	DENGAN PERTAMBANGAN	TANPA PERTAMBANGAN	DENGAN PERTAMBANGAN	TANPA PERTAMBANGAN
2010	110.808,17	51.114,30	110.808,17	51.114,30
2011	108.188,75	57.867,28	106.066,72	56.057,78
2012	112.812,56	66.200,77	107.890,94	61.089,70
2013	122.857,17	74.601,79	117.118,81	66.107,67
2014	133.329,98	87.256,17	121.391,23	71.811,42
2015	150.307,28	101.880,49	130.311,60	77.400,24
2016	173.208,86	114.183,51	142.224,93	82.384,55
2017	188.938,07	122.457,68	148.818,29	86.644,23
2018	210.600,57	133.440,13	159.711,86	91.100,68
2019	189.510,70	144.868,52	134.565,89	95.640,87
2020	199.232,88	142.987,40	137.787,29	92.392,08
2021	235.343,25	148.652,14	146.111,05	82.195,60

Sumber : Papua Dalam Angka. BPS 2021



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

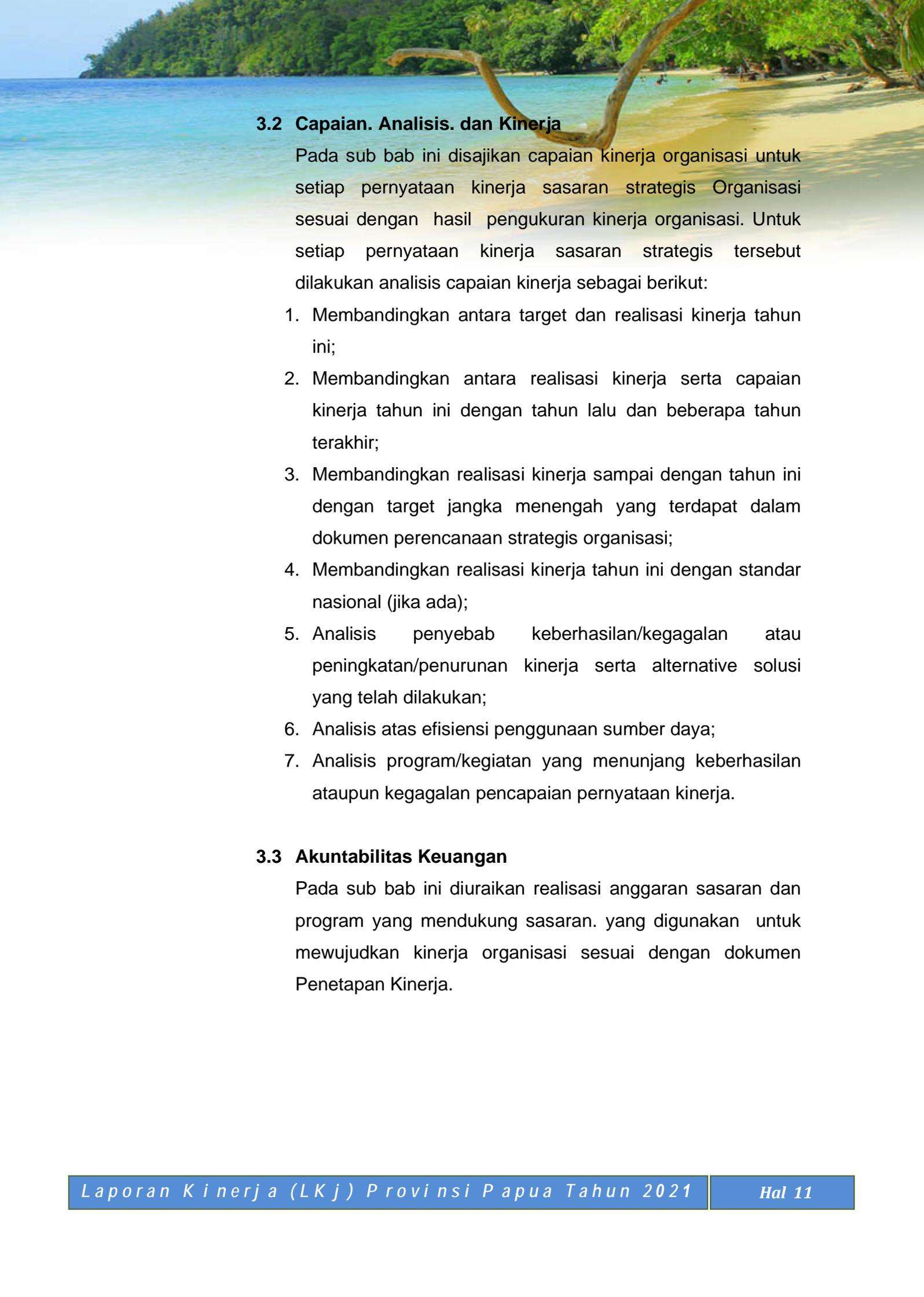
Bab II Perencanaan Kinerja dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatanya yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.



3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran. yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Kinerja (PK)

Penghargaan-Penghargaan



BAB II





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Provinsi Papua memiliki modal dan aset yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, serta sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar *---main capital---* yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

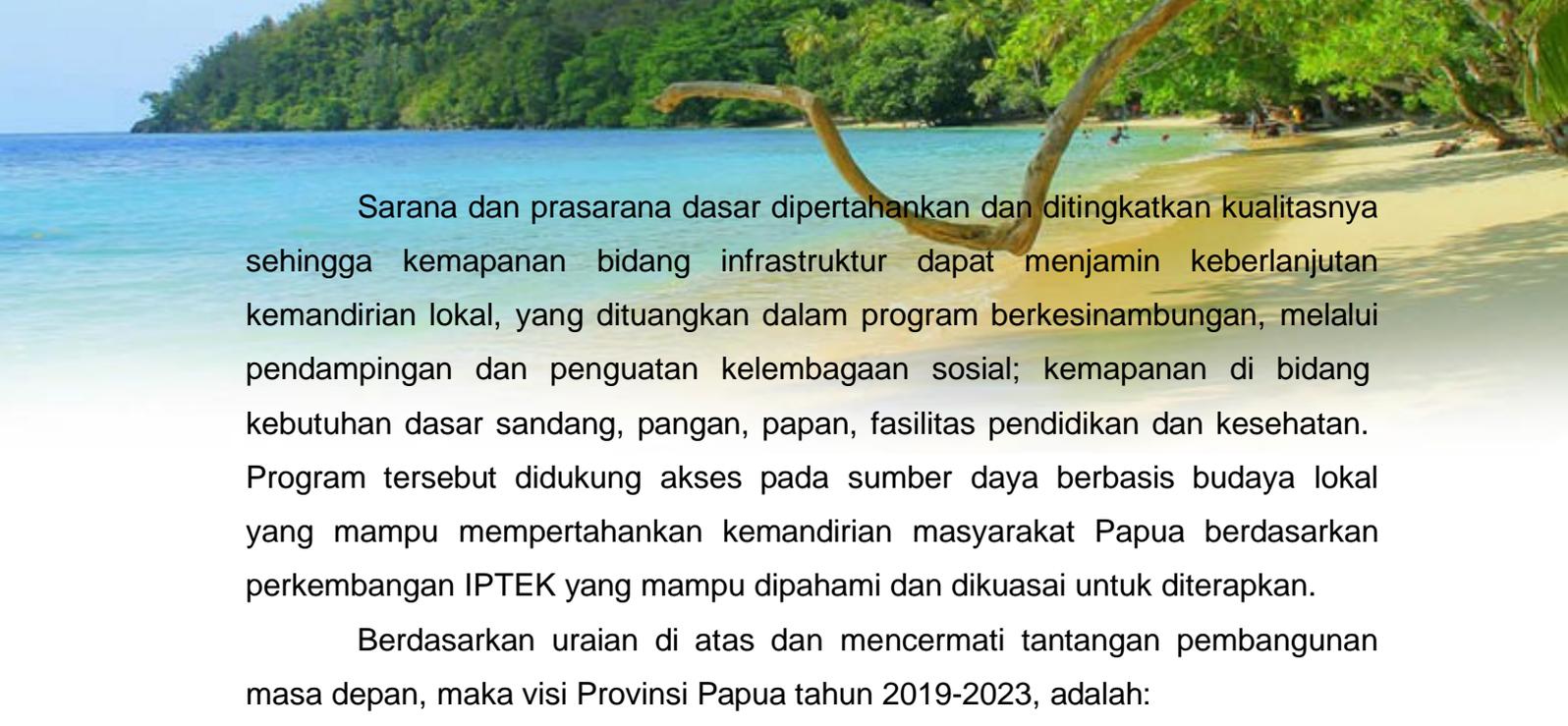
Periode 2019-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya **Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik**. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.

Gambar 2.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua



Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keamanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing, yang didukung perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender dan terwujudnya lembaga jaminan sosial. Keamanan ini juga ditunjukkan dengan pelembagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta budaya kerja yang professional.

Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali.



Sarana dan prasarana dasar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga keamanan bidang infrastruktur dapat menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; keamanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program tersebut didukung akses pada sumber daya berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan mencermati tantangan pembangunan masa depan, maka visi Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa **Keadilan** bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Papua yang BERKEADILAN menjadi fokus utama bagi perwujudan PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA, yang diselimuti dengan prinsip Kasih Menembus Perbedaan, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut Papua yang Baru dalam Bingkai Peradaban Baru Papua. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan KASIH, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.

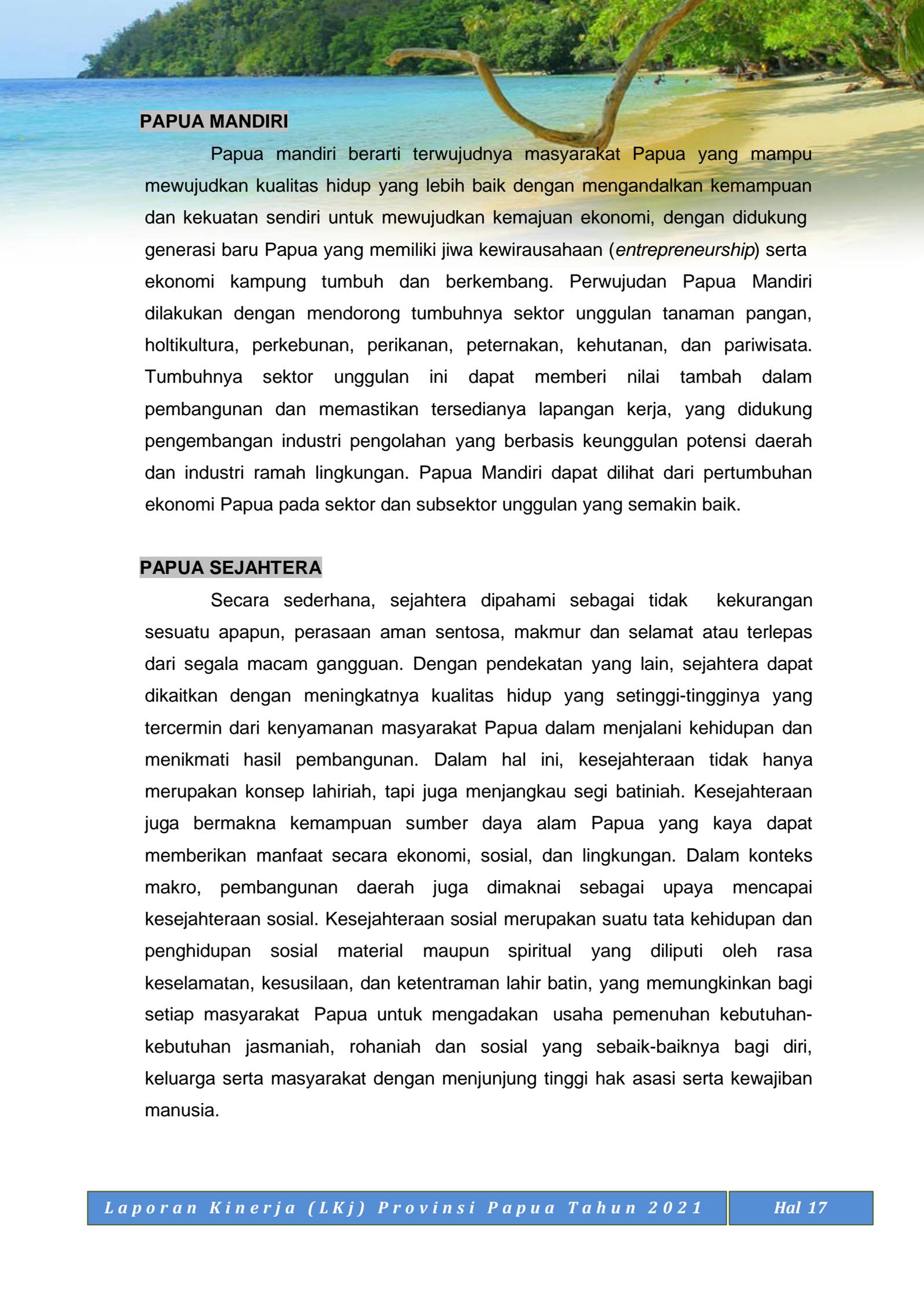
Gambar 2.2 Visi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Pendekatan Kasih ini diharapkan dapat menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adapun penjelasan setiap elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Papua Bangkit berarti terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai NKRI tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dalam hal ini, orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.



PAPUA MANDIRI

Papua mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata. Tumbuhnya sektor unggulan ini dapat memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, yang didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermin dari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalani kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023

Misi pembangunan 2019-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019-2023 yang mempengaruhinya. Misi pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah yakni Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

Gambar 2.3 Misi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023





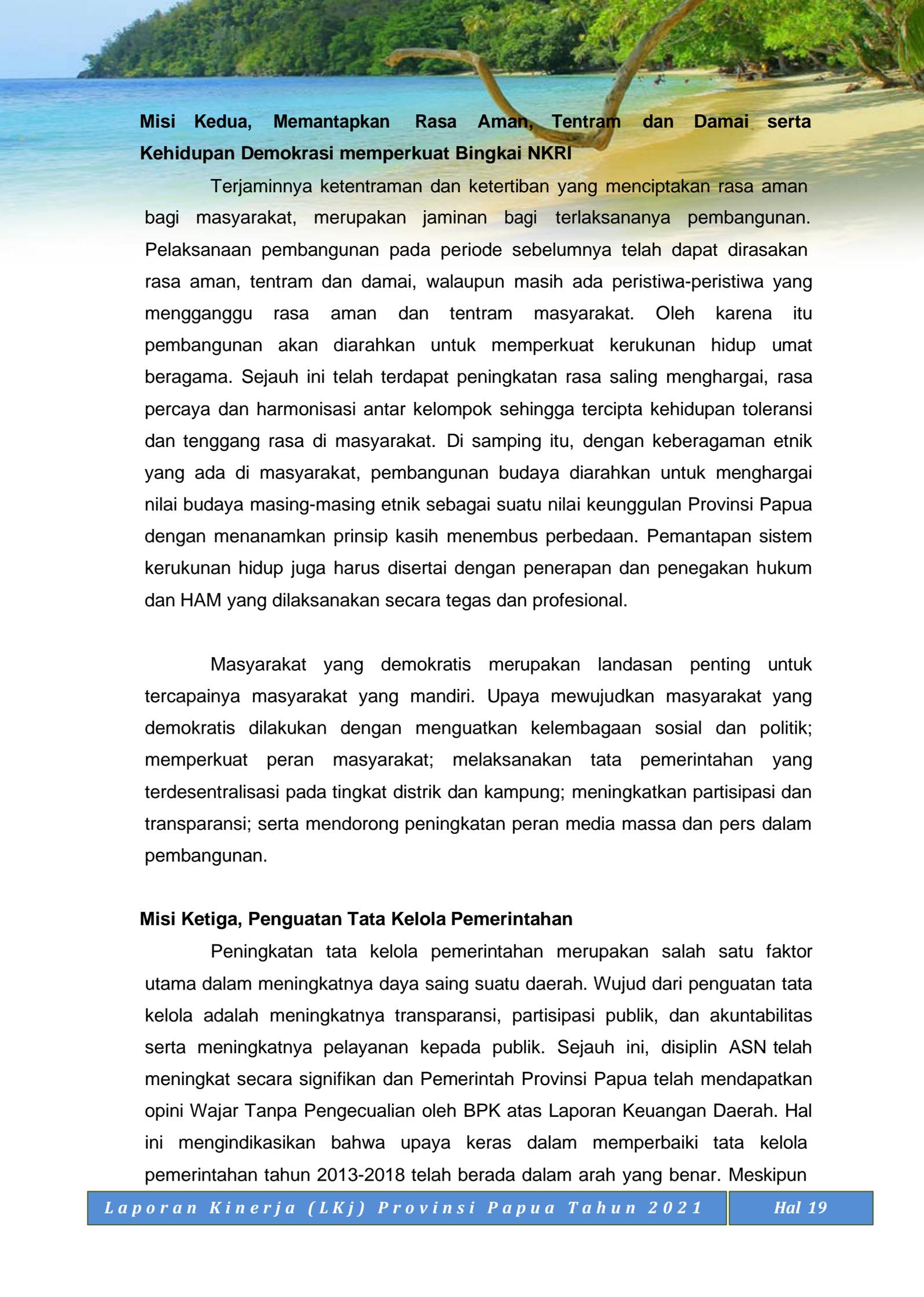
Penjelasan masing-masing misi:

Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siswa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.



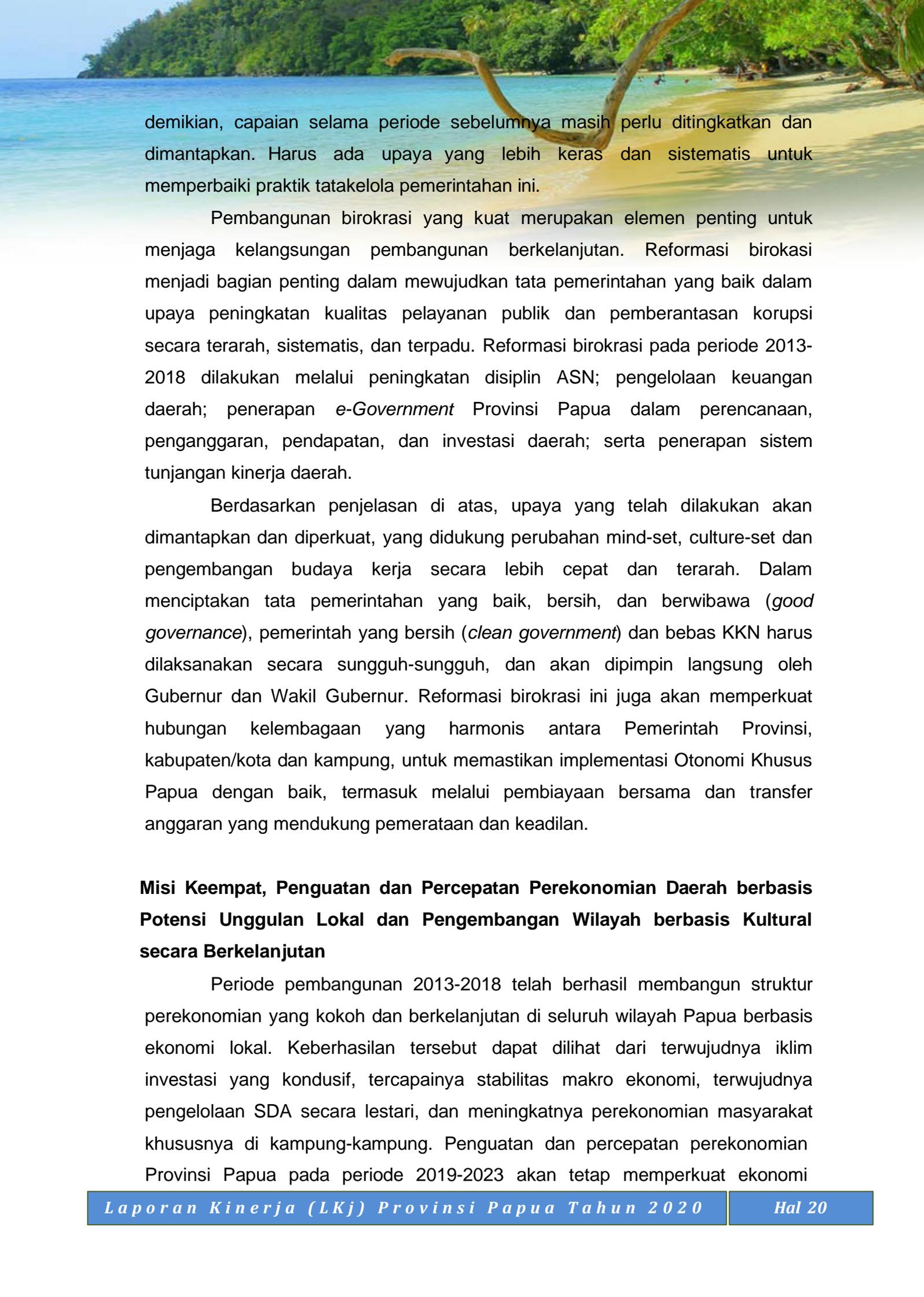
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tenram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tenram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun



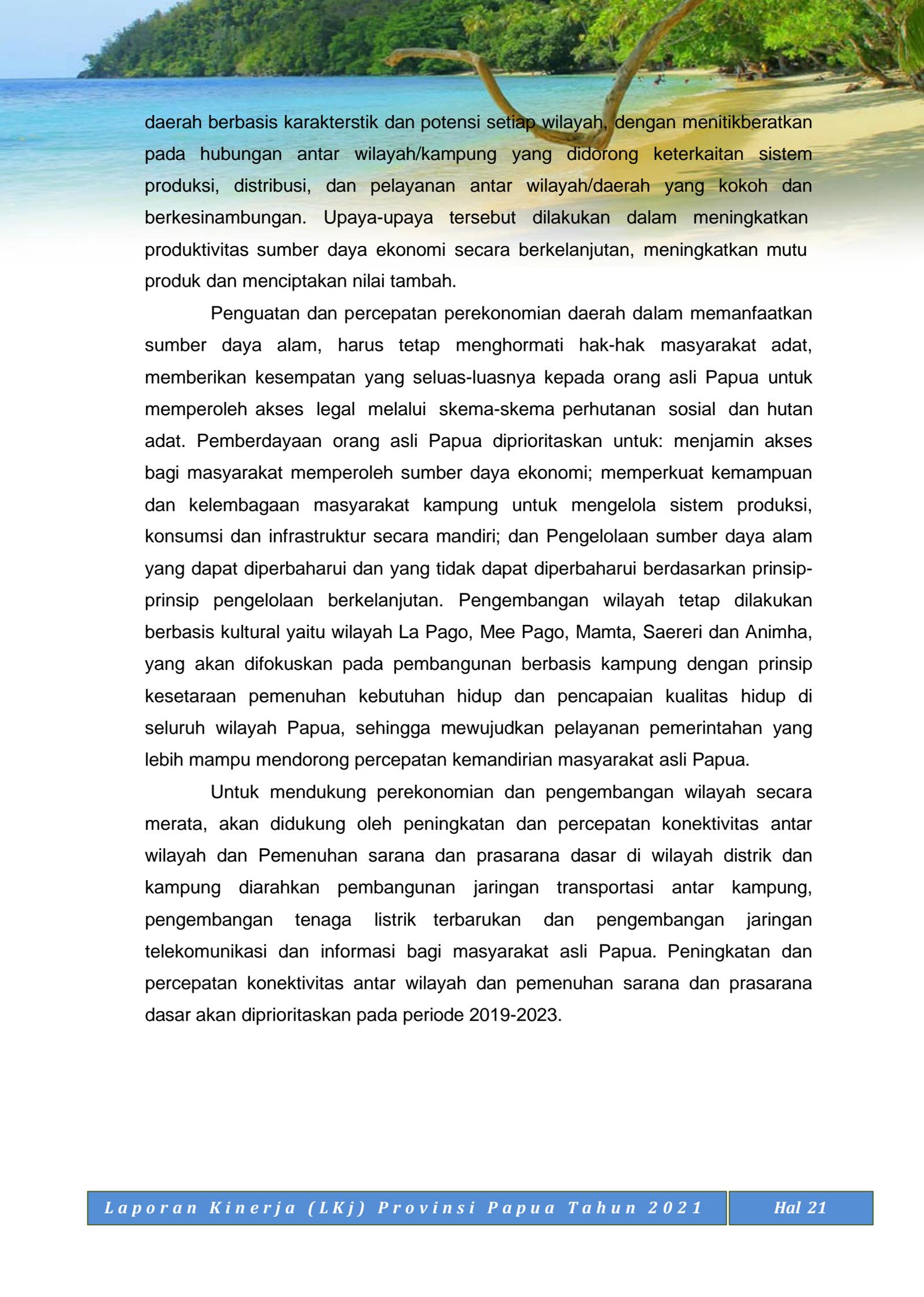
demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan *e-Government* Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

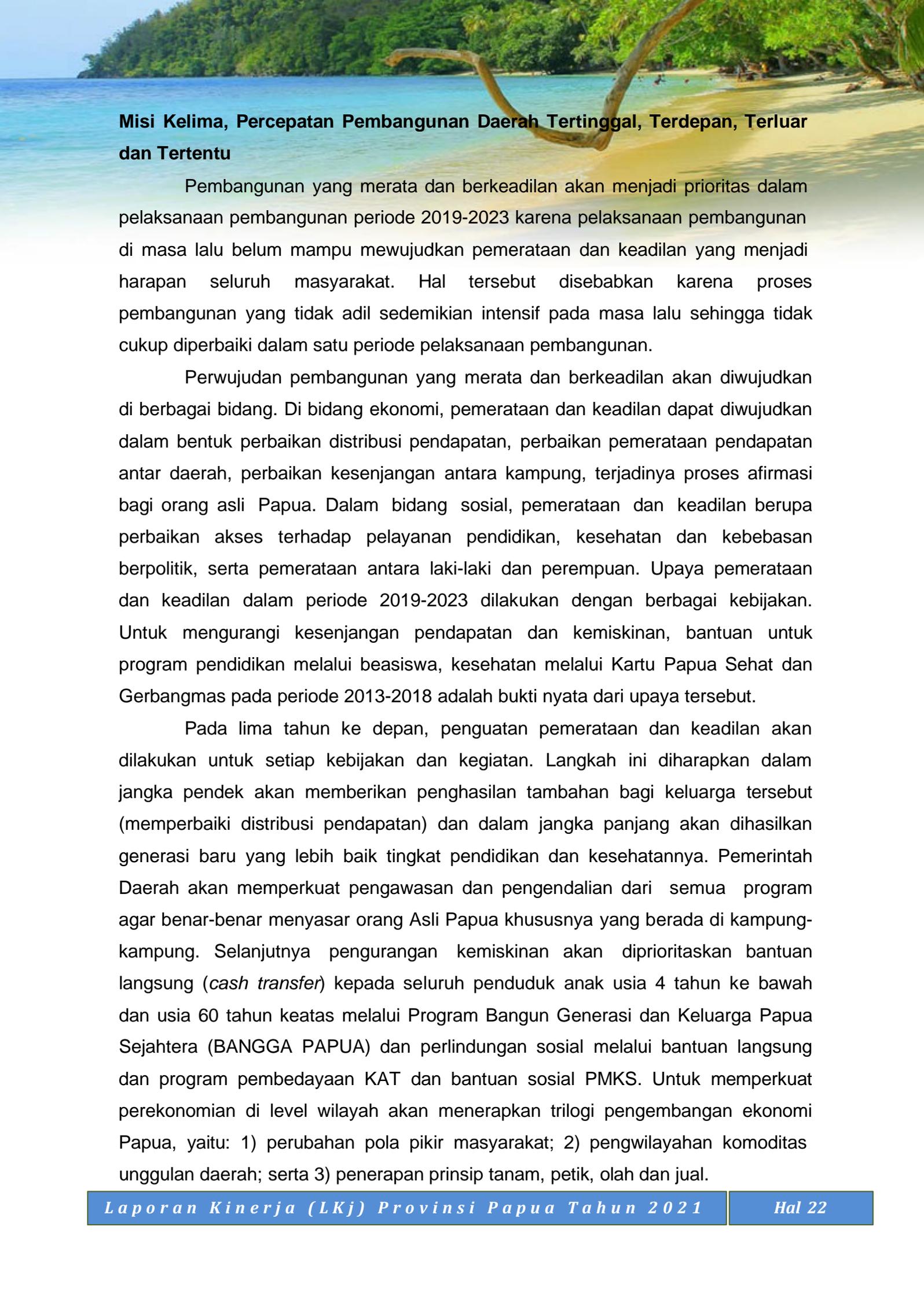
Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi



daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.



Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013-2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.



2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah.

Misi ke-1: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

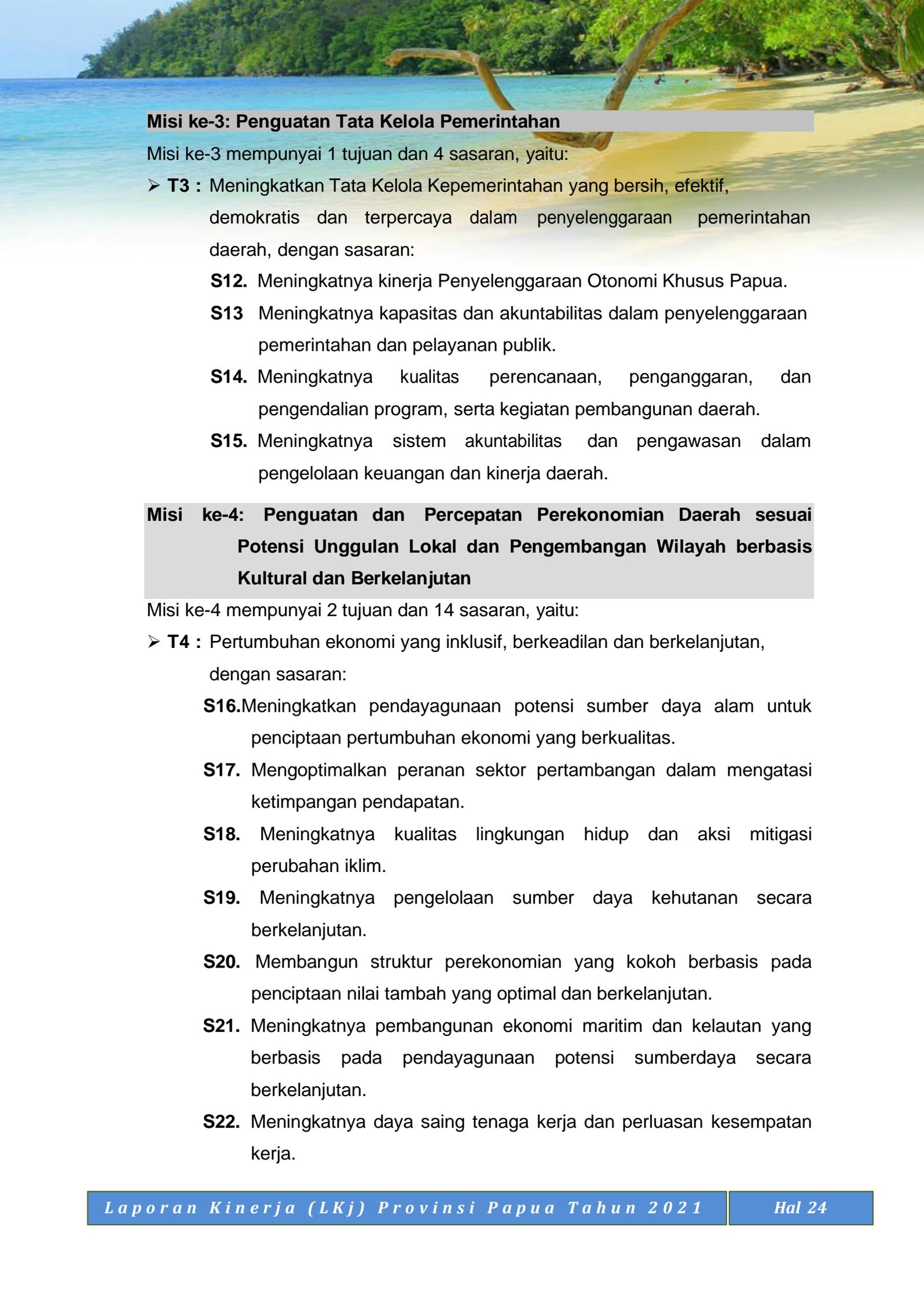
Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 7 sasaran, yaitu:

- **T1** : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran:
 - S1.** Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
 - S2.** Meningkatkan budaya baca pada masyarakat.
 - S3.** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - S4.** Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga.
 - S5.** Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
 - S6.** Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
 - S7.** Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Misi ke-2: Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

- **T2** : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasaran:
 - S8.** Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum.
 - S9.** Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.
 - S10.** Meningkatnya penegakan HAM.
 - S11.** Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.



Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

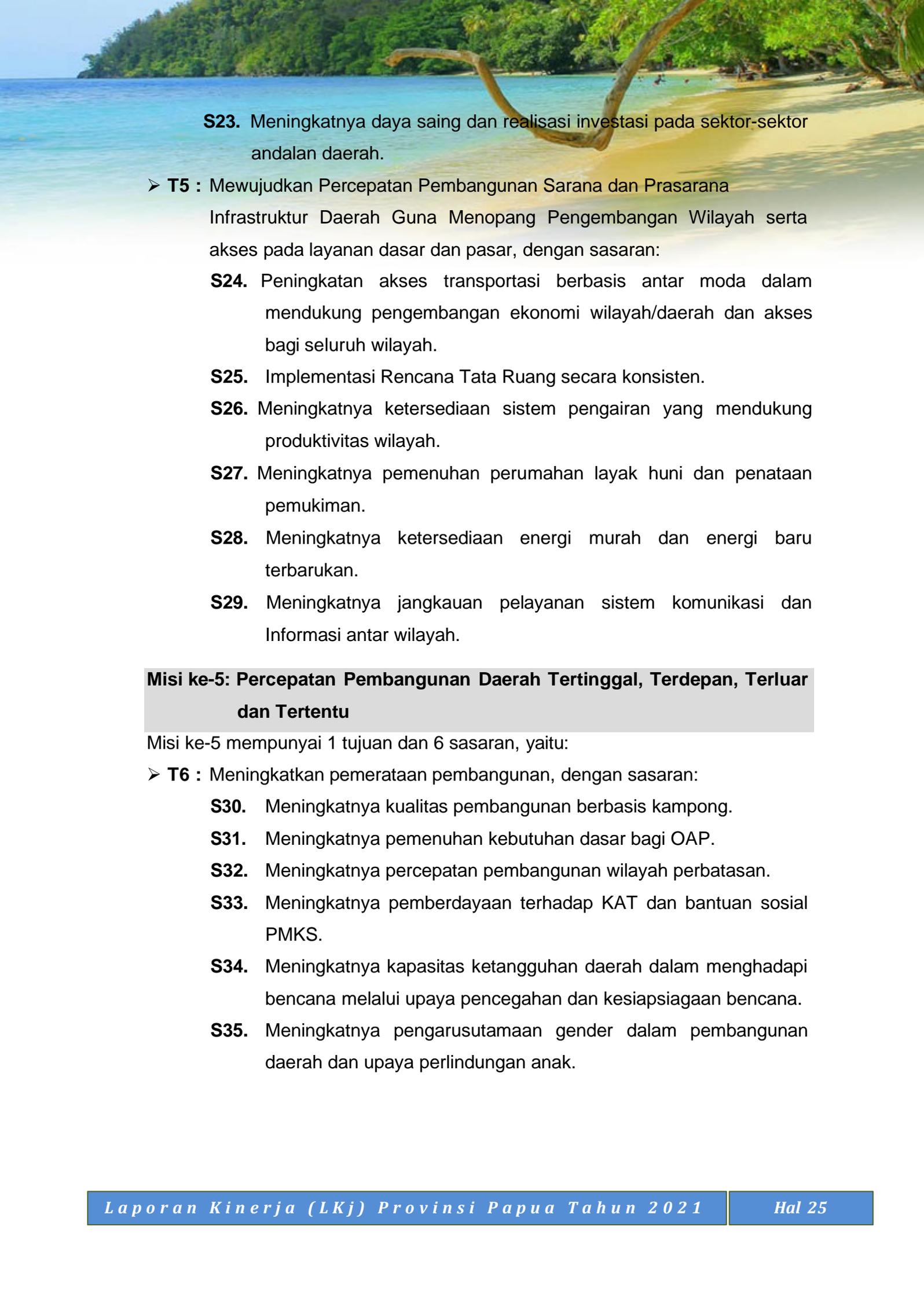
Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

- **T3** : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran:
- S12.** Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.
 - S13** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - S14.** Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.
 - S15.** Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Misi ke-4: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 14 sasaran, yaitu:

- **T4** : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran:
- S16.** Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - S17.** Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
 - S18.** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.
 - S19.** Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan.
 - S20.** Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan.
 - S21.** Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.
 - S22.** Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.



S23. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

- **T5 :** Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar, dengan sasaran:
- S24.** Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
 - S25.** Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.
 - S26.** Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
 - S27.** Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.
 - S28.** Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan.
 - S29.** Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

Misi ke-5: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 6 sasaran, yaitu:

- **T6 :** Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran:
- S30.** Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.
 - S31.** Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.
 - S32.** Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
 - S33.** Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS.
 - S34.** Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
 - S35.** Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.

2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

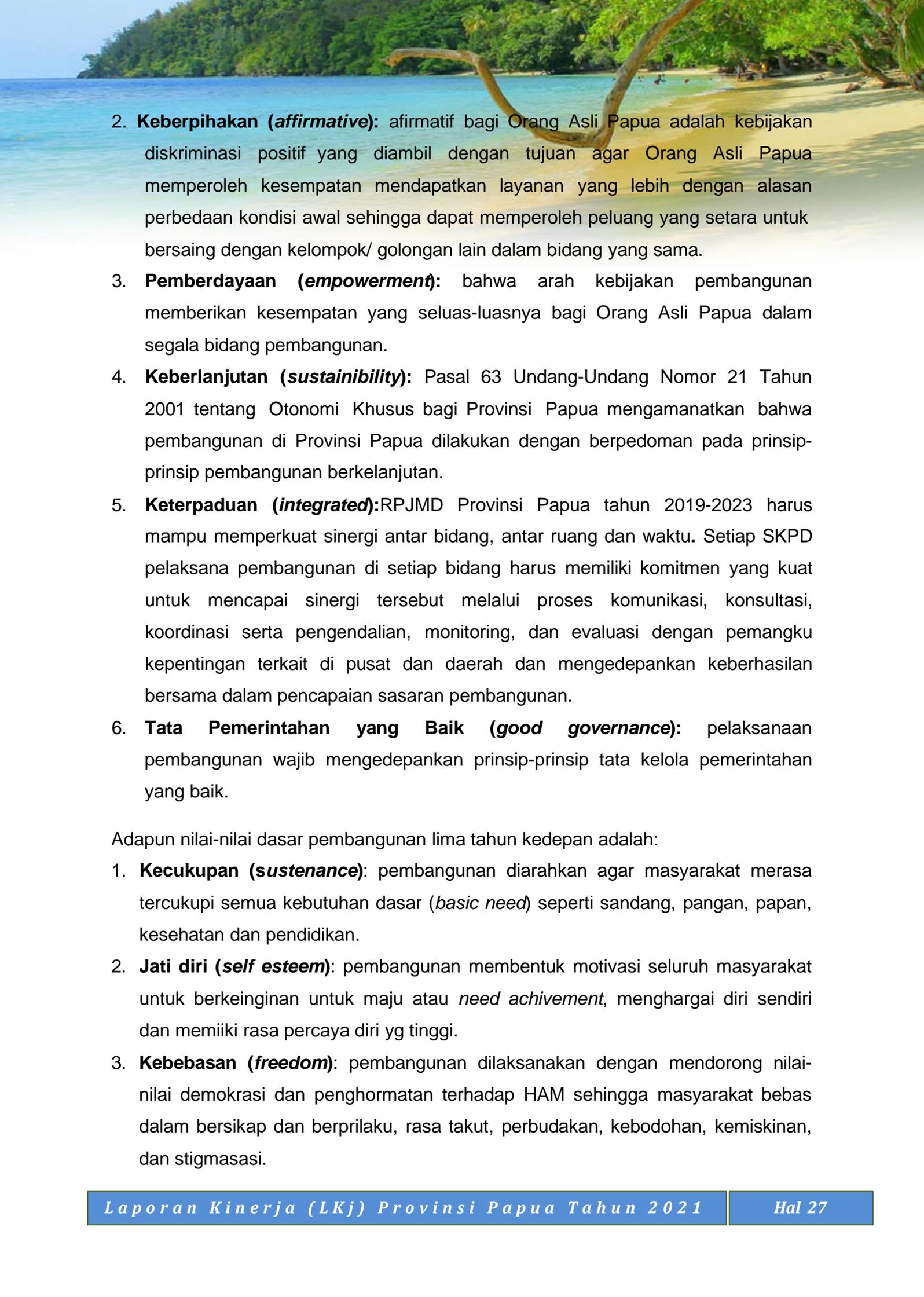
Gambar 2.4. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

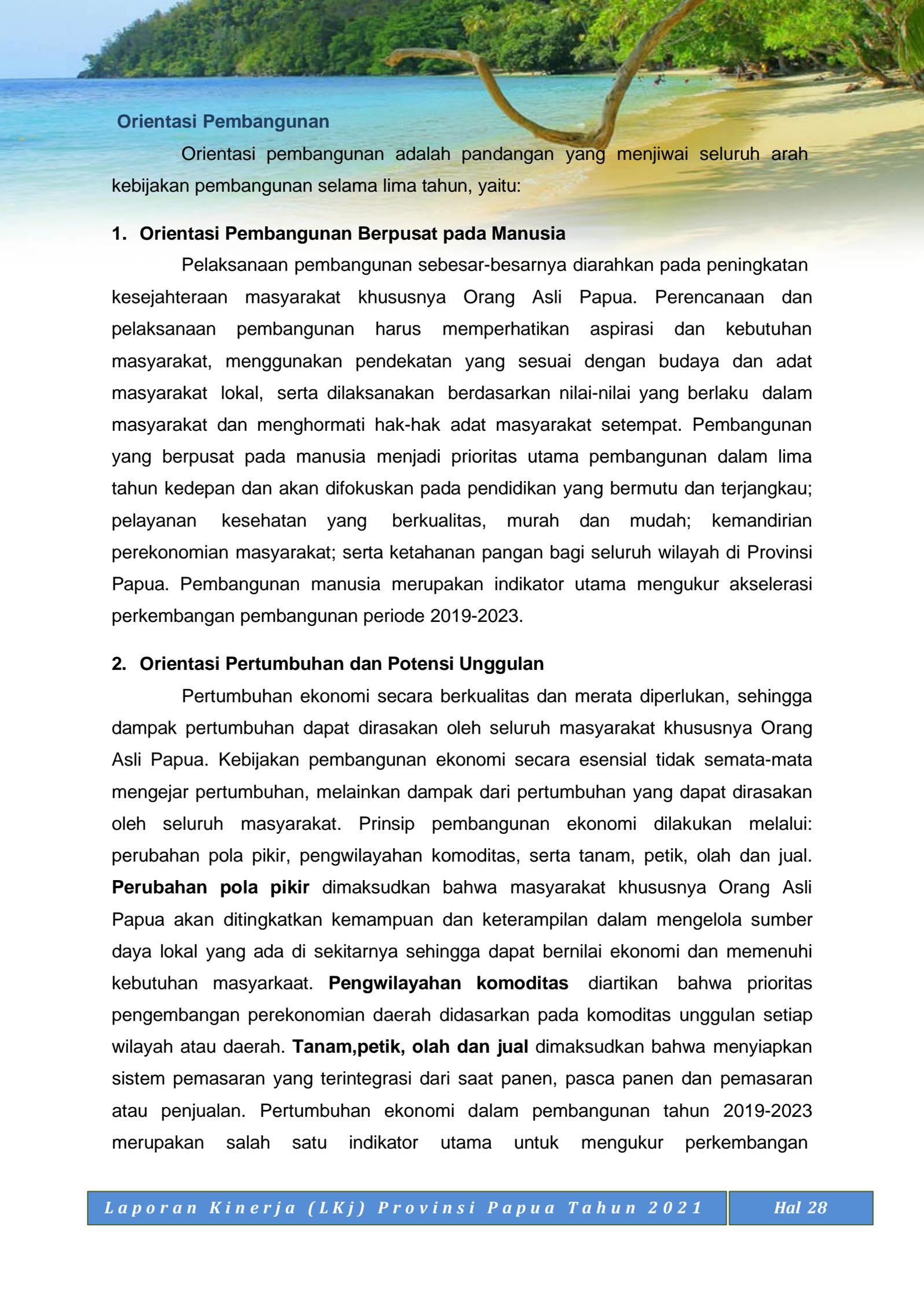
Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2019-2023, terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. **Perlindungan (*protection*):** sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

- 
2. **Keberpihakan (*affirmative*):** afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.
 3. **Pemberdayaan (*empowerment*):** bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
 4. **Keberlanjutan (*sustainability*):** Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
 5. **Keterpaduan (*integrated*):** RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
 6. **Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*):** pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:

1. **Kecukupan (*sustenance*):** pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (*self esteem*):** pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*freedom*):** pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.



Orientasi Pembangunan

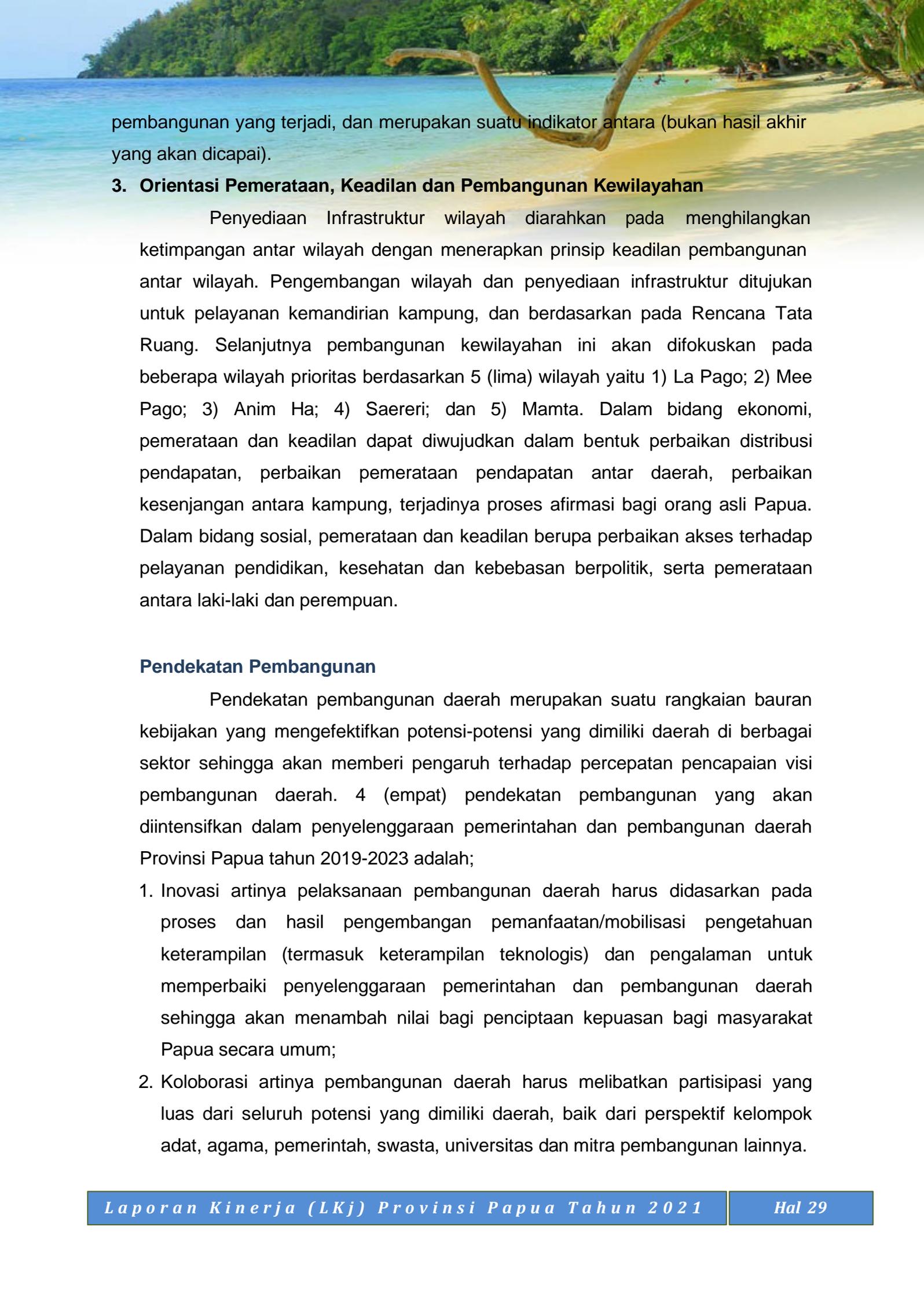
Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, serta dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan akan difokuskan pada pendidikan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah; kemandirian perekonomian masyarakat; serta ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua. Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan periode 2019-2023.

2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan merata diperlukan, sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi secara esensial tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan dampak dari pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, serta tanam, petik, olah dan jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada di sekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. **Pengwilayahan komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam, petik, olah dan jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tahun 2019-2023 merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan



pembangunan yang terjadi, dan merupakan suatu indikator antara (bukan hasil akhir yang akan dicapai).

3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

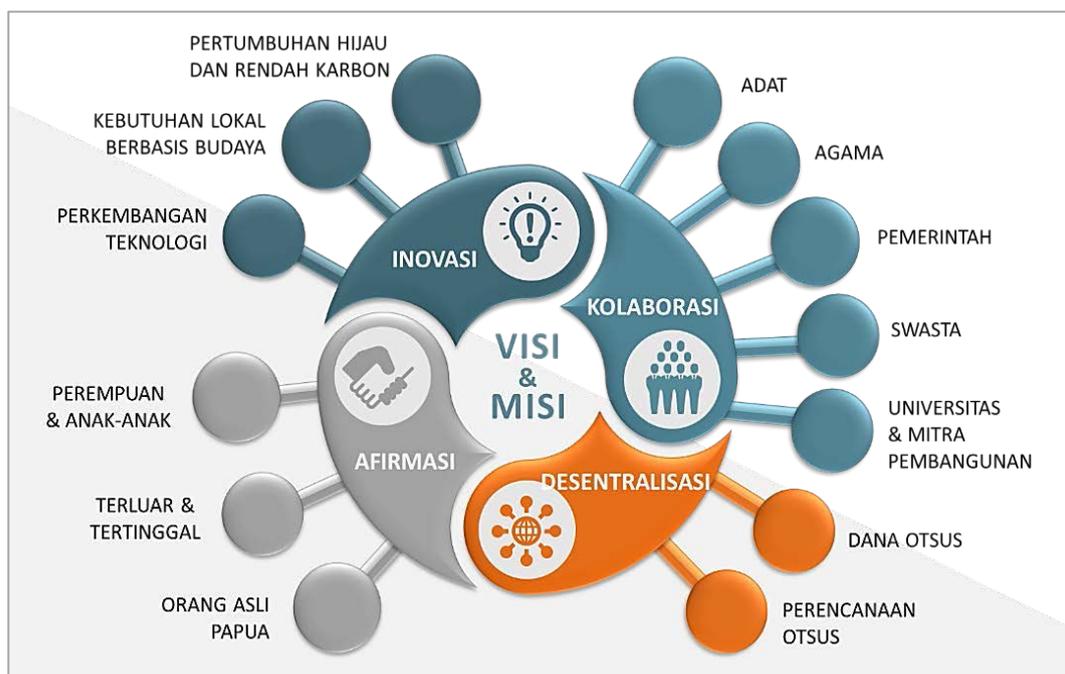
Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;
2. Kolaborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya.

- Pada akhirnya kolaborasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;
3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
 4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 2.5 Pendekatan Pembangunan Daerah

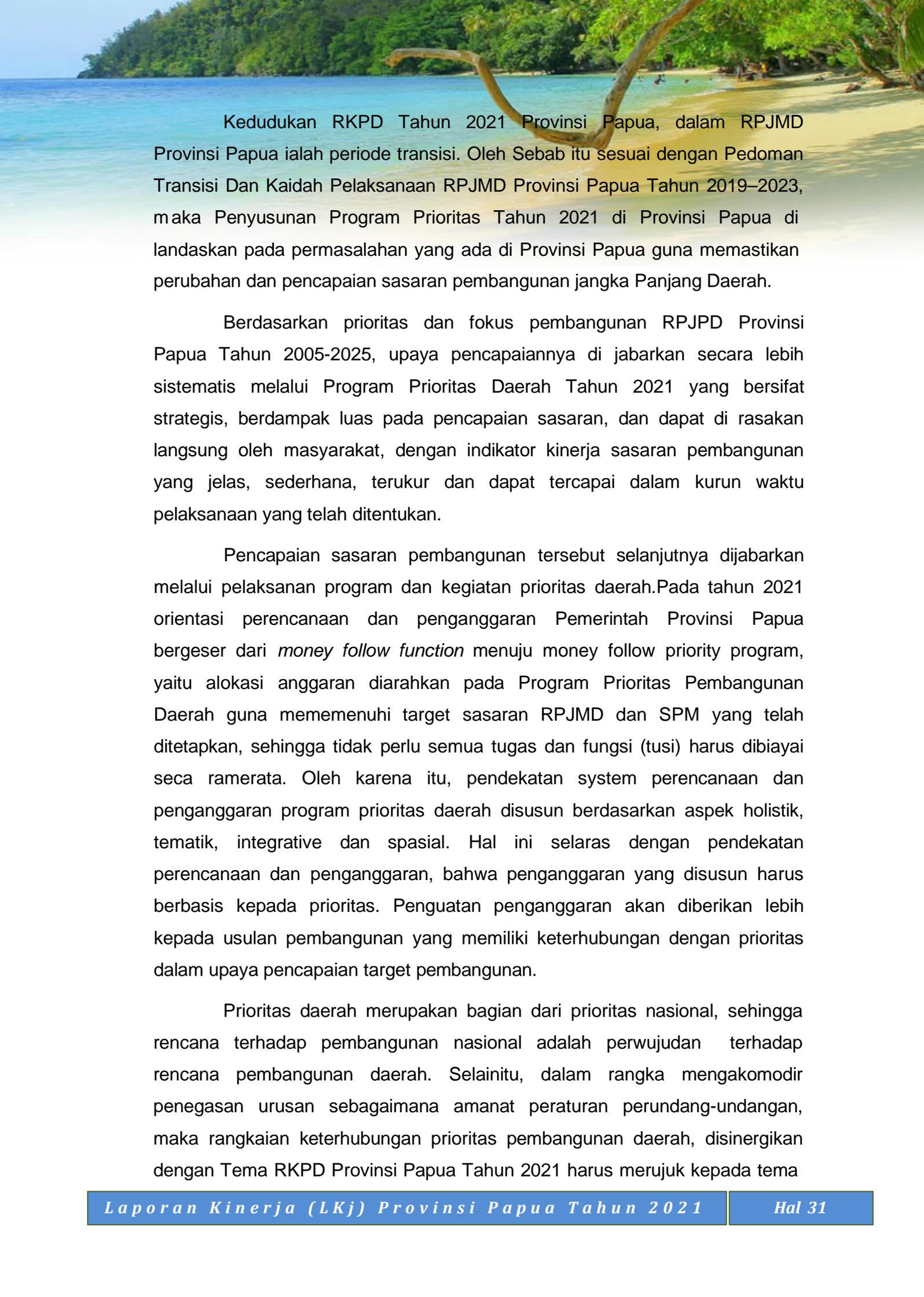


Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stake holders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021

a. Tema Pembangunan tahun 2021

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2021.

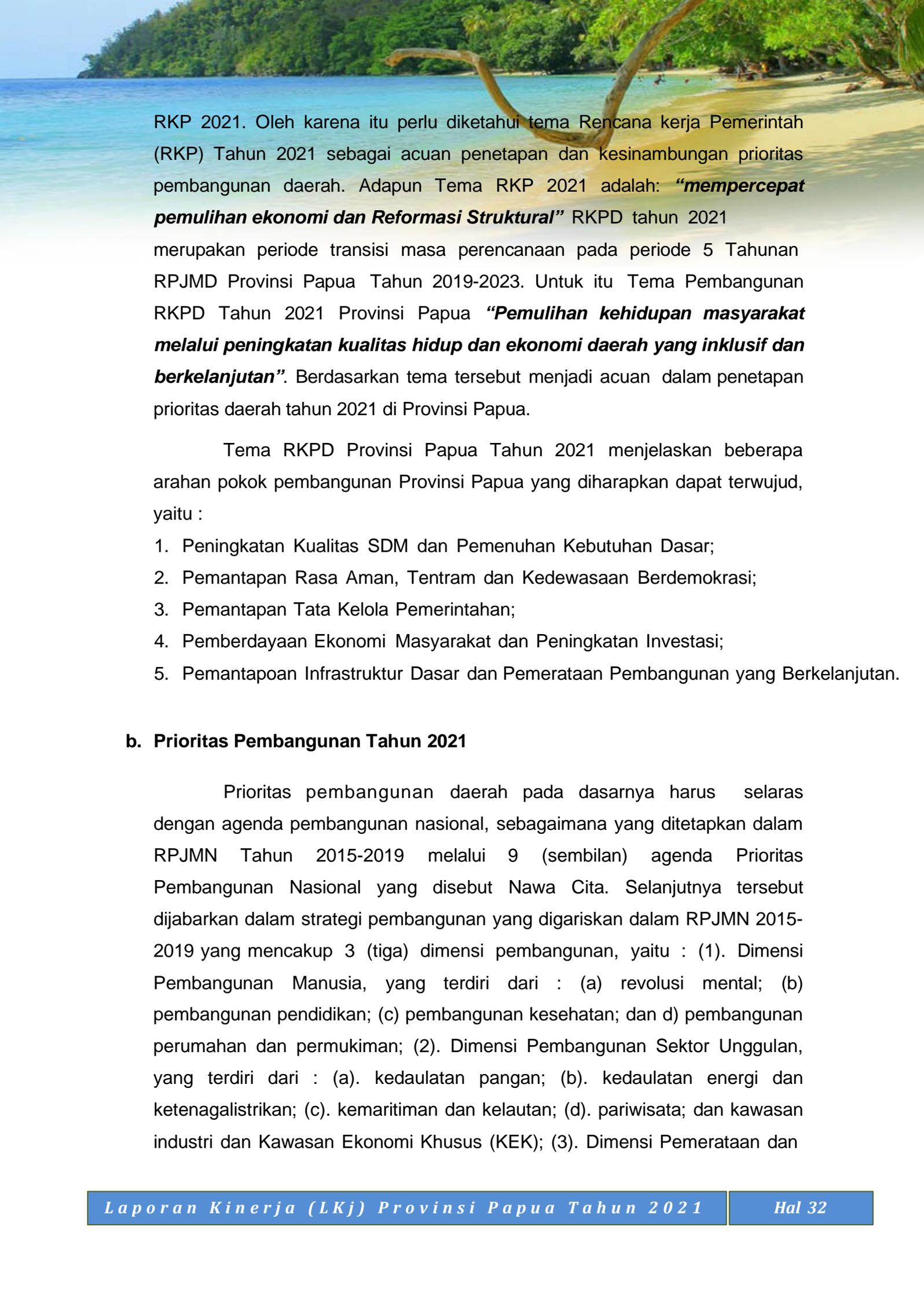


Kedudukan RKPD Tahun 2021 Provinsi Papua, dalam RPJMD Provinsi Papua ialah periode transisi. Oleh Sebab itu sesuai dengan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019–2023, maka Penyusunan Program Prioritas Tahun 2021 di Provinsi Papua di landaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Papua guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, upaya pencapaiannya di jabarkan secara lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2021 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang jelas, sederhana, terukur dan dapat tercapai dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahun 2021 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua bergeser dari *money follow function* menuju *money follow priority program*, yaitu alokasi anggaran diarahkan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah guna memenuhi target sasaran RPJMD dan SPM yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan system perencanaan dan penganggaran program prioritas daerah disusun berdasarkan aspek holistik, tematik, integrative dan spasial. Hal ini selaras dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran, bahwa penganggaran yang disusun harus berbasis kepada prioritas. Penguatan penganggaran akan diberikan lebih kepada usulan pembangunan yang memiliki keterhubungan dengan prioritas dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Prioritas daerah merupakan bagian dari prioritas nasional, sehingga rencana terhadap pembangunan nasional adalah perwujudan terhadap rencana pembangunan daerah. Selain itu, dalam rangka mengakomodir penegasan urusan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka rangkaian keterhubungan prioritas pembangunan daerah, disinergikan dengan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 harus merujuk kepada tema



RKP 2021. Oleh karena itu perlu diketahui tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagai acuan penetapan dan kesinambungan prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema RKP 2021 adalah: **“mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural”** RKPD tahun 2021 merupakan periode transisi masa perencanaan pada periode 5 Tahunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Untuk itu Tema Pembangunan RKPD Tahun 2021 Provinsi Papua **“Pemulihan kehidupan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut menjadi acuan dalam penetapan prioritas daerah tahun 2021 di Provinsi Papua.

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 menjelaskan beberapa arahan pokok pembangunan Provinsi Papua yang diharapkan dapat terwujud, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
2. Pemantapan Rasa Aman, Tenang dan Kedewasaan Berdemokrasi;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi;
5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan.

b. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 melalui 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut Nawa Cita. Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : (1). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : (a) revolusi mental; (b) pembangunan pendidikan; (c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman; (2). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari : (a). kedaulatan pangan; (b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (c). kemaritiman dan kelautan; (d). pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (3). Dimensi Pemerataan dan

Kewilayahan, yang terdiri dari : (a). pemerataan antarkelompok pendapatan; (b). perbatasan negara dan daerah tertinggal; (c). pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan (d). pengembangan konektivitas nasional.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, tema RKPD Provinsi Papua tahun 2021, dan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis yang telah di bahas pada Bab II, perkembangan aspek pembangunan daerah baik sektor maupun wilayah, serta fokus arah kebijakan tahun 2021 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua, maka hasil analisis menghasilkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Prioritas Pembangunan daerah
Provinsi Papua Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi; 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji atau **Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT)** Papua untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD dan IKU, RKPD tahun 2021, serta APBD Provinsi Papua tahun 2021. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.5
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.5
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	77.9
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.1
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	85
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	72.6
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	9.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7393.1

6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.8
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.0
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	46.8
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57.7
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	95.00

9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	85
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	90.00
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11.52
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	3.8

	penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	2,7
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2.7
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.6
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.1
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	82.7
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	47370.4
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.67
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	97.84
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	60.49
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	86.08
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	45.00

18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	40.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	70.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	37.54
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	42.87
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	48.38
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	67.49
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	10.25
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	67.01
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	12.30
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	30
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.73



Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	63.95
---	------	----------------------------	--------	-------

**Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	11.202.523.088.803.00	63,73
2	Belanja Langsung	6.374.834.354.836.64	36,27
JUMLAH		17.577.357.443.639.00	100

Sumber: BPKAD Provinsi Papua

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

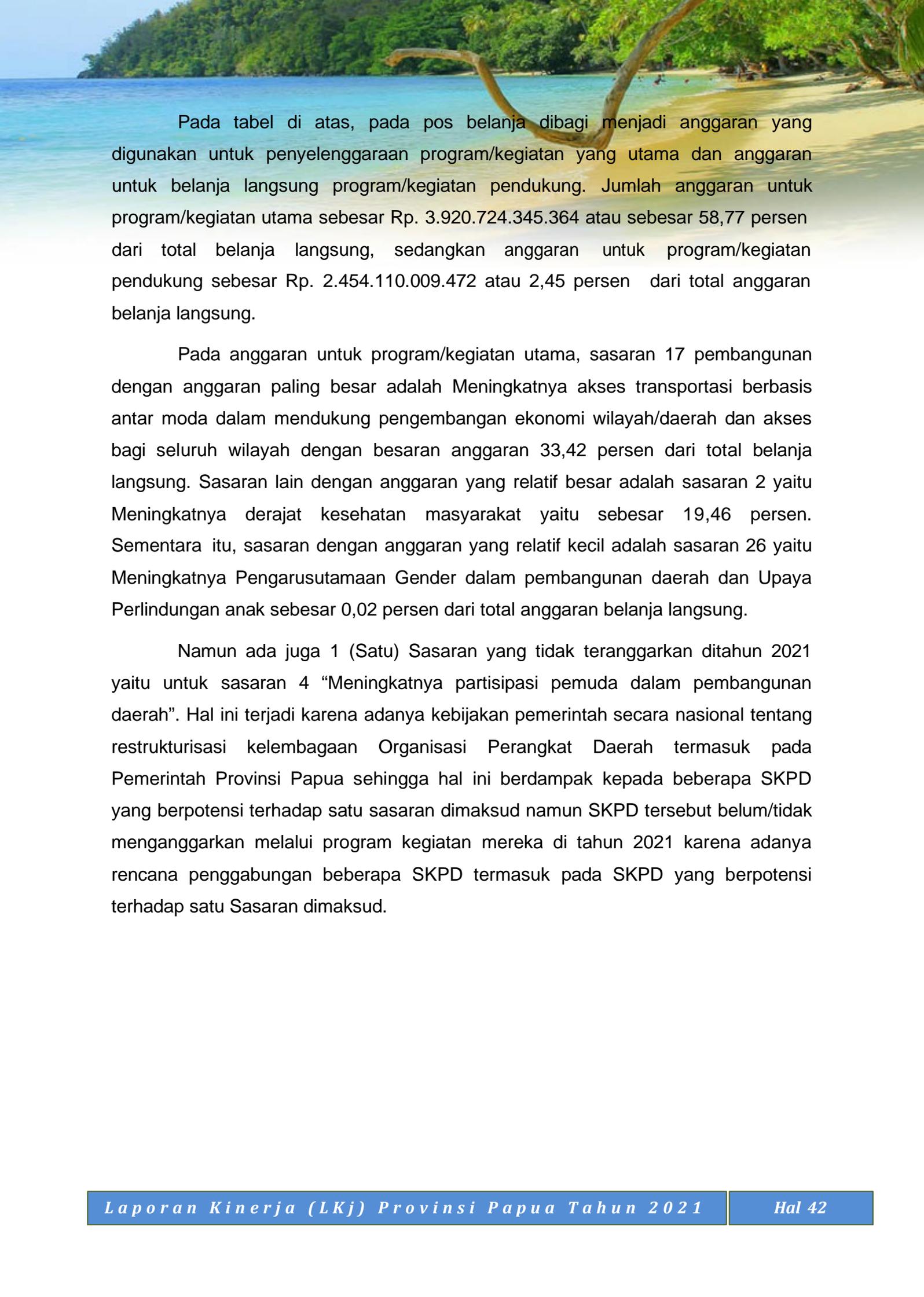
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persen
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	234.363.059.128,-	5.98
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	762.859.659.170,-	19.46
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	274.108.143.658	6.99
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	-	-
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1.659.943.593	0.04
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	177.213.796.709	4.52
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi		
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	2.249.812.708	0,06

9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	34.065.886.754	0.87
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	86.418.958.408	2.20

11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	45.734.815.154	1.17
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	35.255.487.864	0,90
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	8.138.147.861	0.21
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	82.441.375.289	2.10
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1.406.648.011	0.04
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	14.413.403.000	0.37
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	1.200.650.511.934	30.62

18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	423.132.600.120	10.79
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	21.192.672.939	0,54
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	405.983.343.760	10.35
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	38.019.826.673	0.97
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	3.049.884.866	0.08
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	19.173.304.654	0.49
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	3.069.494.947	0.08
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	38.554.229.854	0.98
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	807.333.449	0.02
Anggaran Prioritas IKU		3.920.724.345.364,00	58.77
Belanja Langsung		6.374.834.354.836,00	



Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 3.920.724.345.364 atau sebesar 58,77 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.454.110.009.472 atau 2,45 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran 17 pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah dengan besaran anggaran 33,42 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 2 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu sebesar 19,46 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 26 yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak sebesar 0,02 persen dari total anggaran belanja langsung.

Namun ada juga 1 (Satu) Sasaran yang tidak teranggarkan ditahun 2021 yaitu untuk sasaran 4 "Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah". Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah secara nasional tentang restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah termasuk pada Pemerintah Provinsi Papua sehingga hal ini berdampak kepada beberapa SKPD yang berpotensi terhadap satu sasaran dimaksud namun SKPD tersebut belum/tidak menganggarkan melalui program kegiatan mereka di tahun 2021 karena adanya rencana penggabungan beberapa SKPD termasuk pada SKPD yang berpotensi terhadap satu Sasaran dimaksud.



BAB III





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.5	6,76	90,13
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.5	11,11	96,6
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	77.9	78,89	101,27
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.10	65.93	96,81
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	85.00	93.00	109.00
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	72.06	14.75	20.31
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	9.00	7.00	128.57
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7393.1	100.66	73.44
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.8	100.00	128.50
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.00	100.00	106.40
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	46.08	51.83	110.70
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57.07	50.00	86.70
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	95.00	97.80	102.95
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	70.00
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	90.00	100.00	111.111
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	90.00	100.00	111.111

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100.00
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11.52	13.30	115.45
12	Meningkatnya pendayagunaan	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	3.08	2.42	63.68
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	2.07	0.98	36.29
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2.07	0.85	31.48
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.60	94.20	100.44
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.10	90.00	113.78
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	82.70	111.00	134.22
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ruipiah	0.343	0.449	130.90
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.67	4.50	51.90
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	97.84	96.60	98.73
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	60.49	3.34	5.52
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	86.08	2.00	2.32
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	45.00	60,37	134.15
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	40.00	97.86	244.65

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	70.00	75.00	107,14
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	37.54	40.31	107.30
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	42.87	100.00	233.26
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	48.38	3.84	7.94
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	67.49	97.54	146.37
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	10.25	8.17	79.70
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.01	65.88	98.31
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	12.30	8.85	71.95
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	30.00	3.432	11.44
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.79	79.69	99.87
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	63.95	65.27	102.06

3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	$91 \geq$	Sangat berhasil
2.	$76 \geq 90$	Berhasil
3.	$66 \geq 75$	Cukup berhasil
4.	$51 \geq 65$	Kurang berhasil
5.	$0 \geq 50$	Tidak berhasil

Pengukuran Kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 26 Sasaran Strategis, dan Capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu Akses, Mutu dan Tata Kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara untuk Mutu pendidikan salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator angka melek huruf serta Tata Kelola pendidikan dapat dilihat dari sisi manajemen pengelolaan pendidikan secara kotinu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan”** sebesar 96,00 persen dengan predikat **“sangat berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini, diukur melalui 3 (Tiga) Indikator Sasaran yaitu :

- 1). Rata-rata Lama Sekolah;
- 2). Harapan Lama Sekolah;
- 3). Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf.

Berikut Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Rata-rata lama sekolah	tahun	7,50	6,76	90,13
2	Harapan lama sekolah	tahun	11,50	11,11	96,60
3	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf.	%	77,90	78,89	101,27
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,00

Dari gambaran data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan

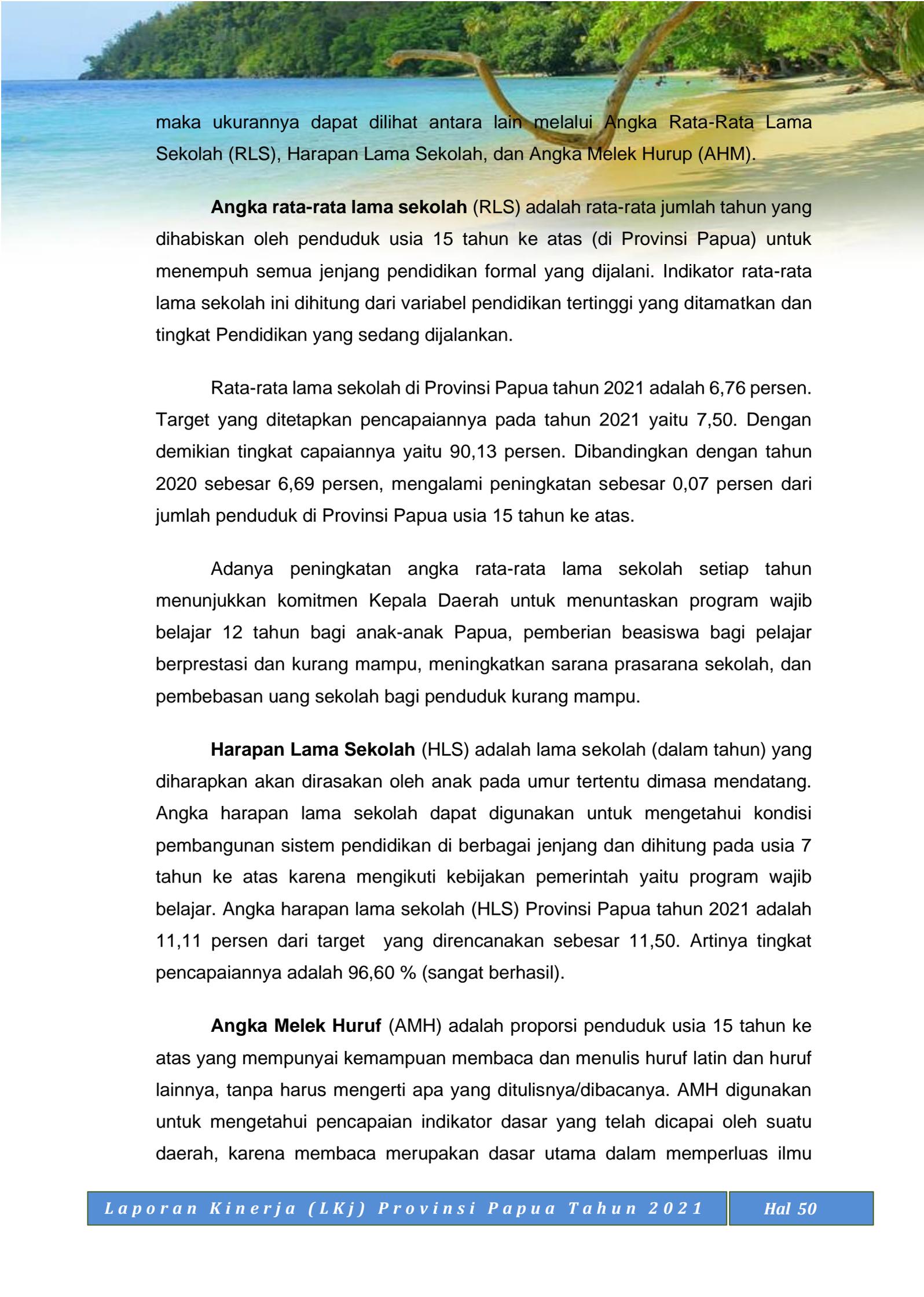
sebagai Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2021 khususnya pada sasaran kinerja rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan penduduk melek huruf yang berusia lima belas tahun ke atas pencapaiannya 96,00. Artinya pencapaian target sasaran strategis pada indikator kinerja sebagaimana dalam Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2021 telah menunjukkan prestasi “sangat berhasil”. Dibandingkan dengan pencapaian sasaran strategis pada 2 (dua) tahun sebelumnya (2019 dan 2020) juga mengalami peningkatan dalam skala “**sangat berhasil**”. Berikut tabel perbandingan dari Sasaran Strategis “**Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan**” ditahun 2019-2021.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.9	6.52	94.5	7.2	6.69	92.92	7,50	6,76	90,13
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11	10.83	98.45	11.2	11.08	98.95	11,50	11,11	96,60
3.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf.	%	75.9	76.79	101.17	76.9	78	101.43	77,90	78,89	101,27
Capaian Indikator kinerja					98,04				97,76	96,00	

Menjadi perhatian bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sejalan dengan pencapaian sasaran strategis khususnya dalam peningkatan aksesibilitas , mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan,



maka ukurannya dapat dilihat antara lain melalui Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf (AMH).

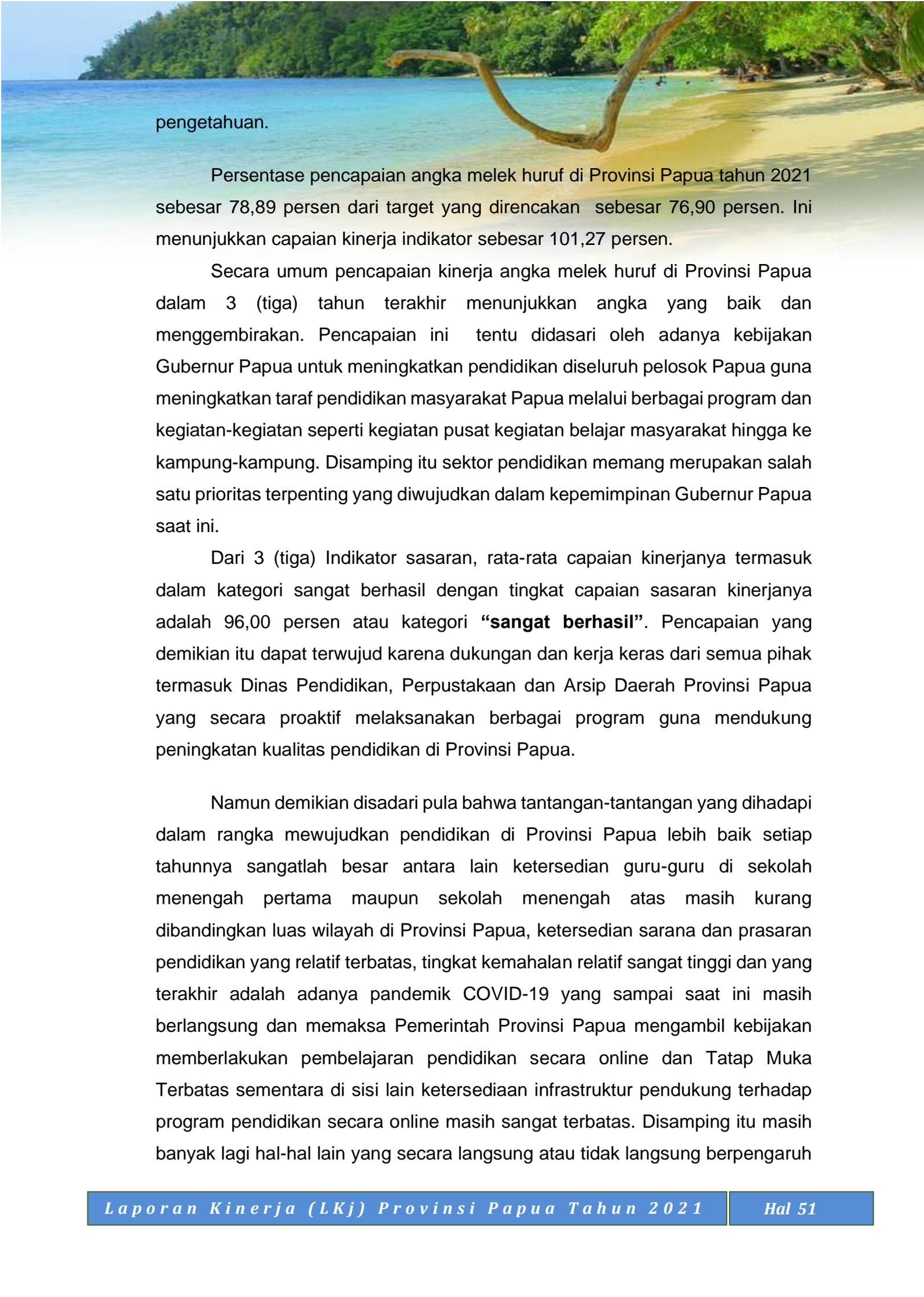
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang dijalankan.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2021 adalah 6,76 persen. Target yang ditetapkan pencapaiannya pada tahun 2021 yaitu 7,50. Dengan demikian tingkat capaiannya yaitu 90,13 persen. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,69 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Papua usia 15 tahun ke atas.

Adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun menunjukkan komitmen Kepala Daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Papua, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan pembebasan uang sekolah bagi penduduk kurang mampu.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Papua tahun 2021 adalah 11,11 persen dari target yang direncanakan sebesar 11,50. Artinya tingkat pencapaiannya adalah 96,60 % (sangat berhasil).

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu



pengetahuan.

Persentase pencapaian angka melek huruf di Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 78,89 persen dari target yang direncanakan sebesar 76,90 persen. Ini menunjukkan capaian kinerja indikator sebesar 101,27 persen.

Secara umum pencapaian kinerja angka melek huruf di Provinsi Papua dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka yang baik dan menggembirakan. Pencapaian ini tentu didasari oleh adanya kebijakan Gubernur Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat hingga ke kampung-kampung. Disamping itu sektor pendidikan memang merupakan salah satu prioritas terpenting yang diwujudkan dalam kepemimpinan Gubernur Papua saat ini.

Dari 3 (tiga) Indikator sasaran, rata-rata capaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian sasaran kinerjanya adalah 96,00 persen atau kategori **“sangat berhasil”**. Pencapaian yang demikian itu dapat terwujud karena dukungan dan kerja keras dari semua pihak termasuk Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang secara proaktif melaksanakan berbagai program guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Namun demikian disadari pula bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua lebih baik setiap tahunnya sangatlah besar antara lain ketersediaan guru-guru di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas masih kurang dibandingkan luas wilayah di Provinsi Papua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif terbatas, tingkat kemahalan relatif sangat tinggi dan yang terakhir adalah adanya pandemik COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung dan memaksa Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan memberlakukan pembelajaran pendidikan secara online dan Tatap Muka Terbatas sementara di sisi lain ketersediaan infrastruktur pendukung terhadap program pendidikan secara online masih sangat terbatas. Disamping itu masih banyak lagi hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh

terhadap proses peningkatan pendidikan di Provinsi Papua.

Sasaran 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” sebesar **96,81** persen dengan predikat “**sangat berhasil**” dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2

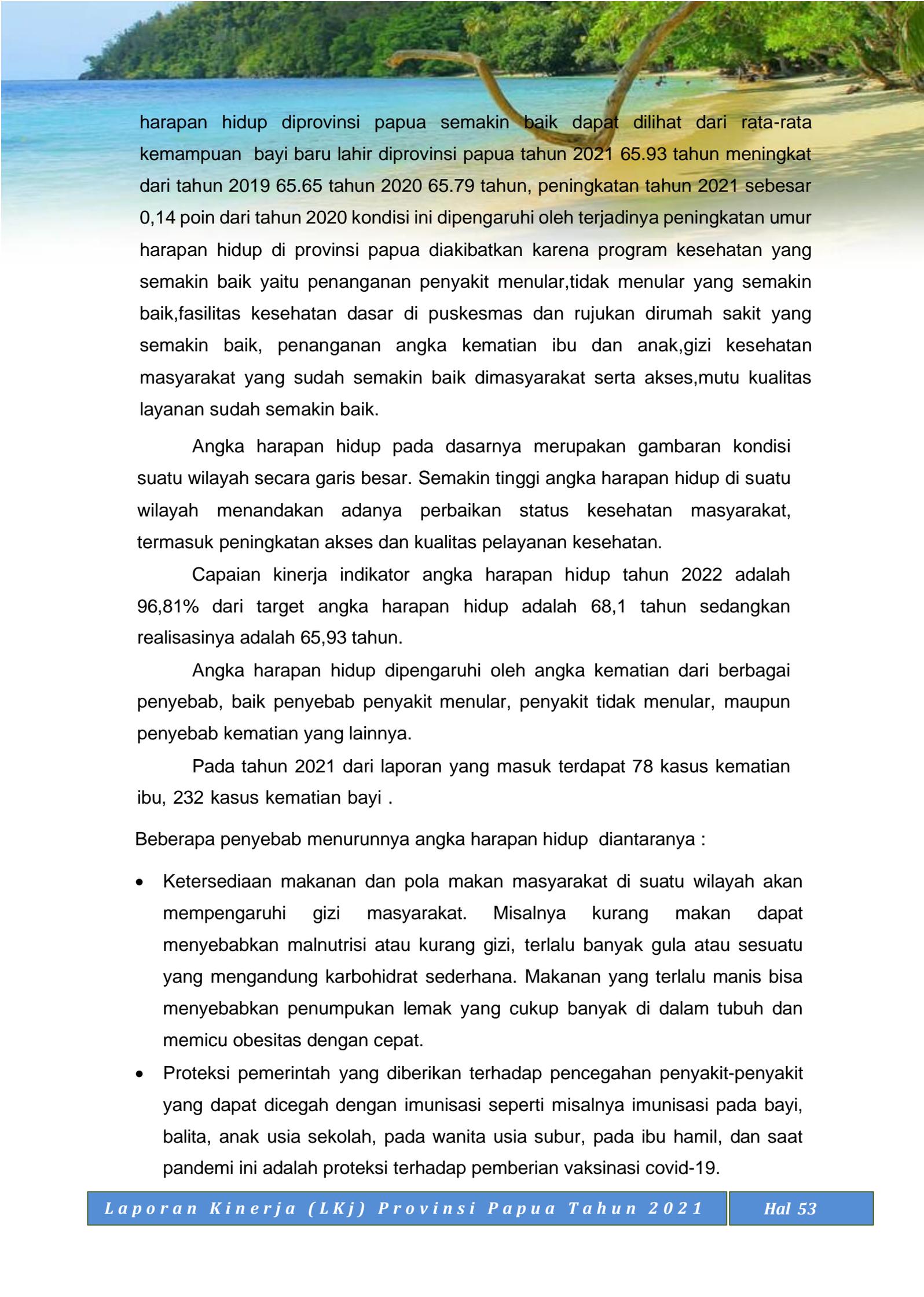
INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Angka Harapan Hidup	tahun	68,1	65,93	96,81
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,81

Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 98.15 persen atau turun sebesar 1,34 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Sasaran 2 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.6	65.65	93.38	67.3	65.79	98.15	68,1	65,93	96,81

Indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat lebih pada angka



harapan hidup diprovinsi papua semakin baik dapat dilihat dari rata-rata kemampuan bayi baru lahir diprovinsi papua tahun 2021 65.93 tahun meningkat dari tahun 2019 65.65 tahun 2020 65.79 tahun, peningkatan tahun 2021 sebesar 0,14 poin dari tahun 2020 kondisi ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan umur harapan hidup di provinsi papua diakibatkan karena program kesehatan yang semakin baik yaitu penanganan penyakit menular,tidak menular yang semakin baik,fasilitas kesehatan dasar di puskesmas dan rujukan dirumah sakit yang semakin baik, penanganan angka kematian ibu dan anak,gizi kesehatan masyarakat yang sudah semakin baik dimasyarakat serta akses,mutu kualitas layanan sudah semakin baik.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

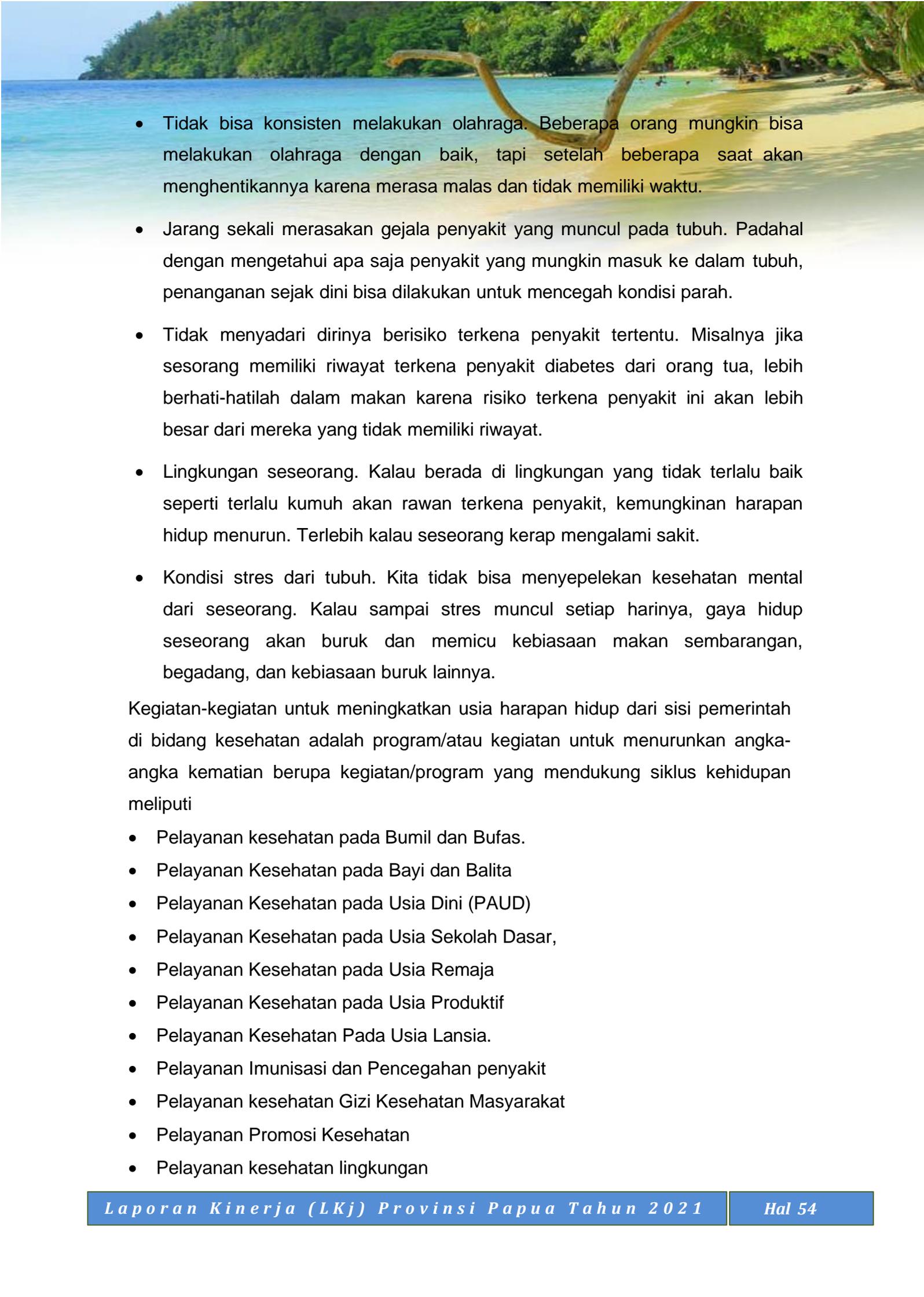
Capaian kinerja indikator angka harapan hidup tahun 2022 adalah 96,81% dari target angka harapan hidup adalah 68,1 tahun sedangkan realisasinya adalah 65,93 tahun.

Angka harapan hidup dipengaruhi oleh angka kematian dari berbagai penyebab, baik penyebab penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyebab kematian yang lainnya.

Pada tahun 2021 dari laporan yang masuk terdapat 78 kasus kematian ibu, 232 kasus kematian bayi .

Beberapa penyebab menurunnya angka harapan hidup diantaranya :

- Ketersediaan makanan dan pola makan masyarakat di suatu wilayah akan mempengaruhi gizi masyarakat. Misalnya kurang makan dapat menyebabkan malnutrisi atau kurang gizi, terlalu banyak gula atau sesuatu yang mengandung karbohidrat sederhana. Makanan yang terlalu manis bisa menyebabkan penumpukan lemak yang cukup banyak di dalam tubuh dan memicu obesitas dengan cepat.
- Proteksi pemerintah yang diberikan terhadap pencegahan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti misalnya imunisasi pada bayi, balita, anak usia sekolah, pada wanita usia subur, pada ibu hamil, dan saat pandemi ini adalah proteksi terhadap pemberian vaksinasi covid-19.

- 
- Tidak bisa konsisten melakukan olahraga. Beberapa orang mungkin bisa melakukan olahraga dengan baik, tapi setelah beberapa saat akan menghentikannya karena merasa malas dan tidak memiliki waktu.
 - Jarang sekali merasakan gejala penyakit yang muncul pada tubuh. Padahal dengan mengetahui apa saja penyakit yang mungkin masuk ke dalam tubuh, penanganan sejak dini bisa dilakukan untuk mencegah kondisi parah.
 - Tidak menyadari dirinya berisiko terkena penyakit tertentu. Misalnya jika seseorang memiliki riwayat terkena penyakit diabetes dari orang tua, lebih berhati-hatilah dalam makan karena risiko terkena penyakit ini akan lebih besar dari mereka yang tidak memiliki riwayat.
 - Lingkungan seseorang. Kalau berada di lingkungan yang tidak terlalu baik seperti terlalu kumuh akan rawan terkena penyakit, kemungkinan harapan hidup menurun. Terlebih kalau seseorang kerap mengalami sakit.
 - Kondisi stres dari tubuh. Kita tidak bisa menyepelekan kesehatan mental dari seseorang. Kalau sampai stres muncul setiap harinya, gaya hidup seseorang akan buruk dan memicu kebiasaan makan sembarangan, begadang, dan kebiasaan buruk lainnya.

Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan usia harapan hidup dari sisi pemerintah di bidang kesehatan adalah program/atau kegiatan untuk menurunkan angka-angka kematian berupa kegiatan/program yang mendukung siklus kehidupan meliputi

- Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bu fas.
- Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar,
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia.
- Pelayanan Imunisasi dan Pencegahan penyakit
- Pelayanan kesehatan Gizi Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pelayanan kesehatan lingkungan

Tentunya hampir semua pelayanan kesehatan yang dilakukan baik pelayanan promotive, preventif dan kuratif adalah pelayanan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH). Oleh karena itu semua program atau kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah kegiatan untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup.

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja sasaran “**Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga**” sebesar **109** persen dengan predikat “**sangat berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

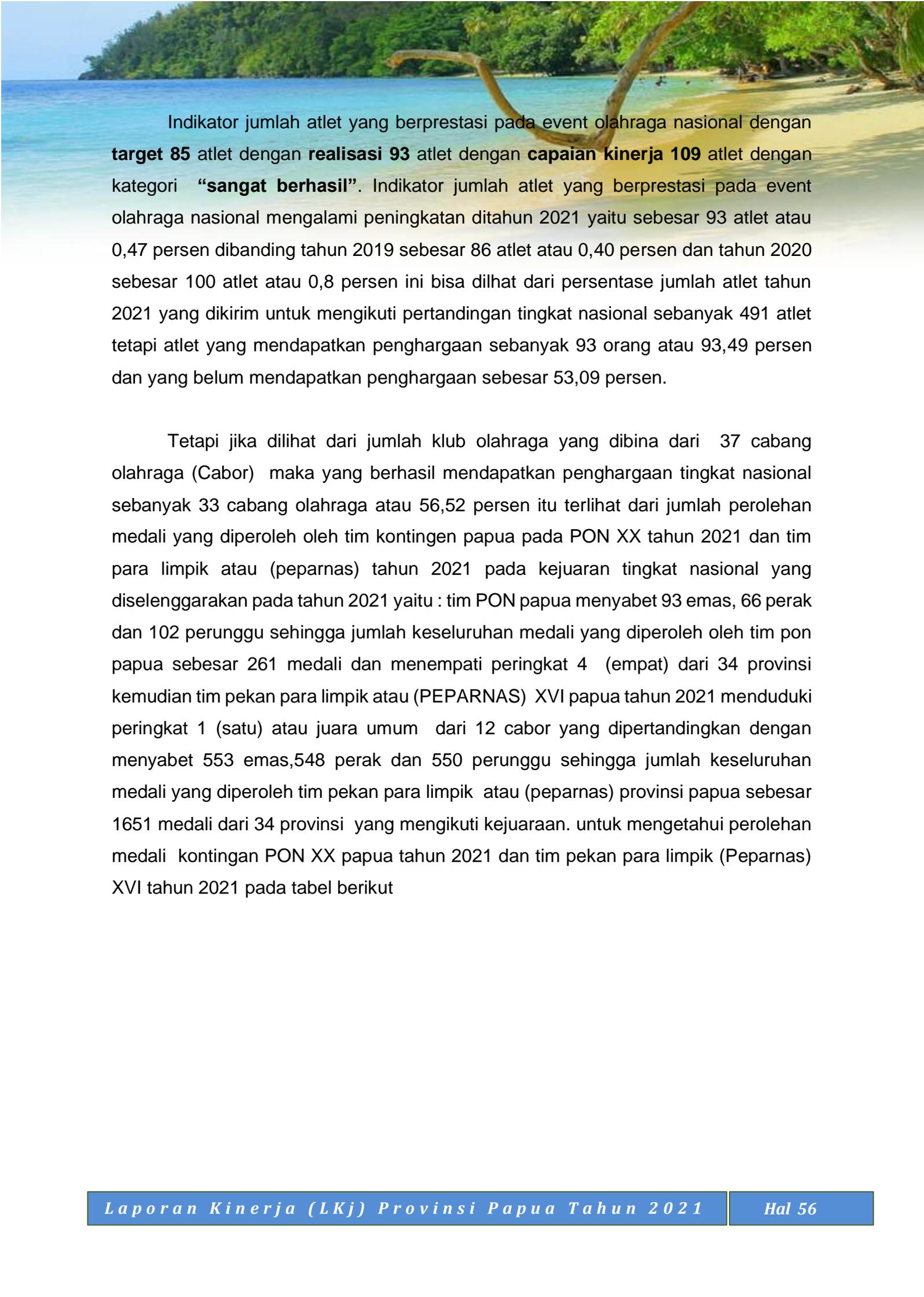
Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	85	93	109
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					109

Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 125 Atlit atau turun sebesar 16 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Sasaran 3 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN
1.	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	40	86	215	80	100	125	85	93	109



Indikator jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dengan **target 85** atlet dengan **realisasi 93** atlet dengan **capaian kinerja 109** atlet dengan kategori “**sangat berhasil**”. Indikator jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional mengalami peningkatan ditahun 2021 yaitu sebesar 93 atlet atau 0,47 persen dibanding tahun 2019 sebesar 86 atlet atau 0,40 persen dan tahun 2020 sebesar 100 atlet atau 0,8 persen ini bisa dilihat dari persentase jumlah atlet tahun 2021 yang dikirim untuk mengikuti pertandingan tingkat nasional sebanyak 491 atlet tetapi atlet yang mendapatkan penghargaan sebanyak 93 orang atau 93,49 persen dan yang belum mendapatkan penghargaan sebesar 53,09 persen.

Tetapi jika dilihat dari jumlah klub olahraga yang dibina dari 37 cabang olahraga (Cabor) maka yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebanyak 33 cabang olahraga atau 56,52 persen itu terlihat dari jumlah perolehan medali yang diperoleh oleh tim kontingen papua pada PON XX tahun 2021 dan tim paraлимпik atau (peparnas) tahun 2021 pada kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan pada tahun 2021 yaitu : tim PON papua menyabet 93 emas, 66 perak dan 102 perunggu sehingga jumlah keseluruhan medali yang diperoleh oleh tim pon papua sebesar 261 medali dan menempati peringkat 4 (empat) dari 34 provinsi kemudian tim pekan paraлимпik atau (PEPARNAS) XVI papua tahun 2021 menduduki peringkat 1 (satu) atau juara umum dari 12 cabor yang dipertandingkan dengan menyabet 553 emas, 548 perak dan 550 perunggu sehingga jumlah keseluruhan medali yang diperoleh tim pekan paraлимпik atau (peparnas) provinsi papua sebesar 1651 medali dari 34 provinsi yang mengikuti kejuaraan. untuk mengetahui perolehan medali kontingan PON XX papua tahun 2021 dan tim pekan paraлимпik (Peparnas) XVI tahun 2021 pada tabel berikut

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
1	AEROMODELING	NANIK NOFIANTI	2	1		
2	AEROMODELING	SEFNAT MARIAN	1			
3	AEROMODELING	NIXON NIKOLAUS NILLA MAHUZE	1			
4	AEROMODELING	ZAINAL WIDYANTO			1	
5	ANGGAR	VORYN THALYA KIRIWENNO			1	
6	ANGGAR	1. VORIN KIRIWENO 2. SYAFIRA PUTRI FADILA 3. RITA HANDAYANI 4. SISKAKONITA			1	
7	ANGGAR	1. SHARUL 2. IKSAN 3. ANJAS RIAN FORMULA 4. BRENT SAMUEL OPADA			1	
8	ANGGAR	1. TERSA HUBY 2. LUDIA GIAY 3. MAYAWI FINGKREU 4. LIDYA NOVITA TRI. W. SIREGAR			1	
9	ANGKAT BERAT	SRI RAHAYU NINGSIH		1		
10	ANGKAT BERAT	SEMI HISAGE		1		
11	ANGKAT BERAT	SEILA WAIMORY			1	
12	ANGKAT BERAT	ZAKEUS WAKUM			1	
13	ANGKAT BESI	NATASYA BETEYOB		1		
14	ATLETIK	ARNOLDUS GAWAI KAIZE	1			
15	ATLETIK	AGUSTINUS MAHUZE		1		
16	ATLETIK	AMAT SUCIPTO PARAPAT		1		
17	ATLETIK	VINSENSIA AWUTET AMJARAM			1	
18	ATLETIK	DALFINSEN SROYER			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
19	ATLETIK	YUNICKE HERLIN ANDERI, SH			1	Mantan Atlet PPLP
20	BERMOTOR	FAHMI BASAM	1			
21	BERMOTOR	AHWIN SANJAYA	1			
22	BERMOTOR	1. GUPITA KRESNA WARDANA 2. BOY ARBI FEBRI	1			
23	BERMOTOR	1. YOSUA PATTIPI 2. LANTHIAN JUAN	1			
24	BERMOTOR	1. AKBAR AURELIANSYAH 2. NAKAMI VIDI MAKARIM	1			
25	BERMOTOR	NAKAMI VIDI MAKARIM		1		
26	BERMOTOR	BOY ARBI FEBRI			1	
27	BERMOTOR	1. FAHMI BASAM 2. NICKY HAYDEN			1	
28	BERMOTOR	YOSUA PATTIPI			1	
29	BILIAR	JAMES LENGKANG	1			
30	BILIAR	SILVIANA	1			
31	BILIAR	1. SILVIANA 2. NUR SUKMAWATY		1		
32	BILIAR	1. SILVIANA 2. FATIH SETIA UTAMI		1		
33	BILIAR	M. FAIZAL ZAINURI		1		
34	BILIAR	1. HAMKA JAYA 2. BACHRAIN RAUF			1	
35	BILIAR	JAMES LENGKANG			1	
36	BILIAR	YANSEN MEOKBUN			1	
37	BILIAR	M. FAIZAL ZAINURI			1	
38	BILIAR	BACHRAIN RAUF			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
39	BILIAR	JAMES LENGKANG			1	
40	BILIAR	YEMY CICOLAS KOURAT			1	
41	BILIAR	FATIH SETIA UTAMI			1	
42	BILIAR	JAMES LENGKANG			1	
43	BULU TANGKIS	GABRIELA M. MONINGKA			1	
44	BULU TANGKIS	1. ASTY DWI WIDYANINGRUM 2. GABRIELA MEILANI MONINGKA 3. BRIGITA MARCELIA RUMAMBI 4. ESTER NURUMI TRI WARDOYO 5. ANGELICA FEBRIANA TIMPOROK			1	
45	BINARAGA	CORNELIUS AMO	1			
46	BINARAGA	OTO GIDION WANTIK	1			
47	BINARAGA	EDOARDUS APCOWO	1			
48	BOLA BASKET	1. LEA ELVENSIA W. KAHOL 2. OKTOVIANA PIGAY 3. WINA NATHALIA MEKIUW 4. STEFANI NGADERMAN	1			
49	CATUR	CERDAS BARUS	2			
50	CATUR	YOSEPH THEOLIFUS TAHER		1	1	
51	CATUR	1. BAIQ VINAL LESTARI 2. RIDA MUTIANI 3. IVANA MARIA T. LASAMA		1		

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
52	CATUR	1. AGUS SUGIANTO 2. ALBERT JEFRI MEBRI 3. REZA FAJAR NUGRAHA 4. TOMMY SUPRIYANTO			1	
53	CRICKET	1. MARIA BERNADETHA KAMEROP 2. MARIA CORAZON K. WOMBAKI 3. ANIKE LIAN KEKRI 4. KISI SALISA KASSE 5. AMARINA EBE 6. RUTH EVELIN OLUA 7. REDSTYA EVELIN SOSELISA 8. PUTU DIAH AMARAWATI 9. SANG AYU NYOMAN MAYPRIANI 10. NI LUH JAYANTI 11. NI LUH KETUT WESIKA R. DEWI 12. AFISKA LOUHENAPESSY 13. A.A. AYU DIVA ADNYAWATI 14. LENNY STEVINA APAY	1			Mantan Atlet PPLP

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
54	CRICKET	1. NAVALDO EDGAR MAKABORI 2. ROBERT IMMANUEL MRAMRA 3. I KADEK DWI DARMADI 4. A. GEDE AGUNG A.K. 5. YULIAN KAMASAN RONSUMRE 6. IKNASIUS SALAY 7. EDWIN MANGGARA 8. RANDO AGUS PRIBADI M. 9. JIMMY HISAGE 10. STANISLAUS FELENDITY 11. NGAHKAN MADE WIDIASTIKA 12. PUTU YUDHA RITAMA 13. KOMANG KRISNA WICAKSANA 14. FEBRIANTO F. JORDI HEO		1		
55	DAYUNG	STEFANI IBO	2			Mantan Atlet PPLP
56	DAYUNG	1. DORSILA KUMBUBUI 2. SYOME MONIM	1			
57	DAYUNG	1. BATSEBA PUANDI 2. SELA OLCE MONIM		1		
58	DAYUNG	FARIDA THAIME		1		
59	DAYUNG	NOVITA KABEY		1		

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
60	DAYUNG	1. SELA O. MONIM 2. KETRAIDA MONIM 3. BENJAMINA V. MUSI 4. FARIDA THAIME 5. BATSEBA PUANDI 6. SUPRANITA REMATOBI 7. STEVANI M. IBO 8. YOKI H. ENTONG 9. IVON M. DIKE 10. SYOME A. MONIM 11. ESTER Y. DAIMOI (S) 12. DORSILA KUMBUBUI 13. NOVITA KABEY 14. ANITA S. WAMBRAUW 15. ESTER F. DAIMOI (J)	1	1	1	Mantan Atlet PPLP.
61	DAYUNG	1. DORSILA KUMBUBUI 2. YOKI H. ENTONG 3. IVON M. DIKE 4. ESTER YUSTINCE DAIMOI			1	
62	DAYUNG	1. FELIKS YUNUS YEUDA 2. ROIKEL MONIM 3. ANTONIUS SUEBU 4. YULIUS DAIMOE			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
63	FUTSAL	1. PITER M. IREEUW 2. MOHAMAD NAJIB 3. AYUB BALUBUN 4. NIKSON YOGI 5. WENDY B.L. ICK 6. ADITYAS P. WIBOWO 7. PIERE R. SAKWERAY 8. RIVALDO C. RAWAR 9. NELSON SESA 10. ZULFIANDRY DONI RYAN 11. ADRIANSYAH RUNTUBOY 12. F X YOSEP MIKUS TANU 13. PITER E. MARSIAT 14. DANIEL LEIATA	1			
64	DAYUNG	WOLEMUS RAUBABA			1	
65	DAYUNG	1. YOAB DAVE TOKORO 2. AGUS INDIRI			1	
66	GANTOLE	1. SIMSON S. MARSYOM 2. DAUD RUNDI	1			
67	GULAT	REYNA FADLY SAEPUMMILAH	1			
68	GULAT	SUMURUNG SIREGAR		1		
69	GULAT	ANDARIAS M. SROYER			1	
70	GULAT	OLOAN SILALAH			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
71	HOKI	1. ROY RONSUMBRE 2. ALEX RONSUMBRE 3. SURY RUMBEWAS 4. RONAL EVAN KADIWARU 5. PETRUS RONSUMBRE 6. LUKAS MANDOWEN 7. MELKIAS RONSUMBRE 8. FERNANDO KBAREK 9. DORUS MAYOR 10. MELVIN KBAREK 11. MICHAEL MANSOBEN 12. RICARD BRANDO AUNALAL 13. ISAK NATANIEL KROBO 14. CHARLES MARSEL 15. AUNALAL 16. HOSEA A.F. KBAREK 17. SALMON KBAREK	1			
72	HOKI	1. JULIUS R.L.K. RUMAROPEN 2. IRSAYER MANGGAPRO 3. PETRUS BELEKU H.L. BEDA 4. ALFIAN KURUBE 5. GIDEON MANSOBEN 6. JACONIAS ROLY RUMBIK 7. RAYNER YUDHA B. RANDONGKIR 8. CHARLIE CLAUDIO KBAREK 9. DAMES FIRAD MARYEN 10. MELKIAS M. NUMANDERI		1		

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
73	HOKI	1. IRYANI RUMBIK 2. MARA RONSUMBRE 3. SEPTINA BISAI 4. OLIVIA KBAREK 5. DOLVINCE RONSUMBRE 6. YOHANA RONSUMBRE 7. SARAH BISAY 8. HERDYNA RANDONGKIR 9. YUBELINA KBAREK 10. PAULINA RONSUMBRE 11. LINA RUMAROPEN 12. FRANSISKA YARANGGA 13. NOVELINCE RUMBIK 14. SELINA RONSUMBRE 15. NOVELIA OLIVIA KBAREK 16. RUTH BRANSIK		1		
74	JUDO	ILHAM FADILLAH	1			
75	JUDO	DESI RAHAYU	1			
76	JUDO	1. YEWI AGUS SUJATMINTO 2. WARIFER BUKUAP	1			
77	JUDO	1. DEVITA M.L. OBINARU 2. FERONIKA M RUMBEWAS	1			
78	JUDO	KADEK ARFCLINTON MULIAARTHA		1		
79	JUDO	NIRZA			1	
80	JUDO	MOCH. KAISAR MAULANA			1	
81	JUDO	DITA AULIA			1	
82	JUDO	RINUS KOGOYA			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
83	JUDO	1. DESI RAHAYU 2. CINTYA RASTRA WAKARMAMU 3. JHON WAROMI 4. YUKI ARDYANTO 5. DITA AULIA PERMATA PUTRI 6. NOLINCE UROP MABIN 7. KADEK ARFCLINTON MULIAARTHA 8. YOSSI SISWANTO 9. SILVANIA MEYTHI MERAUDJE 10. NADYA CINTYA WAHYUNI 11. MOCH. KAISAR MAULANA 12. RINUS KOGOYA		1		
84	KARATE	CLAUDIO FERNANDO NENOBESI	1			
85	KARATE	SAMICE JUVITA KERLIN MOU	1			
86	KARATE	1. RAZTA N.M. RUMBOKWAN 2. NADINE RIZQI ATHIRA 3. NAILA RIZQI ATHALLA		1		
87	KARATE	NABETH TABUNI		1		
88	KARATE	KURNIAWAN			1	
89	KARATE	1. KURNIAWAN 2. RAHMAD DARMAWAN 3. RIVALDI			1	
90	KARATE	GITHA PUTRI ABHIGAEEL			1	
91	KARATE	ESTER EVELYN V. MEBRI			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
92	KARATE	1. CLAUDIO FERNANDO NENOBESI 2. ARIL MARCHZEL OHEE 3. ARYA CHANDRA PRIATMA 4. FRENGKI MAKSI BOLING LA 5. NABETH TABUNI 6. JUAN BERRY RAHARUSUN			1	
93	KEMPO	1. IYON PIET HEIN NUMBERI 2. MUH RAFIF DHAIFULLAH			1	
94	KEMPO	1. SITI SAFINA RAHARENG 2. SHEILA NURHALIZA			1	
95	KEMPO	SELVIANA RONSUMBRE			1	
96	KEMPO	PAVEL ONAIL DAUD			1	
97	KEMPO	CARLI MATATAR, SE			1	
98	LAYAR	M. FASYA ALDIANSYAH	1			
99	LAYAR	ALDO RIZKI ZULKARNAIN	1			
100	LAYAR	EMMA LEDIA JULIA YAWAN			1	
101	LAYAR	1. ENO ENI YOS HANORSIAN 2. NOFI RISNO			1	
102	LONCAT INDAH	1. ALVIEN AHMAD FRAZANERY 2. ADIL AHMAD IBRA			1	
103	LONCAT INDAH	1. ALVIEN AHMAD FRAZANERY 2. ADIL AHMAD IBRA			1	
104	LONCAT INDAH	1. MAULIDINA KHARISMA PUTRI 2. FANI FEBRIYANTI	1			
105	MENEMBAK	1. SLAMET RIADI 2. ANDREAS YUNUS BOKI	1			
106	MENEMBAK	1. SARMUNAH 2. FANNY F. WULANDARI	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
107	MENEMBAK	1. SLAMET RIADI 2. ANDREAS YUNUT BOKUY	1			
108	MENEMBAK	ANDREAS YUNUT BOKY	1			
109	MENEMBAK	1. SARMUNAH 2. FANY FEBRIANA WULANDARI	1			
110	MENEMBAK	NOURMA TRY INDRIANI	1			
111	MENEMBAK	1. FARID PRAYUDA 2. IRAWAN SAPUTRA	1			
112	MENEMBAK	NOURMA TRY INDRIANI	1			
113	MENEMBAK	FANY FEBRIANA WULANDARI	1			
114	MENEMBAK	1. SARMUNAH 2. FANY FEBRIANA WULANDARI	1			
115	MENEMBAK	SLAMET RIADI		1		
116	MENEMBAK	SARMUNAH		1		
117	MENEMBAK	FARID PRAYUDA		1		
118	MENEMBAK	SLAMET RIADI		1		
119	MENEMBAK	FANY FEBRIANA WULANDARI		1		
120	MENEMBAK	FARID PRAYUDA		1		
121	MENEMBAK	IRAWAN SAPUTRA		1		
122	MENEMBAK	MUHAMMAD CHUWAIZAM		1		
123	MENEMBAK	1. CARLELIS MANUSAMA 2. INTAN NATALIA BAWIA		1		
124	MENEMBAK	CARLELIS MANUSAMA		1		
125	MENEMBAK	ANDREA YUNUS BOKI			1	
126	MENEMBAK	1. ADRI MAULANA 2. FARID PRAYUDA			1	
127	MENEMBAK	FARID PRAYUDA			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
129	MENEMBAK	1. SLAMET RIADI 2. NATANIEL KUNEB			1	
130	MUAYTHAI	M. BAYAN HAMID	1			
131	MUAYTHAI	LEA F. WIKARI	1			
132	MUAYTHAI	JEKSON KARMELA	1			
133	MUAYTHAI	LAMBERT YARISETOUW	1			
134	MUAYTHAI	AULIA N. PRAMUDAWARDANI	1			
135	MUAYTHAI	TIARA L.K. MANONGGA	1			
136	MUAYTHAI	ABDUL RAHMAN		1		
137	MUAYTHAI	RAHMAT R. GOZALI		1		
138	MUAYTHAI	MUH. YULL ALIJA		1		
139	MUAYTHAI	PAULA SARUKE		1		
140	MUAYTHAI	OSKAR S. PIUW			1	
141	MUAYTHAI	M. AGUNG HANAFI			1	
142	MUAYTHAI	Yael K. Awom			1	
143	PANJAT TEBING	1. ABBAS HAMID 2. NESTHY STELLA IRIANI PEDAY	1			
144	PANJAT TEBING	1. TETIH RAGIL ANANG EFFENDI 2. NESTHY STELA IRIANI PEDAI	1			
145	PANJAT TEBING	RAVIANTO RAMADHAN	1			
146	PANJAT TEBING	RAVIANDI RAMADHAN		1		
147	PANJAT TEBING	TRIARA PUTRI RAUDHAH			1	
148	PARALAYANG	SILVIANA BEBBY KUMALASARI		1	1	
149	PENCAK SILAT	1. SUHARDIN IFU 2. LUTFI EBYANTO	1			
150	PENCAK SILAT	PUTRA HIDAYANA	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
151	PENCAK SILAT	1. MIFTIYAH HUSNUL K. 2. DEVI SUTANTI		1		
152	PENCAK SILAT	IVHON ERITETENA		1		
153	PENCAK SILAT	SATRIA JAMRUD		1		
154	PENCAK SILAT	DERYALFI FATHUDIN			1	
155	PENCAK SILAT	WANSYIE ALEXANDRIA W. ITAAR			1	
156	PENCAK SILAT	FREDRIK OKOKA			1	
157	PANAHAN	REZZA OCTAVIA		1		
158	PANAHAN	1. REZZA OCTAVIA 2. BINTANG MAYLA R.P. SAMAR 3. PANDE PUTU GINA ARIESTA		1		
159	RENANG	FARREL A. TANGKAS	1	4	1	
160	RENANG PERAIRAN TBK	SRI WAHYUNI			1	
161	POLO AIR	1. MUH. FADEL IZZULHAQ 2. HASLAN H. 3. AHMAD FAUZY MAPPATABE 4. RENALDI 5. MUH. AGUNG WAHYUDI HK. 6. ABU RIZAL BAKRI 7. IMAM GHOZZALY 8. ABEN WISANDER 9. ELDIN NOVRIZAL 10. MUHAMMAD FADHIL THAMRIN 11. MUH. RIZKY SAPUTRA 12. ALOWESIUS W. GEBZE 13. KORNELIS SIANG WOMSIWOR			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
162	RUGBY 7'S	1. RONALD DEMENA 2. JHON HERMAN WALLY 3. ZERUYA RUMAROPEN 4. MICHAEL MEBRI 5. GERALDUS APOKPITS 6. YAKOB BEANAL 7. NATHAN ANINAM 8. FREDDY JOKU 9. JHON RIZAL KAWAY 10. SEPTINUS OYAITOUW 11. ABRAHAM TAIME 12. NGANOP TAPLO	1			
163	RUGBY 7'S	1. SISILIA SOWAY 2. MARICE OLUA 3. MEGAWATI KAINAKAIMU 4. APRILIA YAPSENANG 5. JEANIT G.S. MANSI 6. LINCE DEGEI 7. DINA VERDINANDA OLUA 8. INA YAHMIN 9. YUSTINA DEDA 10. SERLY A. MATINDAS 11. RIBKA EPA 12. KELEMENTINA MOIWEND		1		
165	SELAM	FARADHILAH A. HEHANUSSA	1			
166	SELAM	VERI DWI IRJAYANTO	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
168	SELAM KOLAM	MARGARETHA HERAWATI	1			
169	SELAM KOLAM	ANNISA FABIOLA	1			
170	SELAM LAUT	ANNISA FABIOLA	1			
171	SENAM AEROBIK	1. SONYA A. AKWILA LUTRUN 2. GRACE L. MAICEL SAMSANROY	1			
172	SENAM ARTISTIK	ABIYU RAFI	1		2	
173	SENAM ARTISTIK	AUDI ASHARI ARIF		1	2	
174	SENAM ARTISTIK	1. ABIYU RAFFI 2. AUDI ASHARI ARIF 3. SEPTIAN HUTAGALUNG			1	
175	SEPAK TAKRAW	1. MARIA MAKDALENA ASARIBAB 2. DINA 3. YULI KOMBONG		1	1	
176	SEPAK TAKRAW	1. MARIO S.B. ANTARIBABA 2. MUH RIJAL NUR 3. HENDRA KURNIA BACHARI 4. LA ARJUN 5. RANDI PAGALLA 6. IBRAHIM 7. RIVALDO G.F. FONATABA			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
177	SEPAK TAKRAW	1. DINA 2. YULI KOMBONG 3. MARIA ASARIBAB 4. FATIMA 5. HIKMAH HC 6. ROSA ASARIBAB 7. MINCE KORWA			1	
178	SEPAK TAKRAW	1. MARIO S.B. ANTARIBABA 2. HENDRA KURNIAWAN BACHARI 3. LA ARJUN 4. MUH RIJAL NUH 5. RANDI PAGALLA			1	
179	SEPAK TAKRAW	1. MARIA MAKDALENA ASARIBAB 2. DINA 3. FATIMA 4. NURHIKMA HC 5. YULI KOMBONG			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
180	SEPAK BOLA	1. AGUSTINA KWANO 2. KETLIN YULIA ENTHONG 3. REMINI RUMBEWAS 4. RUTH WAMBLOLO 5. DEBORA PAGAWAK 6. ANGGI JIGIBALOM 7. YULIANA INFAINDAN 8. EMA AWES 9. SELLY WUNUNGGGA 10. MIRA KAROBA 11. LASLEN TABUNI 12. INA PAULANDA WETIPO 13. MADELAIN PIGOME 14. MEGAWATI KAIGERWE 15. YULIANA YENI ONGGE 16. FENI BINSBAREK 17. LIZA MADJAR 18. EMA KARAFIR 19. MARSELA AWI 20. MARLISYE MANDOSIR	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
181	SEPAK BOLA	1. ADZIB ALHAKIM ARSYAD 2. JHON PIGAI 3. JEFRON SITAWAN 4. ARI WAKUM 5. RANDY HANSON CHRISTIAN MAY 6. IMANUEL BASNA 7. ALPONS MIGAU 8. BILL HEIN DICKY KENO 9. HERMANDO WALILO 10. YETER AMOHOSO 11. ARODY UOPDANA 12. I NYOMAN ANSANAI 13. SALVADOR AYOMI 14. GIOVANI J.H.D. NUMBERI 15. MARTHIN ALESANDRO DUSAY 16. FIRMAN SYAHBAS 17. RICKY RICARDO CAWOR 18. CALVIN RERING 19. RAFIKO B. NAWIPA 20. SAMUEL GIDEON BALINSA	1			
182	SEPATU RODA	DAVE EMANUEL ABEL	1			
183	SEPATU RODA	GHEA I.K. RACHMAN	1			
184	SEPATU RODA	JEREMIAH WIHARDJA	1			
185	SEPATU RODA	DEITALIANIS STEGRIAN	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
187	SEPATU RODA	DINDA SALSABILAH	1	1		
188	SEPATU RODA	ZHAWA HARMALIA PUTRI	1		1	
189	SEPATU RODA	SINDU ADILIHUNG	1		1	
190	SEPATU RODA	1. DHINDA SALSABILA 2. DEISTALIANA STEGRIAN 3. GHEA IVANA KUSUMA RACHMAN 4. NABILA RAHMAN		1		
191	SEPATU RODA	RAEHAN JULIO PUTRA			1	
192	SEPATU RODA	1. AHMAD ADAM SURIADIN 2. M. BAGUS LAKSMENDRA 3. DAVE EMANUEL ABEN 4. JEREMIA MIHARDJA			1	
193	SEPATU RODA	1. GHEA IVANA K. RACHMAN 2. DEITALIANIS STEGRIAN 3. DHINDA SALSABILA 4. ZHAHWA HATMALIA PUTRI			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
194	SOFTBALL	1. SILVIA SONGYANAN 2. FERNANDA REVALIN TULAK 3. CICILIA COSTAPINA KUBIARI 4. ADELAIDE TANIA WAROMI 5. YULIANCE ALUA 6. ESTER KRESLEY TIWA 7. BARBALINA ROLANDNY BLESS 8. GRASELA GABRIEL FAIDIBAN 9. DIAN SARI MARTHIN 10. RAGGIANA LEBERTI WAROMI 11. INGGRID GARNASI KREY 12. INTAN WAROMI 13. EPHAFRADYTA KASEH 14. YEMIMA JOHANNA B. ASARIBAB 15. ANA BALANDINA MARANDOF	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
195	SOFTBALL	1. SEM AMOS KADAM 2. MIKHA ROY MSEN 3. DERGANTARA A. PRASETYO 4. AXEL MARANI 5. EFRAIM IMANUEL KMUR 6. HENDRA DANIEL FAIDIBAN 7. MUSA Y. ALOYSIUS BOSEREN 8. FRANS MUSA LIUW 9. OTTOW GEISLER SAMPE 10. JULIANO AKWAN 11. ROKI ITLAY 12. PITER PETRUS MABEL 13. HOWLIE ANGGARA KASEH 14. LEONARD M. ONGKI UDUAS 15. SEBASTIAN HAMOKWARONG			1	
196	TAEKWONDO	GLORYA RINNY KELEYAN	1			
197	TAEKWONDO	ELFIRA			1	
198	TAEKWONDO	PRADITO DAMAS PRADANA			1	
199	TARUNG DERAJAT	IMANUEL B.C. FAKDAWER	1			
200	TARUNG DERAJAT	BEATRIKS ARWAM	1			
201	TARUNG DERAJAT	AKDAMINA SUSANA EPAA	1			
202	TARUNG DERAJAT	ROBERTUS ASSO	1			
203	TARUNG DERAJAT	ELIM TABUNI		1		

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
204	TARUNG DERAJAT	ALEX ASYEREM		1		
205	TARUNG DERAJAT	DARLIN ASSO		1		
206	TARUNG DERAJAT	WIMPI WALILO			1	
207	TARUNG DERAJAT	YULIANA WOSPAKREK			1	
208	TARUNG DERAJAT	MAGDALENA KAMBAYONG			1	
209	TENIS	1. SEPTIANA NUR ZAHIROH 2. NOVELA R.M. PUTRIA SARI		1		
210	TENIS	PRISKA MADELYN NUGROHO		1		
211	TENIS	1. PRISKA MADELYN NUGROHO 2. SEPTIANA NUR ZAHIROH 3. NOVELA REZHA M.P. SARI 4. PAULINA KALEM			1	
212	TENIS	NOVELA R.M. PUTRIA SARI			1	
213	TERBANG LAYANG	ANDRI ABDUL ROHMAN	1			
214	TERBANG LAYANG	1. IRFAN HARIS 2. ULIMAZ ALMIRA	1			
215	TERBANG LAYANG	RISA SETYAWATI	1			
216	TERBANG LAYANG	1. HANS WILLIAM MNUSEFER 2. VLADIMIR MNUSEFER	1			
217	TERBANG LAYANG	1. HANS WILLIAM MNUSEFER 2. SORAYA MENTARI K.	1			

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
218	TERBANG LAYANG	LINA MARDHIANA ,ST		1		
219	TERBANG LAYANG	1. IRVAN HARIS KHOIRUL 2. ULIMAZ ALMIRA BA'ITS			1	
220	TERJUN PAYUNG	1. BONI BERDIAN 2. CECEP KURNIA 3. SUNARTO 4. RISHAN EFENDI 5. SUKISNO	1			
221	TERJUN PAYUNG	NI PUTU IRMA PURNAMA DEWI	1			
222	TERJUN PAYUNG	1. MARGONO 2. MUDJI ERPINTONO 3. SUPRIO 4. WAHYUDI		1		
223	TERJUN PAYUNG	1. FRIDA NATALIA NINGSI SUEBU 2. MARIA MELDA NGAIBAWAR 3. NI PUTU IRMA PURNAMA DEWI			1	
224	TERJUN PAYUNG	SUPRIO		1		
225	TERBANG LAYANG	1. IRVAN HARIS KHOIRUL 2. ULIMAZ ALMIRA BA'ITS			1	

No	Cabang Olahraga	Nama Atlet	Emas	Perak	Perunggu	Ket
226	TINJU	ONA ANTRYNI PAAYS	1			
227	TINJU	SALOMINA YARISETOUW	1			
228	TINJU	SELY WANIMBO		1		
229	TINJU	SYARTIEL ALKILAUS RUMAROPEN		1		
230	TINJU	ERICO KEVIN KEYGEN AMANUPUNJO		1		
231	TINJU	HANA KENDI			1	
232	TINJU	MARIA GEBZE			1	
233	TINJU	NORBERTHA TAYUM KATENG			1	
234	TINJU	GRESTY ALFONS			1	
235	TINJU	JOSUA MANULLANG			1	
236	TINJU	MUHAMMAD TAUFAN PARANSA			1	
237	WUSHU	MORIA MANALU	1			
238	WUSHU	DENI ARIF FADILLAH			1	
239	WUSHU	MARYAM PRISKILA AWEE			1	
240	WUSHU	STEFANO GILBERT RUMAGIT			1	
TOTAL EMAS			93	66	102	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Tahun 2022

Tabel 3.10 Perolehan Medali Emas Kontingen Papua pada Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Papua

NO	CABANG OLAHRAGA	JUMLAH ATLIT	JUMLAH PELATIH	JUMLAH ASISTEN PELATIH	PEROLEHAN MEDALI			JUMLAH	KETERANGAN
					EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	Angkat Berat	114	40	28	20	18	15	53	
2	Atletik	634	221	160	192	191	172	555	
3	Boccia	52	20	16	8	8	6	22	
4	Bulu tangkis	201	73	47	33	33	50	116	
5	Catur	171	60	40	38	38	28	104	
6	Judo	91	32	21	20	20	29	69	
7	Menembak	81	28	19	18	18	18	54	
8	Panahan	171	60	40	30	30	30	90	
9	Renang	318	112	74	136	134	109	379	
10	Sepak Bola CP	44	6	10	1	1	1	3	
11	Tenis Lapangan	45	15	10	12	12	24	48	
12	Tenis Meja	225	79	52	45	45	68	158	
	Jumlah	2147	746	517	553	548	550	1651	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Tahun 2022

Sasaran 4**Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah**

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan, sehingga peran pemuda sebagai subjek dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pemuda diharapkan dapat melakukan perannya untuk mengkawal roda pembangunan baik pada level pemerintahan tetapi juga ditengah masyarakat.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah”** mencapai **20,31** .persen dengan predikat **“Tidak Berhasil”**. Ketidaktercapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

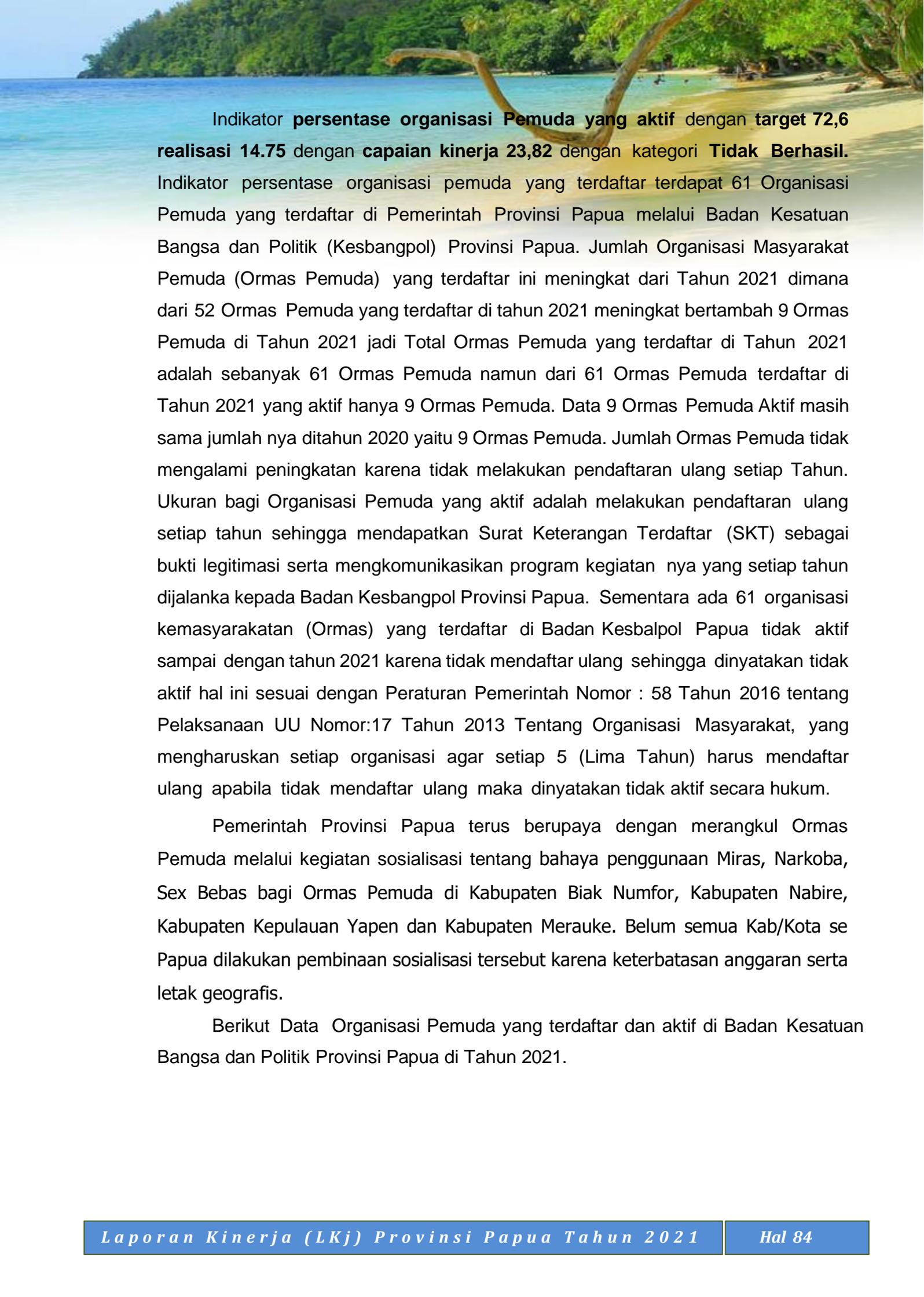
Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	72,6	14.75	20.31
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					20,31

Capaian ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 20.29 persen atau naik sebesar 0.02 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Sasaran 4 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	70.3	16.98	24.15	71.5	14.51	20.29	72.6	14.75	23.82



Indikator **persentase organisasi Pemuda yang aktif** dengan **target 72,6 realisasi 14,75** dengan **capaian kinerja 23,82** dengan kategori **Tidak Berhasil**. Indikator persentase organisasi pemuda yang terdaftar terdapat 61 Organisasi Pemuda yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua. Jumlah Organisasi Masyarakat Pemuda (Ormas Pemuda) yang terdaftar ini meningkat dari Tahun 2021 dimana dari 52 Ormas Pemuda yang terdaftar di tahun 2021 meningkat bertambah 9 Ormas Pemuda di Tahun 2021 jadi Total Ormas Pemuda yang terdaftar di Tahun 2021 adalah sebanyak 61 Ormas Pemuda namun dari 61 Ormas Pemuda terdaftar di Tahun 2021 yang aktif hanya 9 Ormas Pemuda. Data 9 Ormas Pemuda Aktif masih sama jumlahnya ditahun 2020 yaitu 9 Ormas Pemuda. Jumlah Ormas Pemuda tidak mengalami peningkatan karena tidak melakukan pendaftaran ulang setiap Tahun. Ukuran bagi Organisasi Pemuda yang aktif adalah melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sehingga mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi serta mengkomunikasikan program kegiatannya yang setiap tahun dijalanka kepada Badan Kesbangpol Provinsi Papua. Sementara ada 61 organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Papua tidak aktif sampai dengan tahun 2021 karena tidak mendaftar ulang sehingga dinyatakan tidak aktif hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor:17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, yang mengharuskan setiap organisasi agar setiap 5 (Lima Tahun) harus mendaftar ulang apabila tidak mendaftar ulang maka dinyatakan tidak aktif secara hukum.

Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya dengan merangkul Ormas Pemuda melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Miras, Narkoba, Sex Bebas bagi Ormas Pemuda di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Merauke. Belum semua Kab/Kota se Papua dilakukan pembinaan sosialisasi tersebut karena keterbatasan anggaran serta letak geografis.

Berikut Data Organisasi Pemuda yang terdaftar dan aktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua di Tahun 2021.

Tabel 3.13 Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021

No.	Nama Organisasi
1.	Pelajar Islam Indonesia
2.	Pemuda Pentakosta(PEMPAN) Gereja di Indonesia (DPDI) provinsi Papua
3.	Dewan Pimpinan Daerah gerakan muda Indonesia (GEMINDO) Provinsi Papua
4.	Pemuda Panca Marga (PPM)
5.	Pemuda Katolik
6.	Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Provinsi Papua
7.	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)Provinsi Papua
8.	Barisan Muda Papua Bangkit (BMPB) Provinsi Papua
9.	Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Papua

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2022

Sasaran 5

Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan**” mencapai **101.005** .persen dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

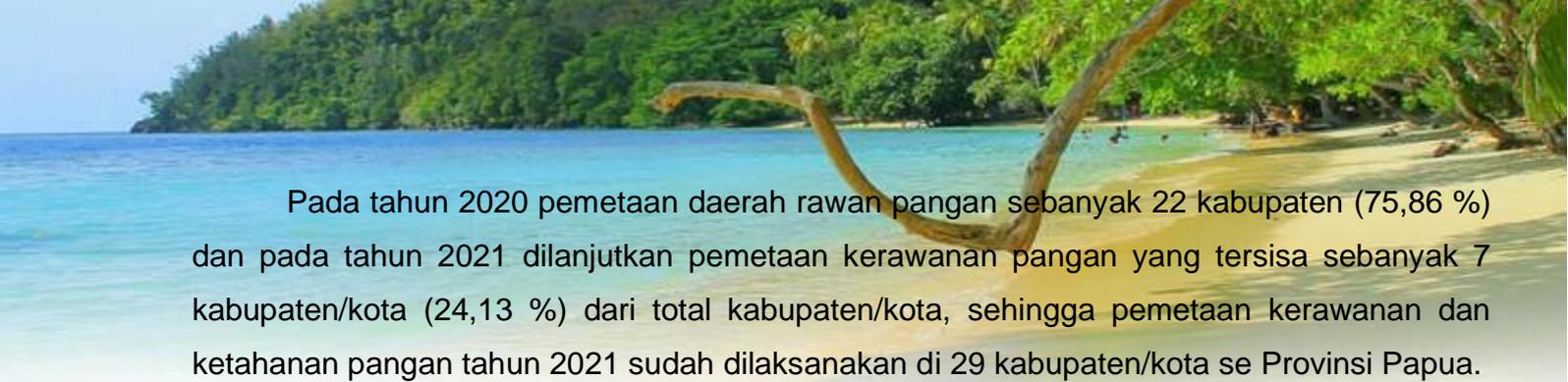
INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	9	7	128.57
2	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7393.1	100.66	73.44
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101.005

Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 72.74 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN									
			2019			2020			2021			
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	
1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	11	25	44	10	22	45.45	9	7	128.57	
2.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7191.8	92.5	1.28	7291.7	7294	100.03	7393.1	100.66	7344	
Capaian Indikator kinerja					22.64				72.74	101.005		

Indikator kinerja **cakupan daerah rawan pangan** dengan **Target 9** Kab/Kota se Papua, **Realisasi 7** Kab/Kota dengan **Capaian 128.57**. Cakupan Pemetaan Rawan Pangan dilakukan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi Papua. Penyusunan FSVA Tahun 2021 diarahkan pada FSVA Kabupaten, yang merupakan analisis lanjutan dari hasil FSVA Nasional dan Provinsi yang telah disusun sebelumnya. Dimana melalui FSVA Kabupaten akan diidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan pada level desa.



Pada tahun 2020 pemetaan daerah rawan pangan sebanyak 22 kabupaten (75,86 %) dan pada tahun 2021 dilanjutkan pemetaan kerawanan pangan yang tersisa sebanyak 7 kabupaten/kota (24,13 %) dari total kabupaten/kota, sehingga pemetaan kerawanan dan ketahanan pangan tahun 2021 sudah dilaksanakan di 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Hasil pemetaan kerawanan dan ketahanan pangan di Provinsi Papua dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Prioritas 1* (Daerah yang rentan pangan sangat tinggi) sebanyak 315 Distrik di 19 kabupaten/kota.
- b. *Prioritas 2* (Daerah yang rentan pangan agak tinggi) sebanyak 72 Distrik di 10 kabupaten/kota.
- c. *Prioritas 3* (Daerah yang rentan pangan tinggi) tersebar di 73 Distrik di 6 kabupaten/kota.
- d. *Prioritas 4* (Daerah yang rentan pangan cenderung tahan pangan) tersebar di 74 Distrik di 10 kabupaten/kota.
- e. *Prioritas 5* (Daerah yang agak tahan pangan) tersebar di 32 Distrik di 7 kabupaten/kota.
- f. *Prioritas 6* (Daerah yang tahan pangan) tersebar di 10 Distrik di 3 kabupaten/kota.

Indikator kinerja **pengeluaran perkapita yang disesuaikan** dengan **Target** 7393.1 Rp.Ribu per kapita, **Realisasi 100.66** Rp.Ribu per kapita dengan **Capaian 71.44** Rp.Ribu per kapita. Khusus Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua yang didasarkan pada data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan NTP di Papua turun 0.25 Persen dengan Indeks NTP sebesar 100.66 pada Desember 2021. Penurunan NTP terjadi karena Indeks Harga yang diterima Petani Naik sebesar 0.39 persen sementara Indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0.65 persen. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau term of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan selama 5 (lima) tahun terakhir seperti tabel berikut.

Tabel 3.16 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Rp.000)	Laju Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (%)
1.	2017	6.996	-
2.	2018	7.159	2,33
3.	2019	7.336	2,47
4.	2020	6.954	- 5,20
5.	2021	6.955	0,01

Berdasarkan data tersebut di atas, maka tingkat pengeluaran rata-rata per kapita selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana titik terendah terjadi pada tahun 2020 dengan laju pengeluaran per kapita minus 5,20 % dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dengan laju pengeluaran per kapita sebesar 0,01 %.

Apabila dikaitkan dengan indeks pengeluaran terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, dengan nilai jual produksi sektor pertanian yang diterima oleh petani di perdesaan, maka nilai tukar petani (NTP) rata-rata sektor pertanian tahun 2021 mencapai 100,66 mengalami penurunan sebesar 2,06 dibanding tahun 2020. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Sasaran 6

Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat

Provinsi Papua memiliki luas 315.091,62 km² dan merupakan Provinsi terbesar dan terluas **pertama** di Indonesia, Papua, memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah suku 255 suku yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk dengan timbulnya konflik karena adanya kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah, ada beberapa motif yang mempengaruhi terjadinya konflik yaitu motif sosial, motif politik dan motif ekonomi.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali, maka perlu penanganan terhadap konflik sosial secara profesional, sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keharmonisan dan kohesitas masyarakat.

Tahun 2021 Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Konflik yang terjadi di Papua sebanyak 34 kali terdiri atas konflik ideologi sebanyak 32 (tiga puluh dua) konflik dan konflik kriminal sebanyak 2 (dua) konflik, jumlah konflik yang ditangani sebanyak 34 (tiga puluh empat) konflik, Untuk mencapai sasaran **“Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat”** diukur melalui jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dengan realisasi 100 persen.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat”** mencapai **128,5** .persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,8	100	128,5
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					128,5

Bedasarkan data Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Provinsi Papua, Konflik yang terjadi di Papua adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Data Konflik Papua

KABUPATEN	KONFLIK IDIOLOGI	KONFLIK KRIMINAL	JUMLAH
KABUPATEN PUNCAK	9	1	10
KABUPATEN INTAN JAYA	8	1	9
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	5	0	5
KABUPATEN YAHUKIMO	4	0	4
KABUPATEN YALIMO	3	0	3
KABUPATEN PUNCAK JAYA	3	0	3
JUMLAH KONFLIK	32	2	34

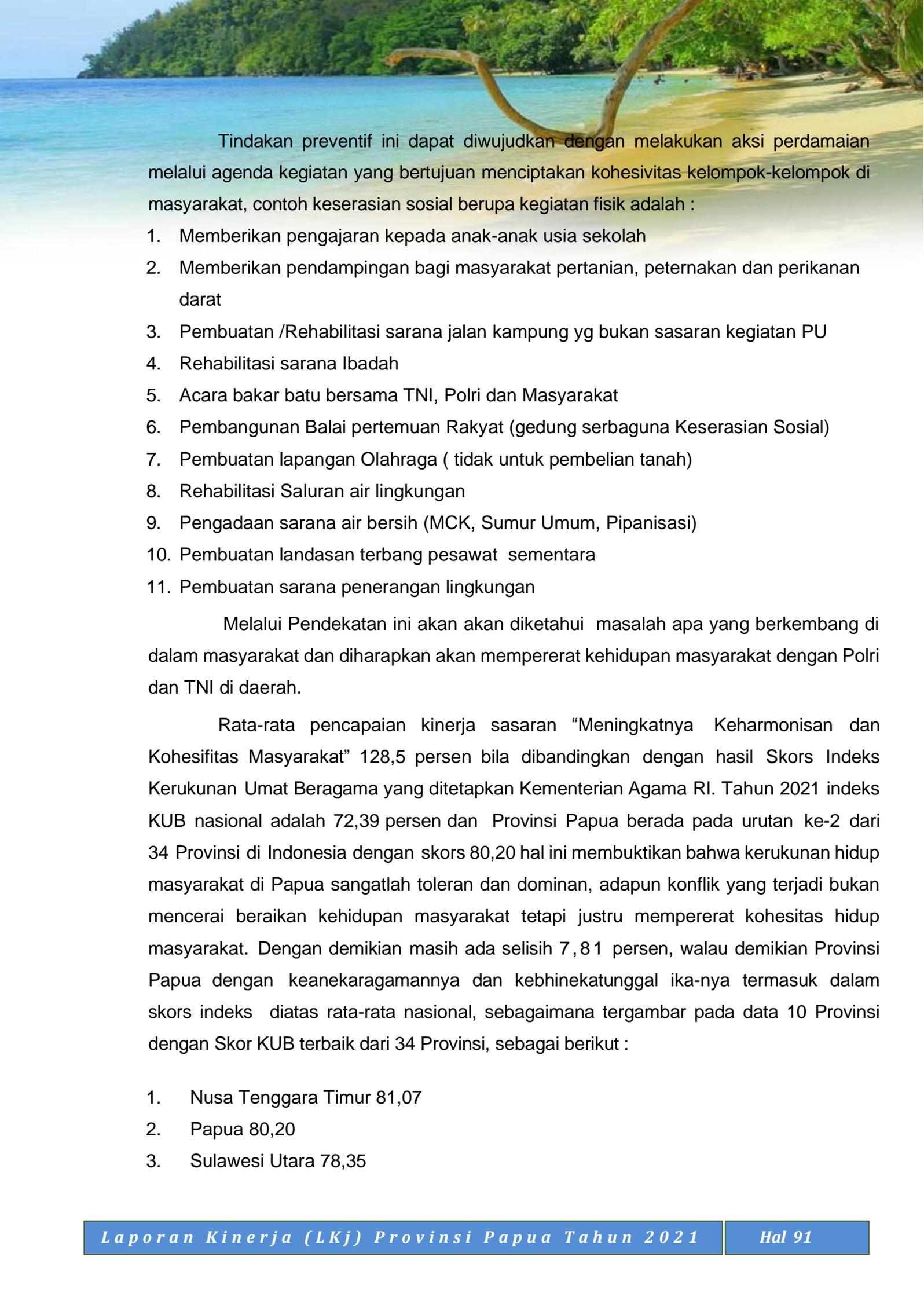
Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2022

Tidak semua Kabupaten di Papua menjadi daerah rawan konflik, namun ada beberapa daerah yang telah di petakan Polri menjadi daerah rawan konflik seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Yahukimo, oleh karena itu perlu dilakukan penyelesaian konflik, walaupun konflik telah ditangani pada daerah rawan konflik pembangunan di Papua tetap berjalan sebagaimana program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko widodo.

Pendekatan terus dilakukan walaupun masih ada riak-riak konflik berikutnya yang akan terjadi, pendekatan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan dan pelanggaran HAM, pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan dengan mengedepankan pendekatan ekonomi dan infrastruktur.
2. Pendekatan sosial/keserasian sosial
3. Pendekatan keamanan
4. Dialog yang dibangun dalam masyarakat dan pemerintah

Pendekatan Keserasian sosial merupakan pendekatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul dan lainnya.



Tindakan preventif ini dapat diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat, contoh keserasian sosial berupa kegiatan fisik adalah :

1. Memberikan pengajaran kepada anak-anak usia sekolah
2. Memberikan pendampingan bagi masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan darat
3. Pembuatan /Rehabilitasi sarana jalan kampung yg bukan sasaran kegiatan PU
4. Rehabilitasi sarana Ibadah
5. Acara bakar batu bersama TNI, Polri dan Masyarakat
6. Pembangunan Balai pertemuan Rakyat (gedung serbaguna Keserasian Sosial)
7. Pembuatan lapangan Olahraga (tidak untuk pembelian tanah)
8. Rehabilitasi Saluran air lingkungan
9. Pengadaan sarana air bersih (MCK, Sumur Umum, PIPANISASI)
10. Pembuatan landasan terbang pesawat sementara
11. Pembuatan sarana penerangan lingkungan

Melalui Pendekatan ini akan akan diketahui masalah apa yang berkembang di dalam masyarakat dan diharapkan akan mempererat kehidupan masyarakat dengan Polri dan TNI di daerah.

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat” 128,5 persen bila dibandingkan dengan hasil Skors Indeks Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan Kementerian Agama RI. Tahun 2021 indeks KUB nasional adalah 72,39 persen dan Provinsi Papua berada pada urutan ke-2 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan skors 80,20 hal ini membuktikan bahwa kerukunan hidup masyarakat di Papua sangatlah toleran dan dominan, adapun konflik yang terjadi bukan menceraikan beraikan kehidupan masyarakat tetapi justru mempererat kohesitas hidup masyarakat. Dengan demikian masih ada selisih 7,81 persen, walau demikian Provinsi Papua dengan keanekaragamannya dan kebhinekatunggal ika-nya termasuk dalam skors indeks diatas rata-rata nasional, sebagaimana tergambar pada data 10 Provinsi dengan Skor KUB terbaik dari 34 Provinsi, sebagai berikut :

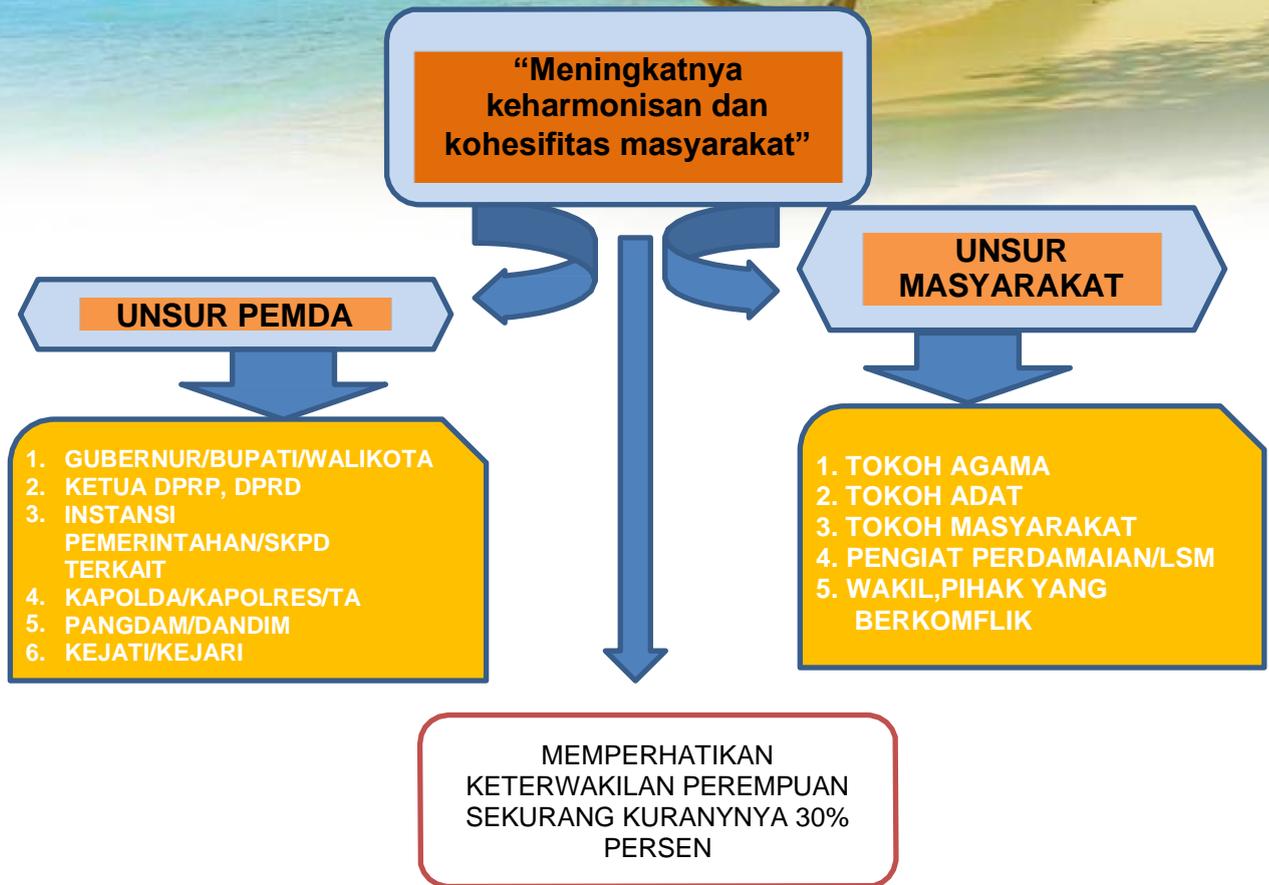
1. Nusa Tenggara Timur 81,07
2. Papua 80,20
3. Sulawesi Utara 78,35

- 
4. Papua Barat 78,63
 5. Bali 77,95
 6. Kalimantan Barat 77,61
 7. Maluku 76,30
 8. Kalimantan Tengah 76,20
 9. Kepulauan Riau 76,20
 10. D.I Yogyakarta, 76,03

Dengan demikian toleransi, kebersamaan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik di Papua.

Penanganan konflik di Papua tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan semata yang cenderung represif. Masyarakat Papua memiliki ikatan sosial yang kuat, menghormati ajaran agama dan patuh pada hukum adat. Oleh karena itu penyelesaian konflik di Papua lebih membutuhkan dialog dengan melibatkan tokoh masyarakat sipil non politik, tokoh lintas agama, tokoh adat, lembaga adat dan pemerintah. Menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Mendeklarasikan kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Dibawah ini terdapat Tabel yang menggambarkan tahap penyelesaian konflik di daerah, sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber Data : Badan KESBANGPOL , 2019

Dibawah ini adalah data jenis konflik yang terjadi di Papua Tahun 2021 sebagai berikut :
Tabel 3.19 Jenis Konflik

No	Tanggal/ Bulan/Ta hun	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Ket
				Luka			Meninggal Dunia			
				TNI	POLRI	SIPI L	TNI	POLRI	SIPIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	6 Januari 2021	Intan Jaya	Kriminalitas (Pembakaran Pesawat terbang PK-MAX milik MAF oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB))	-	-	-	-	-	-	1 Pesawat PK-MAX milik MAF dipiloti A.n. Alex Luferechek habis terbakar
2.	10 Januari 2021	Intan Jaya	Idiologi (Kontak Senjata KKB dengan Anggota Tonif 400)	-	-	-	1	-	-	1 Orang tewas dalam kontak senjata
3.	22 Januari 2021	Intan Jaya	Idiologi (Peneyrangan KKB terhadap Anggota TNI Yonif R.400/BR)	-	-	-	2	-	-	2 org tewas dalam kontak sejata
4.	8 Februari 2021	Intan Jaya	Idiologi Penyerangan KKB terhadap Masyarakat penjual minyak tanah	-	-	-	-	1	-	1 orang tewas a.n. RNR
5.	12 Februari 2021	Intan Jaya	Idiologi (Penembakan oleh KKB terhadap TNI Yonif 400)	1	-	-	-	-	-	1 orang luka
6.	15 Februari 2021	Intan Jaya	Idiologi (Kontak Senjata KKB dengan Anggota Yonif 400)	-	-	-	1	-	-	1 orang TNI dan 3 orang KKB tewas dalam kontak senjata
7.	19 Februari 2021	Puncak	Idiologi (Kontak Senjata KKB dengan Aparat Gabungan TNI, POLRI di Bandara Aminggaru)	-	-	-	-	-	-	1 orang tewas anggota KKB

No	Tanggal/ Bulan/Ta hun	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Ket
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	27 Maret 2021	Puncak	Idiologi Kontak tembak KKB dengan Aparat TNI di Kmapung Makki Distrik Ilaga Utara	3	-	-	1	-	-	1 orang tewas TNI dan 3 orang terluka
9.	8 April 2021	Puncak	Idiologi Kontak Senjata KKB menembak 2 (dua) Guru dan membakar sekolah di Distrik Beoga Kabupaten Puncak	-	-	2	-	-	-	2 orang tewas
10.	12 April 2021	Puncak	Kriminal Helikopter milik PT Esra Air dibakar KKB di Bandara Aminggaru Ilaga Kab. Puncak	-	-	-	-	-	-	Helikopter Jenis MI 8 milik PT Esra Air
11.	14 April 2021	Puncak	Idiologi Kontak snejata KKB menembak tukang Ojek a.n. Udin di Eromaga Distrik Omikia Kab. Puncak	-	-	-	-	2	-	1 Orang meninggal dunia
12.	25 April 2021	Puncak	Idiologi Kontak Tembak KKB menembak Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu di Distrik Beoga Puncak	-	-	-	1	-	-	1 Orang meninggal dunia
13.	27 April 2021	Puncak	Idiologi Kontak Tembak KKB menembak Bratu I Komang Wira Natha Resimen III Pelopor Brimob di Distrik Ilaga Kab. Puncak	-	-	-	1	-	-	1 Orang meninggal dunia
14.	18 Mei 2021	Pegunungan Bintang	Idiologi Kontak Tembak KKB menembak 4 org meninggal dunia, korban (Laksa Mahendra, Satrio Giri, Nusantara Mulkam) di Kampung Yapinakot Distrik Seraubakon Kab. Pegubin	-	-	-	-	-	4	4 Orang meninggal dunia
15.	18 Mei 2021	Yahukimo	Idiologi Terjadi penyerangan oleh OTK 2 org Prajurit Yonif R 432 tewas di Bandara Nolgoliat Dekai Kab. Yahukimo	-	-	-	2	-	-	2 Orang meninggal dunia

No	Tanggal/ Bulan/Tahun	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Ket
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	21 Mei 2021	Puncak	Idiologi Terjadi Kontak tembak KKB dengan Aparat TNI/Polri di Kampng Makki Ilaga Kab. Puncak	-	-	-	-	-	1	1 Orang meninggal dunia
17.	28 Mei 2021	Pegunungan Bintang	Idiologi Penyerangan Pos Polisi Oksamol Pegubin oleh KKB di Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	1	-	1 Orang meninggal dunia (Briptu Mario Sanoi)
18.	03 Juni 2021	Puncak	Terjadi Kontak senjata oleh KKB kepada tukang bangunan di Kampung Eronggobak Distrik Ilaga Kab. Puncak	-	-	-	-	-	1	1 Orang meninggal dunia (Habel Halenti)
19.	Sda	Sda	KKB juga menyerang sekitar Bandara Aminggaru Ilaga Puncak membakar Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara dan Kantor Air Nav di Ilaga Puncak	-	-	-	-	-	-	Terbakar Kantor UPBU dan Kantor Air Nav
20.	23 Juni 2021	Yahukimo	KKB mengahdap truk pengangkut matrial dan menyerang kampong Bingky menganiaya hingga menewaskan 4 orang	-	-	-	-	-	4	4 orang pekerja bangunan tewas di Kampung Bingky Distrik Seradala Kab. Yahukimo
21.	29 Juni 2021	Yalimo	Amuk massa membakar gedung perkanatoran dll di Elelim Ibu Kota Kab. Yalimo setelah Putusan MK mendiskualifikasi Erdi Dabi Calon Bupati Yalimo	-	-	-	-	-	-	Korban materi cukup banyak
22.	9 Juli 2021	Yahukimo	Terjadi kontak senjata antara KKB dengan Tim Satgas TNI/POLRI di Kali El Kampung Masom Kab. Yahukimo	-	1	-	-	-	-	1 polisi tertembak di bagian
23.	24 Juli 2021	Yahukimo	Aksi massa terjadi di Dekai Kab. Yahukimo merusak rumah Bupati dan membakar rumah masyarakat akibat tidka terima pergantian Kepala Distrik	-	-	-	-	-	-	1 rumah masyarakat terbakar dan rumah Bupati di rusak

No	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Ket
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	31 Juli 2021	Yalimo	Terjadi Pembakaran Rumah Sekda Kab. Yalimo dan 10 rumah yang berada di Komplek perumahan pegawai	-	-	-	-	-	-	11 unit rumah terbakar dan rumah Sekda Kab. Yalimo
25.	24 Agustus 2021	Yalimo	Terjadi kembali aksi pembakaran rumah dan menyebabkan masyarakat Yalimo kesulitan mendapat akses kesehatan dan kebutuhan bahan pokok	-	-	-	-	-	2	1 rumah terbakar
26.	13 September 2021	Pegunungan Bintang	Pembakaran Kantor Bank Ppaua, Pasar, Puskesmas dan SD Inpres di Distrik Kiwirok Kab. Pegubini	1	-	-	-	-	1	1 TNI terluka tambah 1 tenaga Medis meninggal, 1 TNI terwas & 1 Brimob
27.	21 September 2021	Sda	Penembakan kembali 1 Prajurit tewas			1				1 Minggal Dunia anak
28.	26 September 2021	Sda	Terkait evakuasi Gbriek/I Meilan			1				
29.	26 September 2021	Intan Jaya	Korban Kontak Senjata Aparat dan KKB	-	-	-	-	-	1	Melpianus umur 2 tahun
30.	29 Oktober 2021	Puncak Jaya	Terjadi pembakaran ktr Airnav kawasan bandar	-	-	-	-	-	-	1 Unit kantor Airnav terbakar
31.	5 November 2021	Puncak Jaya	Terjadi Kontak Senjata 2 Anggota TNI terluka 1 org KKB tewas	-	-	-	-	-	1	1 anggota KKB tewas dan 2 Anggota Polisi terluka dan mendapat perawatan di Timika
32.	9 November 2021	Puncak Jaya	1 org warga sipil tertembak saat melintas	-	-	-	-	-	-	1 org korban an Agustina Hondau

No	Tanggal/ Bulan/Tahun	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Ket
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	14 November 2021	Intan Jaya Papua	Terjadi kontak senjata antara Aparat dan KKB	-	-	-	-	-	-	1 anggota KKB Selon tewas
34.	6 Desember 2021	Intan Jaya	Kontak senjata antara Aparat dan KKB	-	-	-	-	-	1	1 org Anggota KKB tewas
JUMLAH				5	1	2	11	4	16	

Data Korban akibat konflik Pada Tahun 2019 - 2021, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.20 Data Korban Konflik

DATA KORBAN LUKA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KENAIKAN PENURUNAN
TNI	7	4	5	1
POLRI	7	4	1	3
SIPII	112	15	2	13
JUMLAH	126	23	8	
DATA KORBAN MENINGGAL	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KENAIKAN PENURUNAN
TNI	13	1	11	10
POLRI	1	1	4	3
SIPII	65	28	16	12
JUMLAH	79	30	31	

Berdasarkan data tersebut jumlah korban akibat konflik pada Tahun 2019 dan 2021 menunjukkan ada penurunan jumlah korban luka dan korban meninggal baik dari TNI, POLRI ataupun Sipil, dibawah ini adalah matriks capaian sasaran meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun								
		2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat.	Indeks	76,9	0	0	77,30	57,50	74,38	77,8	100	128,5

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian konflik, kerjasama POLRI, TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat perlu ditingkatkan.

Konflik terbanyak adalah konflik idiologi yang diikuti dengan konflik kriminal, Politik walaupun Provinsi Papua memiliki keanekaragaman Suku, Agama dan Ras tetapi sangat jarang terjadi konflik agama. penyelesaian koflik idiologi perlu pendekatan-pendekatan kontinyu sebab masih ada riak-riak mengikuti konflik berikutnya.

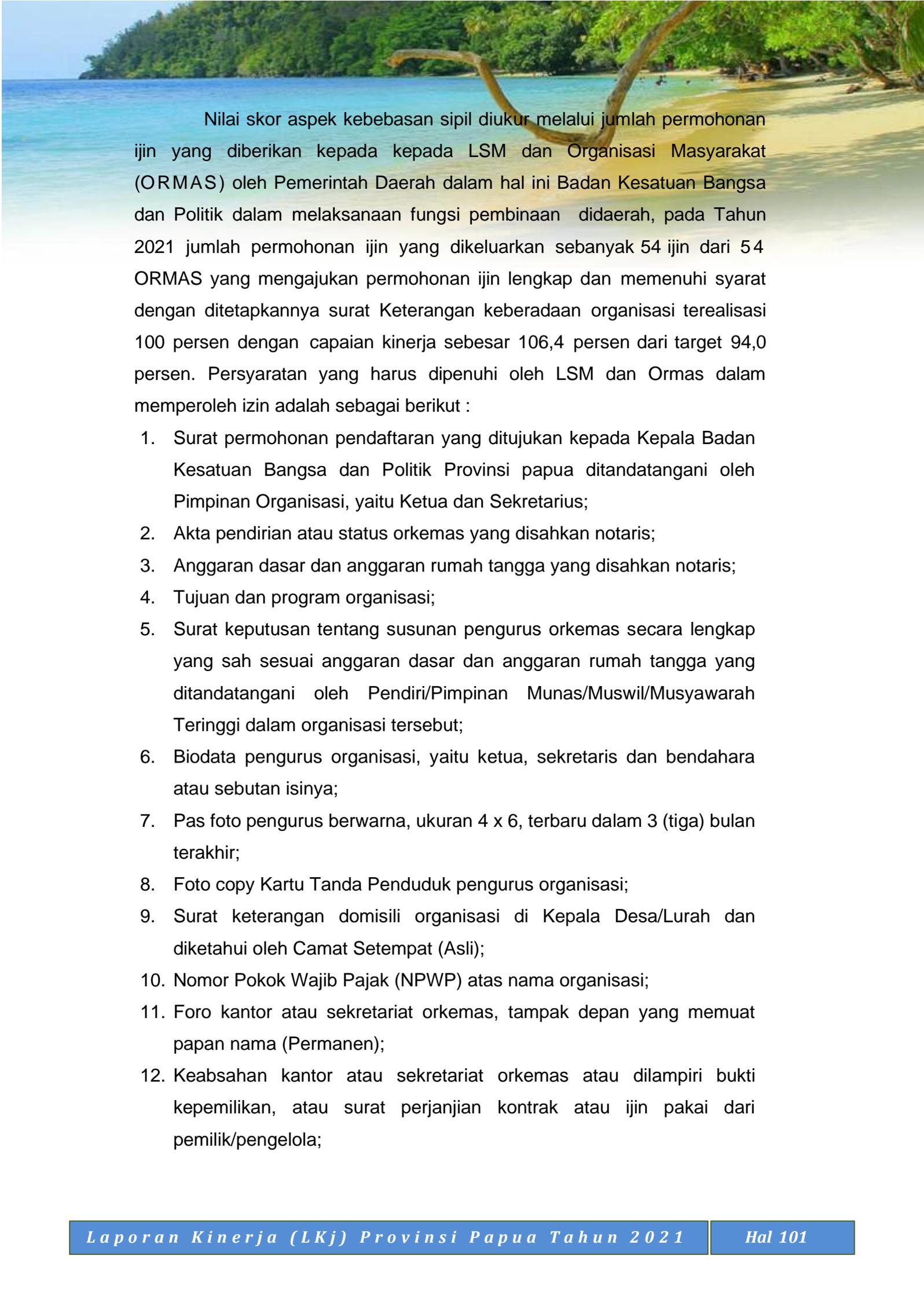
Sasaran 7

Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran 7 (ketujuh) yaitu **“Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi”** diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator sasaran dengan capaian kinerja 101,3 persen dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3(Tiga) indikator sasaran, sebagai berikut :

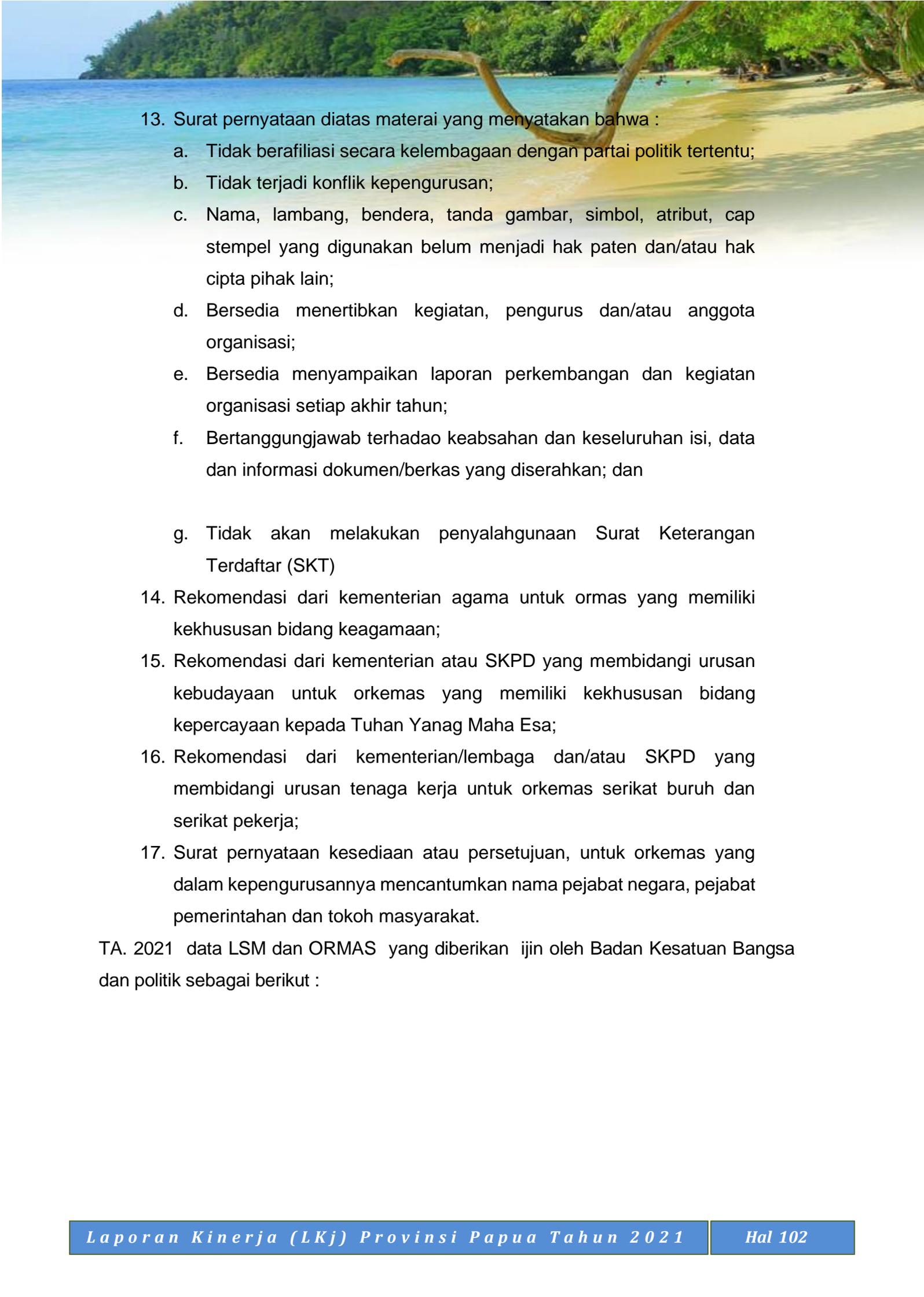
Tabel 3.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	94	100	106,4
2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	46,8	51,83	110,7
3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57,7	50	86,7
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101,3



Nilai skor aspek kebebasan sipil diukur melalui jumlah permohonan ijin yang diberikan kepada LSM dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsi pembinaan di daerah, pada Tahun 2021 jumlah permohonan ijin yang dikeluarkan sebanyak 54 ijin dari 54 ORMAS yang mengajukan permohonan ijin lengkap dan memenuhi syarat dengan ditetapkannya surat Keterangan keberadaan organisasi terealisasi 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 106,4 persen dari target 94,0 persen. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh LSM dan Ormas dalam memperoleh izin adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua dan Sekretaris;
2. Akta pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris;
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
4. Tujuan dan program organisasi;
5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas/Muswil/Musyawahat Teringgi dalam organisasi tersebut;
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
7. Pas foto pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
9. Surat keterangan domisili organisasi di Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat Setempat (Asli);
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;
11. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (Permanen);
12. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas atau dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;

- 
13. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa :
 - a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
 - b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
 - c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
 - d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
 - e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
 - f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
 - g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
 14. Rekomendasi dari kementerian agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 15. Rekomendasi dari kementerian atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 16. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja;
 17. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

TA. 2021 data LSM dan ORMAS yang diberikan ijin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagai berikut :

Tabel 3.32 Data Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2021

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
1.	PERKUMPULAN IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) 220/024; 11 JANUARI 2021	AHU-0058096. AH.01.07 TAHUN 2016, TGL 23 MEI 2016	2021	GEDUNG LPTO KOTARAJA – JAYAPURA – PAPUA
2.	DPD BINA BANGUN BANGSA PROVINSI PAPUA 220/050; 20 JANUARI 2021	SRT PERMOHONAN : 01/DPN.BBB/I/2021. TGL 12 JANUARI 2021	2021	JL. PROKLAMASI 91 JAKARTA PUSAT
3.	LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT PAPUA BERSATU 220/023; 13 JANUARI 2021	SRT PERMOHONAN : 107/LKMPB/XI/2020. TGL 05 DESEMBER 2020	2021	JL. NIGIMY KOMPLEKS PD. IRIAN BHAKTI SANTAROSA JAYAPURA
4.	DPD GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA PROVINSI PAPUA 220/042; 14 JANUARI 2021	AHU-0000724. AH.01.08 TAHUN 2020. TGL 07 AGUSTUS 2020	2021	JL. RUKO PASIFIK DOK II KANOR CAFE De LORD JAYAPURA
5.	ASOSIASI ALUMNI YAMAGATA PAPUA (PAPUA YAMAGATA FRIENDSHIP) 220/044; 14 JANUARI 2021	AHU-0001209. AH.01.05 TAHUN 2020. TGL 12 DESEMBER 2020	2021	Jln. Dr. SAM RATULANGI KANTOR BKPM APO KOTA JAYAPURA – PAPUA
6.	DPD JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (IKPK) 220/043; 14 JANUARI 2021	AHU-0001682. AH.01.07 TAHUN 2015. TGL 26 JUNI 2015	2021	JL. RUKO DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO
7.	YAYASAN ANU BETA TUBAT PAPUA (YABTP) 220/041; 14 JANUARI 2021	AHU-0022336. AH.01.12 TAHUN 2019. TGL 11 NOVEMBER 2019	2021	JL. PRAKIT PEMDA II CIGOMBONG KOTARAJA, BLOK L9
8.	PERKUMPULAN WARGA TULANG SEHAT INDONESIA (PERWATUSI) 220/040; 14 JANUARI 2021	AHU-0009202. AH.01.07 TAHUN 2017. TGL 08 JUNI 2017	2021	JL. DHARMAWANGSA VI RUKO No. 50 JAKARTA SELATAN
9.	YAYASAN GAPAI HARAPAN PAPUA 220/122; 22 FEBRUARI 2021	AHU-0017410. AH.01.04 TAHUN 2020. 30 SEPTEMBER 2020	2021	JL. YOU MAKHE, KELURAHAN DOBONSOLO, DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA
10.	YAYASAN PANTI ASUHAN TUNASBANGSA IMANUEL 220/212; 22 Pebruari 2021	AHU-6147. AH.04 TAHUN 2011, TGL 16 SEOTEMBER 2011	2021	JL ANGKASA BASE" G KELURAHAN ANGKASA PURA KEC. JAYAPURA UTARA

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
11.	YAYASAN PAPUA SIAP MANDIRI 220/123; 22 FEBRUARI 2021	AHU-0014283. AH.01.07 TAHUN 2018. TGL 16 OKTOBER 2018	2021	JL. PASIFIK INDAH III PASIR 2 – JAPURA – PAPUA
12.	YAYASAN SURYA PAPUA 220/119; 22 FEBRUARI 2021	AHU-1764. AH.03.04 TAHUN 2013. TGL 10 APRIL 2013	2021	JL. RAYA BESUM – GENYEM KOTA, RT3/RW.01, KELURAHAN HANGGAI HAMONG, DISTRIK NAMBLONG – KABUPATEN JAYAPURA.
13.	YAYASAN FENANBULU 220/120; 22 FEBRUARI 2021	AHU-0022669. AH.01.12 TAHUN 2017. TGL 12 DESEMBER 2017	2021	KOMP. RAWA BAMBU SATU Jln. D No. 06 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN, (Kode Pos, 12520, Tlp/Fax 02178848321)
14.	DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKUMPULAN PERKASA (DPN PERKASA) 220/154; 10 MARET 2021	AHU-0005715. AH.01.07 TAHUN 2019. TGL 27 MEI 2019	2021	JL. PRAMUKA BUPER WAENA GANG DOLORASA No. 1
15.	PERKUMPULAN PEMUDA KARYA NASIONAL 220/153; 10 MARET 2021	AHU-0011951. AH.01.07 TAHUN 2019. TGL 05 DESEMBER 2019	2021	JL. RAMBUTAN No. 03 KELURAHAN ARDIPURA, KECAMATAN JAYAPURA SELATAN – KOTA JAYAPURA – PAPUA
16.	PALANG MEAH INDONESIA 220/171; 26 MARET 2021	AHU-2 UM.01.01-775. TGL 22 FEBRUARI 2021	2021	Jln. TRIKORA No. 7 DOK V ATAS JAYAPURA – PAPUA
17.	YAYASAN PEMBINAAN MUSLIN AL ANSHOR PAPUA 220/172; 26 MARET 2021	AHU-0004707. AH.01.04 TAHUN 2019, TGL 23 MARET 2019	2021	JL. KRISNA ANGKASA PURART.003/RW.001. DISTRIK JAYAPURA UTARA
18.	YAYASAN GLOBAL AMANAH DONY PEDRO (YGAD) 220/222; 27 APRIL 2021	AHU-0001969. AH.01.04 TAHUN 2021. TGL 20 JANUARI 2021	2021	JL. BESTUUR RT.004/RW.003 KELURAHAN SENTANI KOTA, KECAMATAN SENTANI KOTA – KABUPATEN JAYAPURA
19.	PERKUMPULAN GAHARU PEMUDA MANDIRI 220/221; 27 APRIL 2021	AHU-0004174. AH.01.07 TAHUN 2021. TGL 6 APRIL 2021	2021	JL. JERUK NIPIS KEL WAHNO, KEC ABEPURA, KOTA JAYAPURA

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
20.	LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SUKU KAMORO 220/246; 05 MEI 2021	SRT PERMOHONAN : 105/DPA-LEMASKO/II- 0.1/IV/2021	2021	Jln. YOS SUDARSO Km. 6 WONOSARI JAYA Sp. 4 TIMIKA – KABUPATEN MIMIKA – PROVINSI PAPUA
21.	YAYASAN MILI NATAKA PAPUA 220/247; 05 MEI 2021	AHU-0004941. AH.01.04 TAHUN 2020	2021	KOTARAJA LUAR RT.003/RW.001 KELURAHAN WAHNO – KOTA JAYAPURA
22.	PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA 220/275; 25 MEI 2021	AHU-0004211. AH.01.07 TAHUN 2017. TGL 09 MARET 2017	2021	JL. NABIRE No. 31 DOK VII PERTAMINA, RT.002/RW.III, KELURAHAN IMBI, DISTRIK JAYAPURA UTARA
23.	YAYASAN SURAY NUSANTARA 220/354; 23 JUNI 2021	AHU-0016027. AH.01.07 TAHUN 2015. TGL 13 NOVEMBER 2015	2021	Jl. Ds. SANGGUNG RT. 04/RW. 01, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO – PROVINSI JAWA TENGAH
24.	YAYASAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI GEREJA KRISTEN INJILI IZAAK SAMUEL KIJNE JAYAPURA 220/335; 21 JUNI 2021	AHU-505. AH.01.04 TAHUN 2013. TGL 20 FEBRUARI 2013	2021	Jl. SENTANI 37 ABEPURA – JAYAPURA
25.	YAYASAN SIHAN FIRDAUS ASSO 220/353; 21 JUNI 2021	AHU-0003699. AH.01.04 TAHUN 2021. TGL 04 FEBRUARI 2021	2021	Jl. KOMP MUALAF KELURAHAN ANGKASA, KECAMATAN JAYAPURA UTARA
26.	LEMABAG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA 220/352; 21 JUNI 2021	AJU-0005382. AH.01.07 TAHUN 2021. TGL 29 APRIL 2021	2021	Jl. RAYA SENTANI YPKP No. 57 (SAMPING MESJID AL-AGSA) SENTANI KABUPATEN JAYAPURA
27.	LASKAR ANAK BANGSA ANTI KORUPSI INDONESIA (LABAKI) 220/465; 13 JULI 2021	SRT PERMOHONAN : 002/LABAKI/PPSKT/VII2021	2021	Jl. NABIRE No. 25 DOK VII, RT. 02/RW. VIII, KELURAHAN IMBI, KECAMATAN JAYAPURA UTARA – KOTA JAYAPURA – PROVINSI PAPUA
28.	PERKUMPULAN PENGUSAHA ASLI PAPUA BERSATU 220/466.23 JULI 2021	SURAT PEMOHONAN 01/DPR.PPAPB.PP/IV/2021 TGL 17 APRIL 2021	2021	JL. PRAJAMUKTI II NO.40 ANGKASA PURA JAYAPURA UTARA

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
29.	YAYASAN PENDIDIKAN 45 PROVINSI PAPUA (YAPCN 45)220/464. 05 JULI 2021	AHU-388.AM.01.04 TAHUN 2011, TGL17 JANUARI 2011	2021	JL. FERRY KELAPA DUA ENTROP JAYAPURA
30.	DPD GERAKAN RAKYAT CINTA INDONESIA (DPD GERON PROVINSI PAPUA) 220/430; 05 JULI 2021	AHU-0004843. AH.01.07 TAHUN 2019. TGL 26 APRIL 2019	2021	Jl. ABU ATAS No. 4 RT. 003/RW. 003, KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN ABEPURA
31.	SANGGAR MERAH PUTIH 220/530; 03 AGUSTUS 2021	AHU-781. AH.02.01 TAHUN 2010. TGL 26 MARET 2010	2021	Jl. ARDIPURA BARU II POLIMAK ASRI B3 JAYAPURA
32.	GARUDA MUDA MERAH PUTIH REPUBLIK INDONESIA 220/629; 03 SEPTEMBER 2021	AHU-0013849. AH.01.07 TAHUN 2018. TGL 24 AGUSTUS 2017	2021	PERUM FURIA JALU 2 NOMOR 67 KOTARAJA PAPUA
33.	PEMUDA MUSLIM INDONESIA	AHU-0012551. AH.01.07 TAHUN 2018. TGL 24 AGUSTUS 2017	2021	Jl. RAYA ABEPURA – WAENA (Tembus Yoka Kota Jayapura) JAYAPURA – PROVINSI PAPUA
34.	DPD PEMUDA BATAK BERSATU PROVINSI PAPUA	AHU-0010985. AH.01.07 TAHUN 2019. TGL 17 OKTOBER 2019	2021	Jl. AMPHIBI RUK No. 14, RT. 002/RW. 008 HAMADI, JAYAPURA SELATAN – KOTA JAYAPURA – PROVINSI PAPUA
35.	LEMBAGA SAHABAT ALAM PAPUA (SAPA) 220/688; 17 SEPTEMBER 2021	NMRO Surat Pengantar : 01/DP/SAPA/VIII/2021. TGL 23 AGUSTUS 2021	2021	Jl. POST 7 KOMP. MISSIE, NMOR 77, SENTANI JAYAPURA
36.	DPD GENERASI MUDA KOSGORO (GM KOSGORO) 220/547; 09 Agustus 2021	SKT Sekjen No. 01-00-00/70/D.IV.1/VI/2016 Tgl 14 Juni 2016	2021	Jl. SEKOLAH No. 9 ABEPURA- KOTA JAYAPURA
37.	PERKUMPULAN ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA 220/308; 31 Agustus 2021	AHU-0001587. AH.01.07 THN 2015. Tgl 19 Juni 2015	2021	PERUM GRIYA LESTARI No. D-10 KEL. YABANSAL, DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA – PAPUA

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
38.	DPW KOMISI PENGAWASAN WILAYAH (KPK) TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) PROVINSI PAPUA 220/680; 15 September 2021	AHU-0043267. AH.01.04 THN 2016. Tgl 15 November 2016	2021	Jl. DOYO SENTANI JAYAPURA
39.	LEMBAGA BANTUAN HUKUMTRIDHARMA INDONESIA (LBH TI)PROVINSI PAPUA 220/303, TGL 29 OKTOBER 2021	AHU.0019140.AH.01.07 TH.2015, TGL 23 NOPEMBER 2015	2021	JL. RAYA ABEPANTAI RUKO.TAHITI NO.001 KEL. ASANO ABEPURA PROVINSI PAPUA KOTA JAYAPURA
40.	YAYASAN DUNIA NIES PAPUA 220/804. Tgl 25 Oktober 2021	AHU-0016407. AH.01.04 THN 2021. Tgl 07 Juli 2021	2021	BLACK ORCHID PAPUA Jl. MAHONY LEMBAH FURIA KOTARAJA DALAM, KEL. WAHNO, RT. 05/RW. 05 KOTA JAYAPURA
41.	DPW ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA PROVINSI PAPUA (DPW ARUN) 220/789. Tgl	AHU-0008313. AH.01.07 THN 2017. Tgl 22 MEI 2017	2021	Jl. RAYA ABEPANTAI RUKO TAHITI No. 001 KEL. ASANO – ABEPURA – KOTA JAYAPURA – PROV. PAPUA
42.	GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA (GPI PAPUA) 220/801; Tgl 15 DESEMBER 2021	M-53-HT.03.05 – TH 2019. Tgl 30 Desember 1992	2021	KANTOR PERWAKILAN JAYAPURA – Jl. RAYA SENTANI – ABEPURA, RT. 002/RW. 004, EKL. KOTA BARU, DISTRIK ABEPURA – JAYAPURA
43.	DPD GENERASI MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA PROVINSI PAPUA 220/951; Tgl 23 November 2021	SRT PERMOHONAN NO. 007/DPD-GEMPAR-PAPUA/GUB/XI/2021. Tgl 09 November 2021	2021	Jl. RAYA SUKUN POLIMAK DUA ARGAPURA JAYAPURA SELATAN
44.	DPW MALUKU UTARA BERSATU (MUB) PROVINSI PAPUA 220/952; Tgl 23 November 2021	AHU-0002407. AH.01.07 TH. 2021. Tgl 22 Februari 2021	2021	Jl. RAYA ARGAPURA NO. 5 JAYAPURA – PAPUA

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
45.	ORGANISASI MASYARAKAT SADAR KORUPSI INDONESIA (Msk – INDONESIA) 220/953; Tgl 23 November 2021	AHU-0003419. AH.01.07 TH. 2019. Tgl 25 MARET 2019	2021	JLN. KESADARAN 2 NO. 35A CIPINANG MUARA – JAKARTA TIMUR
46.	DEWAN PRESIDUM DAERAH PAPUA GARDA INDONESIA 220/954; Tgl 23 November 2021	AHU-0011060. AH.01.07 TH. 2019. Tgl 21 Oktober 2019	2021	JL. EMPANG NO. 25 JAYAPURA SELATAN – KOTA JAYAPURA
47.	DPP ALIANSI PEMUDA JALANAN – PAPUA PAROVINSI PAPUA 220/955; Tgl 23 November 2021	SRT PERMOHONAN NO. 002/DPP/API-P/XI/11/2021; Tgl 11 Oktober 2021	2021	JI. PROTOKOLER NO. 1 KEL. KOYA BARAT DISTRIK MUARA TAMI JAYAPURA
48.	LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT PAPUA BERSATU PROVINSI PAPUA 220/1055; Tgl 10 Desember 2021	SRT PERMOHONAN NO. 123/LKMPB-PROV-PAPUA/XI/2021; Tgl 04 November 2021	2021	JI. NY. NIGEMY SANTAROSA, KEL. ARDIPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN – KOTA JAYAPURA
49	PONDOK PESANTREN DDI (DARUD DA'WAH WA-IRSYADI) PROVINSI PAPUA 220/1056; Tgl. 10 Desember 2021	AHU-0001077.AH.01.04.TH 2017; Tgl. 19 Januari 2017	2021	JL. BERINGIN ENTROP-KOTA JAYAPURA
50	DEWAN PENGURUS WILAYAH KOMITE MASYARAKAT DANAU TOBA (DPW-KMDT) PROVINSI PAPUA 220/1057; Tgl. 10 Desember 2021	AHU-0000366.AH.01.07 TH.2020; Tgl. 20 Januari 2020	2021	JL. NUSANTARA (KAMPUNG HORAS) KOTARAJA LUAR DISTRIK ABEPURA-KOTA JAYAPURA
51	ORGANISASI DEWAN MASJID INDONESIA PROVINSI PAPUA 220/1068; Tgl. 14 Desember 2021	SRT PERMOHONAN NO. 97/PW-DWI/VI/2021; Tgl. 09 Desember 2021	2021	PERUM JAYA ASRI BLOK D 8 ENTROP

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
52	UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER PAPUA 220/1065; Tgl. 14 Desember 2021	SRT PERMOHONAN NO.169/D/UOGP/XII/2021 Tgl. 03 Desember 2021	2021	JL. PERKUTUT KOTARAJA-JAYAPURA – PAPUA
53	YAYASAN DINA HASANAH AL-FITRAH 220/1066; Tgl. 14 Desember 2021	AHU-0020137.AH01.04 TH. 2020; Tgl. 26 Oktober 2020	2021	KOMP. PERUMAHAN JAYA ASRI ENTROP JAYAPURA-PAPUA
54	BADAN KERJASAMA PGI-GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) 220/1067; Tgl. 14 Desember 2021	SRT PERMOHONAN NO. 12 /BKS-PGI- GMKI/ENT/0/JPR/XII/2021 Tgl. 23 Agustus 2021	2021	JL. KALI BOBO M. 38 PADANG BULAN ABEPURA – JAYAPURA

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2021

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2021 jumlah permohonan ijin yang diberikan kepada LSM dan Organisasi masyarakat (Ormas) mengalami kenaikan dan penurunan jumlah ijin yang diberikan kepada LSM dan ORMAS, Tahun 2020 merupakan tahun terbanyak jumlah ijin yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada LSM dan ORMAS yang mengajukan pendaftaran.

Tahun 2021 jumlah ijin yang diberikan sebanyak 54 (lima puluh empat), jumlah ini sesuai kelengkapan persyaratan yang dilengkapi oleh LSM dan Organisasi Masyarakat pada saat pendaftaran, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.33 Data Organisasi Masyarakat Sipil yang mendapat Ijin di Tahun 2021

NO.	BIDANG KEGIATAN ORMAS	2019	2020	2021
1.	jumlah permohonan ijin yang diberikan	20	431	54
Jumlah		20	431	54

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2019-2021

Meningkatnya kebebasan sipil untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi merupakan hak asasi manusia.

Realisasi indikator Nilai Skor aspek kebebasan sipil untuk mendukung sasaran **“Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi”** adalah 100 persen, bila di kaitkan dengan Data BPS Tahun 2018-2020 yaitu Simulasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, pada aspek Kebebasan Sipil Tahun 2019 mengalami peningkatan poin 8,72 dibanding Tahun 2018, sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,76 poin dibandingkan tahun 2019, namun demikian capaian IDI Provinsi Papua masih berada pada kategori **“Baik”**. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Indikator–indikator yang mempengaruhi aspek kebebasan sipil (Civil Liberties) no 1-10, hak-hak politik (Political rights) Nomor 11-17 dan lembaga-lembaga demokrasi indikator nomor 18-28, dapat dilihat pada Tabel berikut perkembangan Skor IDI Provinsi Papua Tahun 2019-2020.

Tabel 3.34 Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Papua Tahun 2019 - 2020

No	Indikator	2019	2020
-1	-2	-3	-4
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	54,17	20,83
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	95,65	95,65
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	85,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	75,00
11	Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100,00	100,00
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	98,95	98,95
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	58,63	58,63
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	87,22	87,22
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	48,50	48,50
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	-	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	59,68	62,39
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	77,27	77,27

No	Indikator	2019	2020
-1	-2	-3	-4
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD	61,95	56,13
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	0,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	0,00	0,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00
25	Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	65,79	65,79
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	25,00	16,66
27	Keputusan hakim yang kontroversial	75,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Diolah dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua, 2019-2020

Catatan :

	masuk kelompok indikator aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
	masuk kelompok indikator aspek Hak-Hak politik (Political Rights)
	masuk kelompok indikator aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (Democratic Institutions)

Berdasarkan data tersebut terdapat 2 indikator pada aspek Kebebasan Sipil dengan skor berkategori “buruk” (skor < 60). Indikator tersebut adalah: Dua indikator dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu:

- Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat mengalami penurunan poin sebesar 33,34 pada Tahun 2020;
- Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. penurunan poin sebesar 50 pada Tahun 2020

Namun ada 7 (delapan) indikator dari aspek Kebebasan Sipil lainnya yang mengalami peningkatan dengan kategori “Baik”

Bila dikaitkan dengan sasaran “**Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi**”, Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

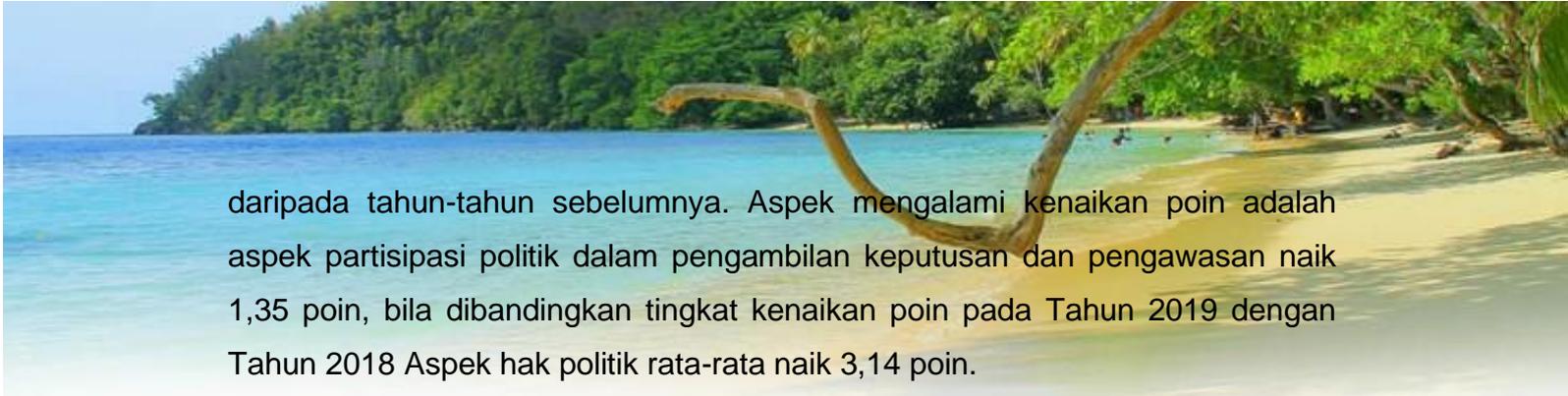
Data BPS Tahun 2020 yaitu Simulasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perkembangan Indeks Variabel IDI Papua, 2018-2019

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2018	2019	2020
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		62,20	65,25	64,54
A	KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)	84,36	93,08	89,32
I.	Kebebasan berkumpul dan berserikat	34,38	100,00	100,00
II	Kebebasan berpendapat	67,35	61,82	25,70
III	Kebebasan berkeyakinan	91,95	94,24	96,92
IV.	Kebebasan dari diskriminasi	89,99	100,00	91,75
B	HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)	47,90	51,16	51,83
V	Hak memilih dan dipilih	69,33	72,47	72,47
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	26,47	29,84	31,19
C	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI	57,05	52,61	53,54
VII	Pemilu yang bebas dan adil	100	83,57	83,57
VII	Peran DPRD	22,36	41,49	36,99
IX.	Peran Partai politik	21,45	10,00	10,00
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	46,33	43,64	39,11
XI.	Peran Peradilan yang independen	100	87,50	100,00

Indikator ke-2 Nilai skor aspek hak-hak politik di Provinsi Papua menunjukkan capaian indikator atas sasaran strategis terealisasi 51,83 persen dari **target 46,8 persen** dengan **capaian kinerja 110,7 persen**.

Realisasi indikator ke-2 merupakan data yang diambil dari IDI Provinsi Papua Tahun 2020, karena data BPS Papua Dalam Angka Tahun 2021 belum dirilis, maka capaian realisasi hak-hak politik dengan realisasi 51,83, capaian ini masih berada dalam kategori “Buruk” karena masih berada pada indeks < 60, walaupun Tahun 2020 aspek ini mendapat penilaian tertinggi



daripada tahun-tahun sebelumnya. Aspek mengalami kenaikan poin adalah aspek partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan naik 1,35 poin, bila dibandingkan tingkat kenaikan poin pada Tahun 2019 dengan Tahun 2018 Aspek hak politik rata-rata naik 3,14 poin.

Tiga Indikator yang mendapat skor penilaian” buruk” pada aspek hak-hak politik adalah :

1. Indikator 13, Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) dengan poin 58,63
2. Indikator 15, Persentase anggota perempuan DPRD provinsi dengan poin 48,50
3. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dengan poin 0,00.

Ke-3 Indikator ini harus mendapat perhatian untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Hak-hak politik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan ini sejalan dengan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus pasal 6 ayat (2 dan 4). Dimana realisasi hak-hak politik dan otonomi khusus telah dimulai dari pengangkatan anggota DPRP melalui jalur Otonomi Khusus atas 14 kursi dilakukan sesuai Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 yang pelaksanaan pendaftaran di laksanakan di Kabupaten dan Provinsi. Tahap Pendaftaran, seleksi, tes wawancara sampai dengan penetapan disampaikan kepada Gubernur atas 14 (empat belas kursi) orang anggota DPRP yang diangkat dan 28 (Dua puluh delapan) daftar tunggu. MRP sebagai lembaga representatif hanya melihat dari sisi keterwakilan orang asli papua.

Hasil seleksi 14 (empat belas kursi) kursi anggota DPRP dan 28 (Dua puluh delapan) daftar tunggu ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan sebagai anggota DPRP yang masing-masing akan mewakili daerah wilayah adat.

Data Jumlah 14 Kursi pada keterwakilan 5 Wilayah adat di Provinsi Papua untuk periode 2019-2024, sebagai berikut :

Tabel 3.36 Keterwakilan Wilayah Adat 14 Kursi

NO.	DAERAH WILAYAH ADAT DI PAPUA	JUMLAH KURSI
1.	Mamta/Tabi, terdiri dari Kab/Kota :	3
	1). Kota Jayapura	
	2). Jayapura	
	3) Mambramo Raya	
	4) Keerom	
	5) Sarmi	
2	Saereri, terdiri dari Kabupaten :	2
	1). Waropen	
	2). Kep. Yapen	
	3). Biak Numfor	
	4). Supiori	
3	Mee pago, terdiri dari Kabupaten :	3
	1). Nabire	
	2). Paniai	
	3). Deiyai	
	4). Dogiyai	
	5). Intan Jaya	
	6). Mimika	
4	Ha Anim, terdiri dari Kabupaten :	2
	1). Merauke	
	2). Mappi	
	3). Asmat	
	4). Boven Digoel	

NO.	DAERAH WILAYAH ADAT DI PAPUA	JUMLAH KURSI
5	La Pago, terdiri dari Kabupaten :	4
	1). Jayawijaya	
	2). Puncak Jaya	
	3). Puncak	
	4). Tolikara	
	5). Lanni Jaya	
	6). Nduga	
	7). Pegunungan Bintang	
	8). Mambramo Tengah	
	9). Yalimo	
	10). Yahukimo	

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2021

Jumlah anggota DPRP periode 2019-2024 hasil pemilu 2019 sebanyak 55(lima puluh lima) anggota dan 14 (empat belas) kursi pengangkatan total 69 (enam puluh sembilan) anggota terdiri dari :

1. Laki laki 59 anggota ----- 49 OAP dan 10 non OAP
2. Perempuan 10 anggota –5 OAP dan 5 non OAP(keterwakilan perempuan masih 14,5) persen.

Jumlah anggota DPRP Kabupaten/Kota se Provinsi Papua periode 2019-2024 hasil pemilu 2019 sebanyak 740(tujuh ratus empat puluh) anggota terdiri dari :

1. Laki laki 669 anggota ----- 522 OAP dan 147 non OAP
2. Perempuan 71 anggota -- 43 OAP dan 28 non OAP (keterwakilan perempuan masih 10) persen.

Berdasarkan data tersebut keterwakilan perempuan dalam Pemilu sangat minim, bila dikaitkan UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pencalonan setiap Parpol harus melibatkan 30 persen perempuan,

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 21 tahun 2001 pada pasal 47 yang memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk dapat duduk dalam lembaga legislatif, capaian kinerja indikator realisasi hak-hak politik dalam OTSUS.

Sedangkan hak-hak memilih dan dipilih tergambar dalam keterwakilan pasangan calon (Paslon) Pilkada serentak dari Kabupaten pada periode 2020-2025, dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.37
DATA PEROLEHAN SUARA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK DI 11 (SEBELAS) KABUPATEN TAHUN 2020

NO.	KABUPATEN	JUMLAH				% PEMILIH
	PASLON	TPS	DPT	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1	2	3	4	5	6	7
I.	KEEROM					
1	MUH. MARKUM & MAVENSIUS MUSUI	185	46,097	13,397	545	98,82
2	PITER GUSBAGER & WAFIR KOSASI			22,075		
3	YUSUF WALI & HADI SUSILO			10,080		
II.	WAROPEN					
1	HENDRIK WONATOREY & KORINUS	139	32,402	3,751	271	99,16
2	YUSAK S. B. WONATOREY & M. IMRAN			1,861		
3	OLEN.O.DAIMBOA & YEHESKIEL IMBIRI			9,990		
4	YEREMIAS BISAI & LAMEK MANIAGASI			16,529		
III	NABIRE					
1.	YUFINIA MOTE & MUHAMMAD DARWIS	501	170,783	61,423	1,407	99,18
2.	MESAK MAGAI & ISMAIL JAMALUDIN			61,729		
3.	FRANISCUS X. MOTE & TABRONI BIM. M. CAHYA			46,224		

IV	YAHUKIMO					
1.	DIDIMUS YAHULI & ESAU MIRIAM	866	310,599	172,535	6	100
2.	ABOCK BUSUP & YULIANUS HELUKA			138,064		

V	ASMAT					
1.	ELISA KAMBU & THOMAS E. SAFANPO	305	80,459	43,817	510	99,37
2.	YULIANUS P. AITURU & BONEFASIU JAKFU	20		36,132		

VI	MERAUKE					
1.	HENDRIKUS MAHUSE & EDY SANTOSA	489	107,540	29,858	1,446	98,86
2.	HERIBERTUS S. SILUBUN & B. SETIADJI			11,599		
3.	ROMANUS MBARAKA & RIDUAN			64,637		

VII	BOVEN DIGOEL					
1.	HENGKY YALUWO & LEXI WAGYU	220	36,882	2,164	6,017	83,69
2.	H. CHAERUR ANWAR & NATHALIS KAKET			3,226		
3.	MARTINUS WAGI & ISAK BANGRI			9,156		
4.	YUSAK YALUWO & JAKOBUS WAREMBA			16,319		

VIII	PEGUNUNGAN BINTANG					
1.	SPI YAN BURDANA & P. KALAKMABIN	383	104,341	73,876	122	99,88
2.	CONSTAN OKTEMKA & DEKI DEAL			30,345		

IX	YALIMO					
1	NAHOK NEKREK & JHON W. WILIL	327	90,948	47,861	1,407	99,18
2	LAKIUS PEYON & ANAHUM MABEL			43,067		

X	SUPIORI					
1	OBETH RUMABBA & DAUD I.O. P. MARISAN	59	14,754	2.326	171	98,84
2	RUTH N.RUMKABU & PIET K. PARIARIBO			3.704		
3	JAKOBUS K & S.RUMBEKWAN			1.193		
4	YAN IMBAB & NICHODEMUS			4.493		

XI	MAMBRAMO RAYA					
	D. DASINAPA & A. P. YOSAFAT MAAY	127	25,466	4,929	330	98,709
	ROBY W. RUMANSARA & LUKAS J. PUNNY			6,015		
	KRISTIAN WANIMBO & YONAS TASTI			5,615		
	JHON TABO & EVER MUDUMI			8,557		



Pemenang Pilkada

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 jo PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam implementasi otonomi khusus Papua yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan, dimana jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Pemilihan anggota MRP periode 2005-2010 berjumlah sebanyak 42 anggota, periode 2011-2016 sebanyak 51 anggota, periode 2017-2022 sebanyak 51 anggota.

Indikator ke-3 Nilai skor aspek lembaga demokrasi diukur melalui jumlah lembaga demokrasi yang mendapat ijin, dengan realisasi 50,0 persen dengan capaian kinerja 86,7 persen, untuk pelaksanaan pilkada 2020, sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 ada 8 (delapan) partai politik yang baru dibentuk ditingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten untuk mengikuti pendaftaran di KPU pada bulan Agustus 2022 sebagai peserta pemilu tahun 2024 dari 16 Parpol. Parpol yang baru mendirikan/membentuk di tingkat Provinsi Papua diberikan surat keterangan bagi parpol yang telah melaporkan kepengurusannya di Provinsi Papua oleh Gubernur melalui Badan Kesbangpol Provinsi Papua. bila dibandingkan dengan Data BPS pada aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (Democratic institutions) ada penurunan poin 3,54 hal ini disebabkan belum semua peserta parpol dibentuk, parpol yang baru dibentuk ada 8(delapan) yang mendapat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Daerah tidak mengusulkan lembaga demokrasi, karena lembaga demokrasi bersifat secara nasional.

Jumlah partai peserta pemilu periode 2019-2024 sebanyak 16 partai dan di Provinsi Papua tidak ada partai politik lokal sebagaimana di Aceh, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengatur adanya pembentukan partai lokal di Provinsi Papua.

Pada Tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional. Di Provinsi Papua ada 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Hasil Pilkada tahun 2020 di Provinsi Papua terdapat 1 Kabupaten (Yalimo) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 5 Mei 2021 sesuai dengan perintah MK dalam putusan perkara nomor 97/php.bup-xix/2021. Hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang digugat kembali oleh satu Paslon ke MK. Pada tanggal 26 Januari 2022 dilaksanakan lagi Pemungutan suara ulang (PSU) tahun kedua pasca putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil putusan MK telah di dibacakan tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00 WIB, dengan putusan sela maka KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Tanggal 14 Maret 2022, DPRD Kabupaten Yalimo telah melaksanakan sidang paripurna istimewa, pengumuman Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Aston Jayapura.

Dibawah ini Tabel Partai peserta dari pemilu ke pemilu, sebagai berikut :

Tabel 3.38 Pemilu Dalam angka di Indonesia

NO	PEMILU	JUMLAH PESERTA
1.	1955	172 peserta
2.	1971	10 partai
3.	1977, 1982, 1987, 1992, 1997	3 partai
4.	1999	48 partal
5.	2004	24 partai
6.	2009	38 partai + 6 parpol lokal di Aceh

NO	PEMILU	JUMLAH PESERTA
7.	2014	12 parpol + 3 parpol lokal di Aceh
8.	2019	16 parpol + 4 parpol lokal di Aceh

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2020

Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024, adalah :

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan.Sejahtera
9. Partai Perindo
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hanura
14. Partai Demokrat
15. PKPI.
16. PBB

Pendaftaran pemilu partai politik dilaksanakan pada Bulan Agustus, untuk pemilu legislatif dilaksanakan 14 Februari

Tabel 3.39 Pemenang Pemilu dari Pemilu ke Pemilu

PEMILU	PEMENANG	PERSENTASE SUARA
1	2	3
1955	PNI	DPR (22,32%), KONSTITUANter (23,97)
1971	GOLKAR	62,82%
1977	GOLKAR	62,11%
1982	GOLKAR	68,34%
1987	GOLKAR	73,16%
1992	GOLKAR	66,10%
1997	GOLKAR	74,51%
1999	PDIP	33,74%
2004	GOLKAR	31,58%
2009	DEMOKRAT	26,40%
2014	PDIP	18,85%
2019	PDIP	22,24%

Data KESBANGPOL Tahun 2019

Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya bila ada penambahan pada masa pemilu.

Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.

Bila di kaitkan dengan Indeks variabel IDI Papua pada Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi dari Tahun 2018-2020 termasuk dalam kategori “Buruk” (skor < 60), ada 5 Indikator dengan skor buruk yaitu :

Lima indikator dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:

1. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD (skor 56,13);
2. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan(skor 0,00);
3. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif (skor 0,00);
4. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu (skor 0,00);
5. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (skor 16,66);

Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik, dalam meningkatkan skor pada aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Di bawah ini terdapat matriks capaian sasaran “Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi” Tahun 2019-2021, sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun									
		2019			2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Skor	93,1	100	107,4	93,6	100	108,8	94,0	100	106,4	
	Skor	43,9	42,81	99,79	46,3	51,16	112,9	46,8	51,83	110,7	
	Skor	55,5	57,05	102,79	56,6	52,61	92,9	57,7	50,00	86,7	
Rata-rata capaian kinerja asasaran				103,33				104,2			

Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2020 meningkat 0,9 persen dibanding capaian kinerja saasaran “Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi”tahun 2021 menurun 2,9 persen, dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2019-2021 diatas 100 persen dengan predikat “ Sangat berhasil”. data ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam mengayomi masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka negara kesatuan Pancasila.

Sasaran 8**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua**” sebesar **102.3 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8

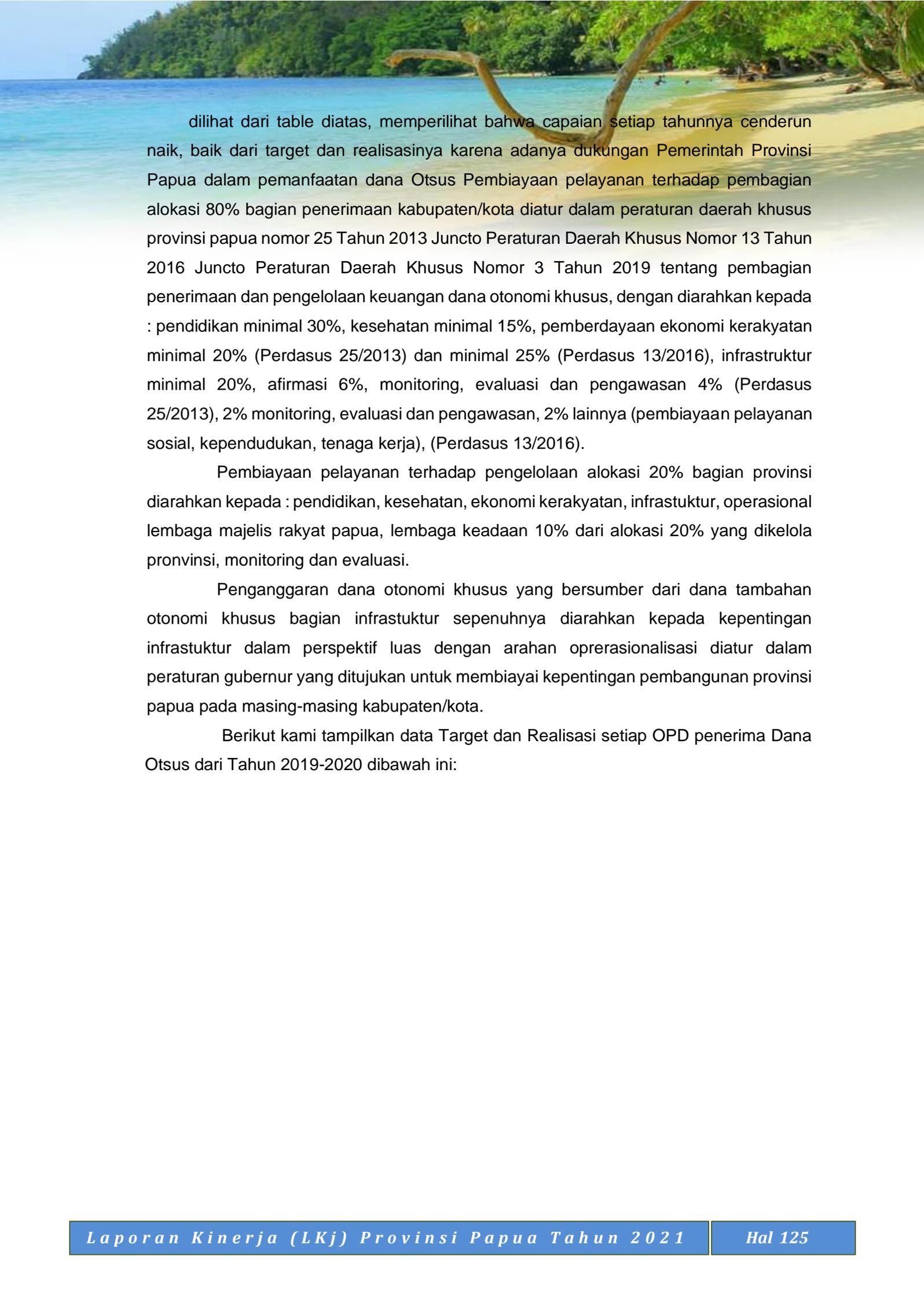
INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan	Persen	95	97,80	102.95
Capaian Kinerja Sasaran					103.06

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja **tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan** targetnya adalah sebesar **95, persen** dengan **realisasi** sebesar **97.80 persen** sehingga tercapai kinerja sebesar **102.95 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Capain tersebut untuk tahun 2021 walaupun dikategorikan berhasil tetapi secara trend mengalami penurunan dari tahun 2020 yakni sebesar 103,06 persen ato turun sebesar 1, 81 persen, hal ini dapat dilihat pada perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari Tahu 2019-2021 dibawah ini

Tabel..... Indikator Kinerja Sasaran 8 untuk Tahun 2019-2021

No	INDIKATOR KINERJA	2019				2020			2021		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	8	9	10	12	13	14	12	13	14
1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	90	92,07	102,3	93	95,85	103,06	95	97,80	102,95



dilihat dari table diatas, memperlihatkan bahwa capaian setiap tahunnya cenderung naik, baik dari target dan realisasinya karena adanya dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam pemanfaatan dana Otsus Pembiayaan pelayanan terhadap pembagian alokasi 80% bagian penerimaan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus, dengan diarahkan kepada : pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 15%, pemberdayaan ekonomi kerakyatan minimal 20% (Perdasus 25/2013) dan minimal 25% (Perdasus 13/2016), infrastruktur minimal 20%, afirmasi 6%, monitoring, evaluasi dan pengawasan 4% (Perdasus 25/2013), 2% monitoring, evaluasi dan pengawasan, 2% lainnya (pembiayaan pelayanan sosial, kependudukan, tenaga kerja), (Perdasus 13/2016).

Pembiayaan pelayanan terhadap pengelolaan alokasi 20% bagian provinsi diarahkan kepada : pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastuktur, operasional lembaga majelis rakyat papua, lembaga keadaan 10% dari alokasi 20% yang dikelola pronvinsi, monitoring dan evaluasi.

Penganggaran dana otonomi khusus yang bersumber dari dana tambahan otonomi khusus bagian infrastuktur sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan infrastuktur dalam perspektif luas dengan arahan oprerasionalisasi diatur dalam peraturan gubernur yang ditujukan untuk membiayai kepentingan pembangunan provinsi papua pada masing-masing kabupaten/kota.

Berikut kami tampilkan data Target dan Realisasi setiap OPD penerima Dana Otsus dari Tahun 2019-2020 dibawah ini:

Tabel....
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per OPD di Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2021

OPD	SATUAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sektor Pendidikan										
Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persen	90,00	90,77	100,86	90,00	95,60	106,22	90,00	80,19	89,10
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persen	90,00	96,07	106,74	90,00	100,00	111,11	90,00	82,68	91,87
Rata-rata	Persen	90,00	93,42	103,80	90,00	97,80	108,67	90,00	81,44	90,48
Sektor Kesehatan										
Dinas Kesehatan	Persen	90,00	84,58	93,98	90,00	95,60	106,22	90,00	85,54	95,04
Rata-rata	Persen	90,00	84,58	93,98	90,00	95,60	106,22	90,00	85,54	95,04
Sektor Infrastruktur										
Dinas PU, Penatan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Persen	85,00	73,46	86,42	85,00	89,82	105,67	85,00	81,45	95,82
Dinas Perhubungan	Persen	85,00	70,11	82,48	85,00	37,06	43,60	85,00	61,30	72,12
Rata-rata	Persen	85,00	71,79	84,45	85,00	63,44	74,64	85,00	71,38	83,97
Sektor Ekonomi										
Dinas Pertanian dan Pangan	Persen				90,00	100,00	111,11	90,00	78,47	87,19
Dinas Ketahanan Pangan	Persen									
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persen	90,00	98,50	109,44						
Dinas Perkebunan	Persen	90,00	99,99	111,10						
Dinas Peternakan	Persen	90,00	99,50	110,56						

OPD	SATUAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	Persen	90,00	97,15	107,94	90,00	100,00	111,11	90,00	89,46	99,40
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Persen				90,00	99,90	111,00	90,00	99,90	111,00
Dinas Koperasi dan UKM	Persen	90,00	94,73	105,26						
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen									
Perdagangan	Persen	90,00	85,56	95,07						
Perindustrian	Persen	90,00	95,70	106,33						
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen				90,00	98,18	109,09	90,00	93,88	104,31
Dinas Kebudayaan	Persen									
Dinas Pariwisata	Persen	90,00	99,34	110,38						
Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	90,00	99,98	111,09	90,00	99,35	110,39	90,00	92,98	103,31
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Persen	90,00	97,19	107,99				90,00	88,04	97,82
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Persen	85,00	77,26	90,89	85,00	100,00	117,65	85,00	95,15	111,94
Rata-rata	Persen	89,55	94,99	106,00	89,17	99,57	111,72	89,29	91,13	102,14
Total Rata-rata	Persen	88,64	86,19	97,06	88,54	89,10	100,31	88,57	82,37	92,91

Sumber data: TP2K Bappeda (diolah)

Sasaran 9**Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**” sebesar **90,55** persen dengan capaian **Berhasil** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.42 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	*B	*70
2.	Capaian implementasi e-government terintegrasi	Persen	90	100	111.11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					90.55

*Prediksi

Berikut nya adalah **Indikator Kinerja “Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh KEMENPANRB dan RI”** dengan **Target BB** dan **Realisasi B** dengan Nilai **70.00** sebagai prediksi untuk penilaian **Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2021 yang baru akan diumumkan pada Triwulan I-II 2022**. Untuk memenuhi Target masih belum bisa tercapai ke Predikat BB karena ini dinilai Untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke sementara yang Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat. Itulah sebabnya

mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA.

Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2021 dengan Nilai 70.00 dengan indikator Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP. Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.43
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2020 serta
Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021 (Prediksi)	70,00	B	BAIK

Oleh : MENPANRB RI
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Target SAKIP Provinsi Papua di Tahun 2020 adalah BB hal ini sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua melalui PERDA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 juga sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua melalui Peraturan Gubernur Papua No.26 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 serta juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.

Berikut Perkembangan SAKIP Provinsi Papua untuk tahun 2015-2020 oleh KEMENPAN dan RB RI yaitu :

Tabel. 3.44 Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Papua Tahun 2015-2020

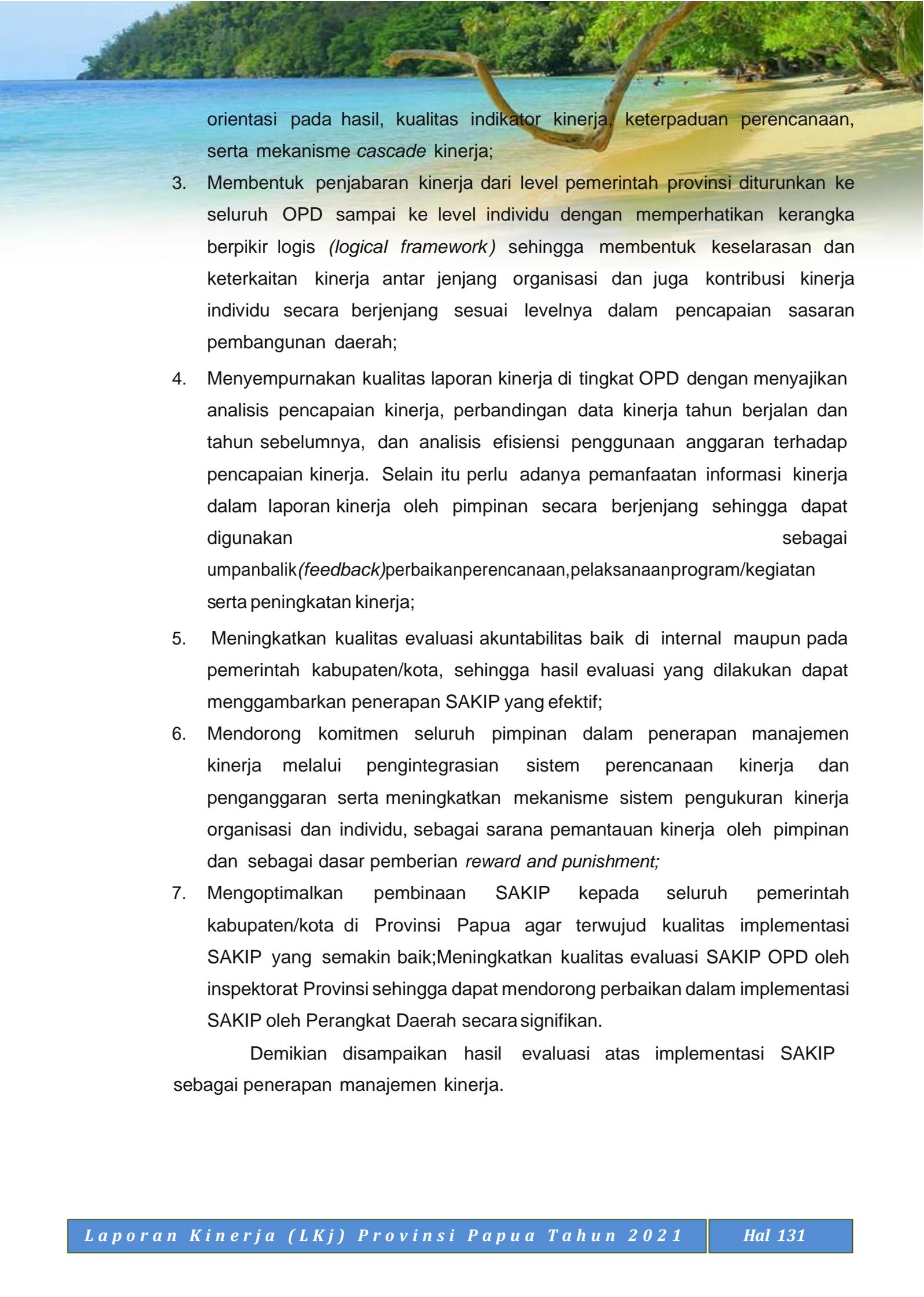
KOMPONEN YANG DINILAI		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		BO BOT	NILAI										
a	Perencanaan Kinerja	30	16,59	35	16,74	35	20,12	35	20,72	35	20,88	35	21,26
b	Pengukuran Kinerja	25	9,55	25	10,94	25	12,85	25	13,28	25	13,95	20	13,95
c	Pelaporan Kinerja	15	7,79	15	8,31	15	9,95	15	10,12	15	10,67	15	10,67
d	Evaluasi Internal	10	2,62	10	4,09	10	5,77	10	6,93	10	7,01	10	7,11
e	Capaian Kinerja	20	9,48	20	11,10	20	11,35	20	11,54	20	11,54	20	11,54
JUMLAH		100	46,03	100	51,18	100	60,04	100	62,59	100	64,05	100	64,53
			C		CC		B		B		B		B
Kenaikan Nilai AKIP					5.15		8.86		2.55		1.46		0.48

Sumber : KEMENPANRB RI

Intepretasi dari Predikat B yaitu dengan nilai >60-70 sesuai dengan PERMENPANRB No.12 Tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP. Maka Intepretasi dari **Predikat B** adalah **Baik** dimana Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Rekomendasi dari Pemerintah melalui MENPANRB RI bagi Gubernur Papua melalui Surat tertanggal 31 Maret 2021, Nomor B/117/M/AA.05/2021, Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 maka ada 8 rekomendasi yang disampaikan bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, maka di rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019 dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti

- 
- orientasi pada hasil, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme *cascade* kinerja;
3. Membentuk penjabaran kinerja dari level pemerintah provinsi diturunkan ke seluruh OPD sampai ke level individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;
 4. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di tingkat OPD dengan menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Selain itu perlu adanya pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja;
 5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas baik di internal maupun pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang efektif;
 6. Mendorong komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
 7. Mengoptimalkan pembinaan SAKIP kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua agar terwujud kualitas implementasi SAKIP yang semakin baik; Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat Provinsi sehingga dapat mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan.

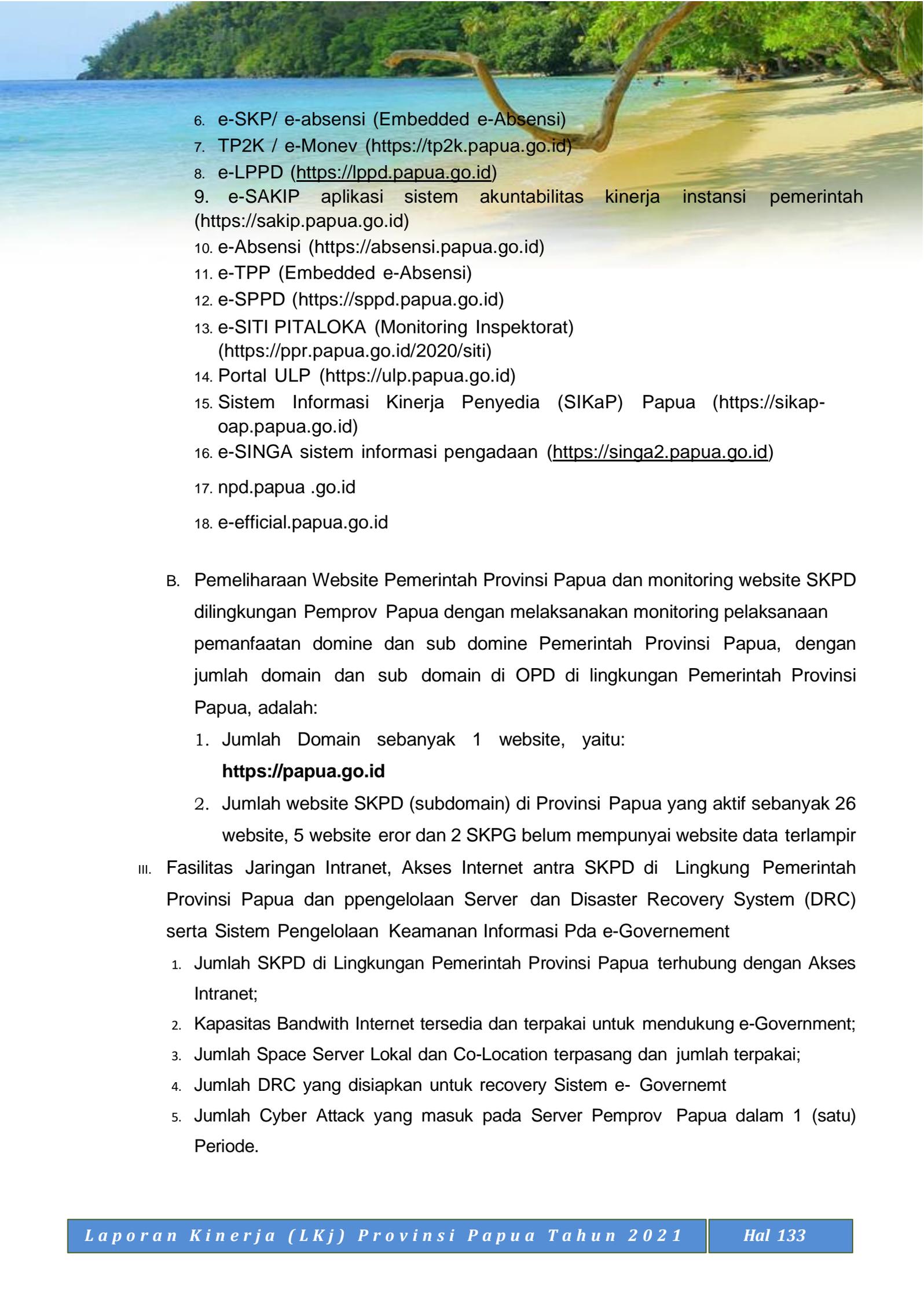
Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja.



Berikutnya adalah **Indikator Kinerja “Capaian implementasi e-government terintegrasi”** dengan **Target 90 persen** dan **Realisasi 100 persen** dengan **Capaian Kinerja sebesar 111.11 persen**.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2021 melakukan pembangunan/ pengembangan aplikasi, monitoring Website, dukungan infrastruktur e-Government dan Optimalisasi PPID untuk meningkatkan pelayanan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Pembangunan Aplikasi:
 1. Sistem Informasi Kartu Kendali Keuangan (SI-K3) yang berbasis web yang teintergrasi dengan Simda (penata usahaan keuangan) dan dilakukan uji coba pada Dinas KOMINFO Prov. Papua dengan alamat <http://npd.papua.go.id>, sebagai sistem dalam mendistribusikan dan alat kontrol penggunaan uang kegiatan mulai dari proses permintaan uang sampai dengan pertanggungjawaban SPJ oleh PPTK yang akan divalidasi bagian keuangan SKPD dengan alur berikut:
 - a. Permintaan uang oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Nota Pencairan Dana (NPD) kepada pimpinan SKPD;
 - b. Persetujuan oleh pimpinan SKPD;
 - c. Pencairan dana oleh kasubag keuangan ke PPTK;
 - d. Pelaksanaan kegiatan oleh PPTK dan dibuktikan dengan dokumen berupa SPJ.
 - e. Ouput dari kegiatan ini adalah kontrol pemanfaat anggaran yang dikelola oleh PPTK mulai dari permintaan sampai dengan dokumen SPJ kepada bagian keuangan SKPD.
 2. Pembangunan aplikasi tentang e-office dengan alamat website <https://e-office.papua.go.id> aplikasi berbasisi web ini digunakan untuk registrasi surat masuk dan surat keluar pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan pada tahun 2021 sebagai uji coba adalah Dinas KOMINFO Provinsi Papua;
- ii. Dalam rangka Pemeliharaan Aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Papua dengan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan berupa:
 - A. Pengembangan Layanan Publik yang online dan integerasi = 16 Aplikasi
 1. e-SIMDA
 2. e-SAMSAT
 3. SP2D dan Tax Online
 4. e-Pusdalisbang / Aplikasi pusat analisa data
 5. e-PPO / e-Perizinan (<https://ppo.papua.go.id>)

- 
6. e-SKP/ e-absensi (Embedded e-Absensi)
 7. TP2K / e-Monev (<https://tp2k.papua.go.id>)
 8. e-LPPD (<https://lppd.papua.go.id>)
 9. e-SAKIP aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (<https://sakup.papua.go.id>)
 10. e-Absensi (<https://absensi.papua.go.id>)
 11. e-TPP (Embedded e-Absensi)
 12. e-SPPD (<https://sppd.papua.go.id>)
 13. e-SITI PITALOKA (Monitoring Inspektorat) (<https://ppr.papua.go.id/2020/siti>)
 14. Portal ULP (<https://ulp.papua.go.id>)
 15. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Papua (<https://sikap-oap.papua.go.id>)
 16. e-SINGA sistem informasi pengadaan (<https://singa2.papua.go.id>)
 17. npd.papua .go.id
 18. e-efficial.papua.go.id

B. Pemeliharaan Website Pemerintah Provinsi Papua dan monitoring website SKPD dilingkungan Pemprov Papua dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan pemanfaatan domine dan sub domine Pemerintah Provinsi Papua, dengan jumlah domain dan sub domain di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, adalah:

1. Jumlah Domain sebanyak 1 website, yaitu:

<https://papua.go.id>

2. Jumlah website SKPD (subdomain) di Provinsi Papua yang aktif sebanyak 26 website, 5 website eror dan 2 SKPG belum mempunyai website data terlampir

iii. Fasilitas Jaringan Intranet, Akses Internet antra SKPD di Lingkung Pemerintah Provinsi Papua dan ppengelolaan Server dan Disaster Recovery System (DRC) serta Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi Pda e-Governement

1. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhubung dengan Akses Intranet;
2. Kapasitas Bandwith Internet tersedia dan terpakai untuk mendukung e-Government;
3. Jumlah Space Server Lokal dan Co-Location terpasang dan jumlah terpakai;
4. Jumlah DRC yang disiapkan untuk recovery Sistem e- Governemt
5. Jumlah Cyber Attack yang masuk pada Server Pemprov Papua dalam 1 (satu) Periode.

iv. Optimalisasi PPID Untuk mendukung Pelayanan Publik

1. Jumlah PPID yang terbentuk di Lingkungan SKPD dan Kab / Kota se-Papua;
2. Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengupload Daftar Informasi Publik.
3. Jumlah Permohonan Informasi dan penyelesaian Permohonan Informasi Publik dalam 1(satu) Periode.

Berikut perkembangan Indikator Sasaran Kinerja capaian implementasi e-Government terintegrasi dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel. 3. 45 Indikator Kinerja Sasaran 9 Indikator 2 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi	Persen	85	120	141.17	85	79.17	93.14	90	100	111.11

Perkembangan capaian e-Government Pemerintah Provinsi Papua dari sisi realisasi mengalami peningkatan di Tahun 2021 yaitu 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020 (79.17), hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran guna kepentingan penyelenggaraan PON di Tahun 2020 dan Pandemi Covid.

Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah.

Salah satu tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua periode 2019-2023 ialah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perwujudan tujuan dimaksud adalah meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah yang diukur dengan **Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD**.

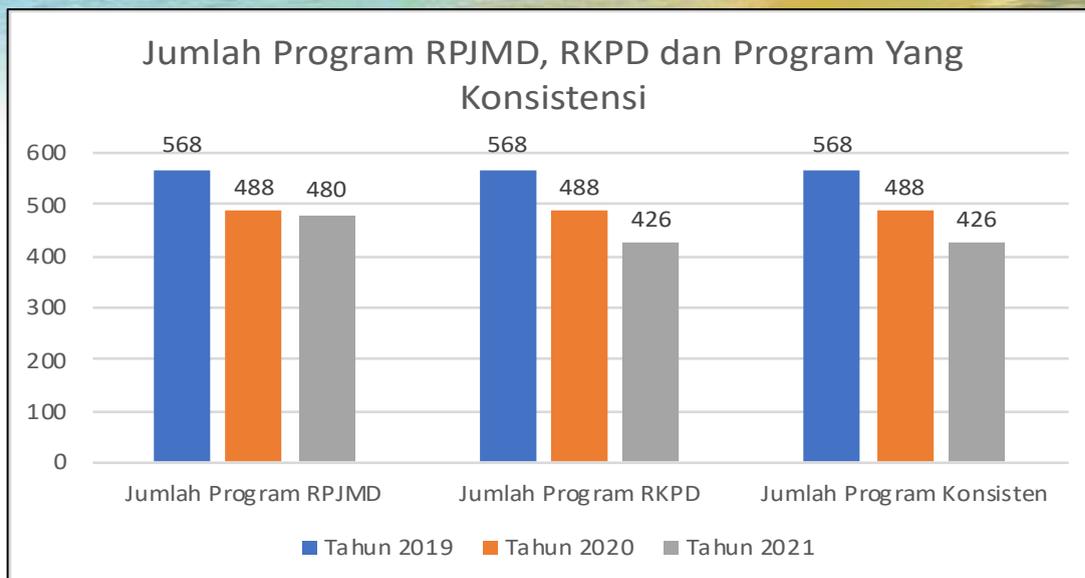
Untuk tahun 2021 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua, realisasi tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD mencapai 100 persen, melampaui target yang ditetapkan yaitu 90,0 persen atau dengan **capaian kinerja sebesar 111,11 persen**. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD mencapai 100% dari tahun 2019, 2020 dan 2021 atau 3 tahun berturut-turut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Capaian kinerja indikator mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020, hanya dikarenakan perbedaan target di tahun 2019 sebesar 80 persen, tahun 2020 sebesar 85 persen sedangkan tahun 2021 ditargetkan sebesar 90 persen.

Tabel 3.39 Indikator Kinerja Sasaran 10 untuk Tahun 2019-2021

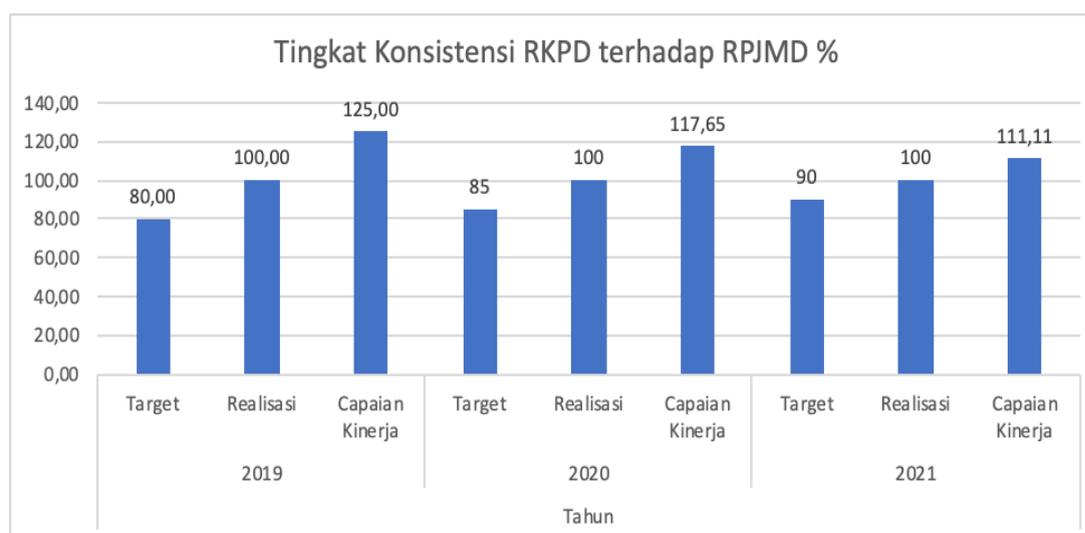
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	80	100	125	85	100	117.65	95	100	111.11

Terkait pencapaian dari tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD pada tahun 2021, dari 426 Program yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Papua tahun 2021 semua konsisten dengan RPJMD, sama dengan tahun 2020 dengan program sebanyak 488 Program dan di tahun 2019 sebanyak 568 program.

Grafik 3.1 Jumlah Program RPJMD, RKPD dan Program yang Konsisten Tahun 2019-2021



Grafik 3.2 Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD (%) Tahun 2019-2021



Pencapaian kinerja ini akan disebabkan dengan kebijakan, antara lain:

1. Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis Elektronik yang terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas aparatur perencana Pembangunan Daerah sampai ditingkat pelaksana program di SKPD Provinsi Papua.
3. Peningkatan Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran 11**Meningkatnya Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya sistem akuntabilitas dan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah**” sebesar **157,73 persen** dengan predikat “**sangat berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.40 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100,00
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11,52	13,30	115,45
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					157,73

Indikator **Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD)** menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan kembali untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Tahun 2021 oleh BPK RI

Adapun Indikator Opini oleh BPK RI adalah :

1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengungkapan yang memadai;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas pengendalian intern; jika tidak ada permasalahan yang signifikan dan material berpengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan (LK) terkait 4 Indikator diatas, opini nya WTP.

Berikut Realisasi Perkembangan Opini BPK atas LKPD

Pemerintah Provinsi Papua tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.41 Perkembangan LKPD Provinsi Papua
oleh BPK RI Tahun 2014-2021**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK RI Atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*WTP

(*) Pemerintah Provinsi Papua Menargetkan Opini BPK RI Di Tahun 2021 Yang Baru Hasilnya Diketahui Pada Sekitar Juni 2022 Adalah Dengan Tetap Predikat WTP

Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dengan predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik artinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI.

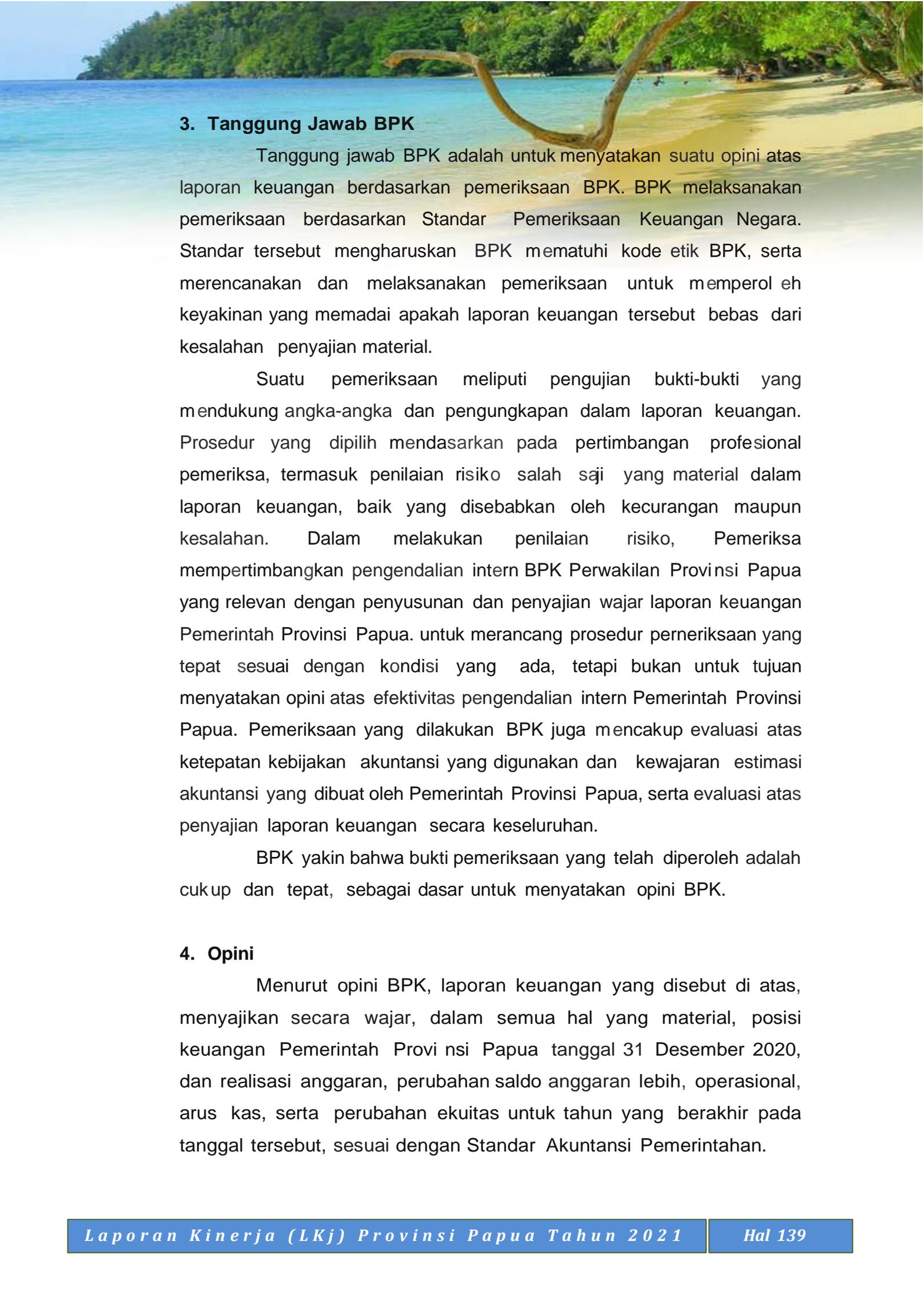
Adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



3. Tanggung Jawab BPK

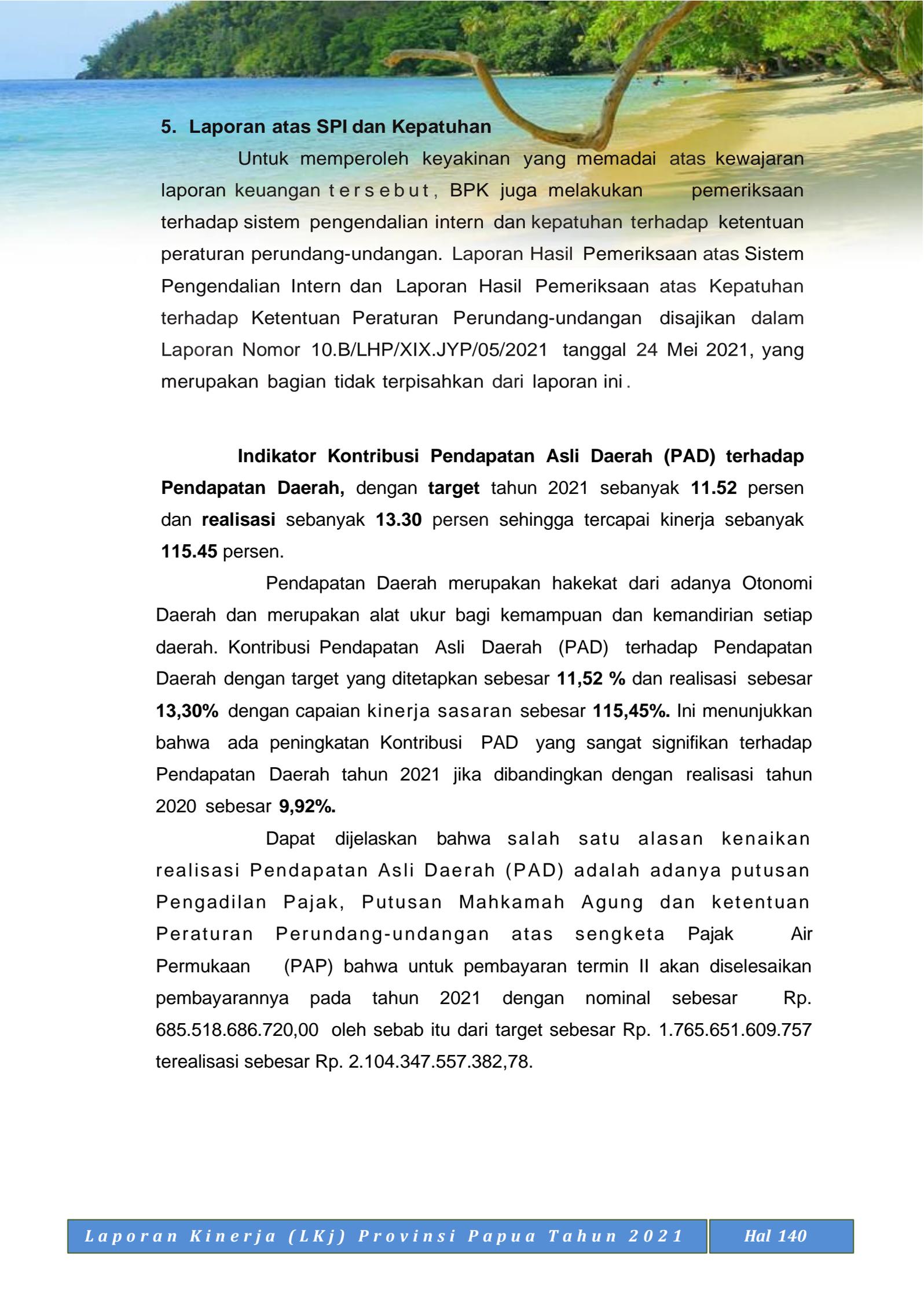
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern BPK Perwakilan Provinsi Papua yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

4. Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



5. Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10.B/LHP/XIX.JYP/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, dengan **target** tahun 2021 sebanyak **11.52** persen dan **realisasi** sebanyak **13.30** persen sehingga tercapai kinerja sebanyak **115.45** persen.

Pendapatan Daerah merupakan hakekat dari adanya Otonomi Daerah dan merupakan alat ukur bagi kemampuan dan kemandirian setiap daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target yang ditetapkan sebesar **11,52 %** dan realisasi sebesar **13,30%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **115,45%**. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan Kontribusi PAD yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar **9,92%**.

Dapat dijelaskan bahwa salah satu alasan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adanya putusan Pengadilan Pajak, Putusan Mahkamah Agung dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) bahwa untuk pembayaran termin II akan diselesaikan pembayarannya pada tahun 2021 dengan nominal sebesar Rp. 685.518.686.720,00 oleh sebab itu dari target sebesar Rp. 1.765.651.609.757 terealisasi sebesar Rp. 2.104.347.557.382,78.

Selain penerimaan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua juga terus berubaya untuk mencari sumber-sumber PAP baru di Kabupaten/Kota se-Papua dengan membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/214/Tahun 2021 tentang Pembebasan/penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2021, yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2021. Hal ini memicu animo masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor memanfaatkan momentum adanya pembebasan sanksi administratif tersebut.

Berikut ditampilkan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Papua sebagai terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2021

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2020	2021	
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Presentasi Peningkatan PAD	1.255.685.466.969,77	2.104.347.557.382,78	67,59
		2. Presentasi Peningkatan Pajak Daerah	986.672.016.100,00	1.627.363.546.469,00	64,93
		3. Presentasi Peningkatan Retribusi Daerah	19.537.313.848,33	18.406.439.197,78	- 5.79
		4. Presentasi Peningkatan PAD Lain-lain	217.493.110.183,44	418.088.193.782,00	92,23

Sumber : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021

Tabel 3.43 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TOTAL REALISASI PENDAPATAN	%
1.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1. Jumlah Realisasi PAD / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	2.104.347.557.382,78	15.827.790.704.441,78	13,30
		2. Jumlah Realisasi Pajak Daerah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	1.627.363.546.469,00	15.827.790.704.441,78	10,28
		3. Jumlah Realisasi Retribusi Daerah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	18.406.439.197,78	15.827.790.704.441,78	0,12
		4. Jumlah Realisasi Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	40.489.377.934,00	15.827.790.704.441,78	1,79
		5. Jumlah Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	418.088.193.782,00	15.827.790.704.441,78	2,64

Sumber : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021

Kontribusi terhadap Total Pendapatan adalah sebanyak 13,30 % dengan penjelasan sebagai berikut :

Total Pendapatan	Rp 15.827.790.704.441,78
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.104.347.557.382,78
1). Pajak Daerah	Rp 1.627.363.546.469,00
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 252.364.581.300,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	Rp 137.229.698.000,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	Rp 199.077.937.255,00
- Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp 723.343.448.609,00
- Pajak Rokok	Rp 315.347.881.305,00
2). Retribusi Daerah	Rp 18.406.439.197,78
3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 40.489.377.934,00
2. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah	Rp 418.088.193.782,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 melampaui Target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 115,45 % dengan rincian sebagai berikut :

Target PAD : Rp. 1.765.651.609.757,00
Realisasi : Rp. 2.104.247.557.382,78
Capaian : 119,18 %

Total Penerimaan Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2021

Target : Rp. 14.675.560.728.899,00
Realisasi : Rp. 15.827.790.704.441,78
Capaian : 107,85 %

Tabel 3.44 Indikator Kinerja Sasaran 11 untuk Tahun 2019-2021

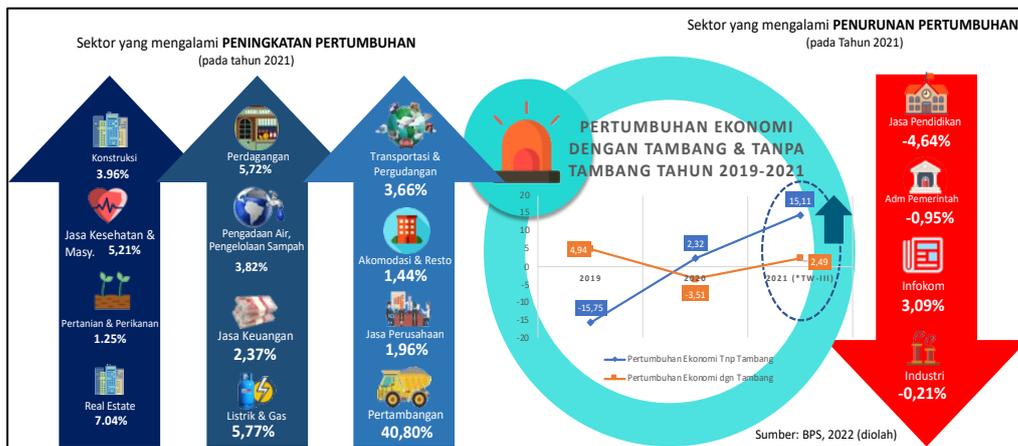
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Kontribusi PAD terhdp Pendapatan Daerah	Persen	9.49	13.83	145.73	10.46	9.92	94.84	11.52	13.30	115.45

Perkembangan capaian Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua dari sisi realisasi mengalami peningkatan di Tahun 2021 yaitu 13.30% jika dibandingkan dengan tahun 2020 (9.92%), hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran guna kepentingan penyelenggaraan PON di Tahun 2020 dan Pandemi Covid.

Sasaran 12 **Meningkatnya Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Penciptaan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.**

Pertumbuhan ekonomi Papua di tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 persen. Perekonomian Papua sangat fluktuatif, tergantung pada besar kecilnya nilai produksi tambang nonmigas (tembaga & emas) dimana tahun tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan -15,75 persen, tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,32 persen walaupun di masa pandemik Covid-19.

Gambar 3.2 Perekonomian Papua Tahun 2021 dari Sisi Produksi



Sumber : BPS, Tahun 2022 (diolah)

Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,80 persen, Real Estate 7,04 persen, pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,77 persen. Di tahun 2021 perekonomian Papua mengalami pemulihan keluar dari krisis di tahun 2020. **terdapat trend peningkatan perekonomian** pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 di sektor Pertambangan dan Penggalian (Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua 36,84%), Real Estate (kontribusi 2,67%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (kontribusi 0,04%).

Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 1,6 persen dengan kontribusi sebesar 10,84 persen untuk pembentukan PDRB Papua, dengan demikian berdampak pula pada pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2021 yaitu **meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang** diukur melalui pencapaian 3 (tiga) sub sektor pada Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB, Sektor Perkebunan dan Kontribusi Sektor Peternakan.

Tabel. 3. 45 Indikator Kinerja Sasaran 12 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persen	3	2.69	89.52	3.4	2.62	77.06	3.8	2.42	63.68
2.	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	1.5	1.04	69.33	2	1.11	55.5	2.7	0.98	36.29
3.	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	1.5	1.03	68.67	2	78.28	94.31	2.7	0.85	31.48
Capaian Indikator kinerja					75.84			60.69			43.81

Sumber : BPS, 2020, (diolah)

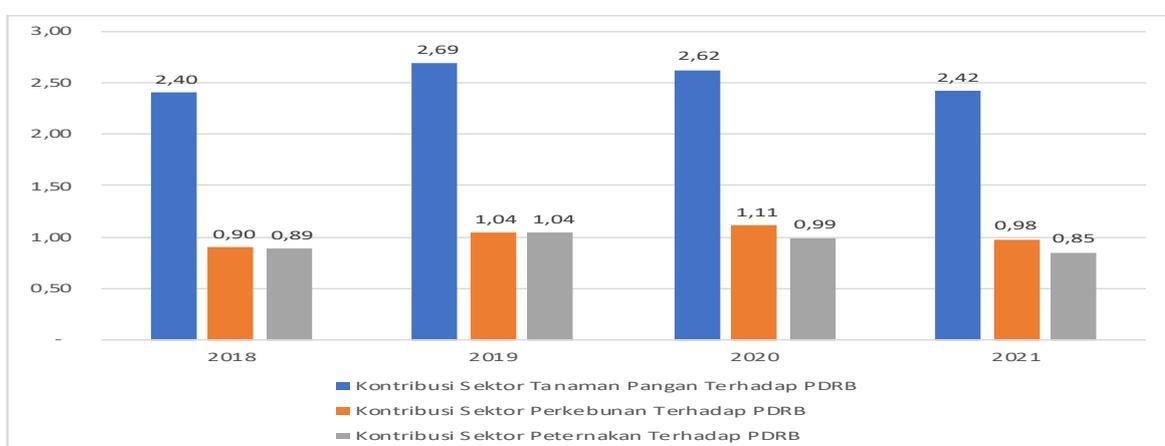
Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran: **Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah 43,81 persen.

Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 60,69 persen, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini selama periode tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan, di mana tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 75,84 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 60,69 persen dan tahun 2021 turun menjadi 31,02 persen.

Jika diurai ke 3(tiga) Capaian Kinerja masing-masing Indikator maka Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB dengan capaian tertinggi sebesar 63,68 persen, selanjutnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB mencapai 36,29 persen dan indikator Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB dengan capaian kinerja yaitu 31.48 persen.

Dapat dilihat dari realisasi tahun 2021, semua indikator kinerja yang jadi ukuran pencapaian sasaran meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas belum mencapai target. Indikator Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB yang ditargetkan sebesar 3,84 persen hanya terealisasi sebesar 2,42 persen, juga mengalami penurunan kontribusi dibanding tahun 2020. Untuk indikator Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB yang ditargetkan 2,71 persen, teralisasi hanya sebesar 0,98 persen masih dibawah target, mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,11 persen. Sedangkan Indikator Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB terealisasi sebesar 0,85 persen masih dibawah target sebesar 2,74 persen, juga mengalami penurunan kontribusi dibanding tahun 2020.

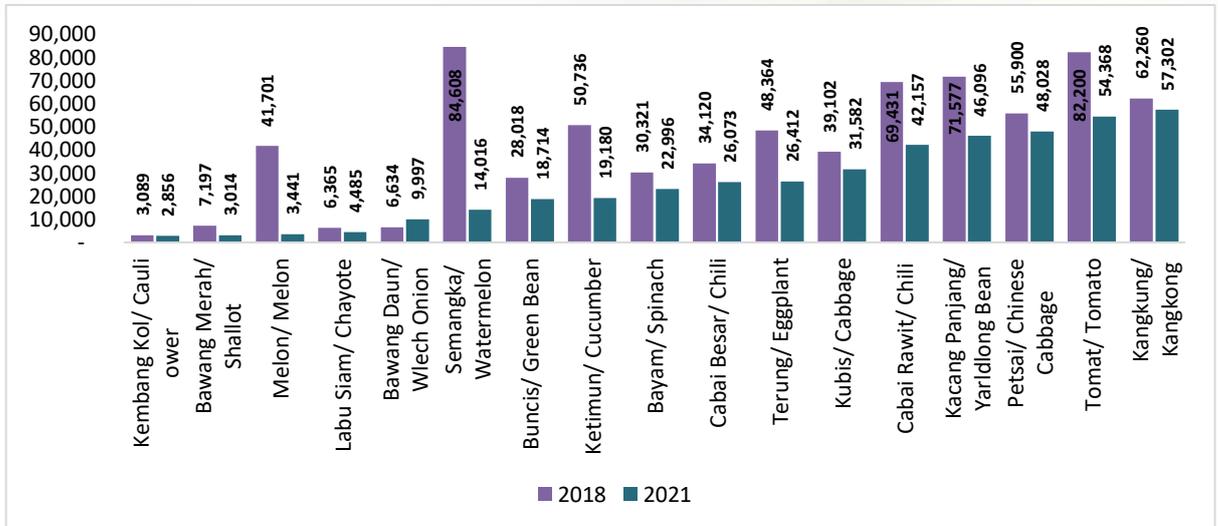
Grafik 3.2 Perkembangan Kontribusi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2021



Sumber : BPS, tahun 2022 (diolah)

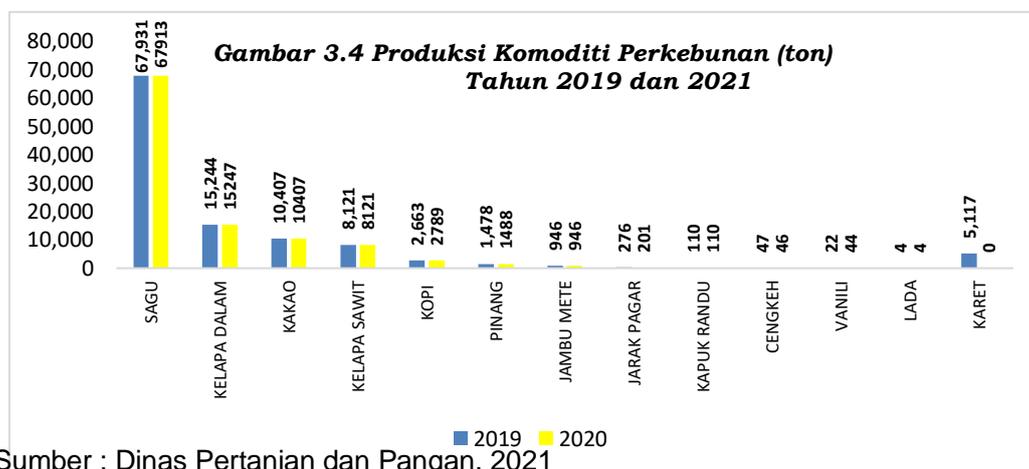
Capaian indikator kinerja **Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB**, terdapat beberapa komoditas sebagai kontributor sektor tanaman pangan 3 tertinggi di tahun 2021 yaitu : Kangkung, Tomat dan Petsai (Kol).

Grafik 3.3 Produksi Tanaman Holtikultura Provinsi Papua tahun 2018 & 2021



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Untuk sub sektor perkebunan, beberapa komoditas unggulan Provinsi Papua adalah Sagu, Kelapa Dalam, Kakao, Sawit, Kopi dan Pinang. Komoditas sagu dengan Produksi tertinggi, selanjutnya Kelapa Dalam dan Kakao.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih di bawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
2. Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

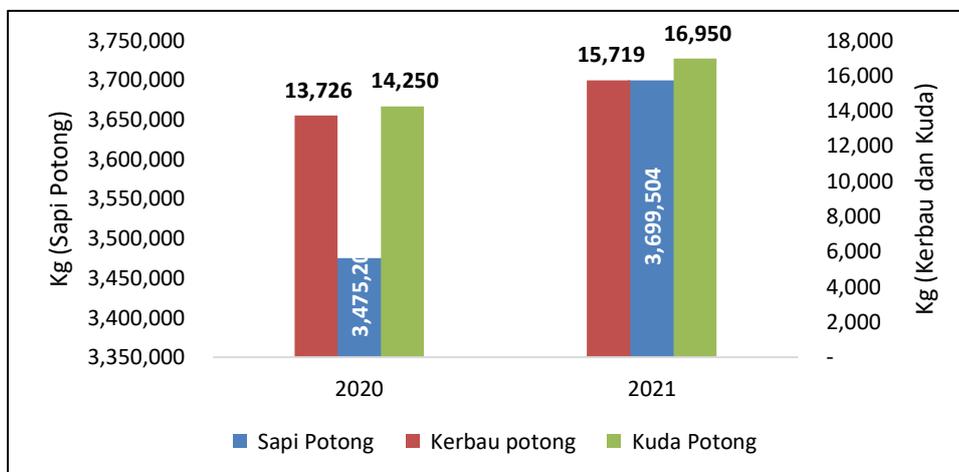
3. Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
4. Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
2. Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan.

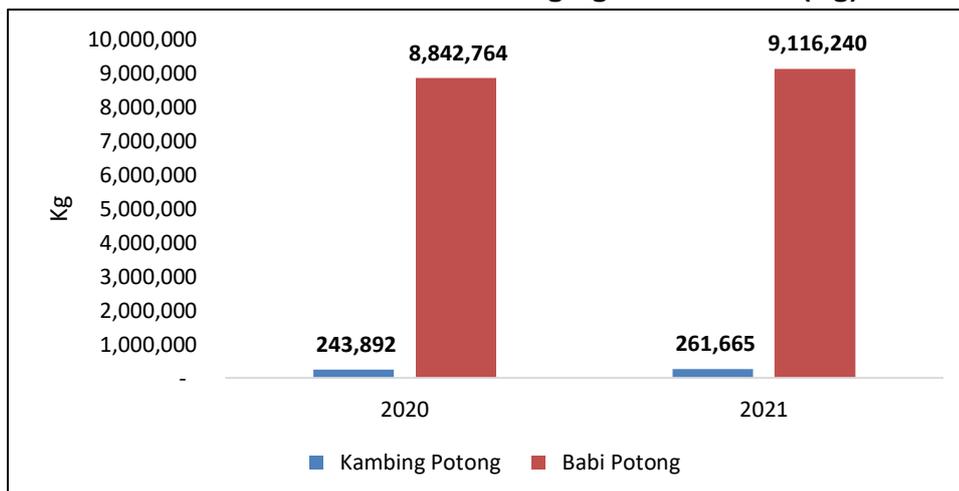
Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil dan produksi daging unggas. Untuk tahun 2021 produksi daging ternak besar mengalami peningkatan khususnya sapi potong sebesar 3,669 Juta Kg dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 3,475juta Kg.

Grafik 3.5 Jumlah Produksi Daging Ternak Besar (Kg)



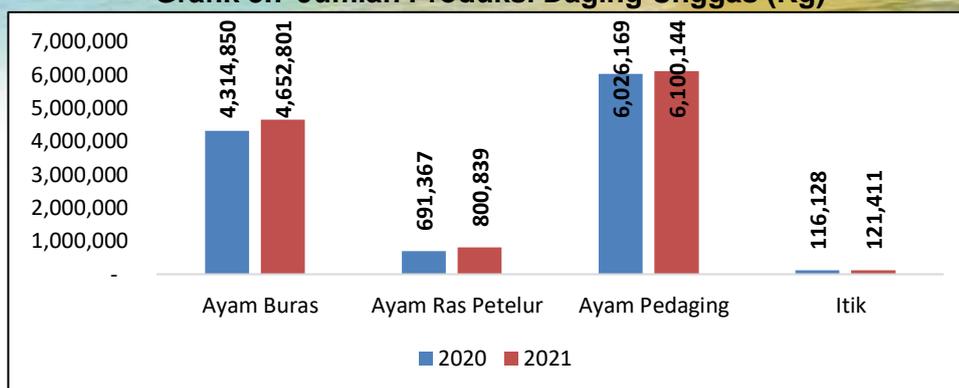
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021 (diolah)

Grafik 3.6 Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil (Kg)



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021 (diolah)

Grafik 3.7 Jumlah Produksi Daging Unggas (Kg)



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021 (diolah)

Sasaran 13

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim**” sebesar **119.83 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.46 Indikator Kinerja Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,60	94.02	100.44
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,10	90.00	113.78
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	82,70	111.00	134.22
4.	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq /juta Rp	0,343	0,449	130.90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					119.83

Rata-rata capaian ini 119.83% lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 82,915% dan tahun 2019 yaitu 43.75%. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019-2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.47 Indikator Kinerja Sasaran 13 untuk Tahun 2019-2021

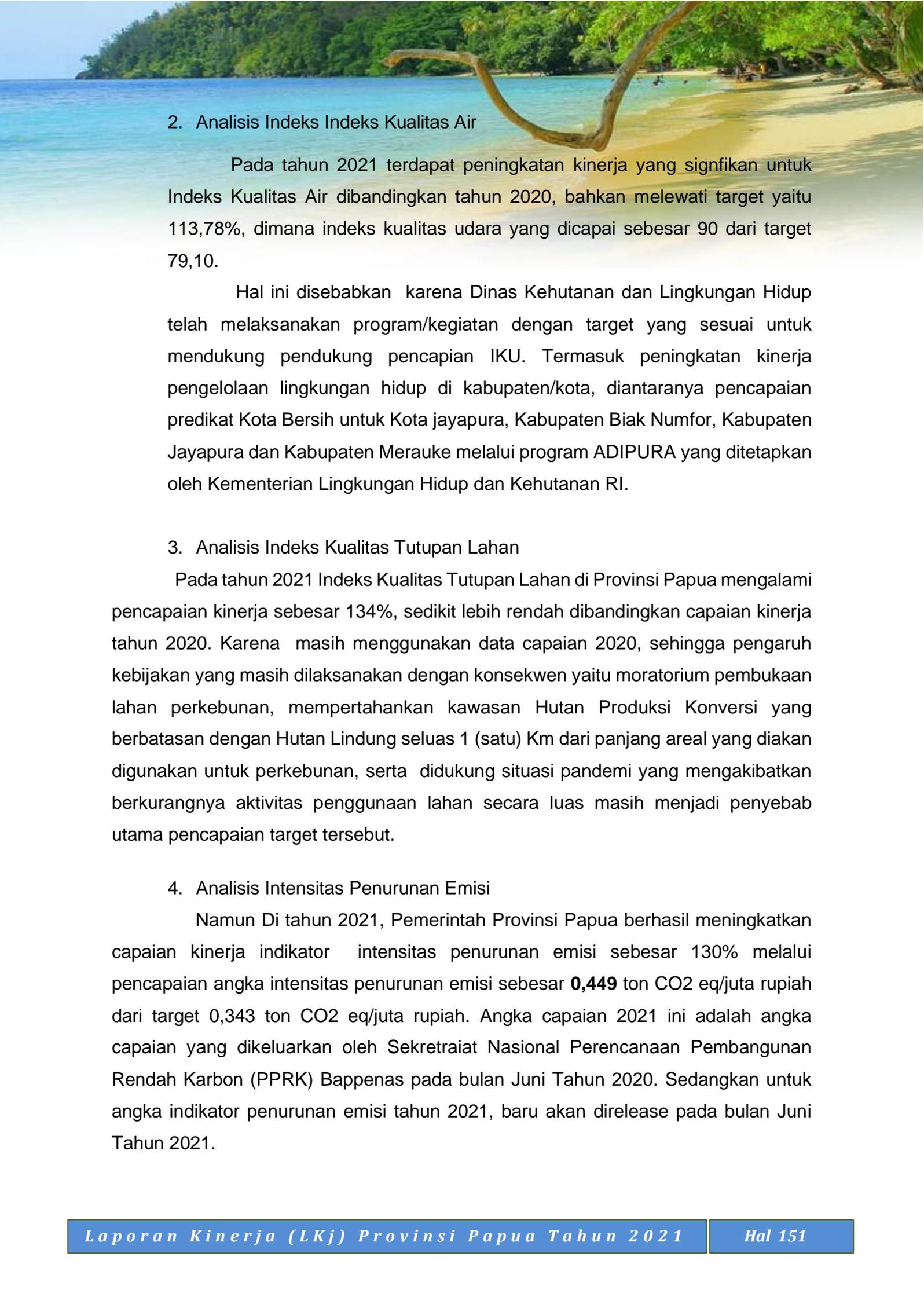
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN									
			2019			2020			2021			
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAIAN (%)	
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,3	N/A	0	92,9	90	97,82	93,62	94,02	100,43	
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,2	N/A	0	78,7	77	97,84	79,10	90	113,78	
3.	Indeks Kualitasutupan Lahan	Indeks	80,4	92,64	115	81,5	111	136	82,7	111	134	
4	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq/juta Rp	0,39	0,65	60	0,37	N/A	0	0,343	0,449	130	
Capaian Indikator kinerja					43.75				82.915			

Sasaran “meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim” diukur dengan 4 (empat) Indikator yaitu :

1. Analisis Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja yang signifikan untuk Indeks Kualitas Udara dibandingkan tahun 2020, bahkan melewati target yaitu 100,43%, dimana indeks kualitas udara yang dicapai sebesar 94,02 dari target 93,62.

Hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program/kegiatan dengan target yang sesuai untuk mendukung pendukung pencapaian IKU. Termasuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, diantaranya pencapaian predikat Kota Bersih untuk Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke melalui program ADIPURA yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.



2. Analisis Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja yang signifikan untuk Indeks Kualitas Air dibandingkan tahun 2020, bahkan melewati target yaitu 113,78%, dimana indeks kualitas udara yang dicapai sebesar 90 dari target 79,10.

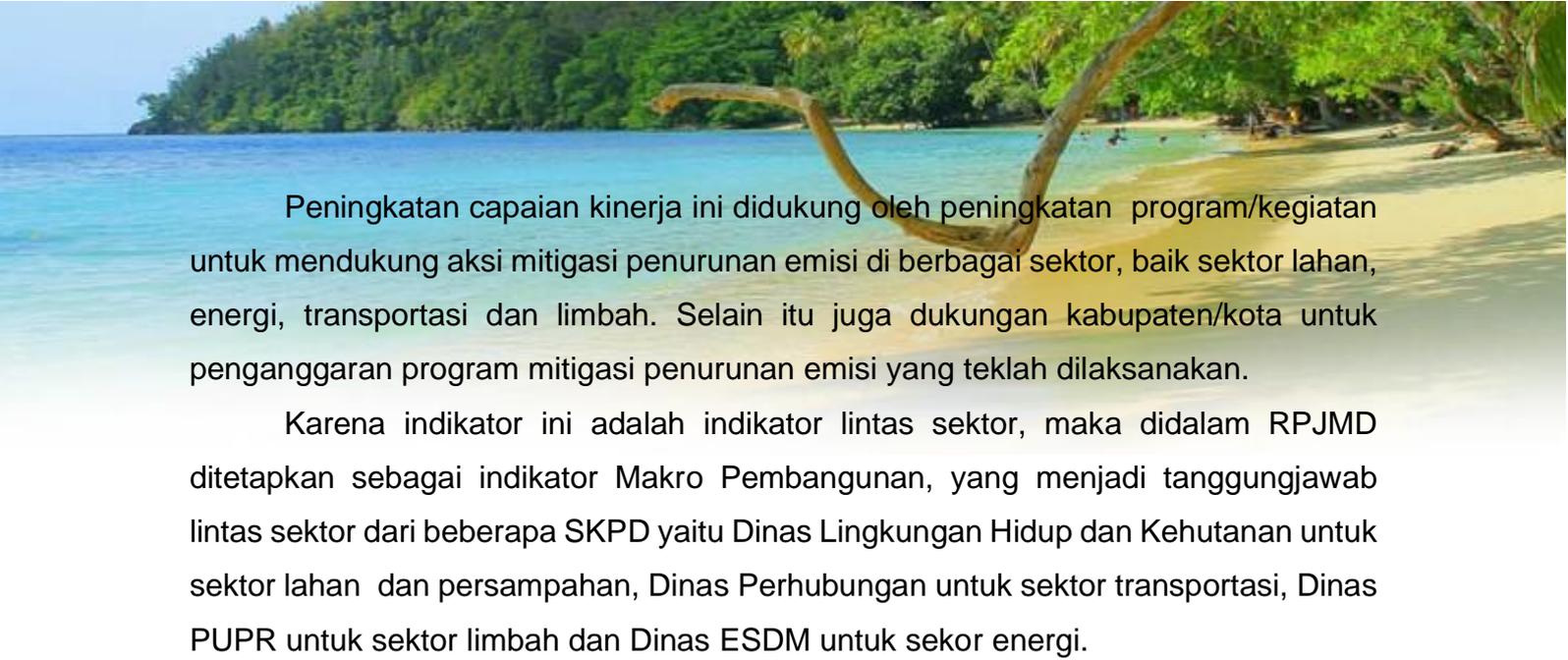
Hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program/kegiatan dengan target yang sesuai untuk mendukung pendukung pencapaian IKU. Termasuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, diantaranya pencapaian predikat Kota Bersih untuk Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke melalui program ADIPURA yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

3. Analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Papua mengalami pencapaian kinerja sebesar 134%, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2020. Karena masih menggunakan data capaian 2020, sehingga pengaruh kebijakan yang masih dilaksanakan dengan konsekwen yaitu moratorium pembukaan lahan perkebunan, mempertahankan kawasan Hutan Produksi Konversi yang berbatasan dengan Hutan Lindung seluas 1 (satu) Km dari panjang areal yang diakan digunakan untuk perkebunan, serta didukung situasi pandemi yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas penggunaan lahan secara luas masih menjadi penyebab utama pencapaian target tersebut.

4. Analisis Intensitas Penurunan Emisi

Namun Di tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua berhasil meningkatkan capaian kinerja indikator intensitas penurunan emisi sebesar 130% melalui pencapaian angka intensitas penurunan emisi sebesar **0,449** ton CO₂ eq/juta rupiah dari target 0,343 ton CO₂ eq/juta rupiah. Angka capaian 2021 ini adalah angka capaian yang dikeluarkan oleh Sekretraiat Nasional Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Bappenas pada bulan Juni Tahun 2020. Sedangkan untuk angka indikator penurunan emisi tahun 2021, baru akan direlease pada bulan Juni Tahun 2021.



Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh peningkatan program/kegiatan untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi di berbagai sektor, baik sektor lahan, energi, transportasi dan limbah. Selain itu juga dukungan kabupaten/kota untuk penganggaran program mitigasi penurunan emisi yang telah dilaksanakan.

Karena indikator ini adalah indikator lintas sektor, maka didalam RPJMD ditetapkan sebagai indikator Makro Pembangunan, yang menjadi tanggungjawab lintas sektor dari beberapa SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sektor lahan dan persampahan, Dinas Perhubungan untuk sektor transportasi, Dinas PUPR untuk sektor limbah dan Dinas ESDM untuk sektor energi.

Catatan :

Terdapat kesalahan data intensitas penurunan emisi didalam RPJMD, dimana tertulis target thn 2021 adalah sebesar 47.370.37 Ton CO2/Rupiah, seharusnya adalah 0.343 Ton CO2/Juta Rupiah.

Sasaran 14

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Maritim Dan Kelautan Yang Berbasis Pada Pendayagunaan Potensi Sumberdaya Secara Berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan yang selanjutnya akan mendukung pencapaian **Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.**

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dengan indikator “Kontribusi Sub Sektor perikanan Terhadap PDRB”.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Maritim Dan Kelautan Yang Berbasis Pada Pendayagunaan Potensi Sumberdaya Secara Berkelanjutan**” sebesar **51.90 persen** dengan predikat “**Kurang Berhasil**”,

dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.48 Indikator Kinerja Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.67	4.50	51.90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					51.90

Sumber : BPS, 2021, (diolah)

Berikut perkembangan Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB dari Tahun 2019-2021 terlihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Table 3.49 Indikator Kinerja Sasaran 14 untuk Tahun 2019-2021

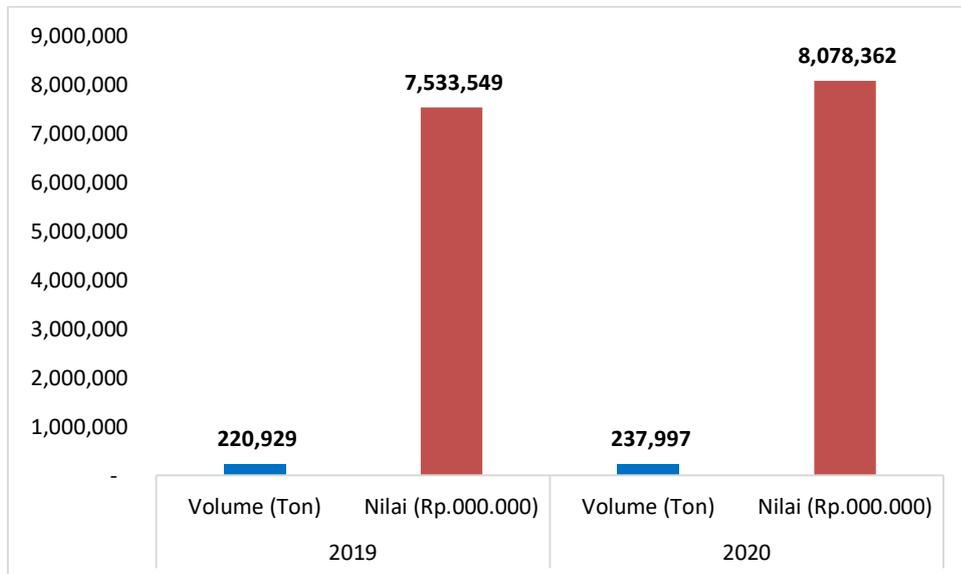
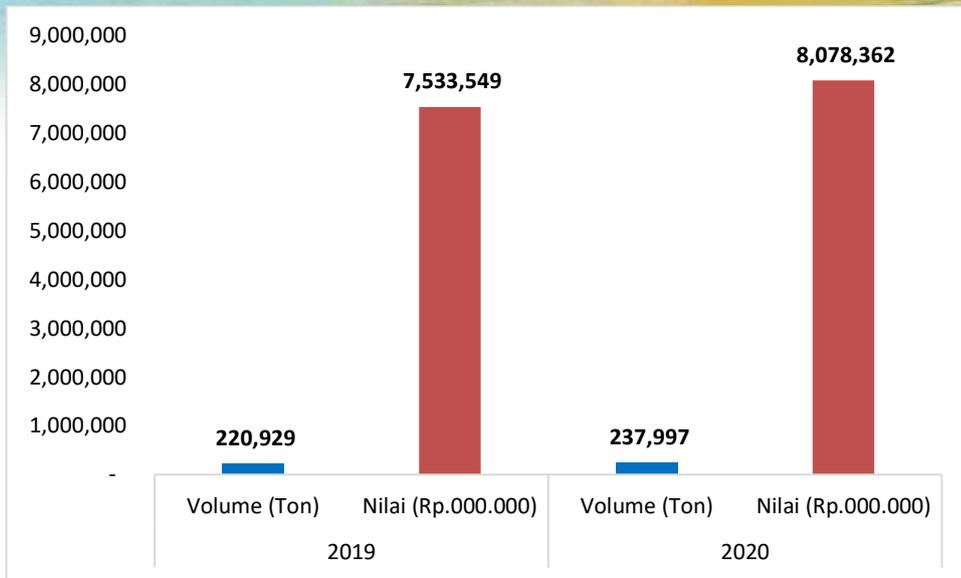
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	6.27	6.00	95.69	7.37	5.07	68.79	8.67	4.50	51.90

Sumber : BPS, 2022, (diolah)

Indikator kinerja **Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB** ditargetkan 8,67 persen dan terealisasi 4,50 persen dengan capaian kinerja 51,90 persen pada tahun 2021. Lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 yang mencapai 68,79 persen dan tahun 2019 mencapai 95,69 persen. Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan kontribusi, di tahun 2019 kontribusi mencapai sebesar 6,0 persen, mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kontribusi 5,07 persen dan tahun 2021 hanya mencapai 4,50 persen.

Hal ini menandakan bahwa Sub Sektor Perikanan masih terdampak dari pandemic covid-19 di tahun 2020 serta diperlukan kebijakan dan dukungan dari SKPD terkait dalam mendorong peningkatan produksi perikanan yang merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Papua dalam menggerakkan prekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**Grafik 3.8 Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Papua tahun 2019 & 2021 (Volume dan Nilai)**



Sumber : BPS, 2021(diolah)

Sasaran 15**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**” sebesar **98,73 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.50 Indikator Kinerja Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	97.84	96.6	98.73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					98.73

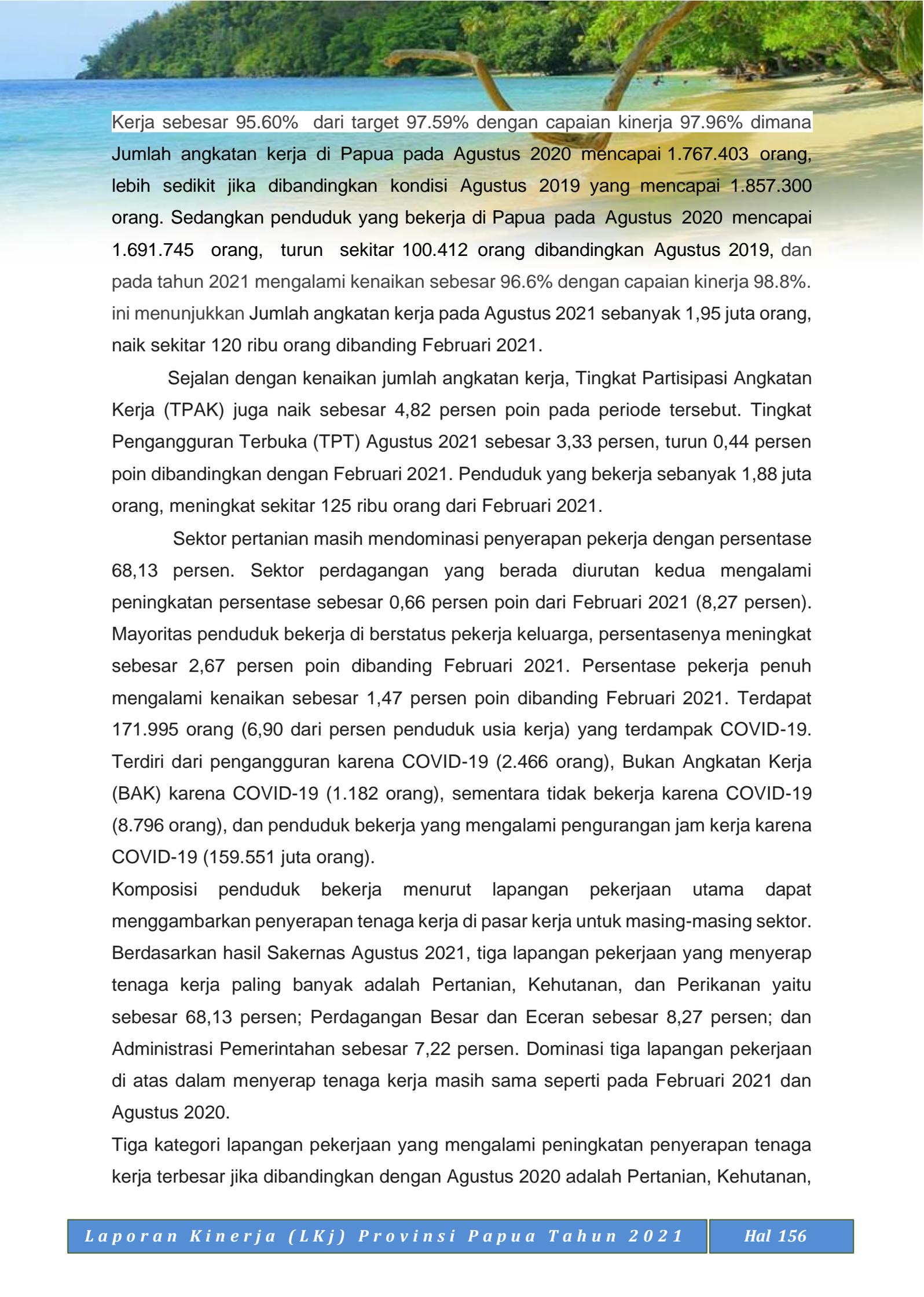
Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.51

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun								
		2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Kesempatan Kerja	Tahun	97.34	96.35	98.98	97,59	95,60	97,96	97.84	96.6	98.73

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2019 sebesar 96.35% dari target 97.34% dengan capaian kinerja sebesar 98,98% yang mana Jumlah angkatan kerja di Papua pada Agustus 2019 mencapai 1.842.203 orang, bertambah 6.240 orang dibanding kondisi Agustus 2018. Sedangkan penduduk yang bekerja di Papua pada Agustus 2019 mencapai 1.775.030 orang, bertambah 28.067 orang dibandingkan Februari 2019 namun berkurang 2.177 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2018), sementara pada tahun 2020 Tingkat Kesempatan



Kerja sebesar 95.60% dari target 97.59% dengan capaian kinerja 97.96% dimana Jumlah angkatan kerja di Papua pada Agustus 2020 mencapai 1.767.403 orang, lebih sedikit jika dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang mencapai 1.857.300 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja di Papua pada Agustus 2020 mencapai 1.691.745 orang, turun sekitar 100.412 orang dibandingkan Agustus 2019, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96.6% dengan capaian kinerja 98.8%. ini menunjukkan Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 1,95 juta orang, naik sekitar 120 ribu orang dibanding Februari 2021.

Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 4,82 persen poin pada periode tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,33 persen, turun 0,44 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 1,88 juta orang, meningkat sekitar 125 ribu orang dari Februari 2021.

Sektor pertanian masih mendominasi penyerapan pekerja dengan persentase 68,13 persen. Sektor perdagangan yang berada di urutan kedua mengalami peningkatan persentase sebesar 0,66 persen poin dari Februari 2021 (8,27 persen). Mayoritas penduduk bekerja di berstatus pekerja keluarga, persentasenya meningkat sebesar 2,67 persen poin dibanding Februari 2021. Persentase pekerja penuh mengalami kenaikan sebesar 1,47 persen poin dibanding Februari 2021. Terdapat 171.995 orang (6,90 dari persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2.466 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1.182 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (8.796 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (159.551 juta orang).

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 68,13 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8,27 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 7,22 persen. Dominasi tiga lapangan pekerjaan di atas dalam menyerap tenaga kerja masih sama seperti pada Februari 2021 dan Agustus 2020.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan (1,22 persen poin); Transportasi dan Pergudangan (0,32 persen poin); dan Jasa Perusahaan (0,14 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Industri Pengolahan (-0,40 persen poin); Administrasi Pemerintahan (-0,29 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran (-0,26 persen poin) Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Perdagangan Besar dan Eceran (0,66 persen poin); Transportasi dan Pergudangan (0,51 persen poin); dan Jasa Perusahaan (0,44 persen poin). Sementara itu, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-0,97 persen poin); Jasa Pendidikan (-0,63 persen poin); dan Jasa Lainnya (-0,44 persen poin).

Seiring jumlah penduduk Papua yang semakin bertambah, kebutuhan akan kesempatan kerja juga semakin bertambah. Tingkat kesempatan kerja mengukur sejauh mana penduduk usia kerja memperoleh kesempatan bekerja dari seluruh angkatan kerja yang tersedia. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 69,10 persen. TPAK baik pada laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan dibandingkan dua pendataan sebelumnya.

Gambar 3.2 Keadaan Ketenagakerjaan Papua Agustus 2021



Sasaran 16**Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi pada Sektor-Sektor Andalan Daerah**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah**” sebesar **3,92 persen** dengan predikat “**tidak berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.52 Indikator Kinerja Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	60.49	3,34	5,52
2	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	86.08	2,00	2,32
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					3.92

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.53

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
		2019			2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	56,36	42,45	75,32	58,39	1,13	1,94	60,49	3,34	5,52
2	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	77,65	503,64	648,6	81,75	1,53	1,87	86,08	2,00	2,32
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					361,96			1,90			3,92

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indikator pertama yaitu **jumlah nilai investasi PMDN** tahun 2021 dengan **target** sebanyak **60,49 triliun** dan realisasi sebanyak **3,34 triliun** sehingga **tercapai kinerja** sebanyak **5,52 persen**, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat rendah, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2020 dengan target sebanyak 58,39 triliun dan realisasi sebanyak **1,13** triliun dengan capaian kinerja sebesar **1,94** persen sehingga mengalami peningkatan capaian kinerja sebanyak **3,58** persen.

Kemudian untuk Indikator yang kedua yaitu **jumlah nilai investasi PMA** tahun 2021 dengan **target** sebanyak **86,08 triliun** dan **realisasi** sebanyak **2,00 triliun** dengan capaian kinerja sebanyak **2,32 persen**, hal ini juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat rendah, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja jumlah nilai investasi PMA tahun 2020 dengan target sebanyak 81,75 triliun dan realisasi sebanyak 1,53 triliun dengan capaian kinerja sebanyak 1,87 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,79 persen capaian kinerja.

Realisasi kinerja dari sasaran startegis “Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan (2) Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan untuk tahun 2019 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Yang menjadi acuan dalam pencapaian IKU SKPD dan penyusunan LKJ adalah berdasarkan data yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
2. Rendahnya capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19.
3. Target kinerja dalam IKU SKPD terlalu besar sehingga capaian kinerja menjadi sangat kecil.
4. Peningkatan realisasi nilai investasi tidak mencapai target dikarenakan :
 - a. Masih adanya permasalahan penanaman modal
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian penanaman modal dalam hal pemantauan, pengawasan dan pembinaan karena membutuhkan biaya tinggi.
 - c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban investor yang berinvestasi di Papua.
5. Terbatasnya sumber daya aparatur dan keseriusan dalam mengolah data perkembangan penanaman modal di Papua.

Berikut adalah perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54 Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya pada Tahun 2020 & Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatan-nya	perusahaan	25	22	14	22

Sasaran 17

Meningkatnya Akses Transportasi Berbasis Antar Moda Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah/Daerah Dan Akses Bagi Seluruh Wilayah.

Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah**” adalah **134,15** persen atau dalam skala ordinal adalah “**Sangat Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

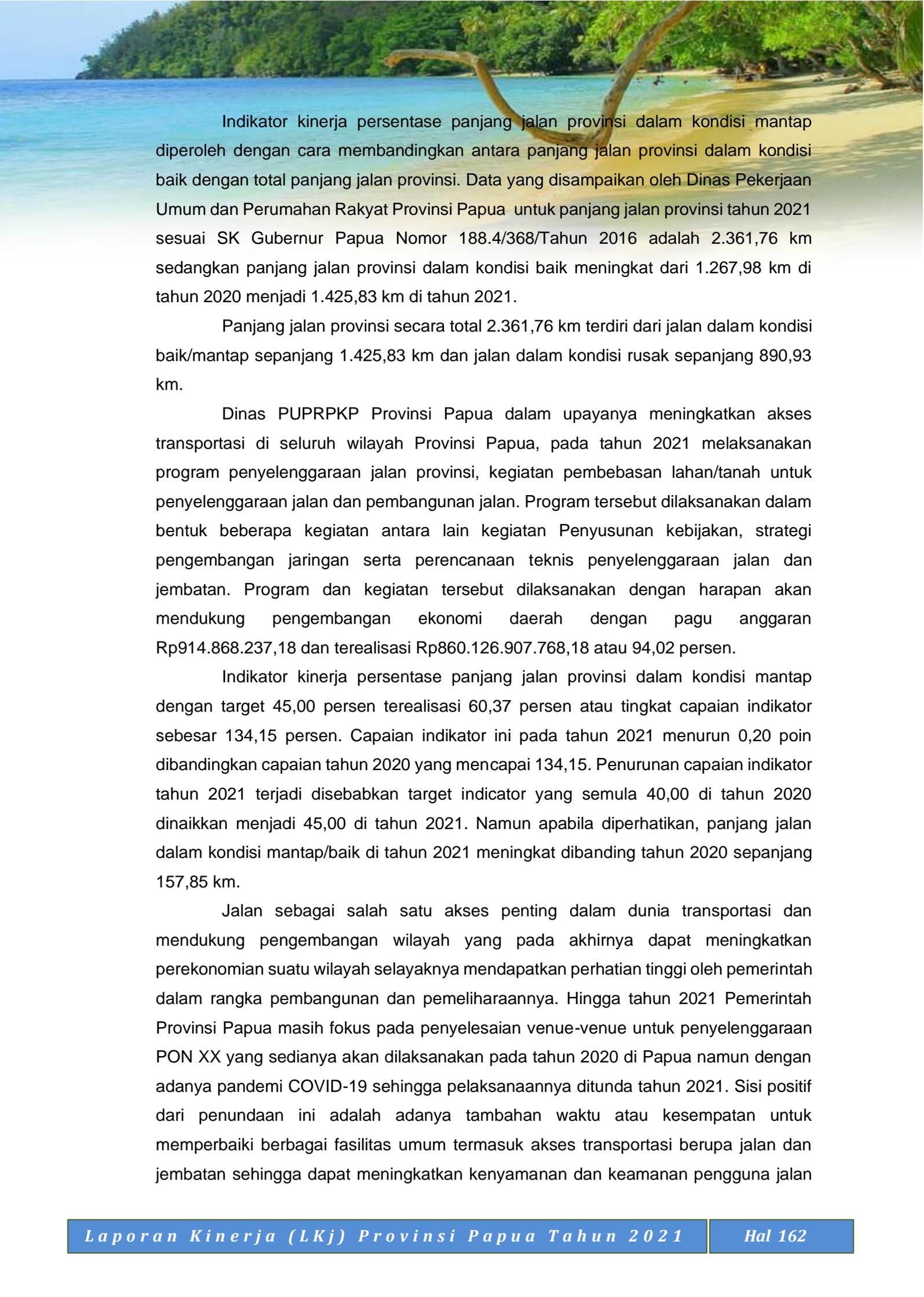
Tabel 3.55 Indikator Kinerja Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi	Persen	45.00	60.37	134.15
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					134.15

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.56 Indikator Kinerja Sasaran 17 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	32,00	53,19	166,22	40,00	53,69	134,23	45,00	60,37	134,15



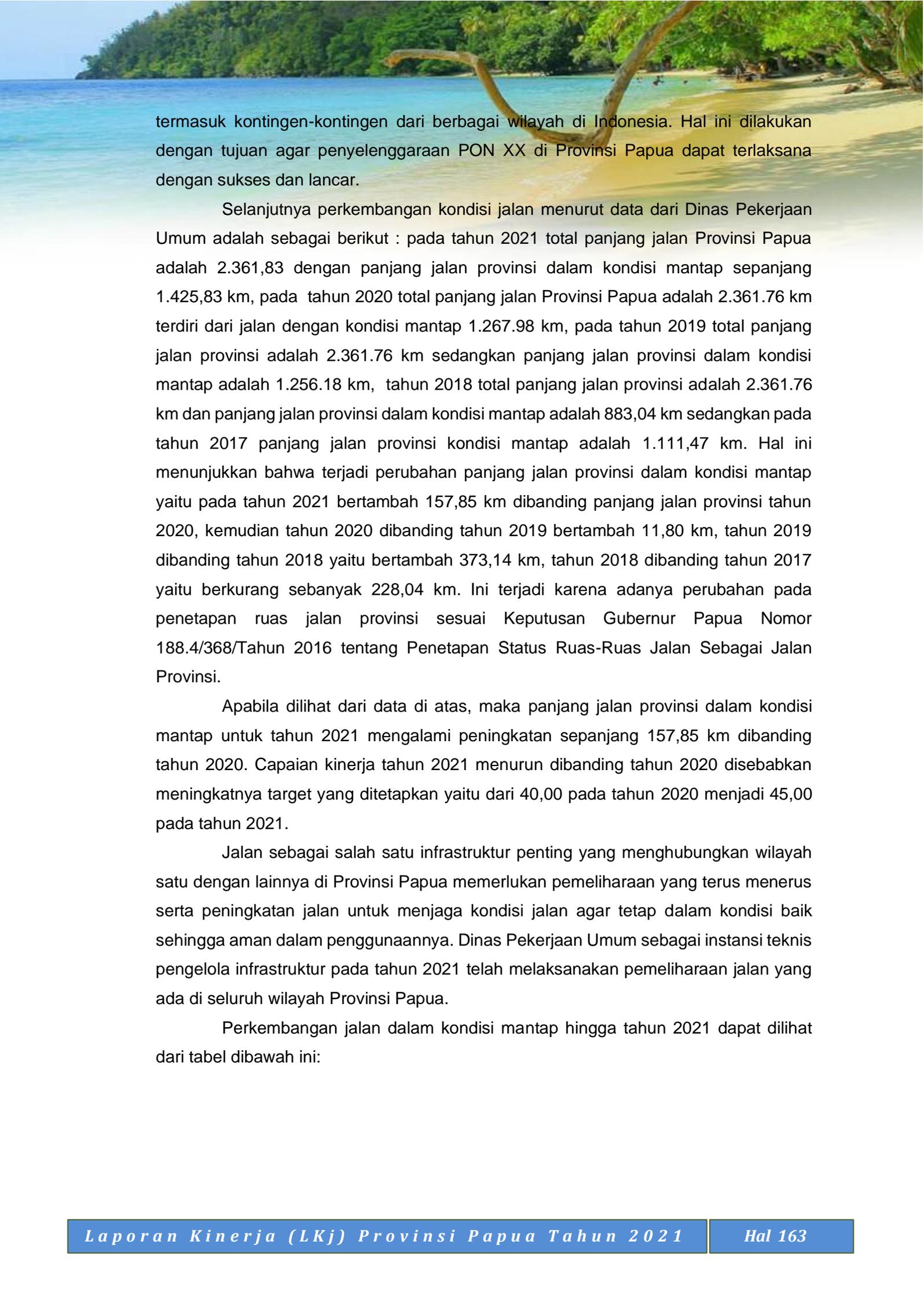
Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dengan total panjang jalan provinsi. Data yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua untuk panjang jalan provinsi tahun 2021 sesuai SK Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 adalah 2.361,76 km sedangkan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik meningkat dari 1.267,98 km di tahun 2020 menjadi 1.425,83 km di tahun 2021.

Panjang jalan provinsi secara total 2.361,76 km terdiri dari jalan dalam kondisi baik/mantap sepanjang 1.425,83 km dan jalan dalam kondisi rusak sepanjang 890,93 km.

Dinas PUPRKP Provinsi Papua dalam upayanya meningkatkan akses transportasi di seluruh wilayah Provinsi Papua, pada tahun 2021 melaksanakan program penyelenggaraan jalan provinsi, kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan dan pembangunan jalan. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk beberapa kegiatan antara lain kegiatan Penyusunan kebijakan, strategi pengembangan jaringan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan akan mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan pagu anggaran Rp914.868.237,18 dan terealisasi Rp860.126.907.768,18 atau 94,02 persen.

Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan target 45,00 persen terealisasi 60,37 persen atau tingkat capaian indikator sebesar 134,15 persen. Capaian indikator ini pada tahun 2021 menurun 0,20 poin dibandingkan capaian tahun 2020 yang mencapai 134,15. Penurunan capaian indikator tahun 2021 terjadi disebabkan target indikator yang semula 40,00 di tahun 2020 dinaikkan menjadi 45,00 di tahun 2021. Namun apabila diperhatikan, panjang jalan dalam kondisi mantap/baik di tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 sepanjang 157,85 km.

Jalan sebagai salah satu akses penting dalam dunia transportasi dan mendukung pengembangan wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah selayaknya mendapatkan perhatian tinggi oleh pemerintah dalam rangka pembangunan dan pemeliharannya. Hingga tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua masih fokus pada penyelesaian venue-venue untuk penyelenggaraan PON XX yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2020 di Papua namun dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaannya ditunda tahun 2021. Sisi positif dari penundaan ini adalah adanya tambahan waktu atau kesempatan untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum termasuk akses transportasi berupa jalan dan jembatan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan



termasuk kontingen-kontingen dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua dapat terlaksana dengan sukses dan lancar.

Selanjutnya perkembangan kondisi jalan menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : pada tahun 2021 total panjang jalan Provinsi Papua adalah 2.361,83 dengan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 1.425,83 km, pada tahun 2020 total panjang jalan Provinsi Papua adalah 2.361.76 km terdiri dari jalan dengan kondisi mantap 1.267.98 km, pada tahun 2019 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km sedangkan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 1.256.18 km, tahun 2018 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km dan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 883,04 km sedangkan pada tahun 2017 panjang jalan provinsi kondisi mantap adalah 1.111,47 km. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap yaitu pada tahun 2021 bertambah 157,85 km dibanding panjang jalan provinsi tahun 2020, kemudian tahun 2020 dibanding tahun 2019 bertambah 11,80 km, tahun 2019 dibanding tahun 2018 yaitu bertambah 373,14 km, tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu berkurang sebanyak 228,04 km. Ini terjadi karena adanya perubahan pada penetapan ruas jalan provinsi sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

Apabila dilihat dari data di atas, maka panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sepanjang 157,85 km dibanding tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020 disebabkan meningkatnya target yang ditetapkan yaitu dari 40,00 pada tahun 2020 menjadi 45,00 pada tahun 2021.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya di Provinsi Papua memerlukan pemeliharaan yang terus menerus serta peningkatan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga aman dalam penggunaannya. Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis pengelola infrastruktur pada tahun 2021 telah melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Perkembangan jalan dalam kondisi mantap hingga tahun 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.57 Panjang Jalan Provinsi Papua Dalam Kondisi Mantap Tahun 2015-2021

Uraian	Tahun (km)						2021
	s/d 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Panjang Jalan kondisi Mantap	969,33	1.004,68	1.111,47	883,04	1.256,18	1.267,98	1.425,83

Data panjang jalan provinsi bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dalam Laporan Kinerja tahun 2021.

Rincian perkembangan data panjang jalan di Provinsi Papua dan mencakup kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua disajikan dalam sebagai tabel berikut :

Tabel 3.58 Panjang Jalan Kab/Kota se Papua Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akhir Tahun End of Year	Negara ¹ State ¹	Provinsi ² Province ²	Kabupaten/ Kota ² Regency/ Municipality ²	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Merauke	2018	351,41	419,1	...	1 732,90
	2019	351,41	419,1	...	1 732,90
	2020	...	419,1
Kabupaten Jayawijaya	2018	314,48	102,6	...	461,2
	2019	314,48	168,13	...	526,73
	2020	...	102,6
Kabupaten Jayapura	2018	153,72	384	...	1 002,70
	2019	153,72	192,18	...	810,88
	2020	...	384,02
Kabupaten Nabire	2018	283,39	105	...	937,9
	2019	283,39	359,29	...	1 192,19
	2020	...	105
Kabupaten Kepulauan Yapen	2018	75,31	148,1	...	659,4
	2019	75,31	148,05	...	586,61
	2020	...	148,05

**Tabel 3.59 Panjang Jalan Kab/Kota se Papua
Tahun 2018-2020**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akhir Tahun <i>End of Year</i>	Negara ¹ <i>State¹</i>	Provinsi ² <i>Province²</i>	Kabupaten/ Kota ² <i>Regency/ Municipality²</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Biak Numfor	2018	75,58	172	...	884,1
	2019	75,58	172	...	787,68
	2020	...	172
Kabupaten Paniai	2018	30,9	12,1	...	293
	2019	30,9	17,9	...	298,8
	2020	...	12,1
Kabupaten Puncak Jaya	2018	-	-	...	149,3
	2019	-	85	...	234,3
	2020	...	0
Kabupaten Mimika	2018	152,41	162,1	...	927,3
	2019	152,41	162,1	...	927,3
	2020	...	162,1
Kabupaten Boven Digoel	2018	181,7	43	...	899,1
	2019	181,7	43	...	899,1
	2020	...	43
Kabupaten Mappi	2018	-	84,2	...	1 400,70
	2019	-	84,15	...	1 400,70
	2020	...	84,15
Kabupaten Asmat	2018	-	886,5
	2019	-	886,5
	2020	...	0
Kabupaten Yahukimo	2018	99,3	18,5	...	386,4
	2019	99,3	86	...	453,9
	2020	...	21
Kabupaten Pegunungan Bintang	2018	126	44	...	44
	2019	126	8	...	1 006,10
	2020	...	8
Kabupaten Tolikara	2018	85	60,4	...	60,4
	2019	85	55,4	...	538,3
	2020	...	55,4

Tabel 3.60 Panjang Jalan Kab/Kota se Papua Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akhir Tahun <i>End of Year</i>	Negara ¹ <i>State¹</i>	Provinsi ² <i>Province²</i>	Kabupaten/ Kota ² <i>Regency/ Municipality²</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Sarmi	2018	154,32	37,7	...	675,9
	2019	154,32	179,2	...	817,4
	2020	...	37,7
Kabupaten Keerom	2018	271,78	86,8	...	760,5
	2019	271,78	256,73	...	930,43
	2020	...	86,8
Kabupaten Waropen	2018	-	46	...	494,1
	2019	-	46	...	494,1
	2020	...	46
Kabupaten Supiori	2018	-	79,2	...	282,4
	2019	-	79,21	...	203,2
	2020	...	79,21
Kabupaten Mamberamo Raya	2018	-	65,6	...	1 097,10
	2019	-	65,6	...	1 031,50
	2020	...	65,6
Kabupaten Nduga	2018	-	63,3	...	554,2
	2019	-	63,3	...	490,9
	2020	...	63,3
Kabupaten Lanny Jaya	2018	-	90	...	325,8
	2019	-	90	...	235,8
	2020	...	90
Kabupaten Mamberamo Tengah	2018	-	32,1	...	335,1
	2019	-	32,1	...	303
	2020	...	32,1
Kabupaten Yalimo	2018	-	21	...	141,6
	2019	-	128,25	...	248,85
	2020	...	21
Kabupaten Puncak	2018	-	0	...	392
	2019	-	0	...	392
	2020	...	0

Tabel 3.61 Panjang Jalan Kab/Kota se Papua Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akhir Tahun End of Year	Negara ¹ State ¹	Provinsi 2 Province	Kabupaten/ Kota ² Regency/ Municipality ²	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Dogiyai	2018	98	8	...	233,7
	2019	98	41,3	...	267
	2020	...	8
Kabupaten Intan Jaya	2018	-	9	...	419
	2019	-	9	...	410
	2020	...	9
Kabupaten Deiyai	2018	40,2	25	...	322,4
	2019	40,2	34	...	331,4
	2020	...	25
Kota/Municipality Kota Jayapura	2018	143,27	84	...	342,4
	2019	143,27	94,98	...	353,38
	2020	...	84,03
Papua	2020	...	2.361,76

Sumber/ Source:

¹ Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura/ National Road Implementation Centre XVIII Jayapura;

² Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua/ Public Works Service of Papua Province dalam Papua Dalam Angka Tahun 2020.

Sasaran 18**Implementasi Tata Ruang secara Konsisten.**

Salah satu orientasi pembangunan Provinsi Papua ialah orientasi **Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan**. Orientasi ini dimaksudkan bahwa Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah dimana Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Provinsi Papua. Oleh karena itu salah satu Sasaran Pembangunan Provinsi Papua adalah Implementasi Tata Ruang secara Konsisten, yang diukur dengan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Capaian kinerja sasaran **“Implementasi Tata Ruang secara Konsisten”** adalah **244.65 persen** atau dalam skala ordinal adalah **”Sangat Berhasil”**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap. Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.62 Indikator Kinerja Sasaran 18

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	40.00	97.86	244.65
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					244.65

Sumber : Perda 23/2013 RTRWP Papua, 2020, (diolah)

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.63 Indikator Kinerja Sasaran 18 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	30,00	85.00	283.00	35,00	98.00	280.00	40,00	97,86	244,65

Indikator kinerja presentase pemanfaatan ruang tahun 2021 ditargetkan 40,00 persen dan teralisasi 97,86 persen dengan capaian kinerja 244,64 persen atau melampaui dari target tahun 2021. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dari tahun 2019 mengalami peningkatan di mana tahun 2019 mencapai 85 persen, meningkat menjadi 98,00 persen di tahun 2020. Ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan telah mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2013.

Sasaran 19

Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah

Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah**” sebesar **107,14** persen dengan predikat “**sangat berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran persentase pemanfaatan sumber daya air. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaian indikator kinerjanya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.64 Indikator Kinerja Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	70.00	75.00	107.14
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					107.14

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.65 Indikator Kinerja Sasaran 19 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	%	60,00	100	166.67	65,00	100	153,67	70,00	75.00	107.14

Capaian kinerja persentase pemanfaatan sumberdaya air sebesar 107,14 diperoleh dari jumlah sumber daya air yang termanfaatkan sebesar 75 persen (sebesar 75 ltr/dtk sesuai rencana di tahun 2021) dibagi target yang ditetapkan yaitu sebesar 70 persen. Capaian kinerja tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan target yang ditetapkan dinaikkan dari 65,00 menjadi 70,00, namun secara realisasi naik dari 65,00 di tahun 2020 menjadi 75,00 di tahun 2021.

Dinas PUPRKP Provinsi Papua pada tahun 2021 melaksanakan program/kegiatan dalam upaya memenuhi target dari sasaran meningkatnya ketersediaan system pengairan yang mendukung produktifitas wilayah, yaitu program pengelolaan sumber daya air dengan kegiatannya antara lain pembangunan bangunan perkuatan tebing, pembangunan kanal banjir, dan restorasi/normalisasi sungai dengan anggaran pelaksanaan program sebesar Rp139.410.990.740,90 dan realisasi sebesar Rp 123.904.203.515,27 atau 88,88 persen.

Sumber daya air yang banyak dimanfaatkan di Provinsi Papua adalah irigasi. Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dimanfaatkan serta berfungsi dengan baik hingga tahun 2021 adalah 7.670,76 m² atau 59,53 persen dari total jaringan irigasi di wilayah Provinsi Papua sepanjang 12.885,76 m². Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik adalah 7.255,3 m².

Dari panjang jaringan irigasi tersebut, jumlah sumber daya air yang dapat dimanfaatkan adalah 100 persen atau dimanfaatkan seluruhnya dengan debit air 75 ltr/dtk.

Realisasi jaringan irigasi diwilayah provinsi Papua sebesar 100 persen dengan capaian kinerja **107,14** persen dengan kategori **sangat berhasil**. Pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga

untuk meningkatkan hal tersebut diusahakan peningkatan pelayanan irigasi untuk mengalir sawah. Data tahun 2021 untuk luas lahan produktif khusus padi yang memanfaatkan jaringan irigasi belum tersedia namun untuk tahun 2020 lahan pertanian produktif di daerah Provinsi Papua yang khusus ditanami padi adalah seluas 52.712,71 ha, untuk lahan hortikultura 155 ha dan untuk perkebunan adalah 152.555 Ha.

Sasaran 20

Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman** didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman**” adalah **170.28** persen dengan predikat “**sangat berhasil**”.

Tabel 3.66 Indikator Kinerja Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	37,54	40,31	107,3
2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	42,87	100	233,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					170.28

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.67

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 - 2021

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun									
			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	35.22	35.02	99.43	35.36	33.09	91.01	37.54	40.31	107.3	
2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	40.61	31.82	78.36	41.72	31.82	76.27	42.87	100	233.26	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					88.895				83.64			170.28

Indikator **Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik** dengan **Target 37,54 persen, Realisasi sebesar 40,31 dengan Capaian Kinerja sebesar 107,3 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**. Indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik telah dilaksanakan pada Kab/Kota se Provinsi Papua di Tahun 2021, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dimana Jamban Sehat efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Adapun Standar dan persyaratan kesehatan dibangun jamban terdiri dari :

- a. Bangunan atas Jamban (dinding atau /atap)
Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dan dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
- b. Bangunan tengah Jamban
Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban yaitu :
 - Lubang pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa ,tetapi harus diberi tutup.
 - Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air,tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limban (SPAL)
- c. Bangunan Bawah Jamban
Merupakan bangunan penampungan ,pengolah,dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja

melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk Bangunan Bawah Jamban, yaitu:

- Tengki Septi, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tengki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tengki septi dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
- Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari airtanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.
- Berikut data presentase cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik Tahun 2021 pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.68 Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik Pada Kabupaten/Kota se Papua Tahun 2016-2020

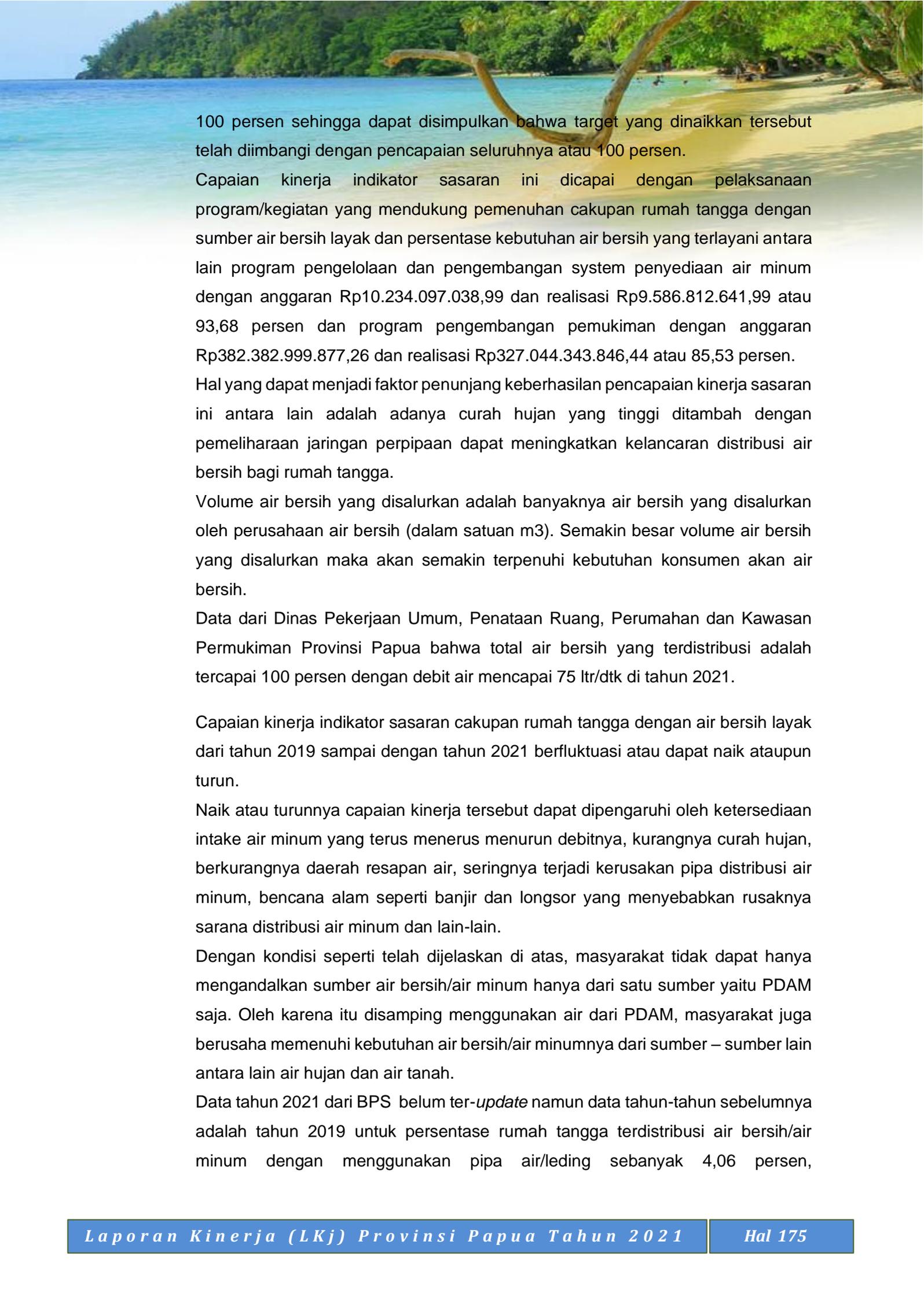
Kabupaten/Kota		2016	2017	2018	2019	2020	
Regency/Municipality		-1	-3	-4	-5	-6	-7
Kabupaten/Regency							
1.	Merauke	41,21	57,15	64,56	80,34	74,02	
2.	Jayawijaya	30,15	30,21	32,06	19,18	21,82	
3.	Jayapura	51,65	66,71	73,77	69,52	73,28	
4.	Nabire	56,39	71,91	63,36	73,07	83,32	
5.	Kepulauan Yapen	58,2	64,3	59,14	65,32	57,66	
6.	Biak Numfor	66,59	88,72	69,52	72,73	84	
7.	Paniai	8,7	13,41	6,29	7,88	6,19	
8.	Puncak Jaya	5,04	10,15	14,58	5,33	10,23	
9.	Mimika	77,96	78,56	87,65	83,31	89,98	
10.	Boven Digoel	21,78	41,30	34,72	63,25	66,37	

11.	Mappi	16,62	26,79	16,89	25,06	26,19
12.	Asmat	6,28	13,11	0,57	6,84	23,28
13.	Yahukimo	3,37	5,33	5,44	4,31	14,32
14.	Pegunungan Bintang	13,28	38,94	29,92	36,29	30,14
15.	Tolikara	6,54	10,79	4,49	6,79	5,41
16.	Sarmi	42,86	62,18	56,45	73,29	60,77
17.	Keerom	50,00	54,18	56,45	73,29	60,77
18.	Waropen	83,24	84,40	67,08	86,54	92,85
19.	Supiori	81,56	78,47	64,90	72,56	81,47
20.	Mamberamo Raya	15,91	11,84	23,8	51,48	56,49
21.	Nduga	-	2,05	0,21	3,82	0,21
22.	Lanny Jaya	1,05	0,44	0,50	7,35	6,1
23.	Mamberamo Tengah	-	-	-	2,92	3,23
24.	Yalimo	2,61	5,23	6,81	14,52	28,35
25.	Puncak	3,00	10,00	0,39	2,71	6,91
26.	Dogiyai	6,85	11,62	1,49	6,92	18,92
27.	Intan Jaya	9,09	2,65	4,04	3,37	-
28.	Deiyai	-	5,51	3,76	1,37	0,74
Kota/Municipality						
1.	Jayapura	78,92	71,26	76,09	86,22	81,55
	PAPUA	27,60	36,29	33,75	38,27	40,31

Sumber Data BPS tahun 2021

Capaian kinerja indikator cakupan rumah tangga dengan air bersih layak dengan **target** yang ditetapkan sebesar **42,87** dan realisasi **100** persen adalah **233,26 persen** dengan predikat **sangat berhasil**.

Capaian kinerja tahun 2021 turun namun tidak signifikan dibanding tahun 2020 yaitu dari 239,69 menjadi 233,26 atau turun 6,43 poin. Penurunan capaian kinerja terjadi disebabkan target tahun 2021 dinaikkan menjadi 42,87 persen dari semula 41,72 persen. Apabila dilihat dari segi kinerja, target yang ditetapkan telah tercapai



100 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa target yang dinaikkan tersebut telah diimbangi dengan pencapaian seluruhnya atau 100 persen.

Capaian kinerja indikator sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pemenuhan cakupan rumah tangga dengan sumber air bersih layak dan persentase kebutuhan air bersih yang terlayani antara lain program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum dengan anggaran Rp10.234.097.038,99 dan realisasi Rp9.586.812.641,99 atau 93,68 persen dan program pengembangan pemukiman dengan anggaran Rp382.382.999.877,26 dan realisasi Rp327.044.343.846,44 atau 85,53 persen.

Hal yang dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah adanya curah hujan yang tinggi ditambah dengan pemeliharaan jaringan perpipaan dapat meningkatkan kelancaran distribusi air bersih bagi rumah tangga.

Volume air bersih yang disalurkan adalah banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih (dalam satuan m³). Semakin besar volume air bersih yang disalurkan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan konsumen akan air bersih.

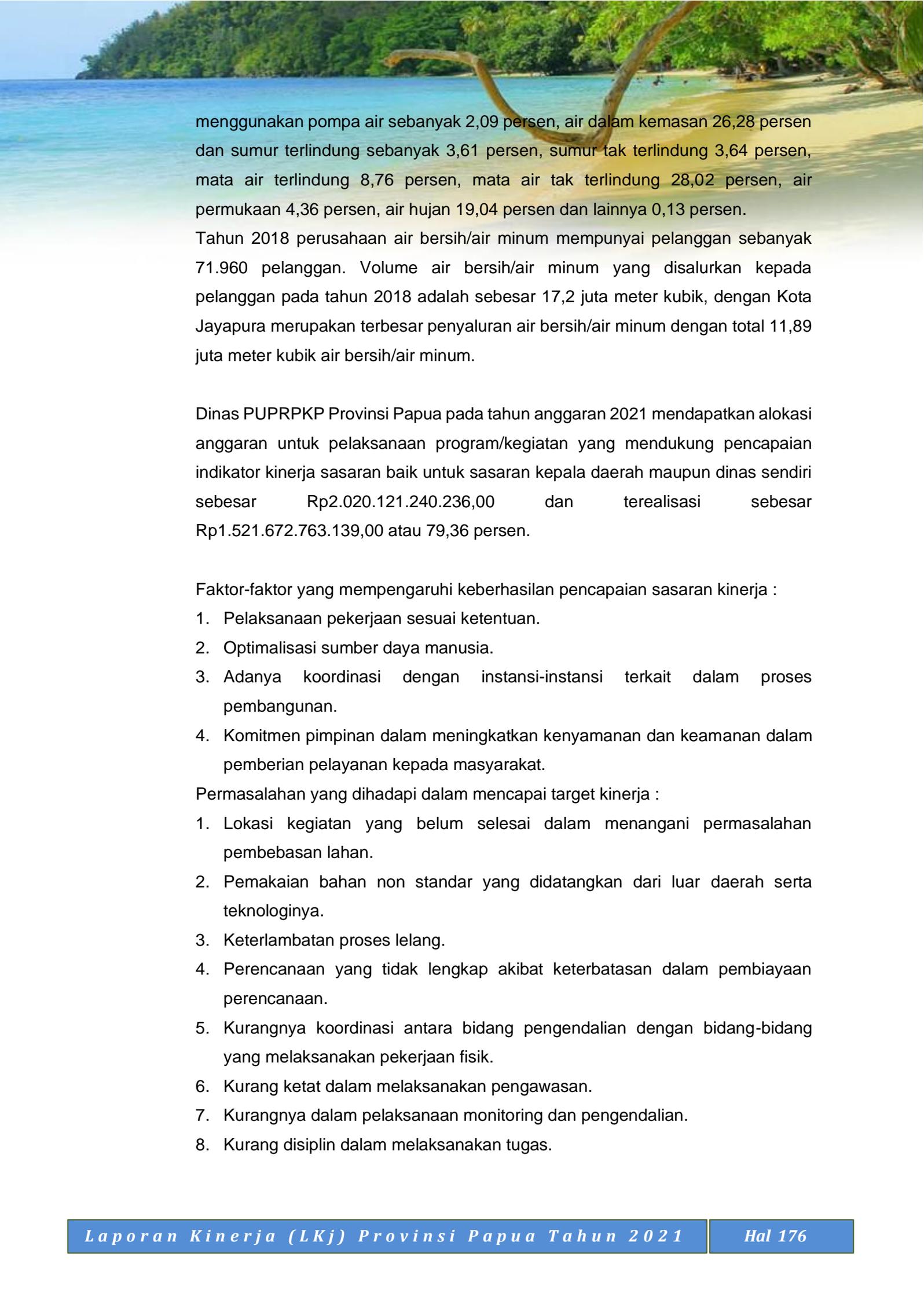
Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua bahwa total air bersih yang terdistribusi adalah tercapai 100 persen dengan debit air mencapai 75 ltr/dtk di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator sasaran cakupan rumah tangga dengan air bersih layak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi atau dapat naik ataupun turun.

Naik atau turunnya capaian kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh ketersediaan intake air minum yang terus menerus menurun debitnya, kurangnya curah hujan, berkurangnya daerah resapan air, seringnya terjadi kerusakan pipa distribusi air minum, bencana alam seperti banjir dan longsor yang menyebabkan rusaknya sarana distribusi air minum dan lain-lain.

Dengan kondisi seperti telah dijelaskan di atas, masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan sumber air bersih/air minum hanya dari satu sumber yaitu PDAM saja. Oleh karena itu disamping menggunakan air dari PDAM, masyarakat juga berusaha memenuhi kebutuhan air bersih/air minumnya dari sumber – sumber lain antara lain air hujan dan air tanah.

Data tahun 2021 dari BPS belum ter-*update* namun data tahun-tahun sebelumnya adalah tahun 2019 untuk persentase rumah tangga terdistribusi air bersih/air minum dengan menggunakan pipa air/leding sebanyak 4,06 persen,



menggunakan pompa air sebanyak 2,09 persen, air dalam kemasan 26,28 persen dan sumur terlindung sebanyak 3,61 persen, sumur tak terlindung 3,64 persen, mata air terlindung 8,76 persen, mata air tak terlindung 28,02 persen, air permukaan 4,36 persen, air hujan 19,04 persen dan lainnya 0,13 persen.

Tahun 2018 perusahaan air bersih/air minum mempunyai pelanggan sebanyak 71.960 pelanggan. Volume air bersih/air minum yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2018 adalah sebesar 17,2 juta meter kubik, dengan Kota Jayapura merupakan terbesar penyaluran air bersih/air minum dengan total 11,89 juta meter kubik air bersih/air minum.

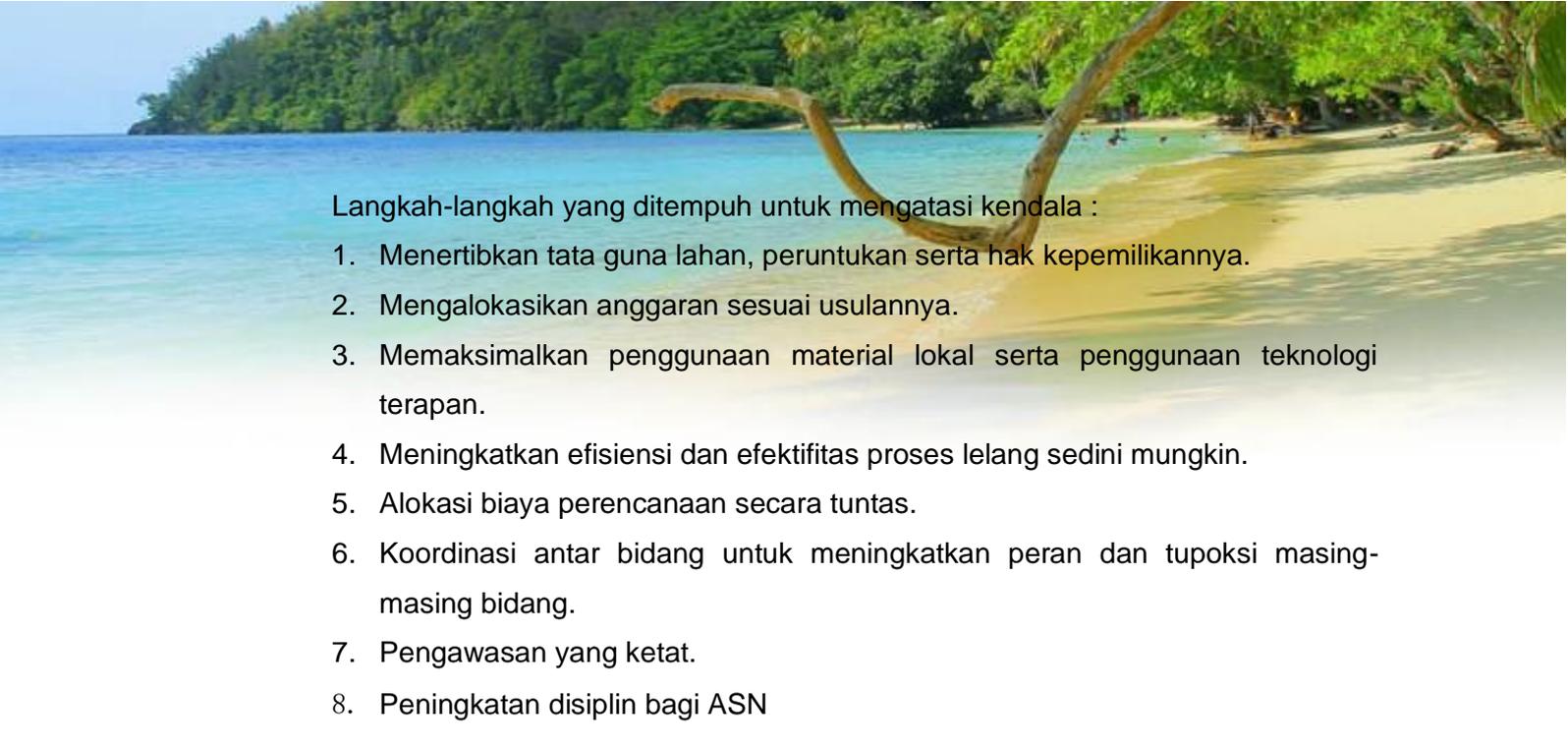
Dinas PUPRKP Provinsi Papua pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran baik untuk sasaran kepala daerah maupun dinas sendiri sebesar Rp2.020.121.240.236,00 dan terealisasi sebesar Rp1.521.672.763.139,00 atau 79,36 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja :

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi sumber daya manusia.
3. Adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam proses pembangunan.
4. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

1. Lokasi kegiatan yang belum selesai dalam menangani permasalahan pembebasan lahan.
2. Pemakaian bahan non standar yang didatangkan dari luar daerah serta teknologinya.
3. Keterlambatan proses lelang.
4. Perencanaan yang tidak lengkap akibat keterbatasan dalam pembiayaan perencanaan.
5. Kurangnya koordinasi antara bidang pengendalian dengan bidang-bidang yang melaksanakan pekerjaan fisik.
6. Kurang ketat dalam melaksanakan pengawasan.
7. Kurangnya dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian.
8. Kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.



Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala :

1. Menertibkan tata guna lahan, peruntukan serta hak kepemilikannya.
2. Mengalokasikan anggaran sesuai usulannya.
3. Memaksimalkan penggunaan material lokal serta penggunaan teknologi terapan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses lelang sedini mungkin.
5. Alokasi biaya perencanaan secara tuntas.
6. Koordinasi antar bidang untuk meningkatkan peran dan tupoksi masing-masing bidang.
7. Pengawasan yang ketat.
8. Peningkatan disiplin bagi ASN

Sasaran 21

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung

Capaian kinerja untuk sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung**” mencapai **7,94** persen dengan predikat “**Tidak Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.69 Indikator Kinerja Sasaran 21

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	48,38	3,84	7,94
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					7.94

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.70 Indikator Kinerja Sasaran 21 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	45.02	3.84	8.53	46.67	3.84	8.53	48.38	3.84	7.94

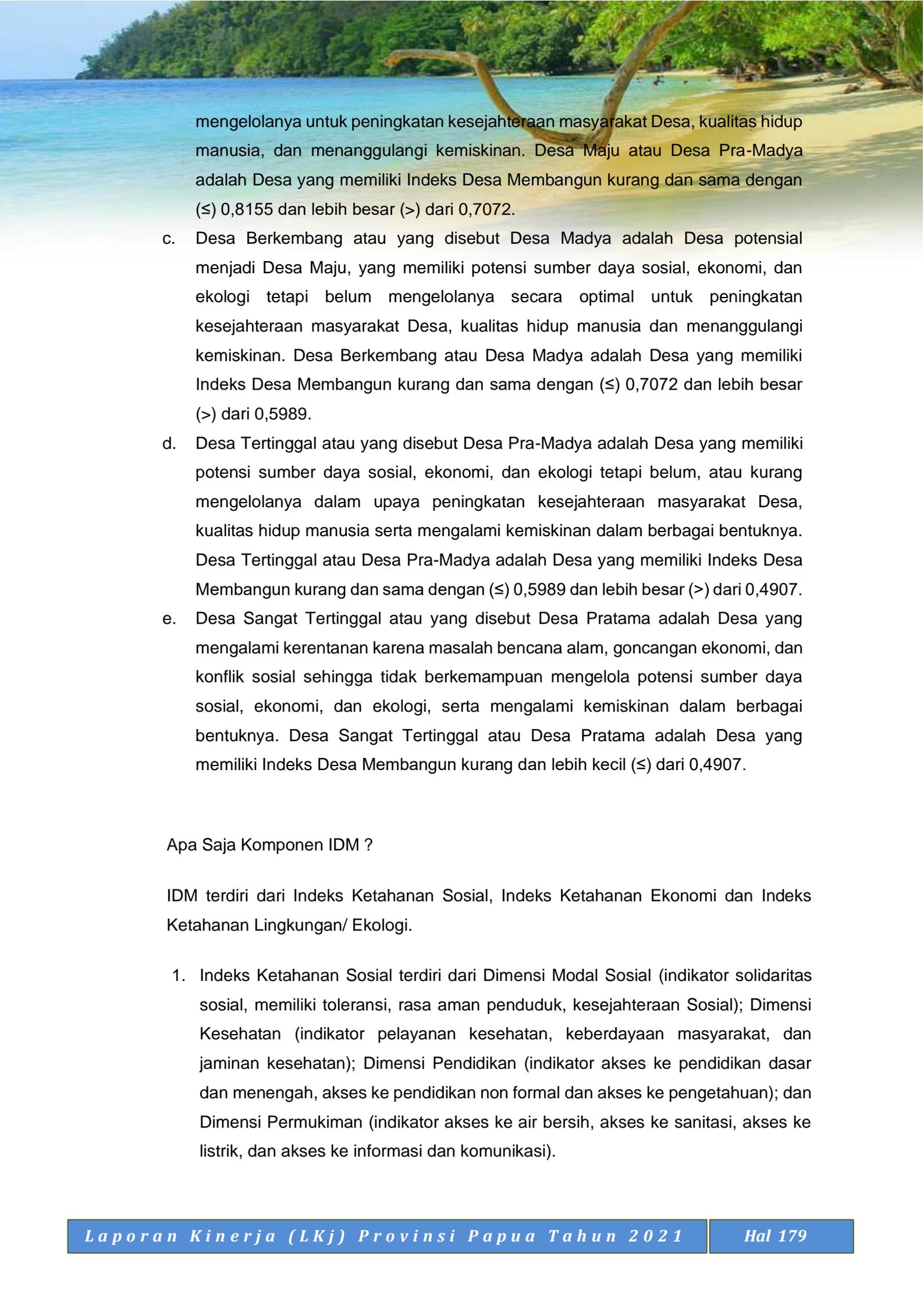
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung ini berdasarkan Indikator kinerja yakni : Indek Kampung Membangun atau dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia disebut Indeks Desa Membanguna (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa (di Provinsi Papua disebut Kampung) dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan target (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTtrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan



mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Apa Saja Komponen IDM ?

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dalam hal klasifikasi status Desa sebagaimana tersebut di atas dimana kriteria penentuan status desa disamaratakan untuk seluruh Indonesia, maka atas pertimbangan letak geografis, ketersediaan infrastruktur, adat budaya lokal dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Provinsi sampai Kampung, maka ditetapkan target kampung membangun adalah Kampung Berkembang menjadi titik fokus pembangunan ke arah Kampung Maju dan Kampung Mandiri, Sudah barang tentu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengupayakan secara maksimal kemajuan Kampung Sangat Tertinggal dan Tertinggal ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan 3 (tiga) Indeks tersebut di atas, maka jumlah Desa/Kampung Berkembang di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.71
Jumlah Kampung Berkembang Setiap Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAMPUNG	KAMPUNG BERKEMBANG
1.	Merauke	179	37
2.	Jayawijaya	328	0
3.	Jayapura	139	38
4.	Nabire	72	1
5.	Kepulauan Yapen	160	58
6.	Biak numfor	254	17
7.	Puncak Jaya	302	0
8.	Paniai	216	0
9.	Mimika	133	11
10.	Sarmi	92	1
11.	Keerom	91	16
12.	Pegunungan Bintang	277	4
13.	Yahukimo	510	0
14.	Tolikara	541	0
15.	Waropen	100	1
16.	Boven Digul	112	0

17	Mappi	162	0
18.	Asmat	221	0
19.	Supiori	38	11
20.	Mamberamo Raya	60	2
21	Mamberamo Tengah	59	0
22.	Yalimo	300	0
23.	Lanny Jaya	354	0
24.	Nduga	248	0
25.	Puncak	206	1
26.	Dogiyai	79	0
27	Intan Jaya	97	0
28.	Deiyai	67	1
29	Kota Jayapura	14	9
Jumlah		5.411	208
Realisasi Kinerja			3,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP, Tahun 2021.

Dari tabel 3.43 tersebut di atas, maka terdapat 15 (lima belas) Kabupaten/kota yang sudah menginput dan telah selesai diverifikasi berjumlah 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) kampung atau setara dengan 29%, sementara 14 (empat belas) kabupaten belum selesai menginput dan verifikasi atau sebanyak 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) kampung atau setara dengan 71%.

Hasil penginputan dan verifikasi, dari 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) kampung yang tersebar di 15 kabupaten/kota terdapat Kampung Berkembang sebanyak 208 (dua ratus delapan), Kampung Sangat Tertinggal berjumlah 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu), Kampung Tertinggal berjumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga), jumlah kampung dalam kategori Kampung Maju berjumlah 21 (dua puluh satu) dan Kampung Mandiri berjumlah 1 (satu) kampung.

Sasaran 22**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Orang Asli Papua (OAP)**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Orang Asli Papua**” sebesar **146.37 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.72 Indikator Kinerja Sasaran 22

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	RATA-RATA REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	67,49	97,54	146.37
Capaian Kinerja Sasaran					146.37

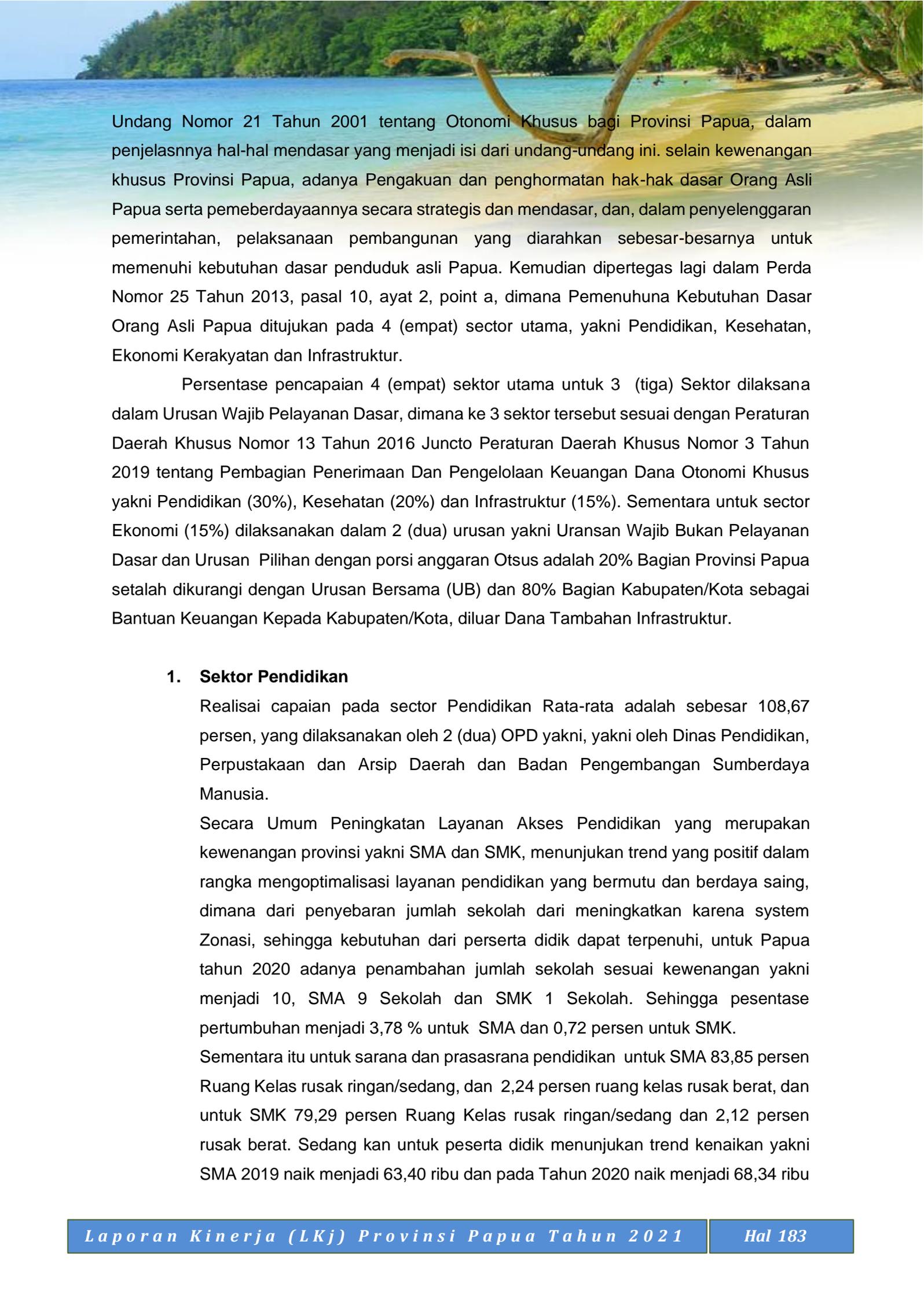
Dilihat dari table diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja **persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP** dengan target sebesar **67,49 persen** dan rata-rata capaian **realisasi** adalah **97,54** persen maka capaian realisasi kinerja adalah sebesar **146.37 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sementara itu untuk perkembangan selama tahun 2019-2021 dapat di lihat pada table dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.73 Indikator Kinerja Sasaran 22 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	%	62,4	76,41	126,5	64,9	89,58	138,03	67,49	97,54	146,37

Pemenuhan Kebutuhan dasar Orang Asli Papua secara tegas dijabarkan dalam Undang-



Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam penjelasannya hal-hal mendasar yang menjadi isi dari undang-undang ini. selain kewenangan khusus Provinsi Papua, adanya Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemeberdayaannya secara strategis dan mendasar, dan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua. Kemudian dipertegas lagi dalam Perda Nomor 25 Tahun 2013, pasal 10, ayat 2, point a, dimana Pemenuhuna Kebutuhan Dasar Orang Asli Papua ditujukan pada 4 (empat) sector utama, yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur.

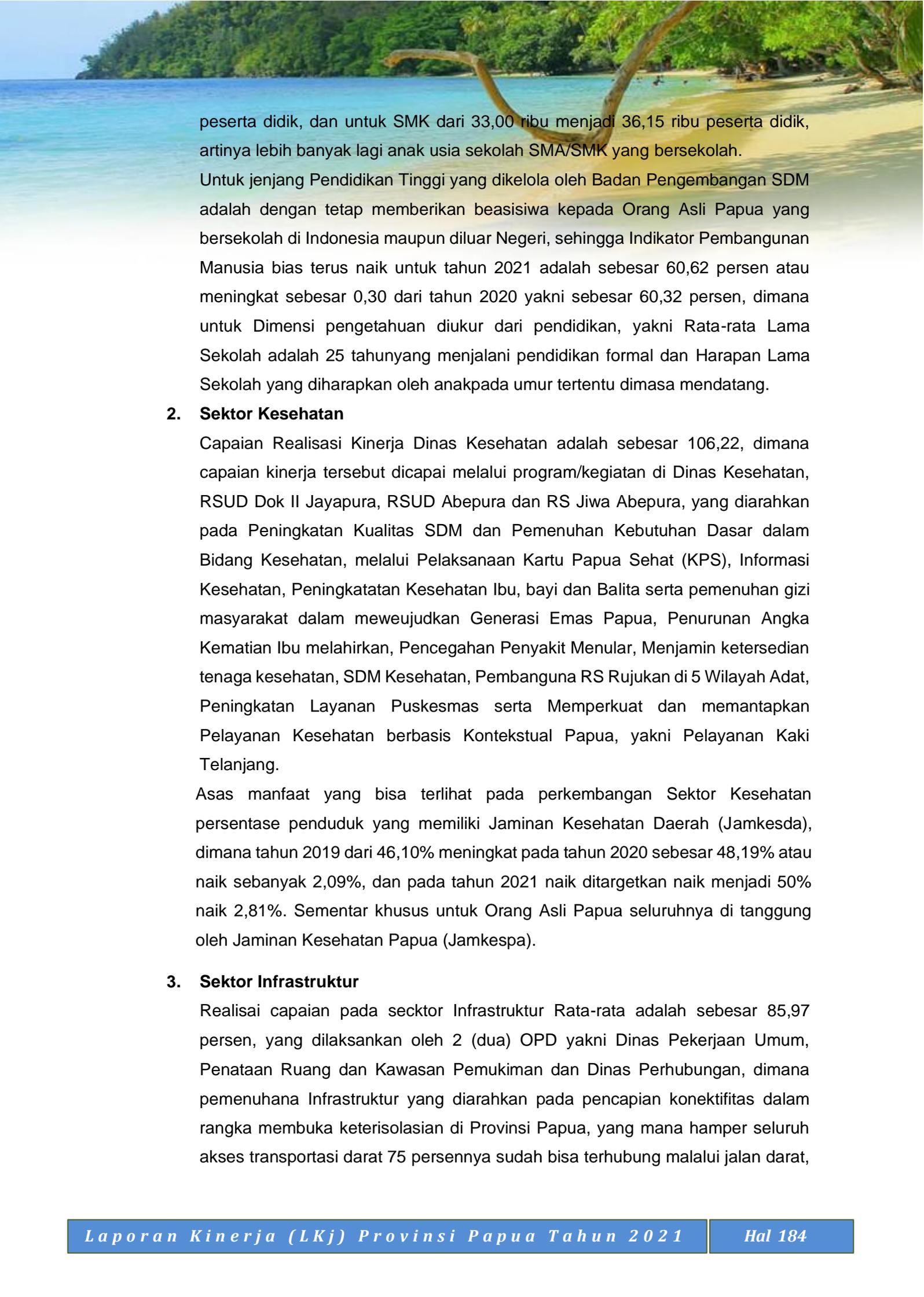
Persentase pencapaian 4 (empat) sektor utama untuk 3 (tiga) Sektor dilaksana dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dimana ke 3 sektor tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus yakni Pendidikan (30%), Kesehatan (20%) dan Infrastruktur (15%). Sementara untuk sector Ekonomi (15%) dilaksanakan dalam 2 (dua) urusan yakni Uransan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan dengan porsi anggaran Otsus adalah 20% Bagian Provinsi Papua setelah dikurangi dengan Urusan Bersama (UB) dan 80% Bagian Kabupaten/Kota sebagai Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, diluar Dana Tambahan Infrastruktur.

1. Sektor Pendidikan

Realisai capaian pada sector Pendidikan Rata-rata adalah sebesar 108,67 persen, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni, yakni oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Secara Umum Peningkatan Layanan Akses Pendidikan yang merupakan kewenangan provinsi yakni SMA dan SMK, menunjukkan trend yang positif dalam rangka mengoptimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, dimana dari penyebaran jumlah sekolah dari meningkatkan karena system Zonasi, sehingga kebutuhan dari peserta didik dapat terpenuhi, untuk Papua tahun 2020 adanya penambahan jumlah sekolah sesuai kewenangan yakni menjadi 10, SMA 9 Sekolah dan SMK 1 Sekolah. Sehingga pesentase pertumbuhan menjadi 3,78 % untuk SMA dan 0,72 persen untuk SMK.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendidikan untuk SMA 83,85 persen Ruang Kelas rusak ringan/sedang, dan 2,24 persen ruang kelas rusak berat, dan untuk SMK 79,29 persen Ruang Kelas rusak ringan/sedang dan 2,12 persen rusak berat. Sedang kan untuk peserta didik menunjukkan trend kenaikan yakni SMA 2019 naik menjadi 63,40 ribu dan pada Tahun 2020 naik menjadi 68,34 ribu



peserta didik, dan untuk SMK dari 33,00 ribu menjadi 36,15 ribu peserta didik, artinya lebih banyak lagi anak usia sekolah SMA/SMK yang bersekolah.

Untuk jenjang Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Badan Pengembangan SDM adalah dengan tetap memberikan beasiswa kepada Orang Asli Papua yang bersekolah di Indonesia maupun diluar Negeri, sehingga Indikator Pembangunan Manusia bias terus naik untuk tahun 2021 adalah sebesar 60,62 persen atau meningkat sebesar 0,30 dari tahun 2020 yakni sebesar 60,32 persen, dimana untuk Dimensi pengetahuan diukur dari pendidikan, yakni Rata-rata Lama Sekolah adalah 25 tahun yang menjalani pendidikan formal dan Harapan Lama Sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

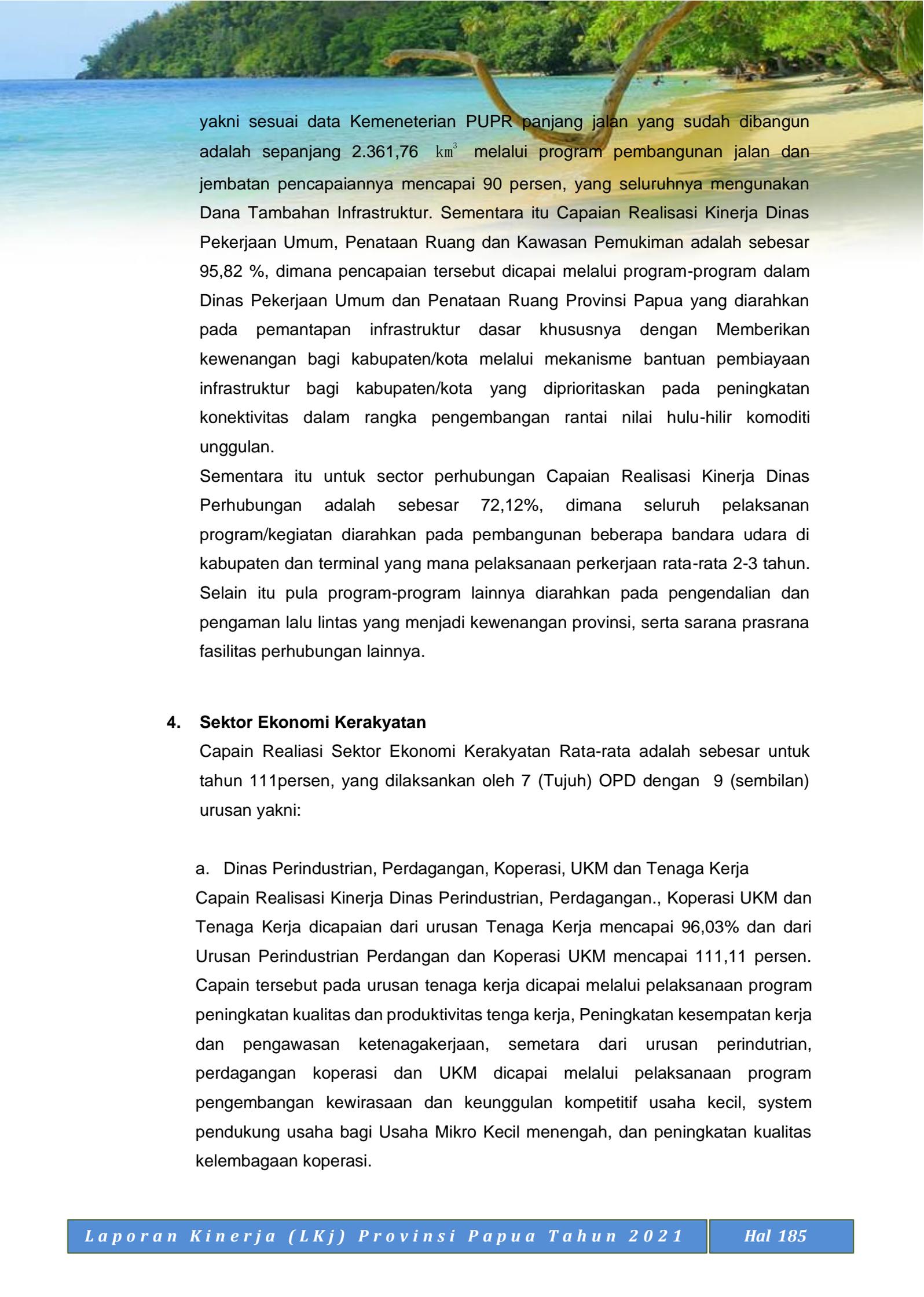
2. Sektor Kesehatan

Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan adalah sebesar 106,22, dimana capaian kinerja tersebut dicapai melalui program/kegiatan di Dinas Kesehatan, RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura, yang diarahkan pada Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Bidang Kesehatan, melalui Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS), Informasi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu, bayi dan Balita serta pemenuhan gizi masyarakat dalam mewujudkan Generasi Emas Papua, Penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan, Pencegahan Penyakit Menular, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, SDM Kesehatan, Pembanguna RS Rujukan di 5 Wilayah Adat, Peningkatan Layanan Puskesmas serta Memperkuat dan memantapkan Pelayanan Kesehatan berbasis Kontekstual Papua, yakni Pelayanan Kaki Telanjang.

Asas manfaat yang bisa terlihat pada perkembangan Sektor Kesehatan persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dimana tahun 2019 dari 46,10% meningkat pada tahun 2020 sebesar 48,19% atau naik sebanyak 2,09%, dan pada tahun 2021 naik ditargetkan naik menjadi 50% naik 2,81%. Sementara khusus untuk Orang Asli Papua seluruhnya di tanggung oleh Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa).

3. Sektor Infrastruktur

Realisasi capaian pada sektor Infrastruktur Rata-rata adalah sebesar 85,97 persen, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan, dimana pemenuhana Infrastruktur yang diarahkan pada pencapaian konektivitas dalam rangka membuka keterisolasian di Provinsi Papua, yang mana hamper seluruh akses transportasi darat 75 persennya sudah bisa terhubung malalui jalan darat,



yakni sesuai data Kementerian PUPR panjang jalan yang sudah dibangun adalah sepanjang 2.361,76 km³ melalui program pembangunan jalan dan jembatan pencapaiannya mencapai 90 persen, yang seluruhnya menggunakan Dana Tambahan Infrastruktur. Sementara itu Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman adalah sebesar 95,82 %, dimana pencapaian tersebut dicapai melalui program-program dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua yang diarahkan pada pemantapan infrastruktur dasar khususnya dengan Memberikan kewenangan bagi kabupaten/kota melalui mekanisme bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan.

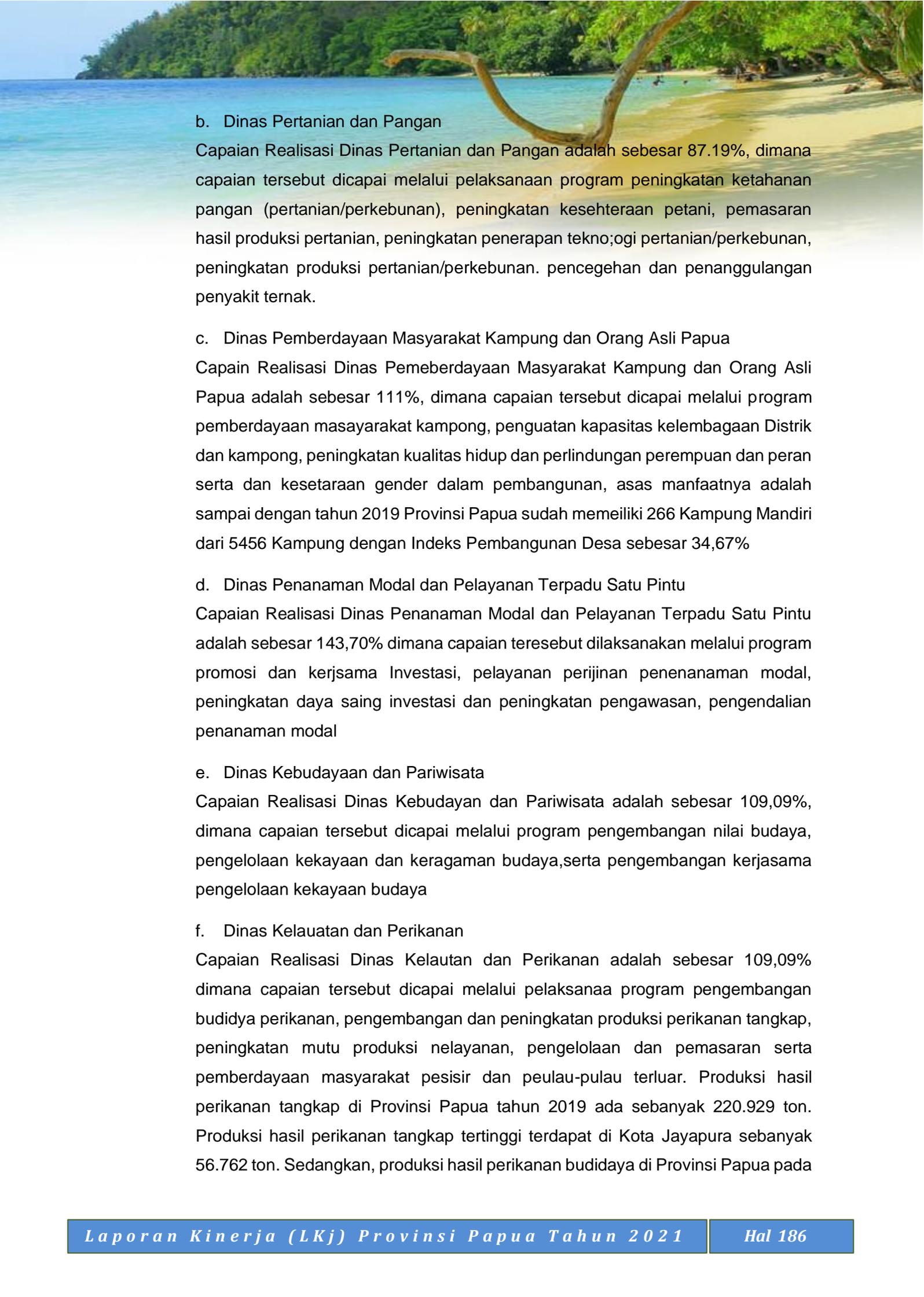
Sementara itu untuk sector perhubungan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan adalah sebesar 72,12%, dimana seluruh pelaksanaan program/kegiatan diarahkan pada pembangunan beberapa bandara udara di kabupaten dan terminal yang mana pelaksanaan perkerjaan rata-rata 2-3 tahun. Selain itu pula program-program lainnya diarahkan pada pengendalian dan pengaman lalu lintas yang menjadi kewenangan provinsi, serta sarana prasarana fasilitas perhubungan lainnya.

4. Sektor Ekonomi Kerakyatan

Capain Realiasi Sektor Ekonomi Kerakyatan Rata-rata adalah sebesar untuk tahun 111persen, yang dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) OPD dengan 9 (sembilan) urusan yakni:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Capain Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan., Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dicapai dari urusan Tenaga Kerja mencapai 96,03% dan dari Urusan Perindustrian Perdangan dan Koperasi UKM mencapai 111,11 persen. Capain tersebut pada urusan tenaga kerja dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenga kerja, Peningkatan kesempatan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, semetara dari urusan perindutrian, perdagangan koperasi dan UKM dicapai melalui pelaksanaan program pengembangan kewirasaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil, system pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.



b. Dinas Pertanian dan Pangan

Capaian Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebesar 87.19%, dimana capaian tersebut dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), peningkatan kesejahteraan petani, pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

Capain Realisasi Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua adalah sebesar 111%, dimana capaian tersebut dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat kampung, penguatan kapasitas kelembagaan Distrik dan kampung, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, asas manfaatnya adalah sampai dengan tahun 2019 Provinsi Papua sudah memiliki 266 Kampung Mandiri dari 5456 Kampung dengan Indeks Pembangunan Desa sebesar 34,67%

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 143,70% dimana capaian tersebut dilaksanakan melalui program promosi dan kerjasama Investasi, pelayanan perijinan penanaman modal, peningkatan daya saing investasi dan peningkatan pengawasan, pengendalian penanaman modal

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebesar 109,09%, dimana capaian tersebut dicapai melalui program pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya,serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

f. Dinas Kelautan dan Perikanan

Capaian Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 109,09% dimana capaian tersebut dicapai melalui pelaksanaa program pengembangan budidaya perikanan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan mutu produksi nelayan, pengelolaan dan pemasaran serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar. Produksi hasil perikanan tangkap di Provinsi Papua tahun 2019 ada sebanyak 220.929 ton. Produksi hasil perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kota Jayapura sebanyak 56.762 ton. Sedangkan, produksi hasil perikanan budidaya di Provinsi Papua pada

tahun 2019 ada sebanyak 23.474 ton hasil pembesaran, 5.617.000 ekor hasil pembenihan, serta 14.000 ekor merupakan ikan hias.

g. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian Realisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebesar 117,65, dimana capaian tersebut dilaksanakan melalui program pelayanan air bersih dan pengembangan energy terbarukan. Papua pada tahun 2019, sebanyak enam perusahaan air bersih mempunyai pelanggan sebanyak 70.483 pelanggan. Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2019 adalah sebesar 17,76 juta m³, diharapkan pada tahun 2023 seluruh masyarakat Papua seluruhnya bias menikmati air bersih. Jumlah pengguna listrik di Provinsi Papua pada tahun 2019 sebanyak 444.958 pelanggan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dimana jumlah pengguna listrik sebanyak 414.986 pelanggan.

Sasaran 23

Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan**” mencapai **83,32** persen dengan predikat “**Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan;
- b. Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan;
- c. Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan.

Yang dirinci lebih lanjut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.74 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 23

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	10,25 -	8,17	79,70
2	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	67,01	65,88	98,31
3	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	12,30	8,85	71,95
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					83.32

Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 87,33 persen atau turun sebesar 4,01 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

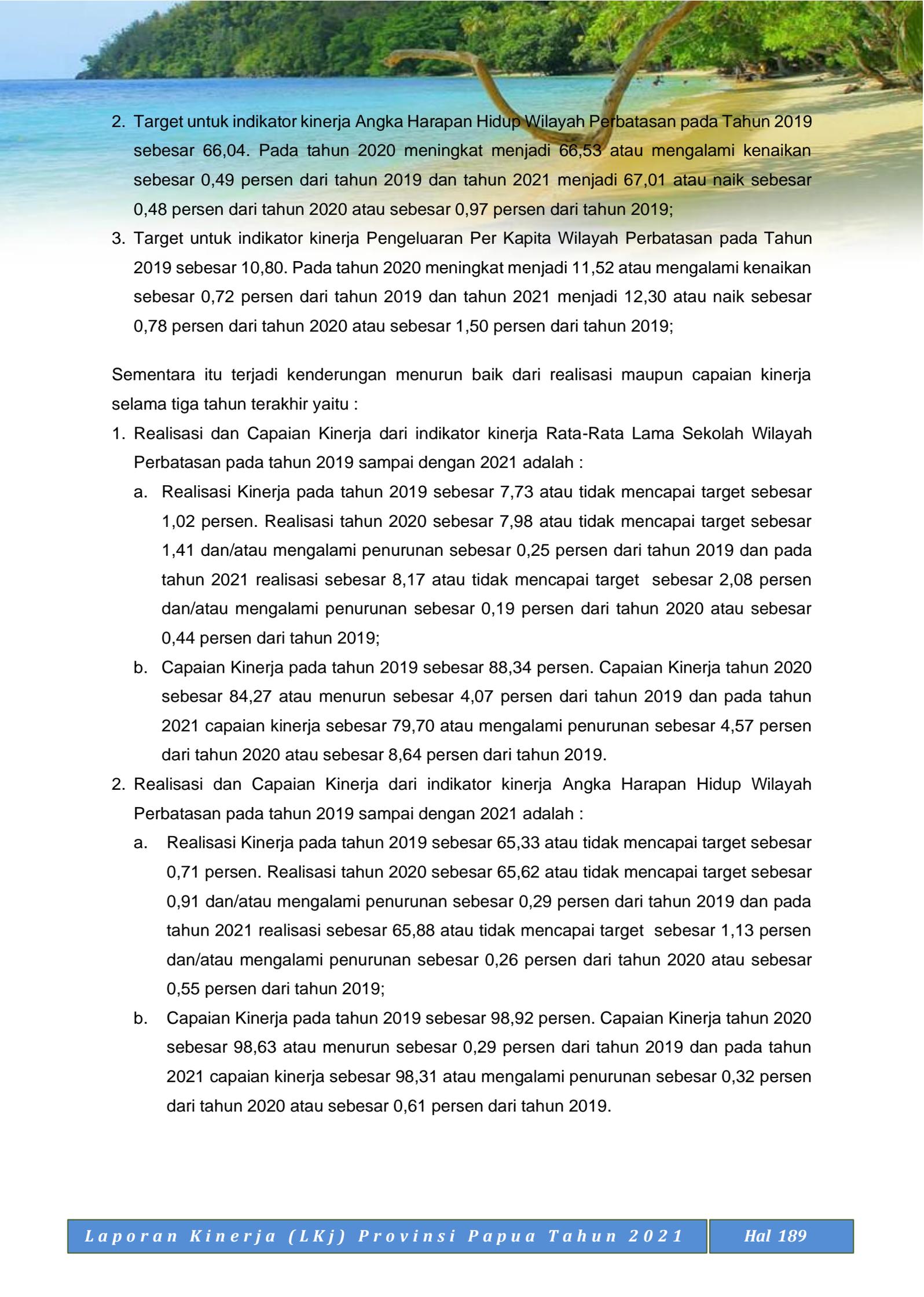
Tabel 3.75
Indikator Kinerja Sasaran 23 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN									
			2019			2020			2021			
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAIAN (%)	
1.	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	8,75	7,73	88,34	9,47	7,98	84,27	10,25	8,17	79,70	
2.	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	66,04	65,33	98,92	66,53	65,62	98,63	67,01	65,88	98,31	
3.	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	10,80	8,97	83,06	11,52	9,11	79,08	12,30	8,85	71,95	
Capaian Indikator kinerja					90,11				87,33			83,32

Dari tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa capaian kinerja setiap tahun cenderung menurun, misalnya pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 90,11 persen, pada tahun 2020 menurun sebesar 2,78 persen menjadi 87,33 persen dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 4,01 menjadi 83,32, atau mengalami penurunan sebesar 6,79 dari tahun 2019. Kecenderungan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan seluruh sendi kehidupan baik kesehatan, pendidikan perekonomian, sosial, budaya dan aspek lainnya yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Perbandingan setiap indikator kinerja dari Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dirinci sebagai berikut :

1. Target untuk indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 sebesar 8,75. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,47 atau mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen dari tahun 2019 dan tahun 2021 menjadi 10,25 atau naik sebesar 0,78 persen dari tahun 2020 atau sebesar 1,50 persen dari tahun 2019;

- 
2. Target untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 sebesar 66,04. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,53 atau mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen dari tahun 2019 dan tahun 2021 menjadi 67,01 atau naik sebesar 0,48 persen dari tahun 2020 atau sebesar 0,97 persen dari tahun 2019;
 3. Target untuk indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 sebesar 10,80. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,52 atau mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen dari tahun 2019 dan tahun 2021 menjadi 12,30 atau naik sebesar 0,78 persen dari tahun 2020 atau sebesar 1,50 persen dari tahun 2019;

Sementara itu terjadi kenderungan menurun baik dari realisasi maupun capaian kinerja selama tiga tahun terakhir yaitu :

1. Realisasi dan Capaian Kinerja dari indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah :
 - a. Realisasi Kinerja pada tahun 2019 sebesar 7,73 atau tidak mencapai target sebesar 1,02 persen. Realisasi tahun 2020 sebesar 7,98 atau tidak mencapai target sebesar 1,41 dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 8,17 atau tidak mencapai target sebesar 2,08 persen dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari tahun 2020 atau sebesar 0,44 persen dari tahun 2019;
 - b. Capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 88,34 persen. Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 84,27 atau menurun sebesar 4,07 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 79,70 atau mengalami penurunan sebesar 4,57 persen dari tahun 2020 atau sebesar 8,64 persen dari tahun 2019.
2. Realisasi dan Capaian Kinerja dari indikator kinerja Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah :
 - a. Realisasi Kinerja pada tahun 2019 sebesar 65,33 atau tidak mencapai target sebesar 0,71 persen. Realisasi tahun 2020 sebesar 65,62 atau tidak mencapai target sebesar 0,91 dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,29 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 65,88 atau tidak mencapai target sebesar 1,13 persen dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dari tahun 2020 atau sebesar 0,55 persen dari tahun 2019;
 - b. Capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 98,92 persen. Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 98,63 atau menurun sebesar 0,29 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 98,31 atau mengalami penurunan sebesar 0,32 persen dari tahun 2020 atau sebesar 0,61 persen dari tahun 2019.

3. Realisasi dan Capaian Kinerja dari indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah :

- a. Realisasi Kinerja pada tahun 2019 sebesar 8,97 atau tidak mencapai target sebesar 1,83 persen. Realisasi tahun 2020 sebesar 9,11 atau tidak mencapai target sebesar 2,91 dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 8,85 atau tidak mencapai target sebesar 3,45 persen dan/atau mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dari tahun 2020 atau sebesar 0,12 persen dari tahun 2019;
- b. Capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 83,06 persen. Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 79,08 atau menurun sebesar 3,98 persen dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 71,95 atau mengalami penurunan sebesar 7,13 persen dari tahun 2020 atau sebesar 11,11 persen dari tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan pada tahun 2019-2021 berdasarkan data makro 3 (tiga) Indikator kinerja yakni : Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan yang diperoleh dari 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Papua yang berada di wilayah perbatasan, seperti tabel berikut ini :

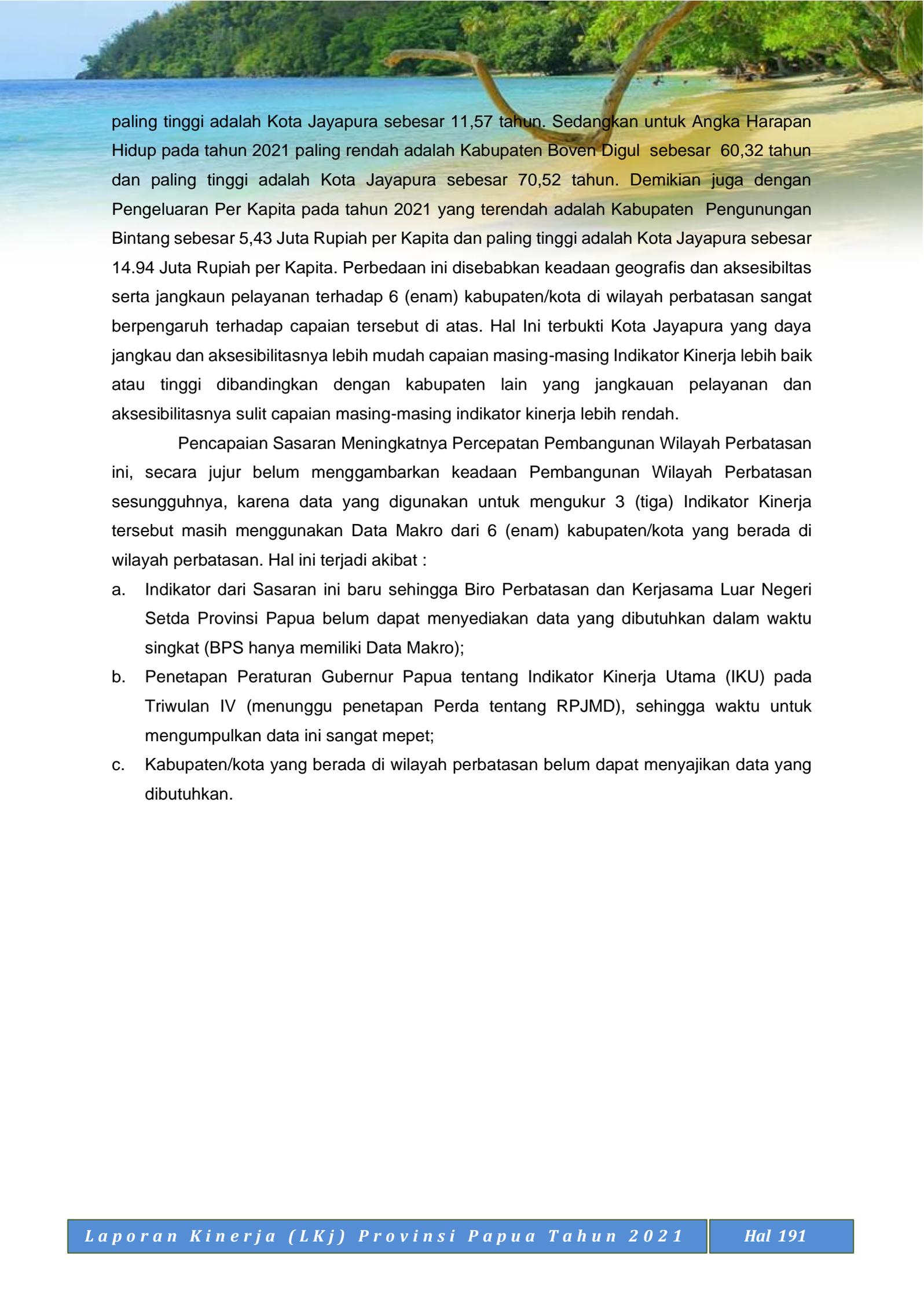
Tabel 3.76

Data Makro Capaian Indikator Setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan

NO.	KABUPATEN / KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH			ANGKA HARAPAN HIDUP			PENGELUARAN PER KAPITA		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Merauke	8,49	8,56	8,73	66,71	66,93	67,07	10,43	10,50	10,20
2.	Boven Digul	8,32	8,55	8,79	59,16	59,64	60,32	8,21	8,30	7,86
3.	Pegunungan Bintang	2,49	2,61	3,04	64,08	64,34	64,54	5,58	5,63	5,43
4.	Keerom	7,38	8,00	8,02	66,35	66,60	66,78	8,92	9,14	8,93
5.	Supiori	8,39	8,60	8,87	65,53	65,81	66,06	5,77	5,82	5,71
6.	Kota Jayapura	11,30	11,55	11,57	70,15	70,38	70,52	14,92	15,18	14,94

Sumber Data : BPS-Papua Dalam Angka 2021.

Dari tabel 3.76 tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2021 dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan rata-rata lama sekolah sebesar 3,04 tahun dan



paling tinggi adalah Kota Jayapura sebesar 11,57 tahun. Sedangkan untuk Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 paling rendah adalah Kabupaten Boven Digul sebesar 60,32 tahun dan paling tinggi adalah Kota Jayapura sebesar 70,52 tahun. Demikian juga dengan Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2021 yang terendah adalah Kabupaten Pengunungan Bintang sebesar 5,43 Juta Rupiah per Kapita dan paling tinggi adalah Kota Jayapura sebesar 14.94 Juta Rupiah per Kapita. Perbedaan ini disebabkan keadaan geografis dan aksesibilitas serta jangkauan pelayanan terhadap 6 (enam) kabupaten/kota di wilayah perbatasan sangat berpengaruh terhadap capaian tersebut di atas. Hal ini terbukti Kota Jayapura yang daya jangkau dan aksesibilitasnya lebih mudah capaian masing-masing Indikator Kinerja lebih baik atau tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang jangkauan pelayanan dan aksesibilitasnya sulit capaian masing-masing indikator kinerja lebih rendah.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan ini, secara jujur belum menggambarkan keadaan Pembangunan Wilayah Perbatasan sesungguhnya, karena data yang digunakan untuk mengukur 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut masih menggunakan Data Makro dari 6 (enam) kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini terjadi akibat :

- a. Indikator dari Sasaran ini baru sehingga Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua belum dapat menyediakan data yang dibutuhkan dalam waktu singkat (BPS hanya memiliki Data Makro);
- b. Penetapan Peraturan Gubernur Papua tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan IV (menunggu penetapan Perda tentang RPJMD), sehingga waktu untuk mengumpulkan data ini sangat mepet;
- c. Kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan belum dapat menyajikan data yang dibutuhkan.

Sasaran 24**Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**” sebesar **11,44 %** persen dengan predikat “**Tidak Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.77 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 24

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu Orang Per Tahun	30.000	3.432	11,44%
Capaian Kinerja Sasaran					11,44%

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

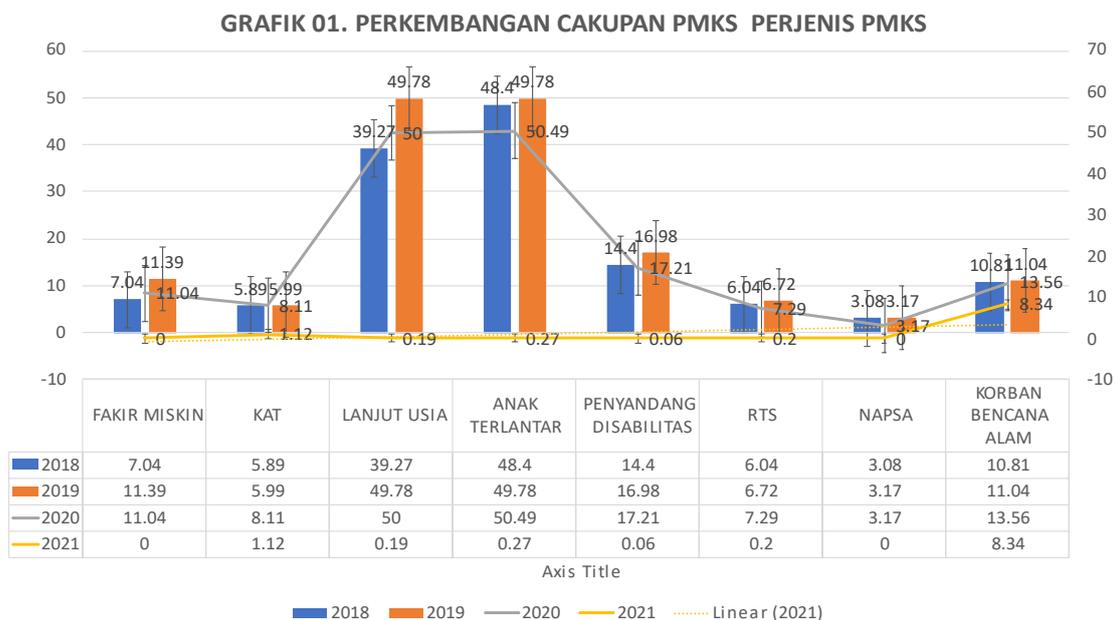
Tabel 3.78 Indikator Kinerja Sasaran 24 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu orang per Thn	10	7.831	7.831	20	7.831	39.16	30	3.432	11.44

Indikator Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dari jumlah target sebanyak 30.000 orang yang direncanakan untuk menerima bantuan, baru dapat terealisasi sebanyak 3.432 orang pada tahun 2021 atau sekitar 11,44%. Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 27,72% dari tahun 2020 yakni sebanyak 4.399 orang. Penurunan

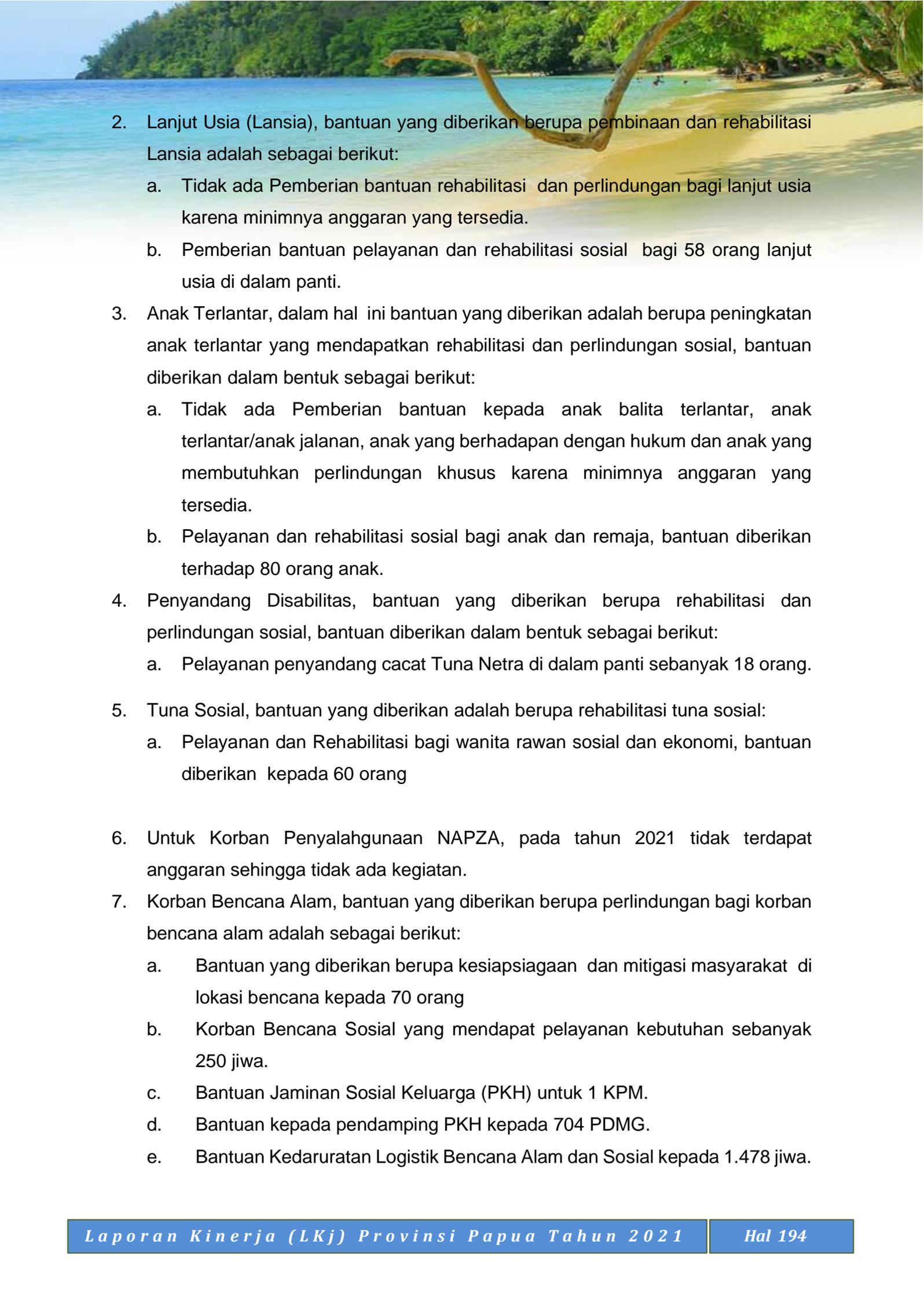
indikator sebesar 27,72% ini karena Jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial berkurang dan hal ini juga merupakan dampak dari refocusing anggaran karena pandemic covid-19 dan PON 2020. Realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 3.432 atau 11,44% ini didapat dari delapan (8) Kelompok PMKS yang tertangani di Provinsi Papua yakni:

Grafik 3.9 Perkembangan cakupan PMKS per jenis PMKS



Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan P3A, tahun 2021 (diolah)

1. Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan yang diberikan berupa pembinaan Komunitas Adat Terpencil adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial sebanyak 30 Unit
 - b. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup bagi 30 KK, setiap Keluarga diasumsikan terdiri dari 5 orang, jadi penerima manfaat ini sebanyak 150 orang.
 - c. Pemberian Bantuan Bibit bagi warga Komunitas Adat Terpencil, bantuan diberikan kepada 30 KK.
 - d. Pemberian Bantuan Peralatan Kerja bagi warga KAT. Bantuan diberikan kepada 30 KK.
 - e. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup bagi 97 kepala keluarga

- 
2. Lanjut Usia (Lansia), bantuan yang diberikan berupa pembinaan dan rehabilitasi Lansia adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada Pemberian bantuan rehabilitasi dan perlindungan bagi lanjut usia karena minimnya anggaran yang tersedia.
 - b. Pemberian bantuan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 58 orang lanjut usia di dalam panti.
 3. Anak Terlantar, dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa peningkatan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Tidak ada Pemberian bantuan kepada anak balita terlantar, anak terlantar/anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena minimnya anggaran yang tersedia.
 - b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja, bantuan diberikan terhadap 80 orang anak.
 4. Penyandang Disabilitas, bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pelayanan penyandang cacat Tuna Netra di dalam panti sebanyak 18 orang.
 5. Tuna Sosial, bantuan yang diberikan adalah berupa rehabilitasi tuna sosial:
 - a. Pelayanan dan Rehabilitasi bagi wanita rawan sosial dan ekonomi, bantuan diberikan kepada 60 orang
 6. Untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA, pada tahun 2021 tidak terdapat anggaran sehingga tidak ada kegiatan.
 7. Korban Bencana Alam, bantuan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban bencana alam adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan yang diberikan berupa kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat di lokasi bencana kepada 70 orang
 - b. Korban Bencana Sosial yang mendapat pelayanan kebutuhan sebanyak 250 jiwa.
 - c. Bantuan Jaminan Sosial Keluarga (PKH) untuk 1 KPM.
 - d. Bantuan kepada pendamping PKH kepada 704 PDMG.
 - e. Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana Alam dan Sosial kepada 1.478 jiwa.

8. Fakir Miskin, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2021 tidak mendapat bantuan oleh karena terbatasnya ketersediaan anggaran.
9. Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua), Pada Tahun 2021 tidak terlaksana karena mengalami refocusing dana.

Faktor yang menyebabkan menurunnya indikator kinerja Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah:

1. Adanya pandemi Covid 19 sehingga mengalami pengurangan dana (Refocusing Anggaran) yang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan.
2. Adanya Pekan Olahraga Nasional 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran 25

Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran “**Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**” termasuk kategori **Rendah** dengan predikat “**Tidak Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.79 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 25

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah
Capaian Indikator Kinerja					Rendah

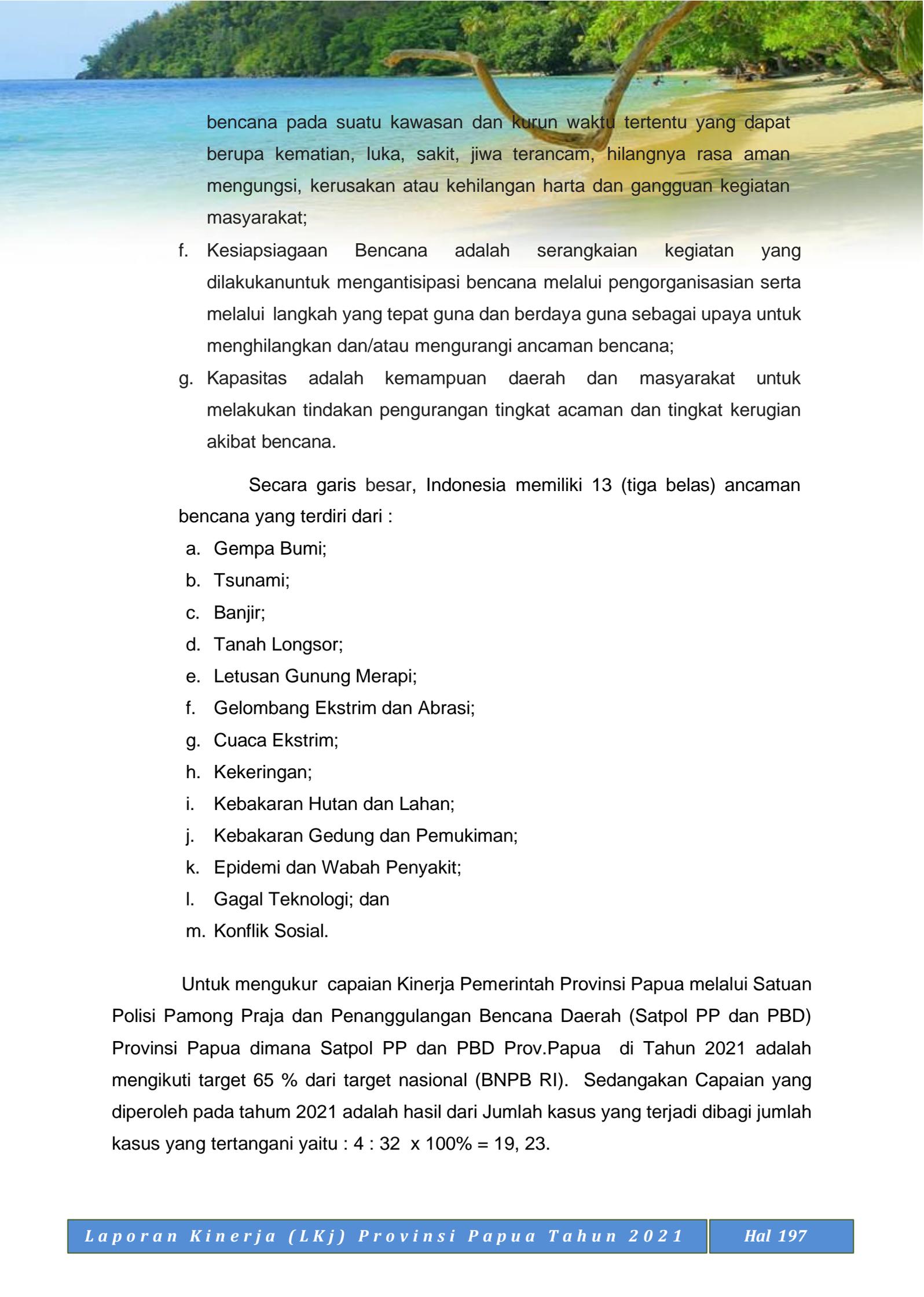
Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.80 Indikator Kinerja Sasaran 25 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Se dang	Rendah	Rendah

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terdapat beberapa pengertian berhubungan dengan Sasaran ini sebagai berikut :

- a. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- c. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangikemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- e. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat



bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;

- f. Kesiapsiagaan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- g. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.

Secara garis besar, Indonesia memiliki 13 (tiga belas) ancaman bencana yang terdiri dari :

- a. Gempa Bumi;
- b. Tsunami;
- c. Banjir;
- d. Tanah Longsor;
- e. Letusan Gunung Merapi;
- f. Gelombang Ekstrem dan Abrasi;
- g. Cuaca Ekstrem;
- h. Kekeringan;
- i. Kebakaran Hutan dan Lahan;
- j. Kebakaran Gedung dan Pemukiman;
- k. Epidemik dan Wabah Penyakit;
- l. Gagal Teknologi; dan
- m. Konflik Sosial.

Untuk mengukur capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah (Satpol PP dan PBD) Provinsi Papua dimana Satpol PP dan PBD Prov.Papua di Tahun 2021 adalah mengikuti target 65 % dari target nasional (BNPB RI). Sedangkan Capaian yang diperoleh pada tahun 2021 adalah hasil dari Jumlah kasus yang terjadi dibagi jumlah kasus yang tertangani yaitu : $4 : 32 \times 100\% = 19,23$.

Untuk mengukur tinggi atau rendahnya capaian kinerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua menggunakan Skala Ordinal Penilaian guna mengukur sejauhmana keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran.

Dari hasil analisis pencapaian target dari penetapan target 65% dan realisasinya adalah 12.5% dengan capaiannya 19,23% menunjukkan tingkat kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PBD Provinsi Papua adalah Tidak Berhasil/Rendah.

Rendahnya capaian target ini disebabkan oleh minimnya/ kurangnya dukungan anggaran yang di kelola oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan kinerja dalam Penanggulangan Bencana baik di Kabupaten/Kota se-Papua.

Tolok ukur Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan tingkat penanganannya masih rendah terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.81 Jumlah dan Jenis Bencana di Kab/Kota se Papua Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS BENCANA						Jumlah Kasus
		Gempa Bumi	Banjir	Longsor	Abrasi	Gelombang Pasang	Angin Puting	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Merauke							-
2.	Jayawijaya							-
3.	Jayapura		1	1		1		3
4.	Nabire		1				1	2
5.	Kepulauan Yapen		1	1		1	1	4
6.	Biak numfor							-
7.	Puncak Jaya							-
8.	Paniai		2	1				3
9.	Mimika							-
10.	Sarmi		1					1
11.	Keerom		1					1
12.	Pegunungan Bintang		1	1				2
13.	Yahukimo							-
14.	Tolikara		1	1				2
15.	Waropen					1	1	2
16.	Boven Digul							-
17.	Mappi							-

18.	Asmat							-
19.	Supiori		1				1	2
20.	Mamberamo Raya		2	1		1	1	5
21.	Mamberamo Tengah			1				1
22.	Yalimo		1	1			1	3
23.	Lanny Jaya							-
24.	Nduga							
25.	Puncak							-
26.	Dogiyai							-
27.	Intan Jaya							-
28.	Deiyai							-
29.	Kota Jayapura		1					-
Jumlah			14	8		6	4	35

Belum Tertangani

Sumber data : Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus dari jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sepanjang Tahun 2021 adalah Bencana banjir, sebanyak 14 (Empat belas) Kasus, tanah lonsor sebanyak 8 (delapan) kasus, gelombang pasang sebanyak 6 (enam) kasus, dan angin puting beliung sebanyak 4 (empat kasus). Untuk Kabupaten yang paling terbanyak mengalami berbagai bencana adalah Kabuapten Mamberamo Raya sebanyak 5 (lima) kasus.

Sementara Kabupaten/Kota yang terjadi bencana banjir adalah Kabupaten paniai dan Kabuapten Mamberamo Raya masing sebanyak 2 (dua) kali kasus, sedangkan Kabupaten Nabire, Yapen, Paniai, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Tolikara, Supiori, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Kota Jayapura terjadi bencana banjir, longsor, gelombang pasang dan angin puting masing-masing 1 (satu) kali kasus bencana terjadi di sepanjang Tahun 2021.

Dari 32 (tiga puluh dua) kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua ada 4 (empat) kasus yang dapat tertangani oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua hanya sebesar 12,5 % dari target nasional yang di tetapkan oleh BNPB RI yaitu sebesar 65 %.

Kendala ini disebabkan oleh minimnya/ kurangnya dukungan anggaran pada yang di kelola oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua untuk

pengadaan dan pendorongan Logistik, Tim Operasi Reaksi Cepat dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Sasaran 26

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak**” mencapai **100.96 persen** dengan predikat **sangat berhasil**, pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut :

Tabel 3.82 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 26

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,79	79.69	99.87
			63,95	65,27	102,1
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63.95	65.27	102.06
			63,95	65,27	102,1
Capaian Indikator Kinerja					100.96

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.83 Indikator Kinerja Sasaran 26 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Indeks	79.99	80.05	100.06	79.69	79.59	99.87	79.79	79.69	99.87
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	62.91	70.68	112.35	63.43	65.37	103.06	63.95	65.27	102.6
Capaian Indikator Kinerja					85.37				101.46	100.96	

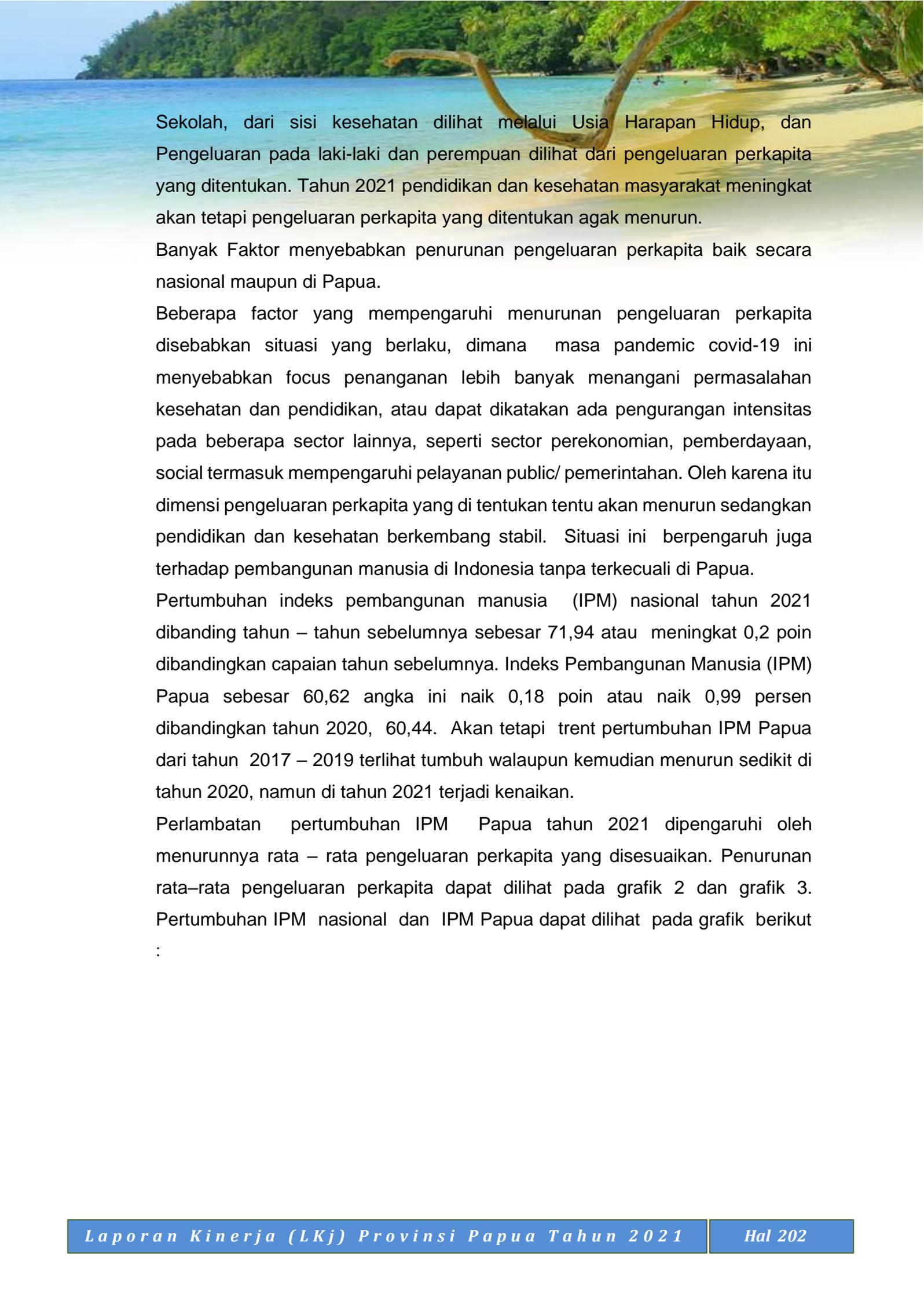
Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan Target 79,79 terealisasi 79,69 dengan capaian kinerja 99,9 dengan katagori **sangat berhasil**. Artinya ini mencapai target IPG 100,02% atau -0,1 akan tetapi secara keseluruhan telah berhasil memperoleh capaian kinerja 99,9 di tahun 2021. Perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) menurun sedikit dibandingkan dengan IPG tahun sebelumnya (2020) sebesar 80,05, atau sekitar 0,46 poin. Adapun penurunan indikator IPG dipengaruhi oleh :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. Pengeluaran Perkapita yang ditentukan.

Dari tabel tersebut diatas, perbandingan data dari Tahun 2019-2021 yang di tetapkan selalu naik walaupun hanya beberapa poin saja, namun Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sangat Berhasil dengan penjelasan sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan dan kesetaraan gender akan terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Dari sisi pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama



Sekolah, dari sisi kesehatan dilihat melalui Usia Harapan Hidup, dan Pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita yang ditentukan. Tahun 2021 pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat akan tetapi pengeluaran perkapita yang ditentukan agak menurun.

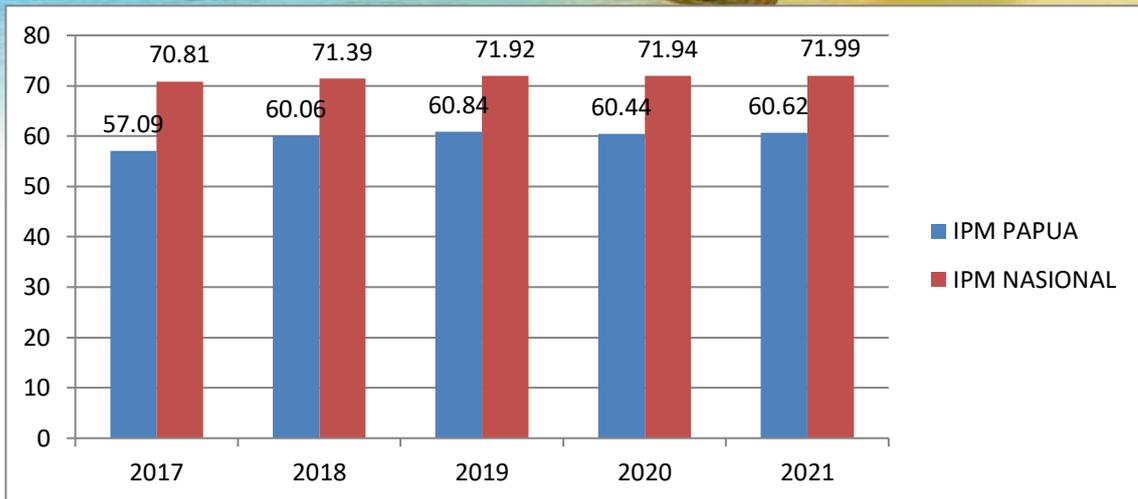
Banyak Faktor menyebabkan penurunan pengeluaran perkapita baik secara nasional maupun di Papua.

Beberapa factor yang mempengaruhi penurunan pengeluaran perkapita disebabkan situasi yang berlaku, dimana masa pandemic covid-19 ini menyebabkan focus penanganan lebih banyak menangani permasalahan kesehatan dan pendidikan, atau dapat dikatakan ada pengurangan intensitas pada beberapa sector lainnya, seperti sector perekonomian, pemberdayaan, social termasuk mempengaruhi pelayanan public/ pemerintahan. Oleh karena itu dimensi pengeluaran perkapita yang di tentukan tentu akan menurun sedangkan pendidikan dan kesehatan berkembang stabil. Situasi ini berpengaruh juga terhadap pembangunan manusia di Indonesia tanpa terkecuali di Papua.

Pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) nasional tahun 2021 dibanding tahun – tahun sebelumnya sebesar 71,94 atau meningkat 0,2 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua sebesar 60,62 angka ini naik 0,18 poin atau naik 0,99 persen dibandingkan tahun 2020, 60,44. Akan tetapi trend pertumbuhan IPM Papua dari tahun 2017 – 2019 terlihat tumbuh walaupun kemudian menurun sedikit di tahun 2020, namun di tahun 2021 terjadi kenaikan.

Perlambatan pertumbuhan IPM Papua tahun 2021 dipengaruhi oleh menurunnya rata – rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Penurunan rata–rata pengeluaran perkapita dapat dilihat pada grafik 2 dan grafik 3. Pertumbuhan IPM nasional dan IPM Papua dapat dilihat pada grafik berikut :

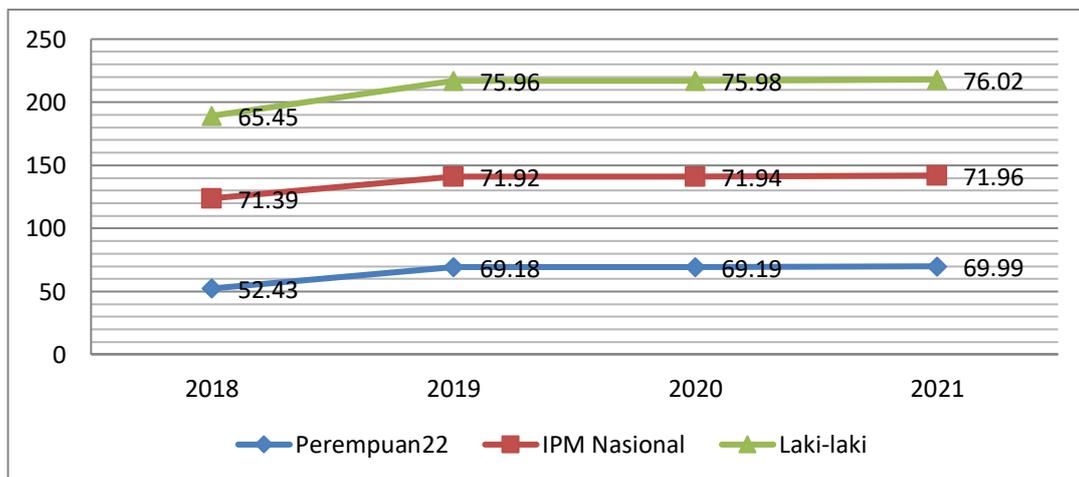
Grafik 3.10 PERKEMBANGAN IPM PAPUA, IPM NASIONAL



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

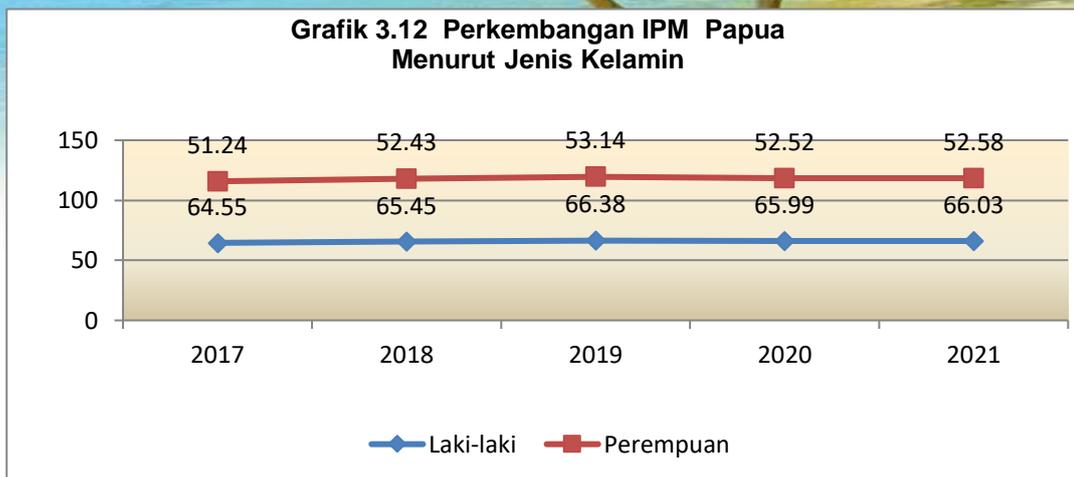
Tabel berikut menggambarkan perkembangan IPM dilihat dari data terpilah gender.

Grafik 3.11 IPM Nasional Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.

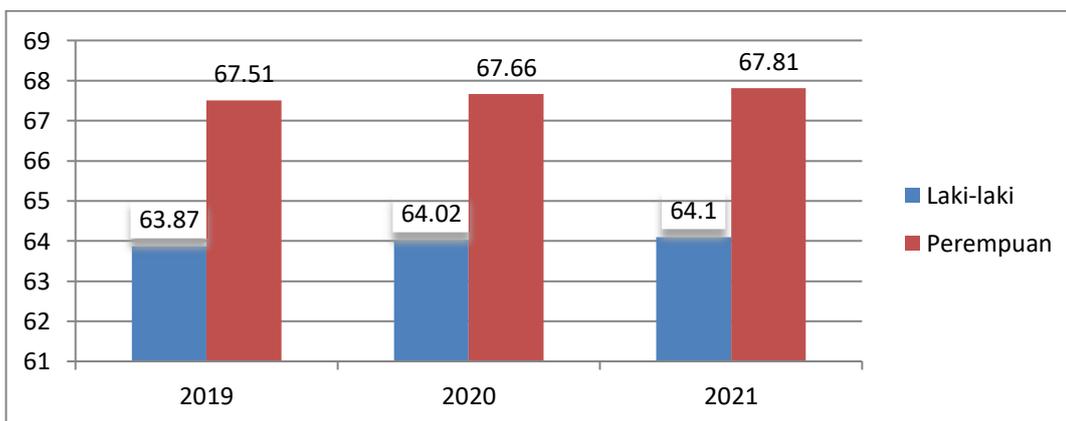
Tahun 2019 IPM laki-laki lebih rendah dibanding tahun 2020 dimana IPM perempuan meningkat sedikit lebih besar 16,75 dibandingkan IPM laki-laki 10.5. Peningkatan IPM perempuan di tahun 2021 sekitar 0,80 poin sedangkan IPM laki-laki 0,04 poin. Peningkatan IPM perempuan yang sedikit lebih tinggi di tahun 2021 dibandingkan laki-laki menunjukkan pembangunan sudah menuju keadilan gender.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.

Perkembangan IPM laki-laki naik sedikit lebih besar pada tahun 2020 atau sekitar 0.06 poin dibandingkan dengan tahun 2021, sedangkan IPM Perempuan naik 0,04 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017-2019 dapat dikatakan pertumbuhan IPM menurut jenis kelamin stabil dan menurun ketika memasuki tahun 2020, tetapi di tahun 2021 terjadi kenaikan sedikit. Pencapaian dimensi komposit pembentuk indikator IPM/IPG akan diuraikan pada grafik dibawah ini :

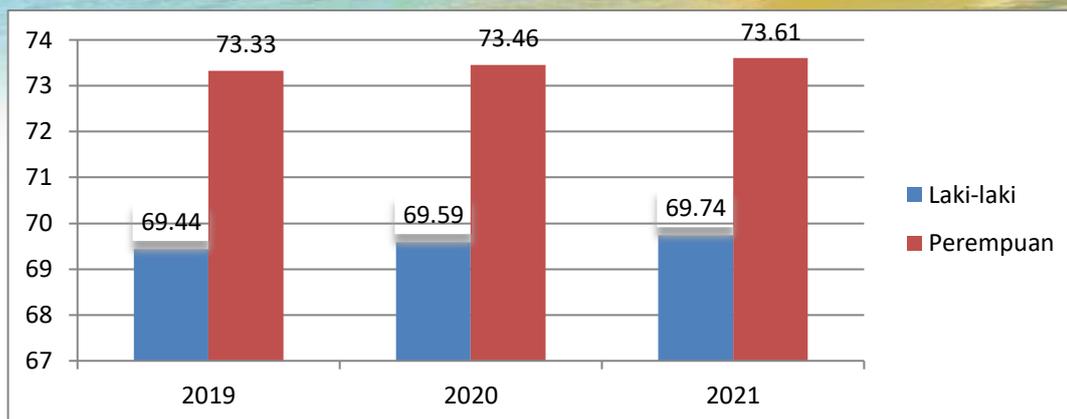
Grafik 3.13 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin Di Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Dari grafik diatas diketahui bahwa angka harapan hidup baik laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat.

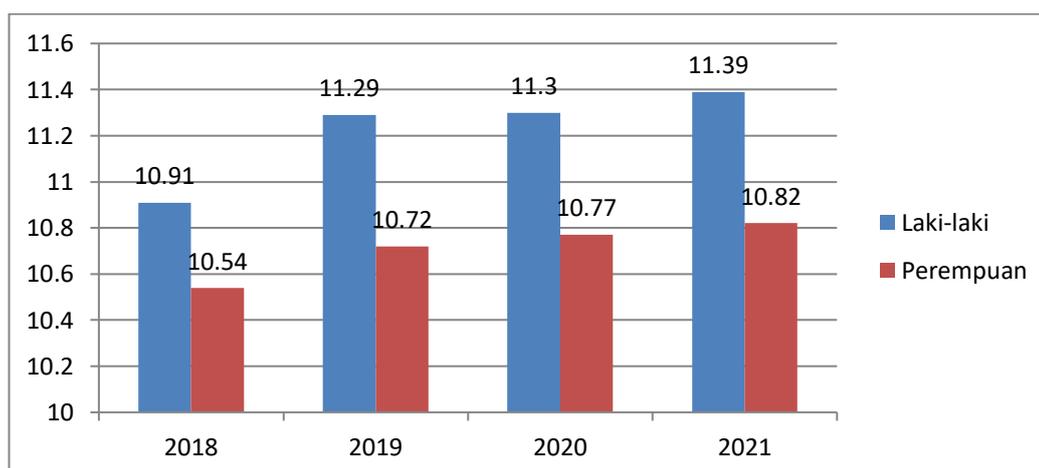
Grafik 3.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin Secara Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Grafik diatas juga menunjukkan bahwa rata – rata angka harapan hidup perempuan lebih lama dibandingkan laki-laki. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,61 tahun, demikian sebaliknya. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Grafik 3.15 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Papua

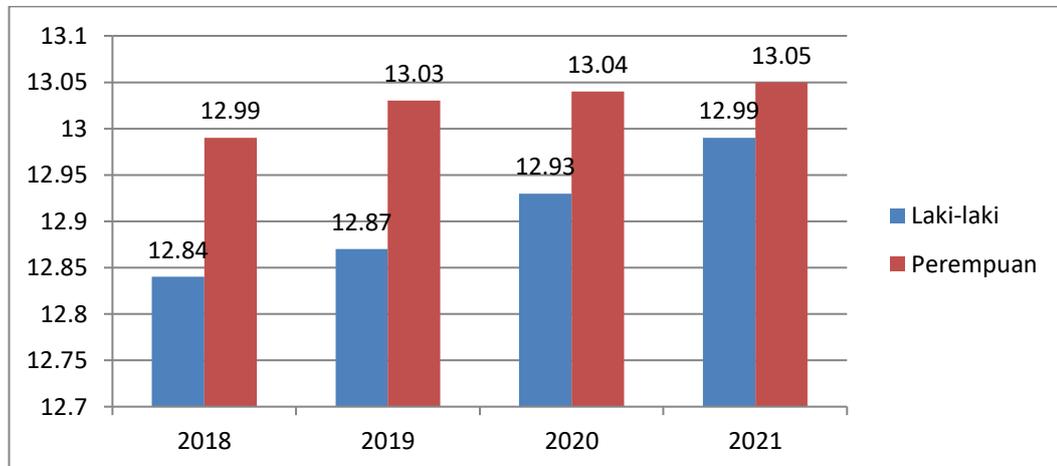


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Grafik diatas menunjukkan peningkatan rata – rata angka harapan lama sekolah (HLS) dari tahun 2018-2021. Tahun 2021 angka harapan lama sekolah laki-laki meningkat 0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya, angka harapan lama sekolah perempuan pun meningkat 0,5 poin dibanding tahun

2020. Hal ini menunjukkan trend positif peningkatan kualitas sumber daya melalui sektor pendidikan.

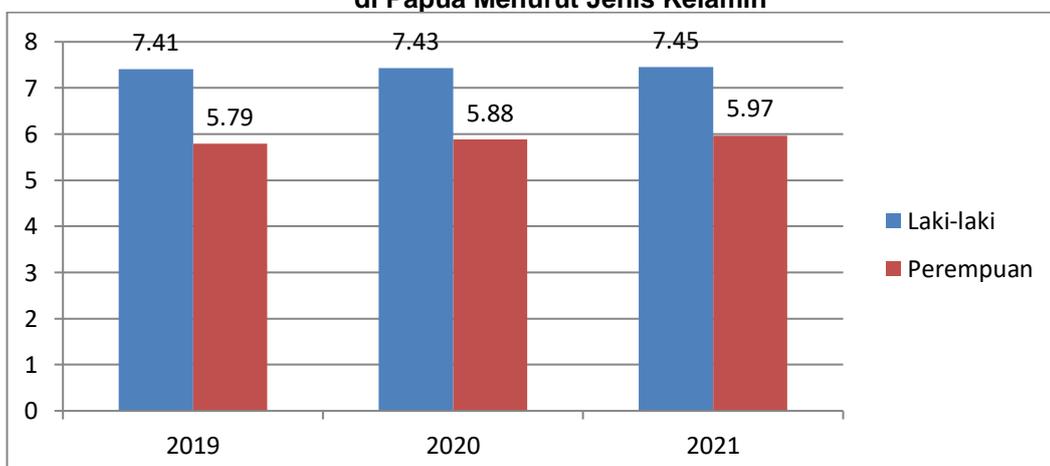
**Grafik 3.16 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Jenis Kelamin secara Nasional**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Secara nasional angka harapan lama sekolah (HLS) juga menunjukkan bahwa anak-anak laki-laki berusia 7 tahun memiliki harapan dapat mengenyam pendidikan hingga 12.93 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan jenjang diploma. Anak – anak perempuan justru mempunyai harapan lebih lama sekolah 0,11 dibandingkan dengan anak laki-laki.

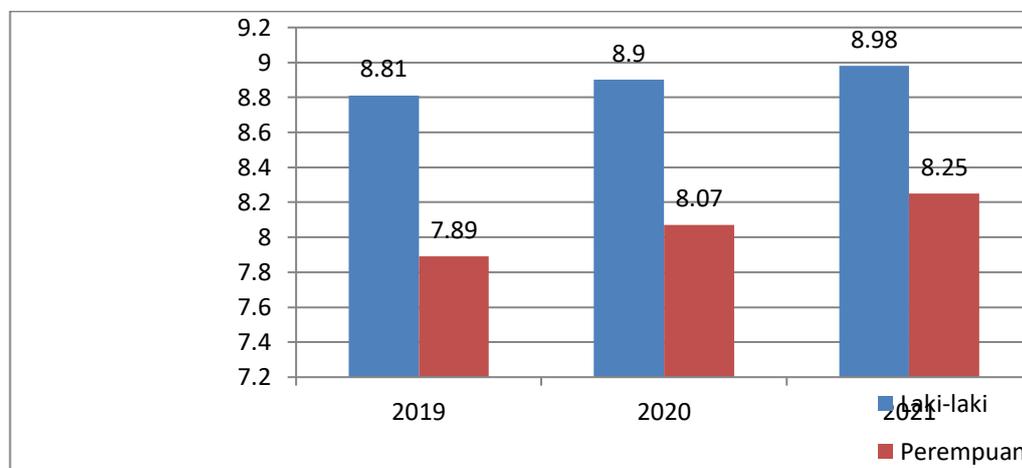
**Grafik 3.17 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
di Papua Menurut Jenis Kelamin**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Rata-rata lama sekolah di peroleh dengan membagi jumlah penduduk dikali lama pendidikan yang dihabiskan di bagi jumlah penduduk 15 tahun keatas yang sedang bersekolah/ telah berijazah. Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa rata – rata lama sekolah bagi perempuan adalah 5.97 atau setara kelas V semester III, sementara laki-laki sudah menempuh pendidikan 7,45 tahun masa sekolah atau setara kelas VII. Dengan demikian pemerintah daerah dapat sasaran dan strategi dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah, antara lain : menyiapkan infrastruktur, membangun ruang kelas, menyiapkan tenaga guru, memberikan beasiswa, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat afirmatif dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM didaerah.

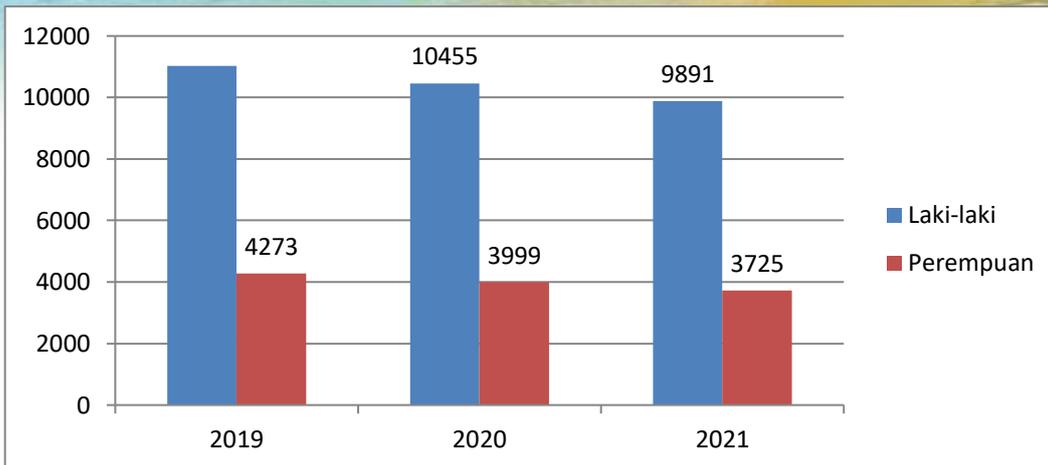
**Grafik 3.18 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Secara Nasional Menurut Jenis Kelamin**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Demikian halnya dengan rata-rata lama sekolah (RLS) Papua, peningkatan Kualitas Sumber Daya secara nasional juga telah menjadi agenda tetap setiap tahunnya dalam program dan kegiatan, karena memasuki masa milenium dibutuhkan kualitas sumber daya manusia siap pakai dan berani dalam pengambilan keputusan agar tercipta masyarakat maju dan mandiri.

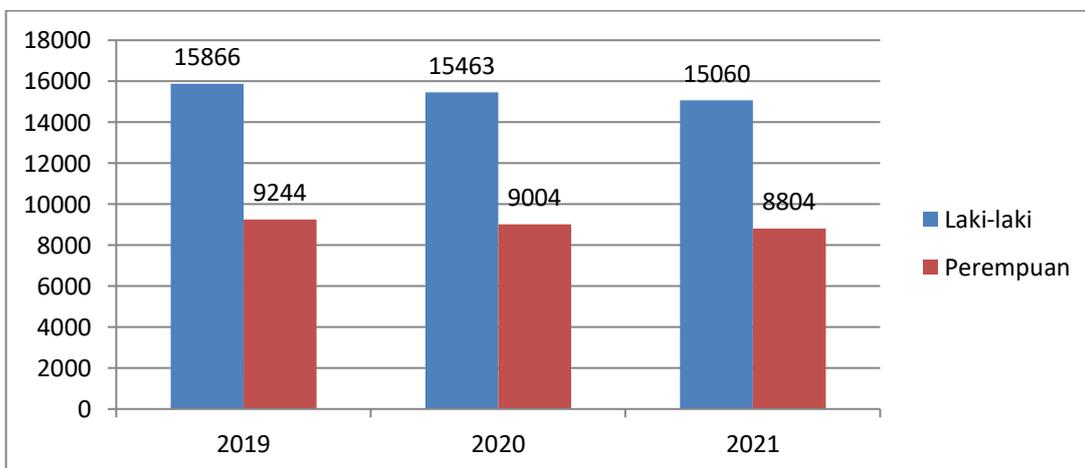
Grafik 3.19 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu/rupiah/orang/tahun) menurut Jenis Kelamin di Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Menurunnya rata – rata pengeluaran perkapita laki-laki dari 10455 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 9891 juta rupiah pada tahun 2021 atau menurun 564 poin. Hal ini memberikan dampak buruk penurunan IPM/IPG di tahun 2021. Pengeluaran perkapita perempuan juga mengalami penurunan di tahun 2021 (3725) sebesar 274 poin dibandingkan rata – rata pengeluaran perkapita 2020.

Grafik 3.20 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu / rupiah/ orang/tahun) secara Nasional Menurut Jenis Kelamin



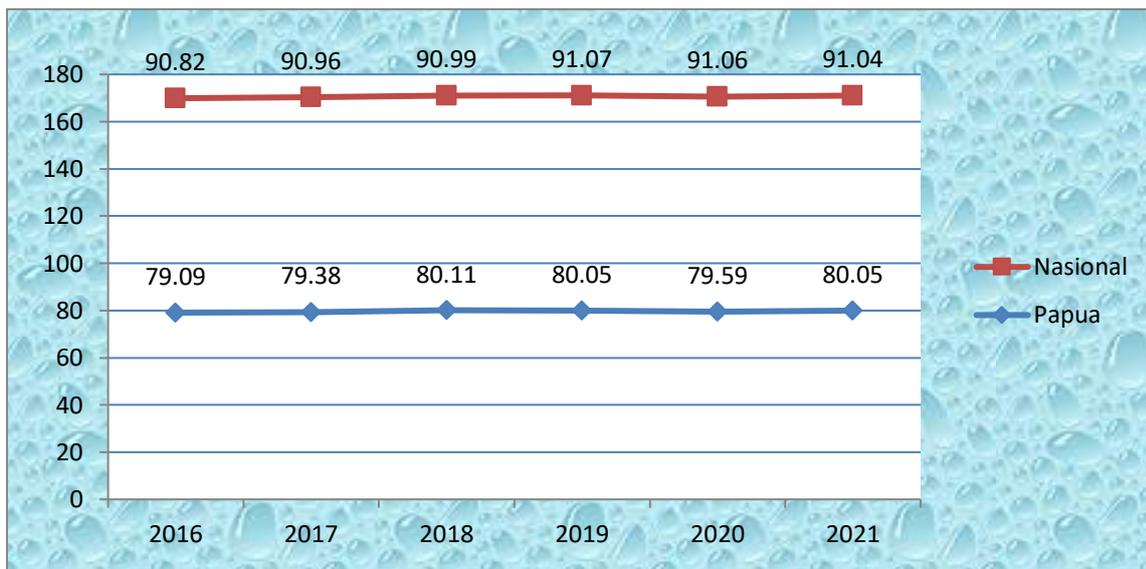
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Dengan demikian dari 4 (empat) komposit IPG/IPM diatas, dapat disimpulkan bahwa : kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara umum mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran perkapita

mengalami penurunan. Oleh karena itu pengeluaran perkapita yang rendah hendaknya diikuti dengan program pembangunan ekonomi kerakyatan dimulai dari yang berskala kecil termasuk program pemberantasan kemiskinan meskipun persentase kemiskinan cenderung turun namun sangat lambat, dan penggalakkan program padat karya serta meminimalisasi ketimpangan pembangunan di daerah.

Grafik berikut menggambarkan perkembangan IPG Papua dan IPG Nasional sebagai berikut :

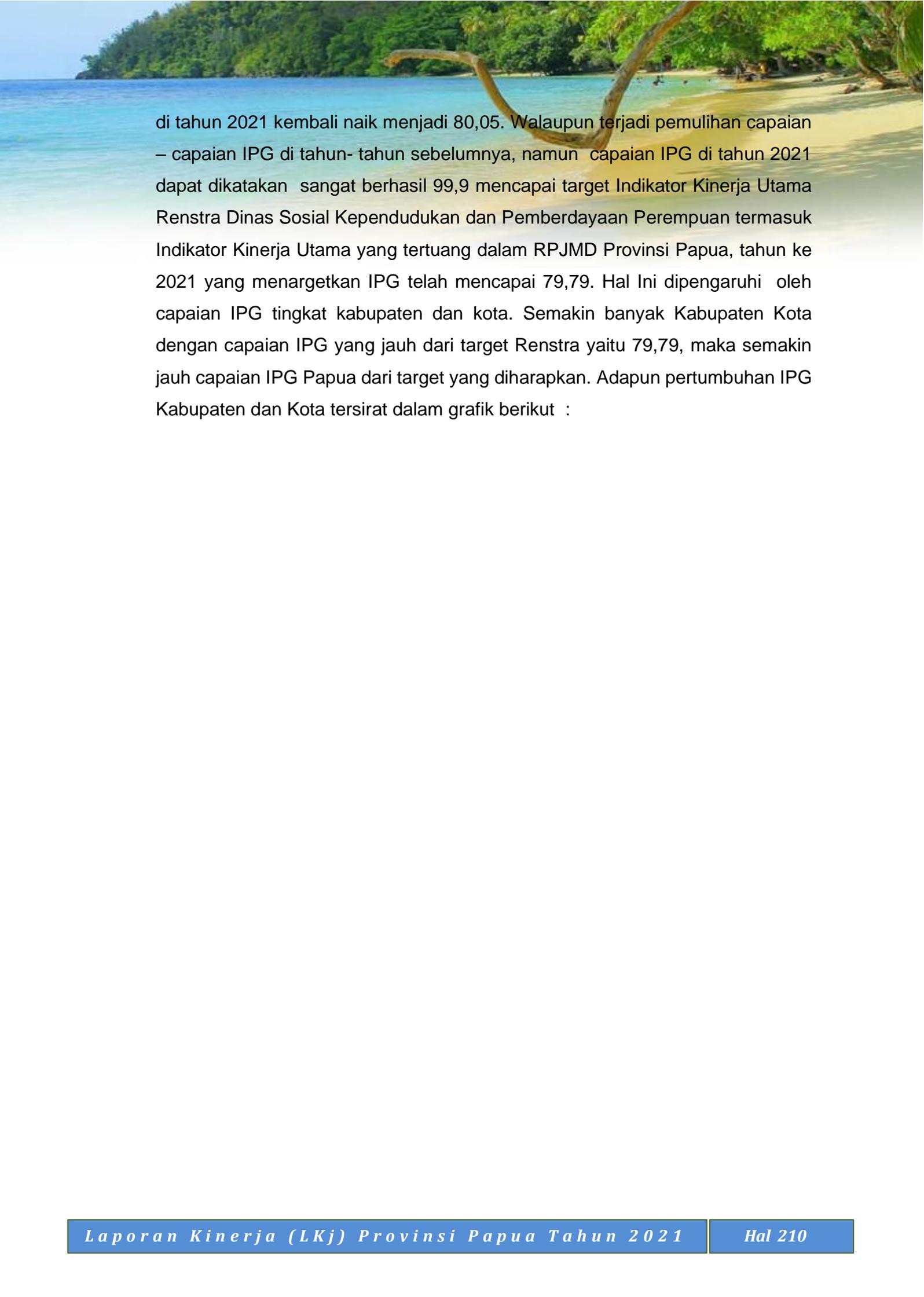
Grafik 3.21 Perkembangan IPG Papua dan IPG Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021.

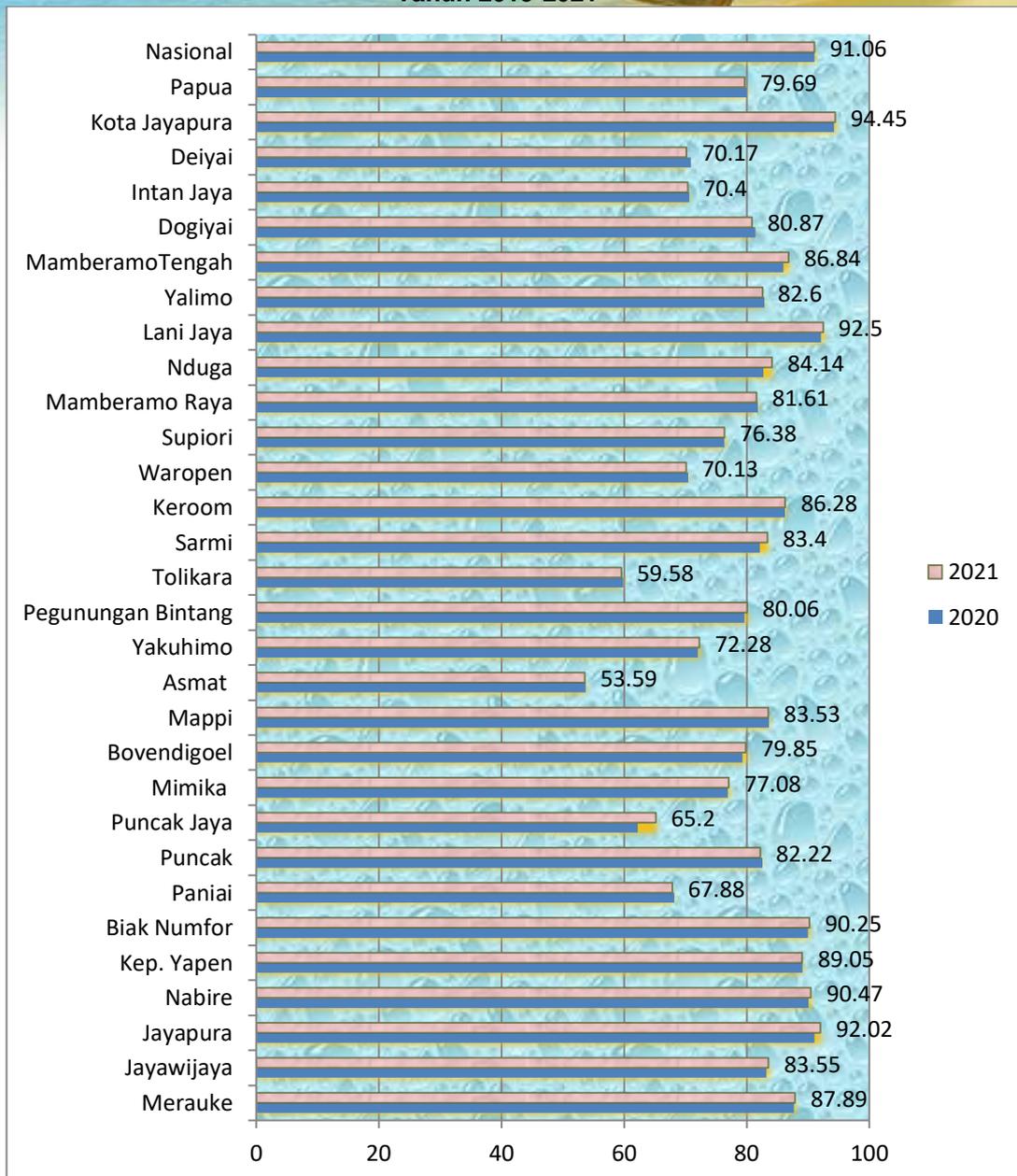
Pada tahun 2021, IPG nasional mengalami penurunan 0,2 point dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 91,06. Tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender nasional mengalami peningkatan dengan capaian 91,07, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 0,1 poin dan juga tahun 2021 turun 0,2 poin. Menurunnya pengeluaran perkapita juga merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja IPG tahun 2021. Faktor berpengaruh lainnya adalah perkembangan penyakit pandemic covid-19 telah menguras perhatian dan membatasi ruang gerak masyarakat sehingga perputaran ekonomi menjadi lambat.

Meskipun pertumbuhan IPG Papua menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 (80,05) dan turun di tahun 2019 (80,05) juga turun di tahun 2020 (79,59) namun



di tahun 2021 kembali naik menjadi 80,05. Walaupun terjadi pemulihan capaian – capaian IPG di tahun- tahun sebelumnya, namun capaian IPG di tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil 99,9 mencapai target Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan termasuk Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua, tahun ke 2021 yang menargetkan IPG telah mencapai 79,79. Hal Ini dipengaruhi oleh capaian IPG tingkat kabupaten dan kota. Semakin banyak Kabupaten Kota dengan capaian IPG yang jauh dari target Renstra yaitu 79,79, maka semakin jauh capaian IPG Papua dari target yang diharapkan. Adapun pertumbuhan IPG Kabupaten dan Kota tersirat dalam grafik berikut :

Grafik 3.22 Perkembangan IPG Kabupaten/Kota se Papua Tahun 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan sebaran IPG kabupaten dan kota, terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai diatas rata – rata IPG Nasional diatas 90 mendekati 100, yaitu : Kota Jayapura 94,45, Lani Jaya 92,50, Kabupaten Jayapura 91,99, Nabire 90,47 dan Biak Numfor 90,25, dan sekitar 15 (lima belas) kabupaten yang juga memiliki nilai IPG diatas rata-rata IPG Papua antara lain : Yapen 89,05, Merauke 87,89, Mamberamo Tengah 86,84, Keerom 86,28, Nduga 84,14, Jayawijaya 83,55, Mappi 83,53, Sarmi 83,45, Puncak 82,22, Mamberamo Raya 81,61, Dogiyai 80,87, Pegunungan

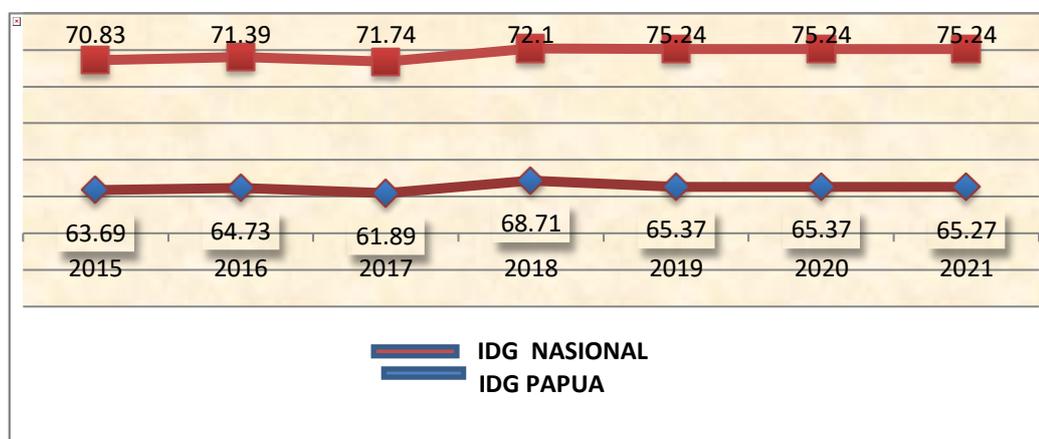
Bintang 80,06, Bovendigoel 79,85, dan Mimika 77,08.

Meskipun demikian, capaian IPG suatu daerah tidak bermakna pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” dan “sama-sama rendah”.

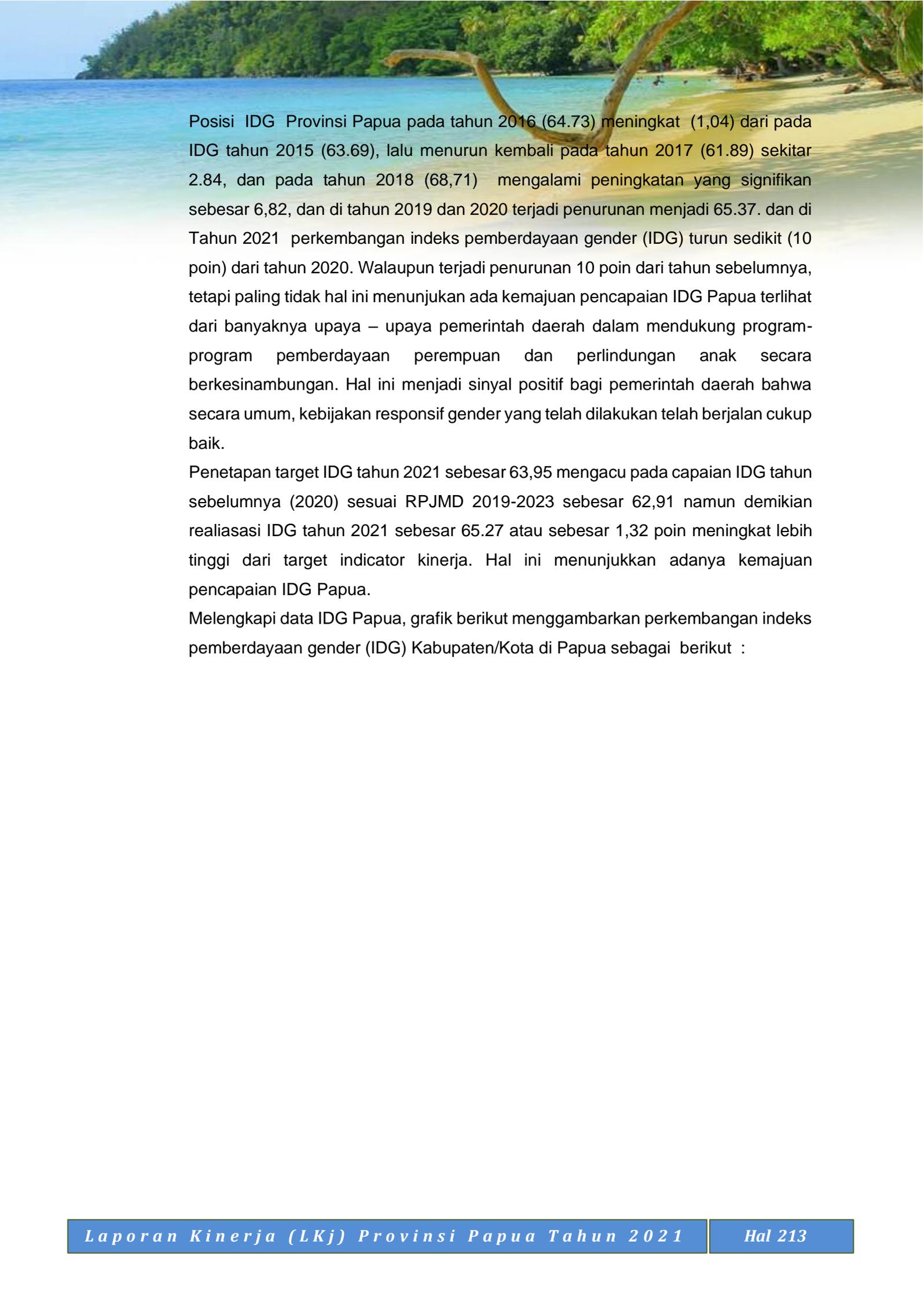
Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu *keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan*. Meski sama- sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Pencapaian indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan pencapaian indeks Pemberdayaan Gender Papua dapat dilihat pada grafik 14 dibawah ini :

Grafik 3.23 Pertumbuhan IDG Nasional dan IDG Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinsosduk3a 2021.

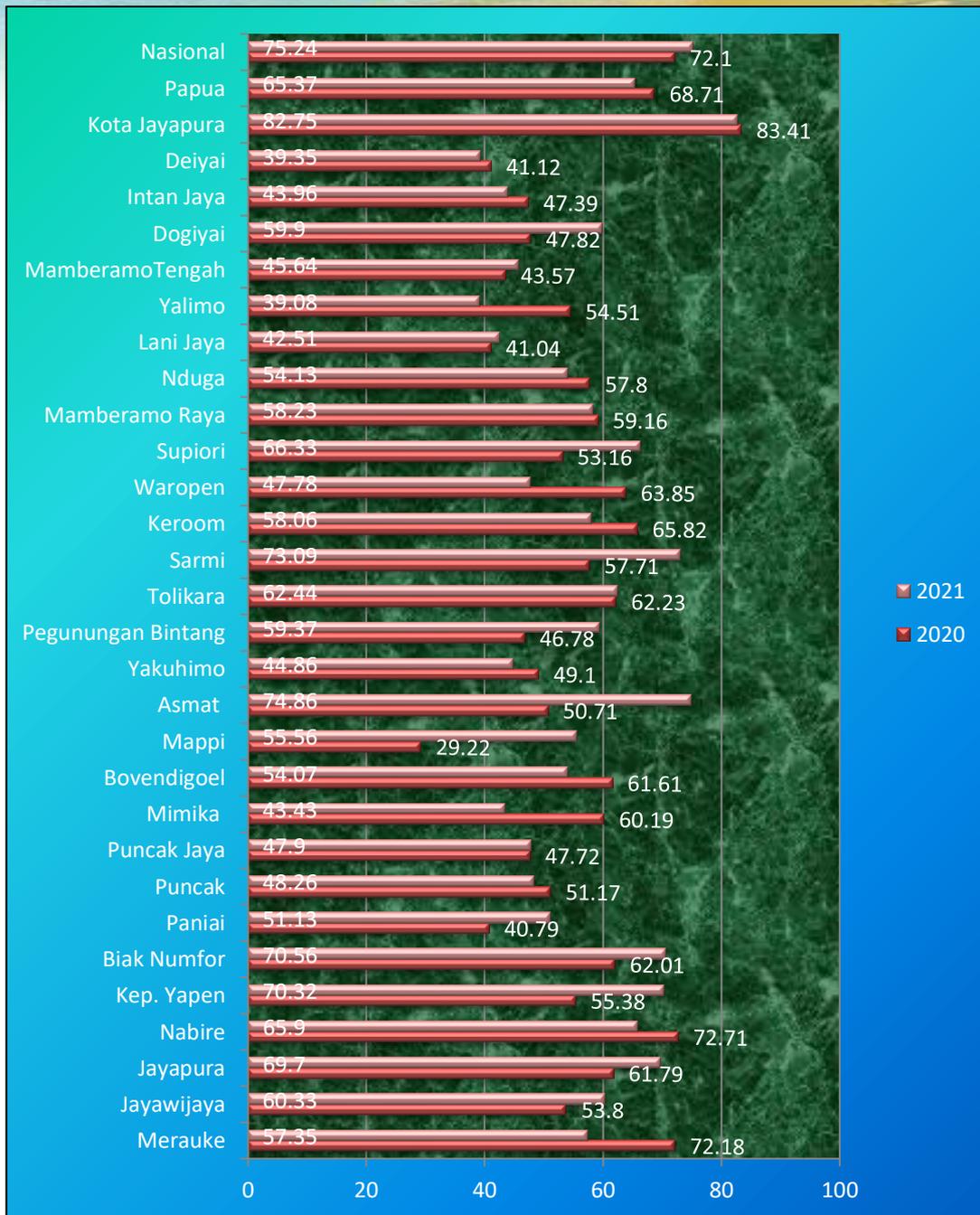


Posisi IDG Provinsi Papua pada tahun 2016 (64.73) meningkat (1,04) dari pada IDG tahun 2015 (63.69), lalu menurun kembali pada tahun 2017 (61.89) sekitar 2.84, dan pada tahun 2018 (68,71) mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 6,82, dan di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan menjadi 65.37. dan di Tahun 2021 perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) turun sedikit (10 poin) dari tahun 2020. Walaupun terjadi penurunan 10 poin dari tahun sebelumnya, tetapi paling tidak hal ini menunjukkan ada kemajuan pencapaian IDG Papua terlihat dari banyaknya upaya – upaya pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkesinambungan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah bahwa secara umum, kebijakan responsif gender yang telah dilakukan telah berjalan cukup baik.

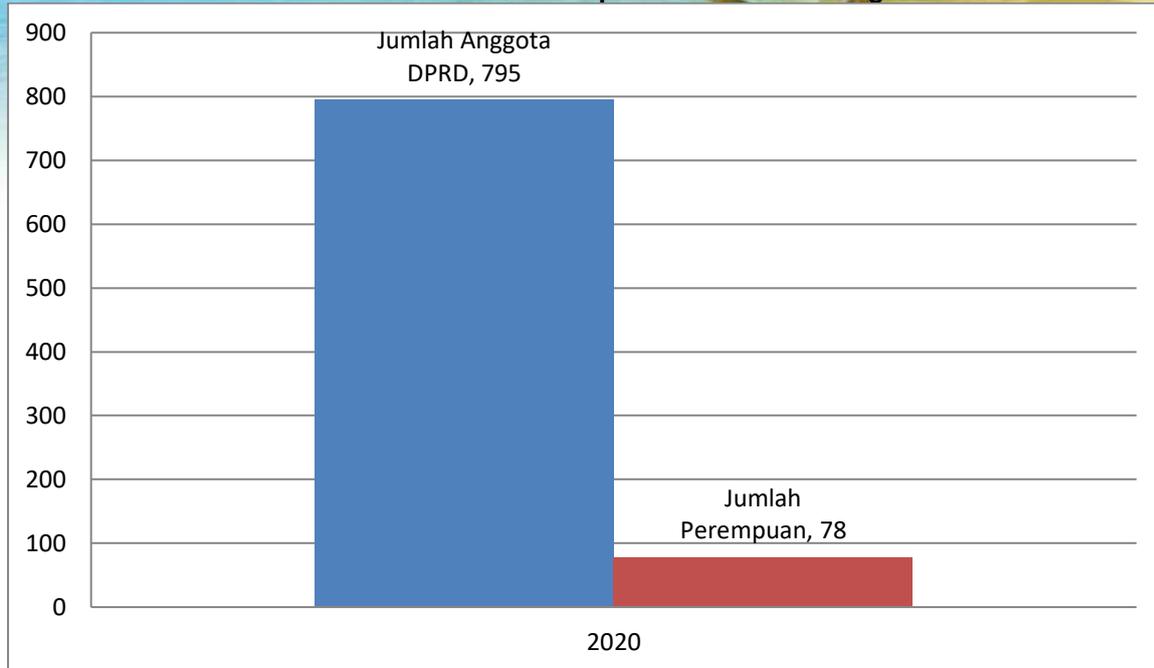
Penetapan target IDG tahun 2021 sebesar 63,95 mengacu pada capaian IDG tahun sebelumnya (2020) sesuai RPJMD 2019-2023 sebesar 62,91 namun demikian realisasi IDG tahun 2021 sebesar 65.27 atau sebesar 1,32 poin meningkat lebih tinggi dari target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pencapaian IDG Papua.

Melengkapi data IDG Papua, grafik berikut menggambarkan perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten/Kota di Papua sebagai berikut :

Grafik 3.24 Perkembangan IDG Kabupaten dan Kota di Papua Tahun 2019-2021



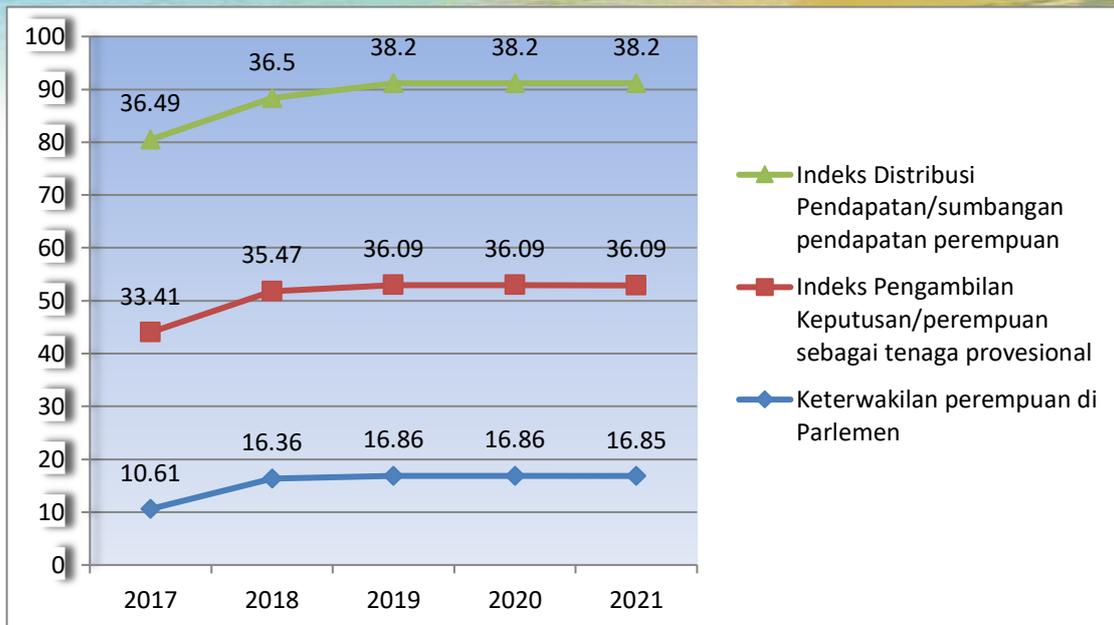
Grafik 3.25 Keterwakilan Perempuan dalam Kelembagaan Politik



Sumber : PMBG tahun 2021.

Sejak 2019, IDG Indonesia secara nasional 72,1 kemudian meningkat lagi ditahun 2020 sebesar 75,24 atau sekitar 3,14 poin dan pada tahun 2021 berkembang tetap 75,24. Demikian halnya dengan peringkat IDG 2019 Papua 68,71 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Capaian IDG 2020 atau turun sekitar - 3,34 point. Capaian IDG kabupaten dan kota sangat variatif ada kabupaten dan kota yang sudah dapat mencapai IDG Papua bahkan beberapa Kab Kota yang memiliki capaian IDG diatas rata-rata nasional bahkan ada kabupaten berada di bawah rata-rata capaian IDG.

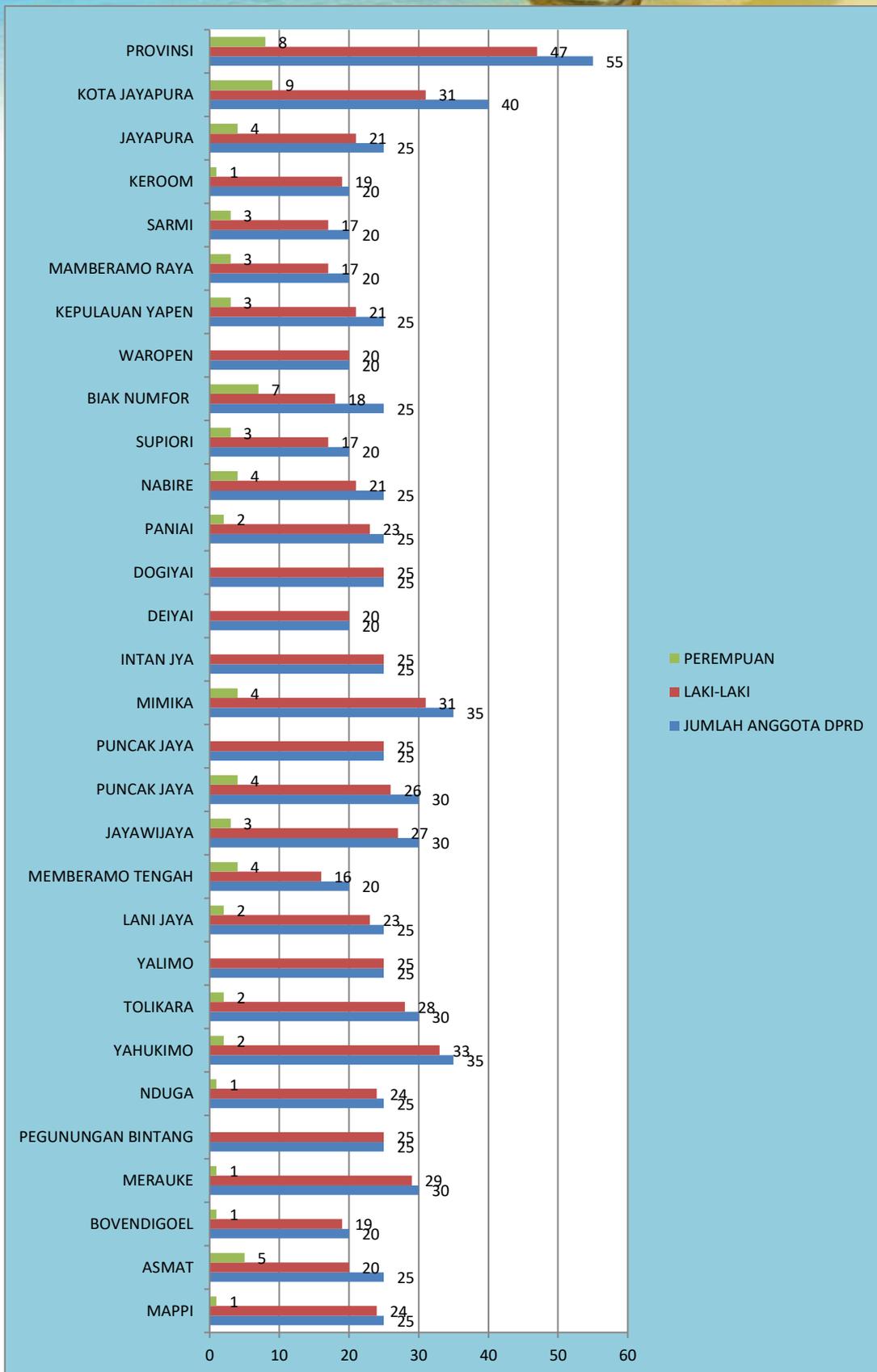
Grafik 3.26 Perkembangan Dimensi IDG Papua tahun 2017-2021



Sumber :PMBG 2019 dan Dinsosduk3a 2021.

Berdasarkan grafik 15 dan grafik 16 menunjukkan perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) di Papua, dapat digambarkan bahwa peran perempuan sudah berkontribusi terhadap pembangunan baik secara ekonomi dan politik di daerah namun kelambatan pertumbuhan IDG disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarkhi dimana peran laki-laki masih diutamakan dan peran perempuan hanya di area domestik/rumah tangga. Walaupun belum memperlihatkan peran perempuan secara utuh namun dengan adanya perkembangan teknologi perempuan saat ini mulai menentukan posisi pada bidang – bidang kerja sesuai keahlian yang dimiliki. Hal ini terlihat pada keterwakilan perempuan dalam kelembagaan politik Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua sebagaimana tersirat dalam grafik dibawah ini :

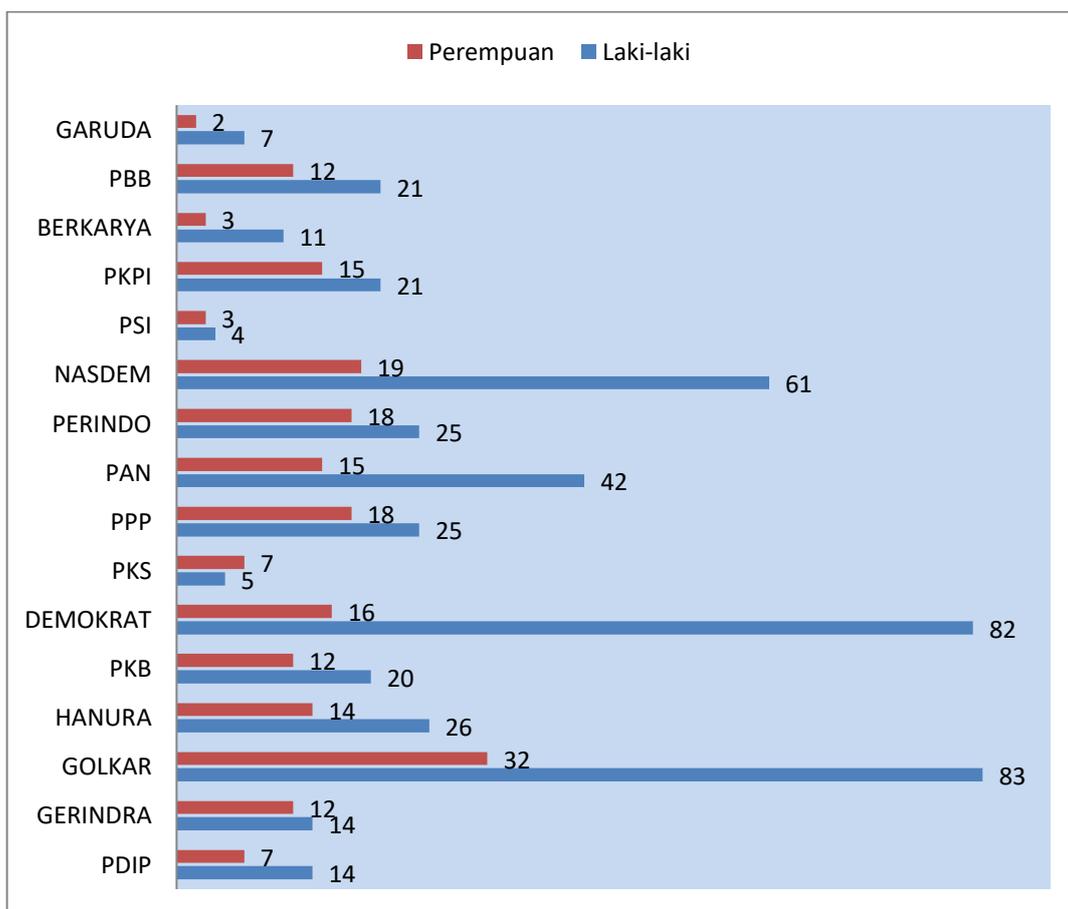
Grafik 3.27 Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota Terpilah Gender



Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Papua 2021

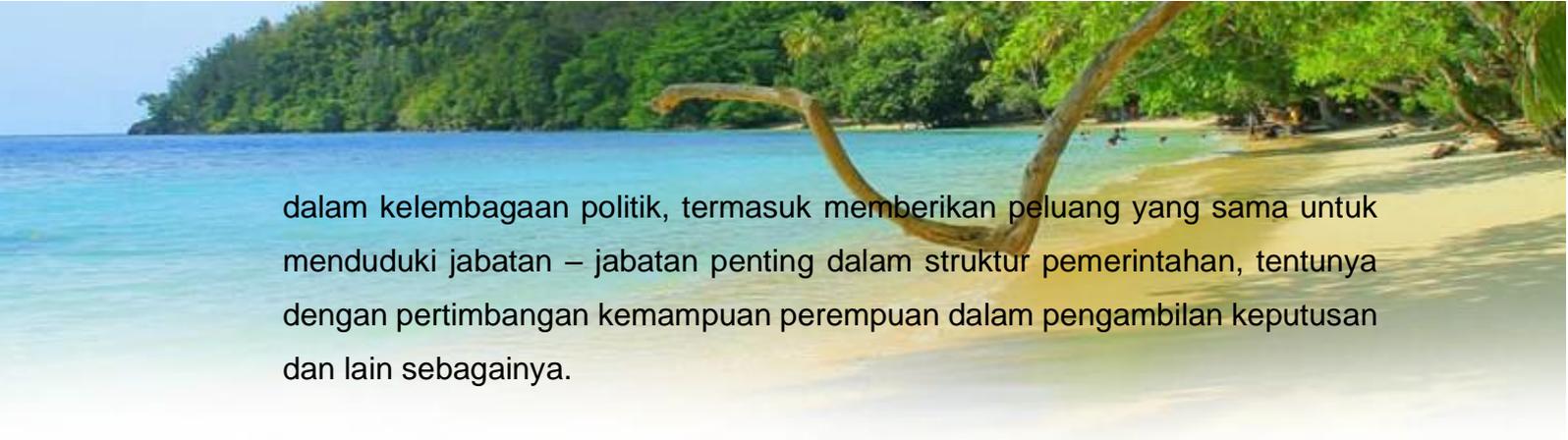
Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kesempatan berpolitik bagi perempuan hanya sekitar 10% dari 795 kursi yang tersedia dalam kelembagaan politik atau perempuan hanya menduduki 78 kursi jika di bandingkan dengan laki-laki di tahun 2021, bahkan ada daerah yang belum memberikan peluang bagi perempuan dalam organisasi politik. Hal ini perlu di seriusi karena banyak perempuan papua yang mempunyai kemampuan berpolitik namun belum mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing di kancah politik bersama dengan laki- laki. Komposisi Perempuan dalam Kelembagaan Politik dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.28 Komposisi Perempuan Dalam Organisasi Politik di Papua



Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Papua 2021.

Berdasarkan grafik diatas peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat terobosan – terobosan membuka peluang bagi perempuan antara lain melakukan MOU dengan KPU serta instansi teknis lainnya untuk menjangking potensi sumberdaya perempuan untuk mengisi kekosongan kursi perempuan



dalam kelembagaan politik, termasuk memberikan peluang yang sama untuk menduduki jabatan – jabatan penting dalam struktur pemerintahan, tentunya dengan pertimbangan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

Tabel 3.84 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021
dari 26 Sasaran Strategis dari Pemerintah Provinsi Papua sesuai RPJMD Prov.Papua Tahun 2019-2023 dan sesuai

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	234,363,059,128.00	220,117,569,417.38	93.92	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
					Pengelolaan Pendidikan Khusus
					Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	762,859,659,170.00	644,246,273,395.40	84.45	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Peningkatan Pelayanan BLUD
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
					Fasilitasi Keprotokolan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
					Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	274,108,143,658.00	268,329,480,454.60	97.89	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	0.00	0.00	0.00	
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1,659,943,593.00	1,659,628,793.00	99.98	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	177,213,796,709.00	173,894,268,589.00	98.13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi				Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
					Fasilitasi Bantuan Hukum
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	2,249,812,708.00	2,200,312,708.00	97.80	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	34,065,886,754.00	33,377,008,822.00	97.98	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
					Mutasi dan Promosi ASN
					Pengembangan Kompetensi ASN
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	86,418,958,408.00	77,778,887,075.00	90.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
					Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	45,734,815,154.00	29,124,239,348.00	63.68	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
					Pendampingan dan Asistensi
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	35,255,487,864.00	31,935,370,489.88	90.58	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Penataan Prasarana Pertanian
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	8,138,147,861.00	7,640,491,896.00	94.30	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Provinsi
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi	82,441,375,289.00	78,438,672,096.42	95.14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Perbenihan Tanaman Hutan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1,406,648,011.00	1,406,644,011.00	100.00	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	14,413,403,000.00	13,299,961,790.00	92.27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah	1,200,650,511,934.00	1,101,539,276,208.75	91.75	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional
					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	423,132,600,120.00	161,354,843,717.11	38.13	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	21,192,672,939.00	19,726,944,028.47	93.08	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	405,983,343,760.00	371,568,275,271.17	91.52	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	38,019,826,673.00	37,496,847,143.00	98.62	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi
					Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
					Pengelolaan Museum Provinsi
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	3,049,884,866.00	2,964,130,756.00	97.19	Pelaksanaan Otonomi Daerah
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	19,173,304,654.00	18,665,406,886.00	97.35	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	3,069,494,947.00	3,063,957,887.00	99.82	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	38,554,229,854.00	37,278,392,202.00	96.69	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Provinsi
					Fasilitasi Keprotokolan
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)			PROGRAM-PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
					Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	807,333,449.00	802,053,449.00	99.35	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
					Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
ANGGARAN PRIORITAS IKU		3,920,724,345,364.00	3,343,514,619,015.18	85.28	
BELANJA LANGSUNG		6,374,834,354,836.00	5,689,192,094,408.90	89.24	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		11,202,523,088,803.00	9,061,952,616,220.91	80.89	
TOTAL BL + BTL		17,577,357,443,639.00	14,751,144,710,629.80	83.92	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2021 adalah Rp17.577.357.443.639,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp11.202.523.088.803,00 dan Belanja Langsung Rp6.374.834.354.836,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.920.724.345.364,00 atau 61.50 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.343.514.619.015.18 dari realisasi belanja langsung atau 58.77 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 85,2 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 85,2 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB IV



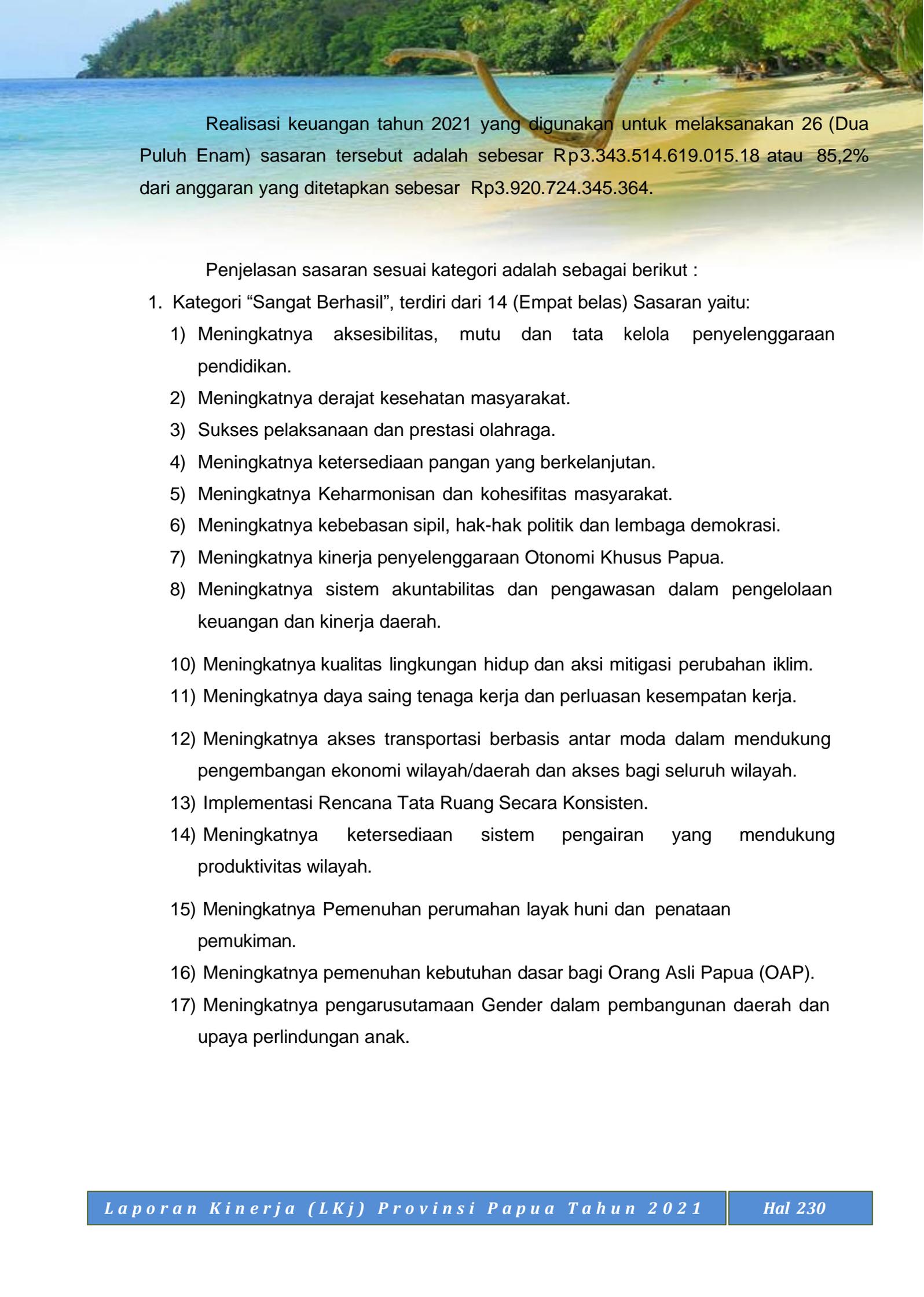
A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing- masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam Tahun 2021 adalah :

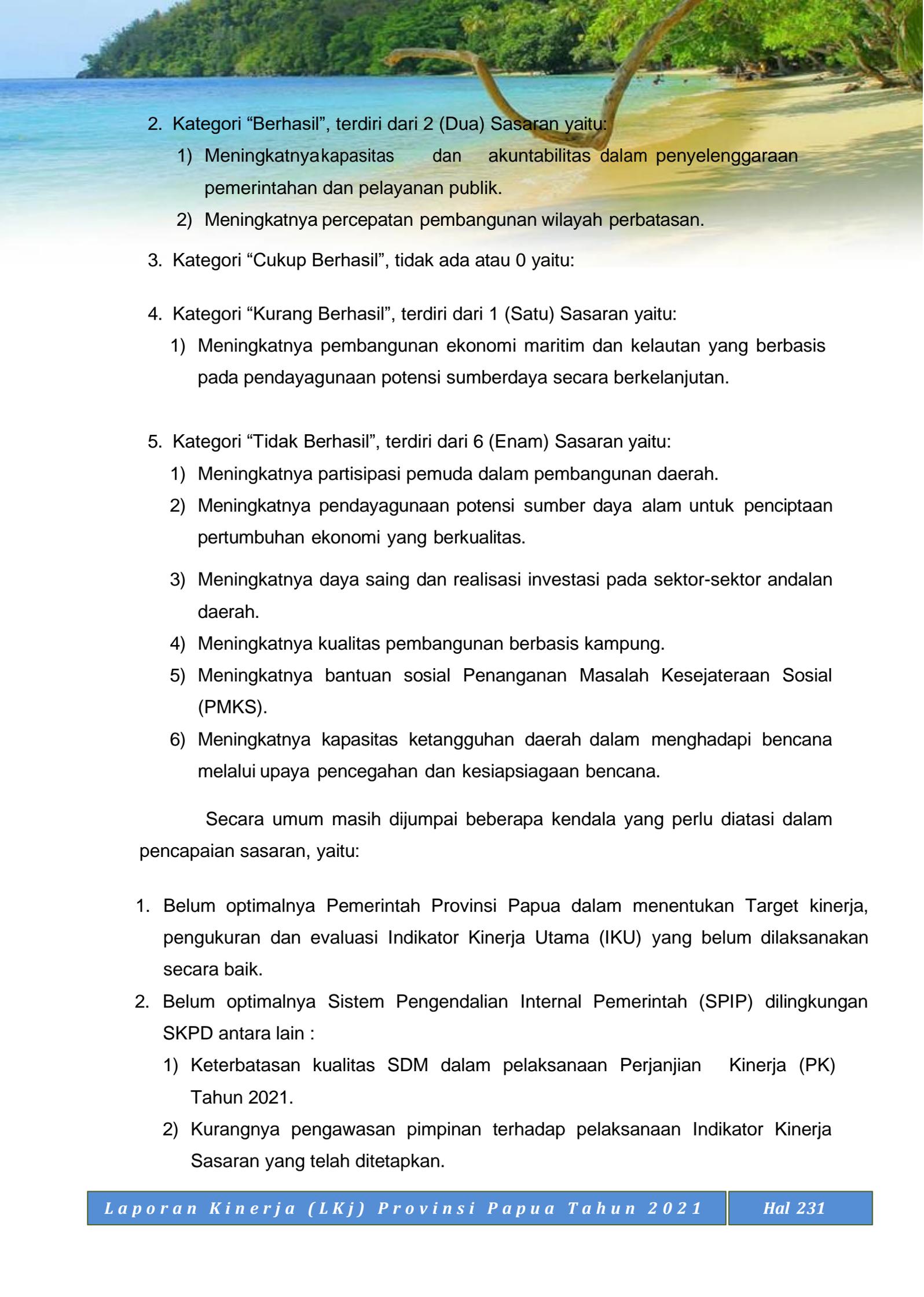
Keterangan	Jumlah
➤ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	26 sasaran
>Kategori "Sangat Berhasil"	17 sasaran
>Kategori "Berhasil"	2 sasaran
>Kategori "Cukup Berhasil"	0 sasaran
>Kategori "Kurang Berhasil"	1 sasaran
>Kategori "Tidak Berhasil"	6 sasaran
➤ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	Rp3.343.514.619.015,18
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	85,28%
➤ Realisasi Belanja Langsung	Rp 5.689.192.094.408.90
> Prosentase realisasi belanja langsung terhadap anggaran belanja langsung	89.24%



Realisasi keuangan tahun 2021 yang digunakan untuk melaksanakan 26 (Dua Puluh Enam) sasaran tersebut adalah sebesar Rp3.343.514.619.015.18 atau 85,2% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.920.724.345.364.

Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

1. Kategori “Sangat Berhasil”, terdiri dari 14 (Empat belas) Sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
 - 5) Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.
 - 6) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
 - 7) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.
 - 8) Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
 - 10) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.
 - 11) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - 12) Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
 - 13) Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten.
 - 14) Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
 - 15) Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.
 - 16) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Orang Asli Papua (OAP).
 - 17) Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.

- 
2. Kategori “Berhasil”, terdiri dari 2 (Dua) Sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - 2) Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
 3. Kategori “Cukup Berhasil”, tidak ada atau 0 yaitu:
 4. Kategori “Kurang Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.
 5. Kategori “Tidak Berhasil”, terdiri dari 6 (Enam) Sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
 - 2) Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - 3) Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.
 - 4) Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.
 - 5) Meningkatnya bantuan sosial Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 6) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target kinerja, pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.

- 
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.



B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan isi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dengan Gubernur sebagai Pimpinan Tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai kinerja yang ditetapkan sesuai Visi Misi SKPD dan Visi Misi Gubernur.
4. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan program kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan
7. Mendorong Kepala SKPD untuk memanfaatkan Hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*).



LAMPIRAN





GUBERNUR PAPUA

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019 - 2023**

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019**



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran berhasil dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Pasal 3

- (1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
 - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

(2). IKU Provinsi/4

- (2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2019

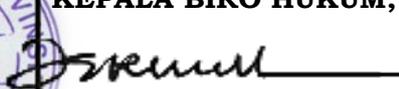
GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 26 Tahun 2019
 Tanggal : 22 Oktober 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA
PERIODE 2019 – 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1:Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM					
1.	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk } i$ <p>Keterangan : <i>RLS</i> : Rata-rata Lama Sekolah pada umur a ditahun t Lama sekolah penduduk i ke-i pada suatu wilayah n : Jumlah penduduk (i = 1,2,3, ..., n)</p>	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan : HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i : Usia (a, a + 1, ..., n) FK : Faktor koreksi pesantren</p>	

				$FK = \frac{\text{jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{jumlah penduduk usia 7 tahun keatas}} + 1$ $\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{jumlah bermukim}}{\text{jumlah santri seluruhnya}}$ $\begin{aligned} &\text{jumlah santri sekolah dan mukim} \\ &= \text{rasio santri mukim} \\ &\times \text{jumlah santri sekolah} \end{aligned}$	
		3.	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	<p>rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua</p>	Dinas Kesehatan
3.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	1.	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang menerima penghargaan tingkat nasional}}{\text{Jumlah seluruh Atlet dalam pembinaan}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
5.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1.	Cakupan daerah rawan pangan	<p>Jumlah Kabupaten/Kota yg rawan pangan</p>	Dinas Pertanian dan Pangan

		2.	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	<u>Indeks harga yang diterima petani</u> Indeks harga yang dibayar petani		Dinas Pertanian dan Pangan
Misi 2 : Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI						
1.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	<u>Konflik yang tertangani</u> Jumlah konflik	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1.	Nilai skor aspek kebebasan sipil	<u>Permohonan Ijin yang diberikan</u> Jumlah Permohonan Ijin yang masuk	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Realisasi Hak-Hak Politik dalam UU OTSUS Papua		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Jumlah Lembaga Demokrasi yangmendapat Ijin dan Jumlah Lembaga Demokrasi yang terdaftar.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan						
1.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1.	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Rata-Rata Realisasi Program OTSUS <u>(Fisik dan Keuangan)</u> Rata-Rata Target Pencapaian Program OTSUS	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPAN dan RB RI	Biro Organisasi
		2.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	<u>Target Sistem yang terintegrasi</u> Realisasi Sistem yang terimplementasi X 100 %	Dinas Komunikasih dan Informatika
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program,serta kegiatan pembangunan daerah.	1.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD yang sesuai <u>RPJMD Tahun berkenaan</u> Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	<u>Jumlah Realisasi PAD</u> Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah X100 %	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan

1.	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	<u>PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs</u> Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	<u>PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs</u> Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan

		3.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sub sektor peternakan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Udara	$\text{IKU} = 100 - [50/0,9 \times (\text{Ieu} - 0,1)]$ <p>Keterangan:</p> <p>IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks European union 0 – 50 = Baik 51 – 100 = Sedang 101 – 199 = Tidak sehat 200– 299 = Sangat tidak Sehat ≥ 300 = Berbahaya</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$ <p>Keterangan :</p> <p>Nilai relative = $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)$ Ci = konsentrasi parameter air Lij = konsentrasi</p> <p>0 ≤ PI_j ≤ 1,0 □ baik (memenuhi baku mutu) 1,0 ≤ PI_j ≤ 5,0 □ cemar ringan 5,0 ≤ PI_j ≤ 10,0 □ cemar sedang PI_j > 10,0 □ cemar berat</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$ <p>Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		4.	Intensitas penurunan emisi	$\frac{\text{Jumlah Emisi CO}_2 \text{ tahun ybs}}{\text{PDRB thn ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.	1.	Kontribusi sub Sektor perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	1.	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas Perindagkop dan Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah.	1.	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs} - \text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		2.	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMA tahun yang ybs-}}{\text{Nilai investasi PMA tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.	1.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	1.	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program Rencana Tataruang (RT)/ Rencana Wilayah (RW)}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.	1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	$\frac{\text{Jumlah sumber daya air yang termanfaatkan}}{\text{Jumlah sumber daya air yang tersedia}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

9.	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik.	$\frac{\text{Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	$\frac{\text{Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih}}{\text{Jumlah RT/KK di Provinsi Papua}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu					
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.	1.	Indeks Kampung Membangun	$\frac{\text{Jumlah Kampung Berkembang}}{\text{Total Jumlah Kampung}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP)	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP yaitu pada Empat (4) Sektor Utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur).	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1.	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	$\frac{(\text{jumlah siswa SD X 6 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMP X 9 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun})}{\text{jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan}}$	Badan Perbatasan dan Kerjasama

		2.	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		3.	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	$Y = p/q$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
4.	Meningkatnya bantuan sosial PMKS.	1.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	1.	Indeks Resiko Bencana(IRBI)	Jumlah Bencana yg tertangani di <u>Provinsi Papua</u> Jumlah Bencana yang terjadi di Provinsi Papua $\times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

6.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG diukur dengan menggunakan rasio $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$ Hasil IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Menjumlahkan Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura. Telp. (0967) 534986- Fax (0967) 534947



REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : X.700/2/005/LHR-ITPROV
TANGGAL : 30 MARET 2022



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Telp. (0967) 536254, 534986 – Fax (0967) 534947

Jayapura, 30 Maret 2022

Nomor : X.700/2/005/LHR-ITPROV
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Reviu Laporan Kinerja (LKj)
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN RB)
Republik Indonesia
di -
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor : 700/2/110/SP-ITPROV tanggal 28 Maret 2022 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021, kami telah melakukan reviu dengan hasil sebagai berikut :

1. DASAR REVIU

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 5) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua;
- 6) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 7) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.
- 8) Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor : 700/2/110/SP-ITPROV tanggal 28 Maret 2022 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;

2. TUJUAN REVIU

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan tujuan adalah :

- 1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

3. RUANG LINGKUP REVIU

Berdasarkan Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah angka 1 huruf f dan g, Reviu dilakukan atas Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yaitu :

- 1) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
- 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;
- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD;

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional (Jika Ada);
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja Tahun 2021 Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan;
- 6) Analisis Program/Kegiatan Tahun 2021 Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja;
- 7) Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

4. HASIL REVIU

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami laksanakan sebagai berikut :

- 1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Hasil analisis terhadap informasi akuntabilitas kinerja Provinsi Papua mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah diketahui terdapat 26 sasaran strategis dan 43 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 antara Kepala SKPD dan Gubernur Papua. Secara umum dari 43 indikator sasaran terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 62,79% indikator yang mencapai target dengan kategori "Sangat Berhasil" dan 8 (delapan) atau 18,60% indikator yang "Tidak Berhasil". Hasil perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah skala ordinal penilaian yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.5	6.76	90.13	90.13
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.5	11.11	96.6	96.61
3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	77.9	78.89	101.27	101.27
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.1	65.93	96.81	96.81
5	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	85	93	109	109.41
6	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	72.06	14.75	20.31	20.47
7	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	9	7	128.57	77.78
8	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7393.1	100.66	73.44	1.36
9	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.8	100	128.5	128.53
10	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94	100	106.4	106.38
11	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	46.08	51.83	110.7	112.48
12	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57.07	50	86.7	87.61
13	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	95	97.8	102.95	102.95
14	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	70	70
15	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	90	100	111.11	111.11
16	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	90	100	111.11	111.11
17	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100	WTP
18	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11.52	13.3	115.45	115.45
19	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	3.08	2.42	63.68	78.57
20	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	2.07	0.98	36.29	47.34
21	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2.07	0.85	31.48	41.06
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.6	94.2	100.44	100.64
23	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.1	90	113.78	113.78
24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	82.7	111	134.22	134.22
25	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	0.343	0.449	130.9	130.90
26	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.67	4.5	51.9	51.90
27	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	97.84	96.6	98.73	98.73
28	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	60.49	3.34	5.52	5.52
29	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	86.08	2	2.32	2.32
30	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	45	60.37	134.15	134.16
31	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	40	97.86	244.65	244.65
32	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	70	75	107.14	107.14
33	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	37.54	40.31	107.3	107.38
34	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	42.87	100	233.26	233.26
35	Indeks Desa Membangun	Indeks	48.38	3.84	7.94	7.94
36	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	67.49	97.54	146.37	144.53
37	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	10.25	8.17	79.7	79.71
38	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.01	65.88	98.31	98.31
39	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	12.3	8.85	71.95	71.95
40	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan social	ribu orang per tahun	30	3.432	11.44	11.44
41	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
42	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.79	79.69	99.87	99.87
43	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	63.95	65.27	102.06	102.06

Ket. indikator tidak terdapat dalam RPJMD 2019-2023

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa belum sepenuhnya informasi mengenai perbandingan antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2 Perbandingan Dengan Kinerja Tahun Lalu

NO	INFORMASI PERBANDINGAN Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	Menyajikan Informasi Perbandingan	31	72.10
2	Tidak Menyajikan Informasi Perbandingan	12	27.90

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator telah menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD.

Dari hasil revidu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa belum sepenuhnya informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RJMD dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3 Perbandingan Dengan RPJMD

NO	INFORMASI PERBANDINGAN Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	Menyajikan Informasi Perbandingan	42	67.44
2	Tidak menyajikan Informasi Penyajian	1	32.55

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Dari hasil rewiu terhadap laporan akuntabilitas diketahui terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang memuat perbandingan dengan standar nasional yaitu sasaran ke 26 “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak” dengan indikator sasaran “Indeks Pemberdayaan Gender”.

- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja Tahun 2021 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil rewiu terhadap laporan akuntabilitas diketahui informasi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan belum sepenuhnya dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Analisis Penyebab

NO	INFORMAsi Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	Menyajikan Informasi	29	60.47
2	Tidak menyajikan Informasi	14	32,56

- 6) Analisis Program/Kegiatan Tahun 2021 yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dari hasil rewiu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum sepenuhnya dilakukan.

- 7) Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dari hasil rewiu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa informasi analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber

daya belum dimuat dalam penjelasan semua capaian sasaran dan capaian sasaran.

Sesuai hasil revidi yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 yaitu :

- 1) Melengkapi data perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada setiap indikator sasaran;
- 2) Melengkapi data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RJMD pada setiap indikator sasaran;
- 3) Melengkapi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada setiap indikator sasaran;
- 4) Membuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada setiap indikator sasaran;
- 5) Membuat analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap indikator sasaran kemudian disajikan dalam penyampain akuntabilitas kinerja;
- 6) Agar menindaklanjuti hasil revidi Laporan Kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

5. Tindak Lanjut Hasil Revidi

Dari hasil revidi terdapat hasil revidi Laporan Kinerja Tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 :

- 1) Kesalahan aritmatika dalam penyajian data;
- 2) Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Demikian disampaikan hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS BERKUALITAS UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI /Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Telp. (0967) 536254, 534986 – Fax (0967) 534947

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jayapura, 30 Maret 2022



Drs. ANGGIAT SHUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA
ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA
NIP. 19661023 198803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura Telp. (0967) 534947 - Fax. (0967) 534936 - 536254

SURAT PERINTAH NOMOR : X.700/ 2 / 110 /SP-ITPROV

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Surat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor 061/F5/Ro.Orgs tanggal 25 Maret 2022 hal, Permintaan Reviu LKj 2021;
 6. Program Kerja Pengawasan (PKPT) Inspektorat Prov. Papua T.A. 2022.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Drs. Anggiat Situmorang, M.Si., Ak., CA | : Penanggungjawab |
| 2. Kamaruddin, S.IP | : Wakil Penanggungjawab |
| 3. Hendry Pakpahan, S.STP, M.Si | : Pengendali Teknis |
| 4. Novelia Pugu, SE, M.Si, CFA | : Ketua Tim |
| 5. Malik Rachman, SE, M.Ec,Dev, CFA | : Anggota Tim |
| 6. Wira Sutria, SE, Ak, M.Si | : Anggota Tim |
| 7. Brian G. Sendoh, SE | : Anggota Tim |
| 8. Rihana, SE | : Anggota Tim |

- Untuk :
1. Seterimanya Surat Perintah ini, segera melaksanakan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 dengan ketentuan :
 - a. Lamanya Penugasan : 7 (tujuh) hari.
 - b. Beban biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
 2. Segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur Papua selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai penugasan.
 3. Pegawai Inspektorat Provinsi Papua dilarang menerima gratifikasi.
 4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28 Maret 2021



a.n. GUBERNUR PAPUA
Pit. INSPEKTUR

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA, QIA., CFA
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

TABEL CAPAIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2021

**TARGET, REALISASI dan CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 2019, 2020 dan 2021**

didasarkan pada INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Prov.Papua Tahun 2019-2023
dan PERJANJIAN KINERJA (PK) Gubernur Papua setiap Tahun Anggaran 2019-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2019				2020				2021		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
1 Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan.	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.9	6.52	94.5	Tahun	7.2	6.69	92.92	Tahun	7.5	6.76	90,13
	2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	11	10.83	98.45	Tahun	11.2	11.08	98.95	Tahun	11.5	11,11	96,6
	3 Penduduk yang berusia	%	75.9	76.79	101.17	%	76.9	78	101.43	%	77.9	78,89	101,27
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.6	65.65	99.38	Tahun	67.03	65.79	98,15	Tahun	68.1	65.93	96,81
3 Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga.	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	40	86	215	Atlet	80	100	125	Atlet	85	93	109
4 Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	70.3	16.98	24.15	persen	71.5	14.51	20.29	persen	72.06	14.75	20.31
5 Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.	1 Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	11	25	44	jumlah kab./kota	10	22	45.45	jumlah kab./kota	9	7	128.57
	2 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7191.8	92.5	1.28	Rp ribu per kapita	7291.7	7294	100.03	Rp ribu per kapita	7393.1	100.66	73.44
6 Meningkatkan Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76.90	100.00	130.00	Indeks	77.30	57.50	74.38	Indeks	77.80	100.00	128.50
7 Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi.	1 Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	93.1	100	107.4	skor	93.6	100	107.4	skor	94	100	106.4
	2 Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	43.9	43.81	97.52	skor	45.3	51.16	99.79	skor	46.08	51.83	110.7
	3 Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	55.5	57.05	102.79	skor	56.6	52.61	104.2	skor	57.07	50	86.7
8 Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	90	92.07	102.3	%	93	95.85	103.06	%	95	97.8	102.95
9 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1 Capaian Nilai SAKIP	predikat	B	B	100	predikat	B	B	100	predikat	BB	B	70
	2 Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	%	85	120	141.17	%	85	79,17	93,14	%	90	100	111.111
10 Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	%	85	100	117.65	%	90	100	111.111

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2019				2020				2021		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
11 Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100
	2	%	9.49	13.83	145.73	%	10.46	9.92	94.84	%	11.52	13.3	115.45
12 Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	1	%	3	2.69	89.52	%	3.4	2.62	77.06	%	3.08	2.42	63.68
	2	%	1.5	1.04	69.33	%	2.00	1.11	55.5	%	2.07	0.98	36.29
	3	%	1.5	1.03	68.67	%	2.00	78.28	94.31	%	2.07	0.85	31.48
13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.	1	Indeks	92.30	NA	0	Indeks	92.90	90	97.82	Indeks	93.6	94.2	100.44
	2	Indeks	78.20	NA	0	Indeks	78.70	77	97.84	Indeks	79.1	90	113.78
	3	Indeks	80.40	92.64	115	Indeks	81.50	111	136.00	Indeks	82.7	111	134.22
	4	Ton CO2/rupiah	0.39	0.65	60	Ton CO2/rupiah	5.00	7.75	155.00	Ton CO2/rupiah	0.343	0.449	130.9
14 Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.		%	6.27	5.38	85.81	%	7.37	5.07	68.79	%	8.67	4.5	51.9
15 Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.		%	97.34	96.35	98.98	%	97.59	95.6	97.96	%	97.84	96.6	98.73
16 Meningkatkan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.	1	Rp. Triliun	56.36	42.45	75.32	Rp. Triliun	58.39	1.13	1.94	Rp. Triliun	60.49	3.34	5.52
	2	Rp. Triliun	77.65	503.64	648.6	Rp. Triliun	81.75	1.53	1.87	Rp. Triliun	86.08	2	2.32
17 Meningkatkan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.		%	32	53.19	166.22	%	40	53.69	134.23	%	45	60.37	134.15
18 Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.		%	30	85	283	%	35	98	280	%	40	97.86	244.65
19 Meningkatkan Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.		%	60	100	166.67	%	65	100	153,85	%	70	75	107,14
20 Meningkatkan Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1	%	35.22	35.02	99.43	%	36.36	33.09	91.01	%	37.54	40.31	107.3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
		2019				2020				2021					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14		
	2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	%	40.61	31.82	78.36	%	41.72	31.82	76.27	%	42.87	100	233.26	
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	45.02	3.84	8.53	Indeks	46.67	3.84	8.53	Indeks	48.38	3.84	7.94	
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	%	62.4	76.41	126.5	%	64.9	89.58	138.03	%	67.49	97.54	146.37	
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	8.75	7.73	88.34	Tahun	9.47	7.98	84.27	Tahun	10.25	8.17	79.7
		2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	66.04	65.33	98.92	Tahun	66.53	65.62	98.63	Tahun	67.01	65.88	98.31
		3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	10.8	8.97	83.06	Rp juta per kapita	11.52	9.11	79.08	Rp juta per kapita	12.3	8.85	71.95
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	10	7.831	7.831	ribu orang per tahun	20	7.831	39.16	ribu orang per tahun	30	3.432	11.44	
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah	
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak.	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.59	80.05	100.06	Indeks	79.69	79.59	99.87	Indeks	79.79	79.69	99.87
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62.91	70.68	112.35	Indeks	63.43	65.37	103.06	Indeks	63.95	65.27	102.06

Sumber : Laporan Kinerja (LKj/LAKIP) Pemerintah Provinsi Papua 2019-2021 (Data Series).
 Penanggungjawab Data : Subag.Peningkatan Kinerja Organisasi-Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.



Dishut dan LH Papua Meraih Penghargaan KPKNL Jayapura Awards 2022

Nabhan Shidqi Farghani

Rabu, 02 Maret 2022 | 76 kali

Jumat (25/2) bertempat di Lantai 4 Gedung Keuangan Negara Jayapura, **Widiyantoro**, Kepala KPKNL Jayapura menyerahkan piagam penghargaan “KPKNL Jayapura Award 2022” kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Pokok dan PNBP Lelang Terbesar Tahun 2021 Kategori Pemerintah Daerah ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, **Jan Jap. L Ormuseray** yang disaksikan oleh beberapa media lokal baik cetak maupun elektronik.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan tahunan yang diberikan berdasarkan capaian dan evaluasi dari kinerja satuan kerja selama setahun. Ada 10 kategori penghargaan yang diperebutkan 530 satker dan seluruh perbankan di wilayah kerja KPKNL Jayapura dan ada 2 bidang penghargaan yaitu penghargaan dibidang pengelolaan aset atau Barang Milik Negara (BMN) dan dibidang lelang,” kata Kepala KPKNL Jayapura Widiyantoro menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan media.

“Penghargaan dari sisi lelang berupa pendapatan negara bukan pajak yang bisa dilakukan dari lelang, terutama dari pemerintah daerah dan kebetulan dinas kehutanan yang paling tertinggi dan terbesar dari lelang yang diajukan dari pihak pemerintah daerah. Lelang itu adalah kayu sitaan, senilai Rp1,8 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap. L Ormuseray, SH., M.Si dalam wawancara terpisah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada KPKNL Jayapura atas terselenggaranya penilaian dari kinerja pemerintah daerah terkait kontribusi PNBP sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Atas nama Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan terima kasih seluruh pejabat KPKNL. Bagi kami penghargaan ini suatu hal luar biasa patut di syukuri karena kinerja sangat baik dan maksimal pemprov Papua melalui dinas yang ditugaskan Gubernur Papua untuk tangani kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi negara dari hasil lelang tertinggi,” ujarnya.

Kegiatan KPKNL Jayapura Awards 2022 ini selain diliput di RRI, juga diliput di beberapa media di Papua seperti TVRI, Surat Kabar Harian Cenderawasih Post dan Papua Inside. Diharapkan adanya penghargaan ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh elemen pengguna jasa KPKNL Jayapura dan makin berkontribusi terhadap negara.

Pemerintah Provinsi Papua Raih Penghargaan dari KEMENDAGRI tentang Realisasi PAD Tertinggi



Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, MB Setiyo Wahyudi

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi ke-3 tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diserahkan pada acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (2/6) lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi menyatakan penghargaan itu tentunya akan semakin memacu peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2022 ini.

“Kami kemarin mendapat penghargaan realisasi PAD tertinggi. Dengan penilaian ini diharapkan jadi penyemangat dalam rangka meningkatkan PAD Papua di tahun ini,” kata Wahyudi kepada wartawan di Jayapura, Rabu (8/6/2022).

Ia mengungkapkan, realisasi PAD Papua pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp 2,139 triliun dari target sebesar Rp 1,977 triliun. “Jika dibandingkan realisasi PAD 2020, ada kenaikan yang cukup besar sekitar 70 persen,” tambahnya.

baca juga

- Kominfo Papua Bangun Videotron di Sarmi Dan Yapen
- Pajak Kendaraan Bermotor di Papua Capai Rp 35,9 M
- Pemprov Papua Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal
- Tiga Orang Hilang Di Perairan Kondo

Menurutnya, kontribusi terbesar peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2021 itu berasal dari Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia.

“Memang PAP ada kontribusinya karena itu setoran dari PTFI yang tahap kedua. Tapi seluruhnya turut memberikan kontribusi bagi peningkatan realisasi PAD Papua,” tutur dia.

Wahyudi optimis, realisasi PAD Papua di tahun anggaran 2022 ini akan mencapai bahkan melewati target yang dibebankan yakni senilai Rp 1,312 triliun.

“Apalagi saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Papua sudah membaik sehingga diharapkan ada tambahan nilai di tahun ini,” ucapnya.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan guna evaluasi masalah keuangan daerah. Saat ini ekonomi sudah membaik, pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2021 ini meningkat dari tahun 2020.

“Saya berterimakasih banyak untuk seluruh pengelola keuangan khususnya pada saat pandemi Covid-19 karena kerja penanganan dapat kita atasi dengan cukup baik. Ini berkat kerja sama kita semua baik pusat, daerah maupun stakeholder yang ada,” ujar Mendagri.

Adapun pemerintah kota penerima penghargaan realisasi APBD tertinggi tahun 2021 dalam kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi di antaranya Kota Blitar, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Tanjung Pinang.

Untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Kotamobagu, Kota Banjar, dan Kota Blitar. Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kota Blitar, Kota Tomohon, Kota Denpasar, Kota Tangerang, dan Kota Bukit Tinggi.

Sementara penghargaan terhadap pemerintah kabupaten kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bangli, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya, penghargaan terhadap pemerintah provinsi atas Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi diberikan kepada Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Bengkulu.

Sementara untuk kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua, dan Provinsi Jawa Barat.



SIWO PWI Beri Penghargaan Kepada Gubernur Papua dan Sekum KONI Papua

Penulis
Redaksi

-
7 Februari 2022
332

0

Gubernur Papua, Lukas Enembe

JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua mendapat penghargaan Inisiator Olahraga Indonesia 2022 dari Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI).

Penghargaan kepada kedua tokoh Papua itu akan diserahkan tepat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Siwo PWI Pusat akan memberikan penghargaan INISIATOR OLAHRAGA INDONESIA 2022 kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Sekum KONI Papua sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang berprestasi terbaik, memiliki kepedulian dan mengabdikan diri di bidang olahraga,” ungkap Ketua SIWO PWI Pusat, Aagwa Ariwangsa dalam rilis yang diterima Papua Today.com, Senin (7/2).

Ariwangsa mengatakan, penetapan kedua tokoh Papua itu diambil oleh SIWO PWI Pusat merupakan hasil dari pengamatan oleh tim keabsahan dan keputusan Dewan Juri Panitia Pelaksana “Inisiator Olahraga 2022”.

“Semoga dengan penghargaan ini Gubernur Papua semakin termotivasi dalam memberikan yang terbaik untuk kejayaan dan kharuman nama bangsa dan negara Indonesia melalui bidang olahraga,” imbuh Ari (panggilan akrabnya).

Penghargaan kepada Gubernur Lukas Enembe dan Sekum KONI Papua ini, lanjut Ari, juga dilatarbelakangi atas pengabdian keduanya dalam mendorong prestasi olahraga dan sukses dalam penyelenggaraan PON XX. Serta berhasil membawa kontingen Papua berada di posisi 4 nasional.

Bahkan, Gubernur Papua dinilai mampu menjawab tantangan dan berhasil menggelar PON XX Tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

Sedangkan Sekum KONI Papua sukses membawa kontingen Papua berhasil meraih 93 medali emas, 66 perak dan 102 perunggu. Pencapaian ini luar biasa, karena Papua juara pertama diluar pulau Jawa.

"Kita mengamati dengan baik dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber atas upaya-upaya Gubernur Papua dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan PON di masa pandemi Covid-19 yang sangat sulit. Sedangkan Sekum KONI adalah tokoh muda Papua yang sukses mengantarkan Papua ke posisi 4 besar PON. Ini pencapaian luar biasa sepanjang PON, Papua mampu juara pertama di luar pulau Jawa. Papua menggeser Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi yang selama ini menduduki posisi 5 besar PON,"jelasnya.

Ketua SIWO PWI Pusat menyampaikan bahwa kedua tokoh Papua tersebut termasuk tokoh populer dibidang olahraga karena dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berhasil mendapatkan penghargaan dari PWI secara berturut-turut.

"Kami berharap bapak Gubernur dan pak Sekum KONI Papua bisa hadir untuk menerima langsung penghargaan ini,"pinta Ari yang pada PON XX Papua bersama Ketua PWI Pusat, Atal S Depari memantau langsung penyelenggaraan iven nasional itu dan mengamati langkah-langkah KONI Papua dalam strategi kontingen Papua memenangi setiap pertandingan di PON XX. (ist/nald)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XIX.JYP/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 23 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Papua
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Arjuna Sakir, S.F., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA 13404



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 15.A/LHP/XIX.JYP/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Papua
Jln. Balai Kota No. 2 Entrop Jayapura
Telp./Fax. (0967) 536099

Nomor : B/ 105 /RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Papua
di

Jayapura

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2021 adalah **56,96** atau kategori "**CC**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,65	11,96
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,62	4,31
	III. Reform	30,00	14,15	14,30
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,42	30,57

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,48	7,52
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,08	7,76
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,80	7,06
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,73	4,05
Total Komponen Hasil		40,00	26,09	26,39
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	56,51	56,96

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

2. Terdapat 8 hasil antara perubahan Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Sumber Data
1.	ASN yang Profesional	0-100	26,48	Badan Kepegawaian Negara
2.	Implementasi SPBE	0-5	1,8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	67,93	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Maturitas SPIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	44,72	Ombudsman Republik Indonesia
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	36,6	Arsip Nasional Republik Indonesia

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta penilaian kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, hasil penilaian ASN profesional dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Maturitas SPIP dan Kapabilitas

APIP Provinsi Papua juga masih rendah dan tidak menunjukkan peningkatan dari hasil penilaian tahun 2020. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2021 juga menunjukkan hasil yang belum terlalu baik, sehingga secara keseluruhan hasil antara Provinsi Papua pada tahun 2021 mengalami penurunan.

3. Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2020.
4. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
 - a. Penetapan agen perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, sehingga agen perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal;
 - b. Pemerintah Provinsi Papua belum menyusun pemetaan kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang bersifat menghambat dan tidak harmonis;
 - c. Peta proses bisnis sebagian unit kerja belum disusun dan belum dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan sebelumnya, sehingga belum terjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;
 - d. Pemerintah Provinsi Papua belum membangun tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan maksimal. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Provinsi Papua yaitu 1,8 kategori kurang;
 - e. Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melaksanakan sistem merit, salah satunya dengan melaksanakan *assessment* kepada pegawai namun hanya dilakukan kepada pimpinan perangkat daerah. Di samping itu, belum disusun kebijakan terkait manajemen talenta;
 - f. Indikator kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi atau unit kerja;
 - g. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun kebijakan pengawasan, antara lain kebijakan tentang *whistle blowing system*, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan. Namun implementasi atas kebijakan pengawasan tersebut masih belum optimal;
 - h. Dalam pelayanan publik belum ada kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan, bila menerima layanan tidak sesuai standar. Di samping itu, belum terlihat upaya yang maksimal dalam menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	64,53	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	77,60	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	70,64	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	68,53	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

6. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Provinsi Papua, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
- Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilannya dan mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksi/rencana tindak;
 - Memastikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan memiliki peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal sehingga dari peta keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan upaya harmonisasi kebijakan;
 - Menetapkan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
 - Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan Master Plan SPBE nasional;
 - Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;

- f. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga mendukung kinerja organisasi atau unit kerja;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan pengawasan agar mengetahui apakah sistem pengawasan sudah baik, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara;
- h. Meningkatkan maturitas SPIP dan APIP Provinsi Papua untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

atas prestasinya dalam:

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

dengan Predikat Nilai



Jakarta, 5 April 2022

MENTERI

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

A blue handwritten signature of Tjahjo Kumolo.

TJAHJO KUMOLO

Nomor : B/ 118 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Gubernur Papua
di
Jayapura

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memperoleh nilai **64,57** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,26	21,26
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,95	13,48
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,69
d.	Evaluasi Internal	10	7,11	7,11
e.	Capaian Kinerja	20	11,54	12,03
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,53	64,57
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020;
2. Sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya menggambarkan kinerja (*outcome*) yang akan dicapai. Selain itu, perjanjian kinerja Kepala PD juga belum selaras dengan dokumen Renstra PD;
3. Penjenjangan kinerja (*cascading*) dari tingkat Pemerintah Provinsi sampai tingkat PD dan level unit terendah belum seluruhnya menggambarkan kinerja kunci yang mempengaruhi kinerja level di atasnya;
4. Sebagian besar laporan kinerja PD belum menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja;
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD;
6. Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya dalam mendorong penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, meskipun hasilnya belum optimal dan belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mereviu kembali Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 dan menindaklanjuti rekomendasi dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan;
2. Melakukan reviu kualitas perencanaan strategis, terutama di tingkat PD, terkait indikator kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan, cukup untuk mengukur kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
3. Memperbaiki penjenjangan kinerja dengan menyelaraskan kinerja dari tingkat daerah sampai tingkat OPD dan unit kerja terkecil/individu agar bisa menggambarkan kinerja yang mempengaruhi capaian kinerja level di atasnya;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD dengan menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Selain itu, PD dapat memanfaatkan informasi kinerja yang diperoleh dari

laporan kinerja sebagai umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;

5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
6. Mengoptimalkan pembinaan SAKIP dan memantau perkembangan implementasi SAKIP di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan aktif sehingga terwujud kualitas implementasi SAKIP yang semakin baik di seluruh Provinsi Papua.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Mandiri dan Validasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Nomor 002.6/951/Pusida tanggal 29 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Hasil Peninjauan Kembali Inovasi Daerah oleh Tim Penjamin Mutu Independen (Swakelola Tipe II) Nomor 0219/SMARTCITY/KEMENDAGRI.11/2021 tanggal 12 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021.

KESATU : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam

Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia.

- KEDUA : Menetapkan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

A. Kategori Provinsi

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79.51	Sangat Inovatif
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.67	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Timur	63.15	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	62.82	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Tengah	62.57	Sangat Inovatif
6	Provinsi Sumatera Barat	61.13	Sangat Inovatif
7	Provinsi Jambi	61.03	Sangat Inovatif
8	Provinsi Banten	60.52	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	58.68	Inovatif
10	Provinsi Bengkulu	57.93	Inovatif
11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.12	Inovatif
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53.38	Inovatif
13	Provinsi Kalimantan Barat	52.74	Inovatif
14	Provinsi Gorontalo	50.42	Inovatif
15	Provinsi Lampung	50.18	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	49.57	Inovatif
17	Provinsi Papua	49.36	Inovatif
18	Provinsi Sulawesi Selatan	49.24	Inovatif
19	Provinsi Aceh	46.40	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Timur	44.19	Inovatif
21	Provinsi Sulawesi Utara	43.36	Inovatif
22	Provinsi Kepulauan Riau	42.10	Inovatif
23	Provinsi Papua Barat	40.64	Inovatif
24	Provinsi Kalimantan Utara	39.63	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
25	Provinsi Sumatera Utara	39.41	Inovatif
26	Provinsi Riau	38.82	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Selatan	36.72	Inovatif
28	Provinsi Sulawesi Barat	36.64	Inovatif
29	Provinsi Maluku	32.66	Inovatif
30	Provinsi DI Yogyakarta	30.41	Inovatif
31	Provinsi Bali	27.02	Kurang Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Tenggara	25.26	Kurang Inovatif
33	Provinsi Maluku Utara	24.44	Kurang Inovatif
34	Provinsi Kalimantan Tengah	15.69	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kabupaten Banyuwangi	84.19	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Wonogiri	75.51	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Bogor	72.46	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Muara Enim	62.97	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Lampung Barat	62.80	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Tabalong	62.78	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Indragiri Hilir	62.42	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tanggamus	62.32	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Musi Rawas	62.10	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Tegal	62.06	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	61.83	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Bojonegoro	60.37	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Aceh Jaya	60.29	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Malang	60.20	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Sumedang	60.19	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Situbondo	60.05	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	60.02	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Deli Serdang	59.62	Inovatif
19	Kabupaten Bandung	59.52	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
20	Kabupaten Pulau Morotai	59.51	Inovatif
21	Kabupaten Kendal	59.43	Inovatif
22	Kabupaten Musi Banyuasin	59.32	Inovatif
23	Kabupaten Sampang	59.24	Inovatif
24	Kabupaten Banyu Asin	59.03	Inovatif
25	Kabupaten Klungkung	58.98	Inovatif
26	Kabupaten Bondowoso	58.57	Inovatif
27	Kabupaten Jombang	58.51	Inovatif
28	Kabupaten Sumba Timur	58.36	Inovatif
29	Kabupaten Boalemo	58.07	Inovatif
30	Kabupaten Lumajang	57.50	Inovatif
31	Kabupaten Sukabumi	57.49	Inovatif
32	Kabupaten Bangkalan	57.46	Inovatif
33	Kabupaten Sragen	57.23	Inovatif
34	Kabupaten Bone	57.15	Inovatif
35	Kabupaten Aceh Barat	56.88	Inovatif
36	Kabupaten Tuban	56.73	Inovatif
37	Kabupaten Kulon Progo	56.64	Inovatif
38	Kabupaten Kubu Raya	56.62	Inovatif
39	Kabupaten Blitar	56.58	Inovatif
40	Kabupaten Sambas	56.51	Inovatif
41	Kabupaten Lampung Tengah	56.47	Inovatif
42	Kabupaten Cirebon	56.29	Inovatif
43	Kabupaten Manggarai Barat	55.96	Inovatif
44	Kabupaten Pangandaran	55.84	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	55.80	Inovatif
46	Kabupaten Semarang	55.80	Inovatif
47	Kabupaten Demak	55.56	Inovatif
48	Kabupaten Bantaeng	55.44	Inovatif
49	Kabupaten Trenggalek	55.28	Inovatif
50	Kabupaten Sanggau	55.01	Inovatif
51	Kabupaten Bangka Tengah	54.39	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
52	Kabupaten Ciamis	54.35	Inovatif
53	Kabupaten Pamekasan	54.35	Inovatif
54	Kabupaten Batanghari	54.28	Inovatif
55	Kabupaten Gunung Kidul	54.24	Inovatif
56	Kabupaten Ogan Komering Ilir	54.22	Inovatif
57	Kabupaten Maluku Tengah	54.20	Inovatif
58	Kabupaten Belu	54.04	Inovatif
59	Kabupaten Nabire	54.02	Inovatif
60	Kabupaten Banyumas	53.94	Inovatif
61	Kabupaten Nias Barat	53.88	Inovatif
62	Kabupaten Pati	53.81	Inovatif
63	Kabupaten Kotawaringin Barat	53.49	Inovatif
64	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	53.44	Inovatif
65	Kabupaten Sleman	53.42	Inovatif
66	Kabupaten Biak Numfor	53.36	Inovatif
67	Kabupaten Karo	53.24	Inovatif
68	Kabupaten Merauke	53.08	Inovatif
69	Kabupaten Sumba Barat Daya	52.81	Inovatif
70	Kabupaten Lampung Utara	52.80	Inovatif
71	Kabupaten Bireuen	52.76	Inovatif
72	Kabupaten Banggai	52.62	Inovatif
73	Kabupaten Bengkulu Utara	52.61	Inovatif
74	Kabupaten Cilacap	52.61	Inovatif
75	Kabupaten Seram Bagian Barat	52.56	Inovatif
76	Kabupaten Tanah Laut	52.42	Inovatif
77	Kabupaten Majalengka	52.35	Inovatif
78	Kabupaten Pekalongan	52.05	Inovatif
79	Kabupaten Way Kanan	52.05	Inovatif
80	Kabupaten Blora	51.36	Inovatif
81	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	51.29	Inovatif
82	Kabupaten Bangka	51.26	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
83	Kabupaten Bulungan	51.15	Inovatif
84	Kabupaten Buol	51.12	Inovatif
85	Kabupaten Humbang Hasundutan	51.09	Inovatif
86	Kabupaten Konawe Kepulauan	51.03	Inovatif
87	Kabupaten Pandeglang	50.83	Inovatif
88	Kabupaten Bone Bolango	50.72	Inovatif
89	Kabupaten Pesisir Barat	50.66	Inovatif
90	Kabupaten Purbalingga	50.62	Inovatif
91	Kabupaten Bengkulu Selatan	50.42	Inovatif
92	Kabupaten Purwakarta	50.38	Inovatif
93	Kabupaten Sumenep	50.38	Inovatif
94	Kabupaten Pringsewu	50.35	Inovatif
95	Kabupaten Halmahera Barat	50.20	Inovatif
96	Kabupaten Supiori	49.84	Inovatif
97	Kabupaten Bangka Selatan	49.68	Inovatif
98	Kabupaten Manggarai	49.63	Inovatif
99	Kabupaten Karanganyar	49.59	Inovatif
100	Kabupaten Samosir	49.57	Inovatif
101	Kabupaten Labuhanbatu	49.51	Inovatif
102	Kabupaten Lampung Selatan	49.48	Inovatif
103	Kabupaten Lamongan	49.34	Inovatif
104	Kabupaten Pesisir Selatan	49.34	Inovatif
105	Kabupaten Natuna	49.05	Inovatif
106	Kabupaten Boyolali	48.99	Inovatif
107	Kabupaten Tulang Bawang	48.88	Inovatif
108	Kabupaten Sekadau	48.84	Inovatif
109	Kabupaten Pesawaran	48.71	Inovatif
110	Kabupaten Banjar	48.62	Inovatif
111	Kabupaten Sidoarjo	48.55	Inovatif
112	Kabupaten Ketapang	48.52	Inovatif
113	Kabupaten Bengkalis	48.30	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
114	Kabupaten Dharmas Raya	48.07	Inovatif
115	Kabupaten Takalar	48.07	Inovatif
116	Kabupaten Keerom	48.04	Inovatif
117	Kabupaten Manggarai Timur	48.02	Inovatif
118	Kabupaten Flores Timur	47.88	Inovatif
119	Kabupaten Rokan Hulu	47.64	Inovatif
120	Kabupaten Bandung Barat	47.39	Inovatif
121	Kabupaten Tana Tidung	47.38	Inovatif
122	Kabupaten Pelalawan	47.33	Inovatif
123	Kabupaten Bulukumba	47.32	Inovatif
124	Kabupaten Purworejo	47.32	Inovatif
125	Kabupaten Badung	47.12	Inovatif
126	Kabupaten Subang	47.05	Inovatif
127	Kabupaten Batang	46.84	Inovatif
128	Kabupaten Ngawi	46.75	Inovatif
129	Kabupaten Kotawaringin Timur	46.60	Inovatif
130	Kabupaten Jepara	46.52	Inovatif
131	Kabupaten Lebak	46.47	Inovatif
132	Kabupaten Madiun	46.44	Inovatif
133	Kabupaten Klaten	46.35	Inovatif
134	Kabupaten Magetan	46.09	Inovatif
135	Kabupaten Morowali	46.08	Inovatif
136	Kabupaten Kepahiang	46.00	Inovatif
137	Kabupaten Tasikmalaya	45.72	Inovatif
138	Kabupaten Agam	45.62	Inovatif
139	Kabupaten Temanggung	45.58	Inovatif
140	Kabupaten Jeneponto	45.49	Inovatif
141	Kabupaten Mojokerto	45.31	Inovatif
142	Kabupaten Seluma	45.05	Inovatif
143	Kabupaten Kerinci	45.02	Inovatif
144	Kabupaten Pacitan	44.88	Inovatif
145	Kabupaten Mandailing Natal	44.76	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
146	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44.76	Inovatif
147	Kabupaten Parigi Moutong	44.70	Inovatif
148	Kabupaten Probolinggo	44.70	Inovatif
149	Kabupaten Tapin	44.68	Inovatif
150	Kabupaten Sukamara	44.67	Inovatif
151	Kabupaten Empat Lawang	44.45	Inovatif
152	Kabupaten Kediri	44.29	Inovatif
153	Kabupaten Rejang Lebong	44.07	Inovatif
154	Kabupaten Buru	44.05	Inovatif
155	Kabupaten Mesuji	43.80	Inovatif
156	Kabupaten Belitung	43.68	Inovatif
157	Kabupaten Sumbawa Barat	43.68	Inovatif
158	Kabupaten Buleleng	43.64	Inovatif
159	Kabupaten Ogan Ilir	43.59	Inovatif
160	Kabupaten Grobogan	43.35	Inovatif
161	Kabupaten Kebumen	43.23	Inovatif
162	Kabupaten Gresik	43.04	Inovatif
163	Kabupaten Sumbawa	42.96	Inovatif
164	Kabupaten Sinjai	42.82	Inovatif
165	Kabupaten Kampar	42.66	Inovatif
166	Kabupaten Balangan	42.62	Inovatif
167	Kabupaten Luwu Utara	42.60	Inovatif
168	Kabupaten Nias	42.52	Inovatif
169	Kabupaten Kudus	42.51	Inovatif
170	Kabupaten Paser	42.43	Inovatif
171	Kabupaten Aceh Barat Daya	42.36	Inovatif
172	Kabupaten Lampung Timur	42.06	Inovatif
173	Kabupaten Muna	42.02	Inovatif
174	Kabupaten Banjarnegara	41.91	Inovatif
175	Kabupaten Magelang	41.81	Inovatif
176	Kabupaten Wonosobo	41.73	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
177	Kabupaten Lahat	41.68	Inovatif
178	Kabupaten Sintang	41.57	Inovatif
179	Kabupaten Penajam Paser Utara	41.50	Inovatif
180	Kabupaten Indragiri Hulu	41.38	Inovatif
181	Kabupaten Kutai Kartanegara	41.38	Inovatif
182	Kabupaten Tanah Datar	41.21	Inovatif
183	Kabupaten Tangerang	41.16	Inovatif
184	Kabupaten Jayawijaya	41.10	Inovatif
185	Kabupaten Bantul	40.97	Inovatif
186	Kabupaten Sarolangun	40.89	Inovatif
187	Kabupaten Poso	40.78	Inovatif
188	Kabupaten Padang Pariaman	40.64	Inovatif
189	Kabupaten Pasaman	40.49	Inovatif
190	Kabupaten Minahasa Tenggara	40.29	Inovatif
191	Kabupaten Bombana	40.20	Inovatif
192	Kabupaten Jayapura	40.13	Inovatif
193	Kabupaten Garut	39.86	Inovatif
194	Kabupaten Batu Bara	39.74	Inovatif
195	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	39.14	Inovatif
196	Kabupaten Karawang	38.83	Inovatif
197	Kabupaten Pohuwato	38.76	Inovatif
198	Kabupaten Pinrang	38.72	Inovatif
199	Kabupaten Mamuju Tengah	38.41	Inovatif
200	Kabupaten Kolaka Utara	38.24	Inovatif
201	Kabupaten Sijunjung	38.13	Inovatif
202	Kabupaten Lombok Tengah	37.77	Inovatif
203	Kabupaten Jembrana	37.68	Inovatif
204	Kabupaten Toba	37.68	Inovatif
205	Kabupaten Timor Tengah Utara	37.56	Inovatif
206	Kabupaten Bengkulu Tengah	37.47	Inovatif
207	Kabupaten Mamasa	36.97	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
208	Kabupaten Anambas	36.95	Inovatif
209	Kabupaten Bengkayang	36.74	Inovatif
210	Kabupaten Bungo	36.64	Inovatif
211	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	36.59	Inovatif
212	Kabupaten Pasaman Barat	36.32	Inovatif
213	Kabupaten Solok	36.27	Inovatif
214	Kabupaten Kuningan	35.96	Inovatif
215	Kabupaten Tulang Bawang Barat	35.93	Inovatif
216	Kabupaten Polewali Mandar	35.91	Inovatif
217	Kabupaten Serang	35.77	Inovatif
218	Kabupaten Merangin	35.63	Inovatif
219	Kabupaten Soppeng	35.48	Inovatif
220	Kabupaten Kepulauan Meranti	35.47	Inovatif
221	Kabupaten Asahan	35.43	Inovatif
222	Kabupaten Tabanan	35.42	Inovatif
223	Kabupaten Lombok Timur	35.28	Inovatif
224	Kabupaten Belitung Timur	34.98	Inovatif
225	Kabupaten Rote Ndao	34.86	Inovatif
226	Kabupaten Tebo	34.63	Inovatif
227	Kabupaten Tana Toraja	34.25	Inovatif
228	Kabupaten Tulungagung	33.91	Inovatif
229	Kabupaten Barito Kuala	33.90	Inovatif
230	Kabupaten Ponorogo	33.84	Inovatif
231	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	33.76	Inovatif
232	Kabupaten Teluk Wondama	33.68	Inovatif
233	Kabupaten Pidie Jaya	33.47	Inovatif
234	Kabupaten Cianjur	33.32	Inovatif
235	Kabupaten Katingan	33.12	Inovatif
236	Kabupaten Sukoharjo	32.88	Inovatif
237	Kabupaten Buton Selatan	32.72	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
238	Kabupaten Lombok Utara	32.56	Inovatif
239	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32.53	Inovatif
240	Kabupaten Wajo	32.44	Inovatif
241	Kabupaten Pasangkayu	32.36	Inovatif
242	Kabupaten Rembang	32.20	Inovatif
243	Kabupaten Karimun	32.09	Inovatif
244	Kabupaten Kuantan Singingi	32.01	Inovatif
245	Kabupaten Barru	31.98	Inovatif
246	Kabupaten Lamandau	31.54	Inovatif
247	Kabupaten Banggai Kepulauan	31.48	Inovatif
248	Kabupaten Kolaka	31.30	Inovatif
249	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	30.60	Inovatif
250	Kabupaten Pematang	30.32	Inovatif
251	Kabupaten Dompus	30.05	Inovatif
252	Kabupaten Sumba Tengah	29.88	Kurang Inovatif
253	Kabupaten Pakpak Bharat	29.70	Kurang Inovatif
254	Kabupaten Nunukan	29.35	Kurang Inovatif
255	Kabupaten Bangka Barat	29.24	Kurang Inovatif
256	Kabupaten Ogan Komering Ulu	29.19	Kurang Inovatif
257	Kabupaten Halmahera Tengah	29.15	Kurang Inovatif
258	Kabupaten Lima Puluh Kota	28.81	Kurang Inovatif
259	Kabupaten Melawi	28.22	Kurang Inovatif
260	Kabupaten Berau	27.34	Kurang Inovatif
261	Kabupaten Gorontalo	27.32	Kurang Inovatif
262	Kabupaten Hulu Sungai Utara	27.28	Kurang Inovatif
263	Kabupaten Kupang	27.08	Kurang Inovatif
264	Kabupaten Aceh Tengah	27.03	Kurang Inovatif
265	Kabupaten Serdang Bedagai	27.00	Kurang Inovatif
266	Kabupaten Manokwari Selatan	26.91	Kurang Inovatif
267	Kabupaten Labuhanbatu Utara	26.84	Kurang Inovatif
268	Kabupaten Kaimana	26.72	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
269	Kabupaten Kepulauan Selayar	26.46	Kurang Inovatif
270	Kabupaten Buton	26.10	Kurang Inovatif
271	Kabupaten Aceh Utara	25.54	Kurang Inovatif
272	Kabupaten Malinau	25.39	Kurang Inovatif
273	Kabupaten Majene	25.35	Kurang Inovatif
274	Kabupaten Aceh Tamiang	25.23	Kurang Inovatif
275	Kabupaten Gianyar	24.96	Kurang Inovatif
276	Kabupaten Lembata	24.17	Kurang Inovatif
277	Kabupaten Bekasi	23.92	Kurang Inovatif
278	Kabupaten Indramayu	23.91	Kurang Inovatif
279	Kabupaten Landak	23.65	Kurang Inovatif
280	Kabupaten Buton Tengah	23.48	Kurang Inovatif
281	Kabupaten Sikka	23.29	Kurang Inovatif
282	Kabupaten Lebong	22.69	Kurang Inovatif
283	Kabupaten Siau Tagulandang. Biaro	22.56	Kurang Inovatif
284	Kabupaten Gowa	22.53	Kurang Inovatif
285	Kabupaten Kapuas	22.53	Kurang Inovatif
286	Kabupaten Seruyan	22.29	Kurang Inovatif
287	Kabupaten Luwu Timur	22.28	Kurang Inovatif
288	Kabupaten Solok Selatan	22.24	Kurang Inovatif
289	Kabupaten Bener Meriah	21.61	Kurang Inovatif
290	Kabupaten Karang Asem	21.41	Kurang Inovatif
291	Kabupaten Siak	20.98	Kurang Inovatif
292	Kabupaten Murung Raya	20.59	Kurang Inovatif
293	Kabupaten Sigi	20.06	Kurang Inovatif
294	Kabupaten Lingga	19.64	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Luwu	19.59	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Pulang Pisau	19.57	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Gayo Lues	18.99	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Maluku Barat Daya	18.92	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Dairi	18.52	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
300	Kabupaten Langkat	18.12	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Wakatobi	17.84	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Rokan Hilir	17.75	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Nganjuk	17.60	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Maros	16.48	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	16.44	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Brebes	16.37	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Barito Timur	16.17	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15.88	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Buton Utara	15.80	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Tapanuli Utara	15.56	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Kota Baru	15.20	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Sabu Raijua	15.04	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Nagan Raya	14.86	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Tapanuli Selatan	14.32	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Sidenreng Rappang	14.26	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Pidie	13.92	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Maluku Tenggara	13.69	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Aceh Selatan	13.68	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Musi Rawas Utara	13.44	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13.36	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Simeulue	13.29	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Muna Barat	13.08	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Aceh Timur	12.92	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Lombok Barat	12.61	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Kepulauan Talaud	12.56	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Minahasa Selatan	12.48	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Muaro Jambi	12.19	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Mempawah	11.96	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Nias Selatan	11.80	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Mukomuko	11.76	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
331	Kabupaten Kaur	11.68	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Mimika	11.56	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Kepulauan Aru	11.40	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Halmahera Selatan	11.32	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Ngada	11.20	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	11.00	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Halmahera Timur	10.80	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Morowali Utara	10.76	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Pasuruan	10.72	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Bangli	10.56	Kurang Inovatif
341	Kabupaten Ende	10.40	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Minahasa	9.88	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Bima	9.68	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	9.44	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Gunung Mas	9.40	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Kapuas Hulu	9.20	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Barito Utara	9.00	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Kayong Utara	9.00	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Padang Lawas Utara	8.40	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Banggai Laut	8.00	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Enrekang	7.96	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Nias Utara	7.60	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Bolaang Mongondow	7.28	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Buru Selatan	7.00	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Tojo Una-Una	6.96	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Teluk Bintuni	6.80	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Aceh Besar	6.76	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Konawe Selatan	6.60	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Halmahera Utara	6.48	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Minahasa Utara	6.16	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Malaka	5.60	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
362	Kabupaten Jember	5.56	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Tanah Bumbu	5.48	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Tolikara	5.28	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Padang Lawas	5.20	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Aceh Singkil	4.52	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Tapanuli Tengah	4.16	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Kepulauan Sula	3.68	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.68	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Nduga	3.60	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.56	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Alor	3.20	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Boven Digoel	3.20	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Kolaka Timur	3.20	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Kutai Barat	3.04	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Nagekeo	2.80	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Paniai	2.00	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Aceh Tenggara	1.30	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Seram Bagian Timur	1.28	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Toraja Utara	1.04	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Sumba Barat	0.80	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Barito Selatan	0.56	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kutai Timur	0.56	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Asmat	0.40	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Donggala	0.40	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Konawe Utara	0.40	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Pulau Taliabu	0.40	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Mamuju	0.08	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Manokwari	0.08	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Raja Ampat	0.08	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Simalungun	0.08	Kurang Inovatif
392	Kabupaten Toli-Toli	0.08	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
393	Kabupaten Deiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
394	Kabupaten Dogiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
395	Kabupaten Fak Fak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
396	Kabupaten Gorontalo Utara	0.00	Tidak Dapat Dinilai
397	Kabupaten Intan Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
398	Kabupaten Kepulauan Yapen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Konawe	0.00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Lanny Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Mahakam Ulu	0.00	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Mamberamo Raya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Mamberamo Tengah	0.00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Mappi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Maybrat	0.00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Pegunungan Arfak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Puncak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Puncak Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Sarmi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Sorong	0.00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Sorong Selatan	0.00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Tambrauw	0.00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Waropen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Yahukimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Yalimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kota Singkawang	70.63	Sangat Inovatif
2	Kota Surabaya	64.70	Sangat Inovatif
3	Kota Padang Panjang	64.08	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	63.76	Sangat Inovatif
5	Kota Yogyakarta	63.29	Sangat Inovatif
6	Kota Tangerang	62.70	Sangat Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
7	Kota Mojokerto	62.30	Sangat Inovatif
8	Kota Probolinggo	61.51	Sangat Inovatif
9	Kota PARIAMAN	61.22	Sangat Inovatif
10	Kota Bandung	60.29	Sangat Inovatif
11	Kota Pekanbaru	60.14	Sangat Inovatif
12	Kota Makassar	60.10	Sangat Inovatif
13	Kota Bitung	59.47	Inovatif
14	Kota Bengkulu	59.37	Inovatif
15	Kota Pangkal Pinang	59.02	Inovatif
16	Kota Jambi	58.98	Inovatif
17	Kota Manado	58.96	Inovatif
18	Kota Bogor	57.80	Inovatif
19	Kota Surakarta	57.73	Inovatif
20	Kota Semarang	57.49	Inovatif
21	Kota Bontang	56.12	Inovatif
22	Kota Pontianak	56.10	Inovatif
23	Kota Pagar Alam	56.06	Inovatif
24	Kota Sukabumi	55.46	Inovatif
25	Kota Denpasar	55.22	Inovatif
26	Kota Palembang	55.19	Inovatif
27	Kota Kediri	55.03	Inovatif
28	Kota Kendari	54.04	Inovatif
29	Kota Blitar	53.21	Inovatif
30	Kota Mataram	53.17	Inovatif
31	Kota Madiun	52.99	Inovatif
32	Kota Samarinda	52.71	Inovatif
33	Kota Magelang	52.36	Inovatif
34	Kota Palu	52.16	Inovatif
35	Kota Payakumbuh	51.99	Inovatif
36	Kota Malang	51.88	Inovatif
37	Kota Bekasi	51.74	Inovatif
38	Kota Tangerang Selatan	51.66	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
39	Kota Tanjung Pinang	50.90	Inovatif
40	Kota Bandar Lampung	50.77	Inovatif
41	Kota Lubuklinggau	50.57	Inovatif
42	Kota Metro	49.81	Inovatif
43	Kota Serang	49.71	Inovatif
44	Kota Pare-Pare	49.63	Inovatif
45	Kota Bima	48.37	Inovatif
46	Kota Ternate	48.36	Inovatif
47	Kota Gunungsitoli	47.61	Inovatif
48	Kota Padang	47.44	Inovatif
49	Kota Kupang	47.34	Inovatif
50	Kota Jayapura	46.89	Inovatif
51	Kota Banjar	46.28	Inovatif
52	Kota Salatiga	46.28	Inovatif
53	Kota Pekalongan	44.72	Inovatif
54	Kota Sawah Lunto	44.64	Inovatif
55	Kota Gorontalo	44.36	Inovatif
56	Kota Langsa	44.28	Inovatif
57	Kota Cirebon	43.47	Inovatif
58	Kota Depok	41.52	Inovatif
59	Kota Balikpapan	39.20	Inovatif
60	Kota Prabumulih	38.51	Inovatif
61	Kota Banjarmasin	37.85	Inovatif
62	Kota Pematang Siantar	37.77	Inovatif
63	Kota Batam	37.33	Inovatif
64	Kota Tasikmalaya	36.43	Inovatif
65	Kota Tegal	33.87	Inovatif
66	Kota Padangsidempuan	33.64	Inovatif
67	Kota Solok	33.36	Inovatif
68	Kota Tebing Tinggi	32.94	Inovatif
69	Kota Kotamobagu	31.99	Inovatif
70	Kota Subulussalam	31.44	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
71	Kota Tarakan	30.73	Inovatif
72	Kota Palangka Raya	30.37	Inovatif
73	Kota Medan	27.98	Kurang Inovatif
74	Kota Palopo	26.67	Kurang Inovatif
75	Kota Batu	24.46	Kurang Inovatif
76	Kota Sabang	24.16	Kurang Inovatif
77	Kota Banda Aceh	22.52	Kurang Inovatif
78	Kota Dumai	20.48	Kurang Inovatif
79	Kota Bukittinggi	18.51	Kurang Inovatif
80	Kota Cilegon	17.68	Kurang Inovatif
81	Kota Banjarbaru	16.71	Kurang Inovatif
82	Kota Lhokseumawe	16.52	Kurang Inovatif
83	Kota Pasuruan	13.60	Kurang Inovatif
84	Kota Tanjung Balai	12.36	Kurang Inovatif
85	Kota Tual	11.00	Kurang Inovatif
86	Kota Tidore Kepulauan	10.60	Kurang Inovatif
87	Kota Ambon	10.08	Kurang Inovatif
88	Kota Sungai Penuh	8.88	Kurang Inovatif
89	Kota Bau-Bau	8.84	Kurang Inovatif
90	Kota Tomohon	8.64	Kurang Inovatif
91	Kota Sibolga	6.30	Kurang Inovatif
92	Kota Binjai	0.48	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0.08	Kurang Inovatif

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

